



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2024



**PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN 2025**



BUPATI ROTE NDAO

KATA PENGANTAR

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai sub sistem Pemerintahan Negara yang bertujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, sebagaimana telah diatur oleh Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2024, Bupati Rote Ndao sebagai Kepala Daerah Kabupaten Rote Ndao mempunyai kewajiban untuk menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rote Ndao.

Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) merupakan refleksi dari nilai – nilai demokrasi yang diwujudkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah yang menyandang fungsi Lembaga Wakil Rakyat sebagai laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran, dengan dukungan segenap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyajikan/memberikan data, maka pembuatan laporan ini dapat diselesaikan.



Untuk itu, kepada berbagai pihak yang telah mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Rote Ndao, kami ucapkan terima kasih dengan harapan kiranya dukungan yang sangat berharga ini akan menjadi motivasi yang bermakna bagi kiprah penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kinerja pemerintahan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Rote Ndao di masa depan. Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini sekaligus Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao membuka diri dan mengharapkan adanya berbagai masukan sebagai bahan evaluasi untuk keperluan pembinaan kinerja Pemerintah Daerah yang lebih baik kedepan sesuai dengan tuntutan dan perubahan regulasi yang ada. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan amanat rakyat dan terus membangun serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Rote Ndao tercinta ini.

“Tuhan Memberkati”

Ba’a, 10 Maret 2025

BUPATI ROTE NDAO,



RAULUS HENUK, S.H

Paraf Hirarki	
Sekretaris Daerah	
Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kabag. Pemerintahan dan Kesra	



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Dasar Hukum	1
1.2 Visi dan Misi	3
1.3 Data Umum Daerah	10
1. Data Geografis Wilayah	10
2. Jumlah Penduduk	14
3. Pertumbuhan Penduduk	15
4. Jumlah PNS	15
5. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan	19
6. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja	21
7. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan	22
BAB II PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	23
2.1 Latar Belakang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024	23
2.2 Penjabaran Perubahan Anggaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024	24
2.3 Penjabaran Perubahan Anggaran Pada Perangkat Daerah di Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024	26
1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	26
2. Dinas Kesehatan	33
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	61
4. Dinas Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup	66
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	69
6. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	72
7. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	77
8. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	79



9.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	82
10.	Dinas Perhubungan	89
11.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.....	92
12.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	95
13.	Dinas Sosial.....	98
14.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.....	101
15.	Dinas Perikanan	104
16.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.....	108
17.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	112
18.	Dinas Peternakan	115
19.	Satuan Polisi Pamong Praja	119
20.	Sekretariat DPRD.....	122
21.	Inspektorat	125
22.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah..	129
23.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	134
24.	Badan Pendapatan Daerah	142
25.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	143
26.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	145
27.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	148
28.	Bagian Pemerintahan dan Kesra	152
29.	Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	155
30.	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	157
31.	Bagian Hukum	158
32.	Bagian Organisasi	161
33.	Bagian Umum.....	163
34.	Kecamatan Lobalain	167
35.	Kecamatan Rote Barat Laut	169
36.	Kecamatan Rote Barat	173
37.	Kecamatan Rote Barat Daya	175
38.	Kecamatan Rote Selatan	177



39. Kecamatan Rote Tengah	180
40. Kecamatan Pantai Baru	183
41. Kecamatan Rote Timur	185
42. Kecamatan Landu Leko	188
43. Kecamatan Ndao Nuse	191
44. Kecamatan Loaholu	193

BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH 195

3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan.....	195
1. Capaian Kinerja Program Sesuai dengan Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja	195
1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	196
2. Dinas Kesehatan	197
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	200
4. Dinas Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup	201
5. Satuan Polisi Pamong Praja	202
6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	203
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.....	204
8. Dinas Sosial	205
9. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	205
10. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	206
11. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	208
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	209
13. Dinas Perhubungan	209
14. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian....	210
15. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	211
16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.....	212
17. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	213
18. Dinas Perikanan	214
19. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	215
20. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	216



21. Dinas Peternakan	217
22. Sekretariat Daerah.....	217
A. Bagian Umum	217
B. Bagian Pemerintahan dan Kesra	218
C. Bagian Hukum.....	219
D. Bagian Organisasi	219
E. Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan...	220
F. Bagian Pengadaan Barang/Jasa	221
23. Sekretariat DPRD.....	221
24. Kecamatan Lobalain.....	222
25. Kecamatan Rote Barat Laut	223
26. Kecamatan Rote Barat Daya	223
27. Kecamatan Rote Barat	224
28. Kecamatan Rote Selatan	225
29. Kecamatan Rote Tengah.....	225
30. Kecamatan Pantai Baru	226
31. Kecamatan Rote Timur	227
32. Kecamatan Ndao Nuse	227
33. Kecamatan Landu Leko.....	228
34. Kecamatan Loaholu	229
35. Inspektorat	229
36. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	230
37. Badan Keuangan dan Aset Daerah.....	231
38. Badan Pendapatan Daerah	231
39. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	232
2. Realisasi Anggaran	233
1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	233
2. Dinas Kesehatan.....	238
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	259
4. Dinas Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup	263
5. Satuan Polisi Pamong Praja	266
6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	268



7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.....	272
8. Dinas Sosial.....	274
9. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.....	276
10. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	279
11. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	284
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	285
13. Dinas Perhubungan	288
14. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian....	290
15. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	292
16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.....	295
17. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	297
18. Dinas Perikanan	299
19. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.....	302
20. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	305
21. Dinas Peternakan	307
22. Sekretariat Daerah.....	310
A. Bagian Umum	310
B. Bagian Pemerintahan dan Kesra	313
C. Bagian Hukum	314
D. Bagian Organisasi	316
E. Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan..	317
F. Bagian Pengadaan Barang/Jasa.....	319
23. Sekretariat DPRD.....	320
24. Kecamatan Lobalain.....	323
25. Kecamatan Rote Barat Laut	326
26. Kecamatan Rote Barat Daya	328
27. Kecamatan Rote Barat	329
28. Kecamatan Rote Selatan	331
29. Kecamatan Rote Tengah.....	333
30. Kecamatan Pantai Baru	335
31. Kecamatan Rote Timur	337



32. Kecamatan Ndao Nuse	339
33. Kecamatan Landu Leko.....	340
34. Kecamatan Loaholu	342
35. Inspektorat	344
36. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	347
37. Badan Keuangan dan Aset Daerah.....	351
38. Badan Pendapatan Daerah	355
39. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	357
3. Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/urusan penunjang/urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya.....	360
4. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang Sudah ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja.....	604
1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	604
2. Dinas Kesehatan.....	605
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	614
4. Dinas Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup	614
5. Satuan Polisi Pamong Praja	615
6. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.....	615
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.....	615
8. Dinas Sosial.....	616
9. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.....	617
10. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	618
11. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	618
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	618
13. Dinas Perhubungan	619
14. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian ...	620
15. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	620
16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	620



17.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	620
18.Dinas Perikanan	621
19.Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.....	621
20.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	621
21.Dinas Peternakan	622
22.Bagian Umum	622
23.Bagian Pemerintahan dan Kesra	623
24.Bagian Hukum.....	623
25.Bagian Organisasi.....	624
26.Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	624
27.Bagian Pengadaan Barang/Jasa	625
28.Sekretariat DPRD.....	626
29.Kecamatan Lobalain.....	626
30.Kecamatan Rote Barat Laut	626
31.Kecamatan Rote Barat Daya	627
32.Kecamatan Rote Barat	627
33.Kecamatan Rote Selatan	628
34.Kecamatan Rote Tengah.....	628
35.Kecamatan Pantai Baru	628
36.Kecamatan Rote Timur	628
37.Kecamatan Ndao Nuse	629
38.Kecamatan Loaholu	629
39.Kecamatan Landu Leko.....	629
40.Inspektorat	630
41.Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	631
42.Badan Keuangan dan Aset Daerah.....	632
43.Badan Pendapatan Daerah	632
44.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	632
3.2 Kebijakan Strategis yang Ditetapkan.....	634
3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya.	636



BAB IV	CAPAIN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN....	649
4.1	Urusan Pemerintahan yang Ditugas Pembantuan	649
1.	Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang diterima dari Pemerintah Tingkat Atasnya.....	649
2.	Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang diterima dari Pemerintah Tingkatan Pemerintah dibawahnya...	649
4.2	Permasalahan/Solusi.....	649
BAB V	PENUTUP	650



BAB I

PENDAHULUAN

I. DASAR HUKUM

1.1 Dasar Hukum Pembentukan Daerah

Kabupaten Rote Ndao secara resmi terbentuk sebagai daerah otonom baru hasil pemekaran dari Kabupaten Kupang pada Tahun 2002 berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4148), dengan 6 (enam) Kecamatan yakni Kecamatan Rote Timur, Kecamatan Pantai Baru, Kecamatan Rote Tengah, Kecamatan Lobalain, Kecamatan Rote Barat Laut dan Kecamatan Rote Barat Daya.

Dasar Hukum Penyusunan

Adapun dasar hukum yang melandasi penyusunan dan penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

1. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4148);
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023 Nomor 003);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 004);
7. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 93 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023 Nomor 093); setelah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 57 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 93 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 (Berita Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 Nomor 057);
8. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 63 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 Nomor 063).



1.2 Visi dan Misi Kepala Daerah

A. Visi

Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 merupakan penjabaran Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang disandingkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Rote Ndao. Sesuai tahapan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rote Ndao 2005-2025, RPJMD periode ini dalam tahapan Kemandirian dan Daya Saing (Periode RPJMD III, 2021-2025). Tahap ini mengandung arti kemampuan untuk terus maju dengan bertumpu pada kekuatan dan daya inovasi masyarakat dan daerah dalam memanfaatkan potensi sumberdaya yang ada serta memiliki kemampuan untuk berkompetisi dan mempunyai keunggulan lebih dibandingkan dengan wilayah lain baik di tingkat regional maupun nasional. Untuk itu kemajuan yang dicapai pada tahap sebelumnya harus terus ditingkatkan dan dimantapkan. Dengan mengacu pada beberapa hal tersebut, sebagai arah pembangunan selama 5 (lima) tahun mendatang maka Visi Kabupaten Rote Ndao adalah :

“Terwujudnya Masyarakat Rote Ndao yang BERMARTABAT secara Berkelanjutan Bertumpu pada Pariwisata yang di dukung oleh Pertanian dan Perikanan”.

Pernyataan visi Kabupaten Rote Ndao tersebut mengandung makna sebagai berikut : BERMARTABAT terdiri dari kata BERTumbuh, MAkmuR, TAat dan BersahaBAT, yang dapat diartikan sebagai harkat atau harga diri, yang menunjukkan eksistensi masyarakat Kabupaten Rote Ndao, namun juga memiliki makna :

1. ROTE NDAO BERTUMBUH :

- Maju : meningkatnya kualitas sumber daya manusia, daya saing ekonomi daerah, kapasitas infrastruktur daerah, serta pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan.
- Mandiri : masyarakat yang mampu mencukupi kebutuhannya dengan layak, mampu mengembangkan potensi diri dan menyediakan yang belum ada bagi diri dan daerahnya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sehingga ketergantungan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan semakin berkurang.



2. ROTE NDAO MAKMUR/SEJAHTERA :

- Meningkatnya pertumbuhan ekonomi inklusif yang berkelanjutan sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran.
- Meningkatnya daya beli masyarakat.
- Meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan yang berkualitas.
- Munculnya kekuatan-kekuatan ekonomi rakyat baru di berbagai sektor.

3. ROTE NDAO TAAT :

- Religius, damai, harmonis, taat kepada ketentuan peraturan/perundang-undangan, nasionalis.
- Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan tentram.

4. ROTE NDAO BERSAHABAT :

- Saling menghargai berbagai perbedaan (suku dan agama) dan status sosial antar sesama warga dan penuh kegotong-royongan.
- Ramah, penuh kasih, bersih, elok, tertata rapi, ceria, hijau, dan indah.
- Terbuka terhadap perubahan sosial dan IPTEK yang bermanfaat bagi kemajuan daerah.

5. BERKELANJUTAN

- Pembangunan yang terus-menerus dan berkesinambungan dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs).
- Pembangunan berkelanjutan meliputi aspek BERTUMBUH, MAKMUR/SEJAHTERA, TAAT, dan BERSAHABAT (BERMARTABAT).

B. Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Rumusan misi dapat memberikan gambaran dalam menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi melalui penetapan tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai.



Perwujudan Visi tersebut ditempuh melalui misi-misi yang mempunyai tujuan akhir peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Rote Ndao. Dijabarkan ke dalam 4 (empat) misi yang dijalankan secara kemitraan dan berkelanjutan meliputi:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing

Sumber daya manusia sebagai subyek dan obyek pembangunan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan dan mewujudkan keberhasilan pembangunan. Sebagai subyek pembangunan dibutuhkan sumberdaya manusia yang sehat, berprestasi dan produktif untuk mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan melalui pembangunan pendidikan dan kesehatan. Pembangunan pendidikan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan kualitas pendidikan sehingga dapat membentuk sumberdaya yang berprestasi dan mampu bersaing dalam tantangan global. Pembangunan kesehatan mempunyai peranan penting dalam menghasilkan sumberdaya manusia yang sehat dan produktif sebagai investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi.

Pembangunan sumber daya manusia berlandaskan budaya akan menciptakan manusia dengan pikiran, sikap, perilaku, tindakan yang memiliki nilai kesantunan, kesopanan, saling menghormati menjunjung adat istiadat, berakhlak mulia, dan bermoral. Pembentukan watak dan penanaman budi pekerti harus mendapat prioritas pada generasi muda untuk mewujudkan karakter adiluhung yang nilai-nilainya terkandung di dalam ajaran agama yang mengarah kepada upaya peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan modal sumber daya manusia yang sehat, berprestasi berlandaskan budaya maka diharapkan tercipta sumber daya manusia yang mandiri dalam berkehidupan. Masyarakat yang mandiri adalah masyarakat yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan masyarakat lain yang telah maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri.

Untuk mewujudkan masyarakat Rote Ndao yang memiliki daya saing dalam tantangan global dan menjadikan masyarakat yang maju dan mandiri, maka peningkatan kualitas sumberdaya manusia baik aparatur dan masyarakat harus selalu menjadi perhatian utama. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai apabila SDM yang ada, memiliki kemampuan dan keterampilan mengelola sumberdaya yang dimiliki sehingga menghasilkan produk-produk yang kompetitif dan berdaya saing di era globalisasi.

Pembangunan kesehatan difokuskan pada penyediaan layanan publik sesuai dengan standar pelayanan minimal yang dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat serta peningkatan cakupan layanan kesehatan dan penyuluhan pola hidup sehat, sehingga melahirkan sumber daya manusia yang sehat dan unggul.

2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Kontribusi Sektor Pariwisata yang Didukung Oleh Pertanian dan Perikanan

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dibutuhkan pengembangan pemanfaatan potensi sumber daya alam memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Pengembangan sektor pariwisata didukung oleh pertanian dan perikanan. Pembangunan perekonomian yang memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat diupayakan merata sehingga kemampuan ekonomi rakyat lebih berkembang dan semakin kuat. Pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh daerah mencerminkan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh setiap warga masyarakat sehingga pemerataan hasil-hasil pembangunan juga dapat tercapai. Dengan demikian setiap program pengembangan ekonomi harus ditujukan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

Sebagai kabupaten kepulauan yang terdiri dari 120 Pulau, 8 Pulau diantaranya berpenghuni dan 112 pulau tidak berpenghuni, dan sekitar 50% merupakan Desa/Kelurahan pesisir yang memiliki sumber daya pesisir dan laut yang dapat menjadi andalan sumber ekonomi yang besar bagi daerah. Pengelolaan sumberdaya tersebut harus tetap mempertimbangkan aspek ekonomi, aspek ekologis, dan kepentingan masyarakat. Potensi terbesar dalam pengelolaan daerah



pesisir dan laut adalah pengembangan pariwisata antara lain wisata bahari berupa kegiatan surfing, diving, snorkeling dan wisata budaya yang sangat cocok dan sangat digemari oleh wisatawan domestik maupun mancanegara. Pembangunan pariwisata yang dimaksud mencakup seluruh aspek pembangunan baik tempat wisata maupun lingkungan sumber daya manusia sarana dan prasarana penunjang serta promosi wisata. Untuk mendukung percepatan pembangunan pariwisata daerah maka, orientasi seluruh kebijakan pembangunan yang terkait terutama sektor pertanian, perikanan dan kehutanan diorientasikan pada pengembangan agrowisata, ekowisata dan wanawisata.

Beberapa komoditas andalan yang dapat dikembangkan adalah budidaya tanaman pangan, usaha perikanan, sadap dan pengolahan nira lontar, serta beternak. Diversifikasi produk dan turunannya dari komoditi andalan tersebut diharapkan mampu meningkatkan pemenuhan kebutuhan masyarakat sekaligus mampu menjawab kebutuhan pasar luar. Potensi sektor ini apabila dikelola dengan baik diharapkan mampu memberikan daya ungkit dan daya dorong dalam pertumbuhan ekonomi daerah yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Percepatan pengentasan kemiskinan dan penanggulangan masalah pengangguran perlu dipacu dengan penyediaan dan penciptaan lapangan kerja, kemudahan akses permodalan, serta peningkatan keterampilan masyarakat. Dalam rangka penciptaan lapangan kerja, penekanan pada pemberdayaan dan keberpihakan terhadap keluarga dan kelompok marginal berdasarkan prinsip-prinsip adil dan merata sehingga melahirkan pengusaha mikro, kecil, menengah serta pengusaha besar yang kuat dan bermoral yang dapat berkompetisi pada level regional maupun level nasional.

3. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang, dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan

Salah satu faktor kunci dalam mendorong pengembangan potensi ekonomi geografis adalah aksesibilitas wilayah yang melahirkan ekonomi mudah, murah dan cepat. Konektivitas wilayah sebagai urat nadi pembangunan ekonomi daerah makin meningkat apabila di dukung dengan lancarnya akses masuk dan keluar ke Kabupaten Rote Ndao. Dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat sangat diperlukan dukungan sarana prasarana infrastruktur yang menghubungkan antar pulau serta didukung moda transportasi darat, laut, dan udara yang meningkat jumlah dan kualitasnya, penyediaan rumah sehat dan layak huni, pelayanan listrik, air bersih dan sanitasi layak serta telekomunikasi sangat dibutuhkan.

Perencanaan pembangunan Kabupaten Rote Ndao harus selalu mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rote Ndao 2013-2033, sehingga pemanfaatan ruang dapat dikendalikan sesuai kaidah-kaidah tata ruang. Sejalan dengan itu, Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah juga memperhatikan Tujuan Pembangunan berkelanjutan guna menjaga pembangunan yang tetap mempertimbangkan keseimbangan ekologis baik di daratan maupun di lautan.

4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih, Serta Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima

Tata kelola pemerintahan yang baik berarti tata kelola pemerintahan yang mencerminkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan partisipatif. Dengan prinsip-prinsip tersebut diharapkan akan tercipta tata pemerintahan yang baik sehingga mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Ketentraman dan ketertiban merupakan kondisi yang diharapkan masyarakat agar dapat melangsungkan kehidupan dengan tenang dan damai, dan



merupakan jaminan bagi terselenggaranya pembangunan untuk mewujudkan harapan dan cita-cita bersama. Kondisi yang tenteram dan tertib akan terwujud apabila terdapat kesadaran kolektif dan komitmen patuh dari seluruh stakeholder pembangunan terhadap berbagai ketentuan yang telah disepakati bersama, yang direalisasikan dalam bentuk ketaatan dan kepatuhan hukum. Penegakan hukum dan ketertiban merupakan faktor yang sangat penting dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan bermartabat. Oleh karena itu, penegakan hukum harus dilaksanakan secara konsekuen dan adil tanpa diskriminasi.

Upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good government) dan bersih (clean government) serta kualitas kebijakan pelayanan publik yang unggul, mampu menjawab kebutuhan masyarakat, mampu memfasilitasi operasional dan evaluasi di lapangan maka dibutuhkan aparatur yang profesional. Pengembangan pelayanan publik perlu di dukung dengan sistem informasi terpadu yang menyediakan sistem informasi manajemen yang komprehensif dan terkini untuk kepentingan pengambilan keputusan dan kebijakan publik yang tepat dan dapat diakses oleh masyarakat.

Pemerintahan yang baik merupakan cermin dari kualitas hubungan berbagai stakeholder yang ada yaitu pemerintah, dunia swasta dan masyarakat sipil. Kualitas hubungan yang baik tercermin dari adanya partisipasi, transparansi, akuntabilitas, penegakan supremasi hukum dan adanya check and balanced di antara ketiganya dalam pembuatan kebijakan publik dan pengelolaan organisasi publik.

Sinergi ini akan melahirkan pelayanan publik yang prima dan menempatkan penerima pelayanan publik bukan sekedar sebagai konsumen tetapi sebagai warga negara yang memiliki berbagai hak dan kewajiban yang telah diatur dengan konstitusi. Fokusnya adalah pada terwujudnya anggaran publik yang berpihak pada pengentasan kemiskinan, pengembalian peran pemerintah sebagai pelayan publik yang efektif dan efisien bagi masyarakat dan terwujudnya hukum yang berbudaya, berkemanusiaan, adil dan tidak diskriminatif.

1.3 Data Umum Daerah

1. Data Geografis dan Wilayah

Kabupaten Rote Ndao merupakan wilayah yang terdiri dari gugusan pulau-pulau kecil di bagian paling selatan kepulauan Nusantara. secara astronomis daerah ini terletak antara 10°25' LS - 11°00' Lintang Selatan dan 121°49' - 123°26' Bujur Timur. Secara geografis Kepulauan Rote Ndao berada diantara Benua Asia dan Benua Australia, serta diantara Laut Sawu dan Samudera Hindia yang terdiri dari 120 buah pulau dengan 8 pulau berpenghuni (Pulau Rote, Pulau Usu I, Pulau Usu II, Pulau Nuse, Pulau Ndao, Pulau Landu, Pulau Ndana dan Pulau Nusa Manuk) dan 112 pulau lainnya belum berpenghuni yang secara keseluruhan mempunyai luas 1.280,10 km² dan luas lautan 2.376 km². Wilayah Utama Kabupaten ini terdapat di pulau Rote, sebagai pulau terbesar diantara 120 pulau yang termasuk wilayah administratif Kabupaten Rote Ndao. Pengelolaan pulau yang tersebar di wilayah Kabupaten Rote Ndao menjadi tantangan bagi Pemerintah khususnya terkait pulau-pulau berpenghuni dalam hal menyediakan sarana dan prasarana konektivitas yang memadai untuk memudahkan transportasi antar pulau-pulau tersebut. Sedangkan untuk pulau-pulau tak berpenghuni difokuskan tata kelola aset pada pemantauan aktifitas penguasaan lahan agar tidak dikuasai secara ilegal.

Kabupaten Rote Ndao memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Laut Sawu
Sebelah Selatan	: Samudera Hindia
Sebelah Timur	: Selat Pukuafu
Sebelah Barat	: Laut Sawu

Berdasarkan posisi geografis dan kondisi wilayah yang digambarkan diatas, Kabupaten Rote Ndao selain memiliki potensi daratan juga memiliki potensi bahari yang besar. Kabupaten Rote Ndao memiliki luas wilayah perairan laut cukup luas, dengan total panjang garis pantai kurang lebih 330 km. Selain itu, Kabupaten Rote Ndao juga memiliki sejumlah pantai yang eksotik, beberapa diantaranya merupakan kawasan surfing terbaik dunia, yakni Pantai Nemberala dan Pantai Boa.



Ditinjau dari kondisi Geostrategis Kabupaten Rote Ndao mempunyai wilayah laut yang berbatasan langsung dengan wilayah laut Negara Australia, dari sudut pandang sumber daya dan perdagangan dapat dilihat sebagai potensi, namun pada kenyataannya masih memiliki potensi konflik antara Indonesia dan Australia sehubungan dengan kegiatan melaut dari nelayan Rote Ndao dan kegiatan transit imigran gelap dari Asia ke Australia.

- Kondisi Topografis

Wilayah Rote Ndao memiliki topografi yang relatif datar dengan wilayah yang sebagian besar merupakan daratan berbukit-bukit dengan ketinggian 0-30 meter di atas permukaan laut (DPL) dengan rincian dataran 35% (45.250 Ha), berbukit dan gunung 25% (32.625 Ha) dan lainnya 40% (50.135 Ha). Rata-rata kemiringan lahan wilayah Kabupaten Rote Ndao berada pada rentang $0 \geq 40\%$, dapat digambarkan sebagai berikut:

- Kemiringan lahan khususnya kecamatan Rote Barat dan Rote Timur lebih landai dari kecamatan lainnya di pulau Rote. Lereng dengan kemiringan lebih dari 40% hanya terdapat di Kecamatan Rote Timur sebesar 0,33% dari luas wilayahnya.
- Kecamatan Pantai Baru 47,74% dari luas wilayahnya kemiringannya 2-15%, 38% berkemiringan 15-40%, sedangkan 11,70% dari luas wilayahnya berkemiringan 0-2%.
- Kecamatan Rote Tengah merupakan daerah yang berbukit-bukit dan bergunung dilihat dari kemiringan lahan 15% sampai 40% sebesar 49,3% dari luas lahan secara keseluruhan di Kabupaten Rote Ndao dan dari luas lahan yang memiliki kemiringan $>40\%$ di Kecamatan Rote Tengah terdapat luas 70% dari luas wilayah secara keseluruhan.

- Kondisi Hidrologis

Potensi hidrologi di Kabupaten Rote Ndao relatif terbatas, didominasi air permukaan yang berasal dari sungai dan danau, air bawah tanah dan mata air untuk menyediakan air sepanjang tahun. Jumlah sungai yang berair sepanjang tahun hanya berjumlah 12 buah. Sungai terbesar adalah Sungai Menggelama, dengan panjang sungai 32 km. Sementara jumlah danau yang berair sepanjang tahun ada 6 buah, dengan total volume kurang lebih 7 (tujuh) juta

meter kubik. Potensi penggunaan air permukaan dari sungai atau danau sebagai sumber air baku perlu kiranya mulai diperhitungkan sebagai alternatif agar ketergantungan terhadap mata air dan sumur bor bisa dikurangi.

Selain air permukaan, sumber air baku dari air bawah tanah memiliki potensi yang besar yakni dari Cekungan air Tanah (CAT). Mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah Kabupaten Rote Ndao memiliki 3 (tiga) Cekungan Air Tanah (CAT) yakni CAT Nemberala dengan luas 236 Km², CAT Batutua luas 229 Km², dan CAT Rote luas 250 Km². Potensi CAT ini bila dieksplorasi secara maksimal dengan sumur bor, sumur gali ataupun dengan teknologi lainnya, dapat menopang kebutuhan air utama di Kabupaten Rote Ndao.

Potensi air baku lainnya adalah mata air yang tersebar hampir di seluruh wilayah Kabupaten Rote Ndao, dimanfaatkan penduduk untuk pemenuhan kebutuhan air bersih dan irigasi umumnya berasal dari perbukitan dengan debit air menurun pada musim kemarau sehingga kebutuhan air untuk musim kemarau merupakan kendala pemenuhan kebutuhan air sehari-hari. Ketersediaan air pada mata air ini juga sangat tergantung pada kondisi hutan yang memiliki kemampuan sebagai peresap air hujan. Kerusakan hutan baik karena kegiatan dalam hutan maupun alih fungsi lahan untuk kegiatan lain perlu diantisipasi untuk menjaga pasokan air serta kualitasnya.

Selain pengambilan langsung oleh masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari pemanfaatan sumber air baku yang dikelola oleh PDAM digunakan untuk pelayanan air minum di Kabupaten Rote Ndao berasal dari 8 (delapan) sumber yakni mata air Siokoen dengan kapasitas 17,5 Liter/detik, Oemau 10 Liter/detik, Lualemba 15 Liter/detik, Lidabesi 10 Liter/detik, Nioen 15 Liter/detik, Lelebe 10 Liter/detik, Sumur Bor Kantor Camat 5 Liter/detik dan Sumur Bor Pantai Baru 5 Liter/detik. Dari total kapasitas terpasang sebesar 87,5 liter/detik dan kapasitas produksi sebesar 34,5 liter/detik terdapat idle capacity sebesar 53 liter/detik yang dapat dimaksimalkan untuk perluasan jaringan pelayanan air bersih.



- Kondisi Klimatologi

Seperti wilayah kabupaten lainnya di NTT, iklim wilayah Rote Ndao dipengaruhi oleh angin muson yang arah dan waktunya dipengaruhi oleh perubahan musim di benua Asia dan Australia. Pengaruh pola angin tersebut menentukan pola musim hujan dan musim kemarau di wilayah Nusa Tenggara, termasuk Kabupaten Rote Ndao.

Musim hujan berlangsung sekitar lima bulan (November-Maret), dan musim kemarau berlangsung kurang lebih tujuh bulan (April-September). Curah hujan tertinggi di Kabupaten Rote Ndao adalah 445,7 mm pada bulan Januari dan jumlah hari hujan diatas 15 hari hujan terjadi pada bulan Januari, Februari dan Desember. Penilaian faktor iklim yang digambarkan dalam bentuk curah hujan sangat berpengaruh terhadap sektor pertanian terutama pada pola dan waktu menanam.

Kawasan selatan mempunyai iklim tropis dan curah hujan rata-rata yang cukup tinggi. Hal ini dapat memberikan manfaat yang besar terhadap pertanian dan perkebunan yang merupakan kegiatan dominan di kawasan selatan. Selain itu perlu pengantisipasi curah hujan yang tinggi dengan menyediakan kawasan penyangga atau konservasi sehingga apabila curah hujan yang tinggi tidak menimbulkan masalah banjir dan juga erosi.

Rata-rata kelembaban udara yakni 74-91%. Rata-rata Suhu minimum 24°C dan maksimum adalah 27°C. Suhu yang relatif tinggi pada satu sisi dan kelembaban udara yang rendah pada sisi yang lain menyebabkan laju evapotranspirasi yang tinggi. Rata-rata evapotranspirasi potensial adalah 6 mm/hari atau 2.160 mm/tahun. Angka evapotranspirasi yang lebih tinggi daripada angka curah hujan mengindikasikan defisit air yang cukup besar, dan berdampak pada rendahnya potensi air permukaan dan air bawah permukaan. Kondisi ini juga berimplikasi pada sistem produksi pertanian yang bersifat musiman dan didominasi sistem pertanian lahan kering atau tadah hujan.

2. Jumlah Penduduk

Pada Tahun 2024 penduduk Kabupaten Rote Ndao berjumlah 154.027 jiwa dengan rincian sebagaimana pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.1
Struktur Penduduk Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024

STRUKTUR USIA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
>75	2,347	2,556	4,903
70-74	1,590	1,686	3,276
65-69	1,973	1,896	3,869
60-64	2,523	2,439	4,962
55-59	2,876	2,712	5,588
50-54	3,204	3,204	6,408
45-49	4,299	4,192	8,491
40-44	4,912	5,131	10,043
35-39	5,045	5,481	10,526
30-34	4,959	5,400	10,359
25-29	5,652	5,818	11,470
20-24	7,670	7,659	15,329
15-19	8,866	8,410	17,276
10-14	8,571	8,027	16,598
5-9	7,771	7,091	14,862
0-4	5,268	4,799	10,067
TOTAL	77,526	76,501	154,027

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Kabupaten Rote Ndao Menurut Kecamatan Tahun 2024

NO.	WILAYAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Rote Barat Daya	13,327	13,249	26,576
2	Rote Barat Laut	8,301	8,374	16,675
3	Lobalain	16,107	15,817	31,924
4	Rote Tengah	4,822	4,744	9,566
5	Pantai Baru	7,753	7,546	15,299
6	Rote Timur	7,857	7,762	15,619
7	Rote Barat	5,049	4,929	9,978
8	Rote Selatan	3,193	3,101	6,294
9	Ndao Nuse	1,796	1,864	3,660
10	Landu Leko	2,826	2,853	5,679
11	Loaholu	6,495	6,262	12,757
TOTAL		77,526	76,501	154,027

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao



Tabel 1.3
Jumlah Kepala Keluarga Menurut Kabupaten Rote Ndao
Tahun 2024

NO	KABUPATEN	JUMLAH KEPALA KELUARGA	KET
1	ROTE NDAO	43.541	KK

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao

3. Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Rote Ndao selama tahun 2000 sampai tahun 2010 dengan rata – rata sebesar 1,95%, laju pertumbuhan penduduk selama tahun 2010 sampai tahun 2020 dengan rata – rata sebesar 1,83% serta laju pertumbuhan penduduk selama tahun 2021 sampai tahun 2024 dengan rata-rata 3,37%..

4. Jumlah Pegawai Negeri Sipil

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Rote Ndao per 31 Desember 2024 sebanyak 2.957 orang, terdiri dari 1.437 PNS laki-laki dan 1.520 PNS Perempuan, dengan Jabatan Struktural sebanyak 354 orang, jabatan Fungsional tertentu sebanyak 1.832 orang dan jabatan Fungsional umum sebanyak 771 orang.

Jika dilihat dari jenjang pendidikan, maka Jenjang Pendidikan Strata 3 sebanyak 1 orang, Strata 2 sebanyak 71 orang, Strata 1 sebanyak 1.830, dan Diploma IV sebanyak 76 orang sementara sisanya ialah jenjang pendidikan Diploma III sampai SD yang lebih rinci dapat dilihat pada tabel.

Tabel 1.4
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jabatan
Tahun Anggaran 2024

No	Nama	Pegawai Negeri Sipil			
		Pejabat Struktural (Orang)	Pejabat Fungsional (orang)	Pejabat Fungsional Umum (orang)	Jumlah
1	2	4	5	6	7
1.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Rote Ndao	7	4	14	25



2.	Badan Keuangan Dan Aset Kabupaten Rote Ndao	15	3	17	35
3.	Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Rote Ndao	6	0	8	14
4.	Badan Pendapatan Kabupaten Rote Ndao	20	4	23	47
5.	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Rote Ndao	8	9	12	29
6.	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Rote Ndao	7	8	8	23
7.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao	7	7	10	24
8.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Rote Ndao	8	48	19	75
9.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kabupaten Rote Ndao	7	6	13	26
10.	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Rote Ndao	7	9	13	29
11.	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Rote Ndao	6	5	31	42
12.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Rote Ndao	7	4	15	26
13.	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao	7	8	13	28
14.	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3	13	6	22
15.	Dinas Perhubungan Kabupaten Rote Ndao	10	1	9	20
16.	Dinas Perikanan Kabupaten Rote Ndao	6	5	4	15
17.	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	5	7	1	13
18.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	8	5	17	30



19.	Dinas Peternakan Kabupaten Rote Ndao	7	20	25	52
20.	Dinas Sosial	5	6	7	18
21.	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Rote Ndao	6	5	8	19
22.	Inspektorat Daerah Kabupaten Rote Ndao	8	21	7	36
23.	Kecamatan Landu-Leko Kabupaten Rote Ndao	8	0	1	9
24.	Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao	24	0	23	47
25.	Kecamatan Ndao Nuse	4	0	1	5
26.	Kecamatan Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao	13	0	15	28
27.	Kecamatan Rote Barat Daya Kabupaten Rote Ndao	7	0	6	13
28.	Kecamatan Rote Barat Kabupaten Rote Ndao	8	0	7	15
29.	Kecamatan Rote Barat Laut Kabupaten Rote Ndao	14	0	10	24
30.	Kecamatan Rote Selatan Kabupaten Rote Ndao	9	0	5	14
31.	Kecamatan Rote Tengah Kabupaten Rote Ndao	14	0	9	23
32.	Kecamatan Rote Timur Kabupaten Rote Ndao	8	0	7	15
33.	Kecamatan Loaholu	9	0	5	14
34.	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Rote Ndao	7	0	8	15
35.	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao	13	0	13	26
36.	Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao	5	3	15	23
37.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	15	1041	234	1290
38.	Dinas Kesehatan	15	573	87	675
39.	Bagian Umum	6	1	26	33
40.	Bagian Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	1	2	5	8
41.	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	1	5	5	11
42.	Bagian Organisasi	1	3	3	7
43.	Bagian Hukum	1	3	4	8
44.	Bagian Perekonomian Dan Administrasi Pembangunan	1	3	2	6
Jumlah/ Total		354	1.832	771	2.957

Sumber : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rote Ndao



Tabel 1.5
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan Kepangkatan

GOLONGAN KEPANGKATAN			JUMLAH
GOLONGAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
I/a	0	0	0
I/b	2	0	2
I/c	0	0	0
I/d	0	0	0
II/a	8	3	11
II/b	23	11	34
II/c	129	120	249
II/d	55	140	195
III/a	236	192	428
III/b	240	290	530
III/c	195	158	353
III/d	266	410	676
IV/a	140	91	231
IV/b	124	101	225
IV/c	18	4	22
IV/d	1	0	1
IV/e	0	0	0
TOTAL	1,437	1,520	2,957

Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rote Ndao

Tabel 1.6
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pejabat Struktural

JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL			JUMLAH
ESELON	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
I-A	0	0	0
I-B	0	0	0
II-A	1	0	1
II-B	23	3	26
III-A	42	10	52
III-B	64	35	99
IV-A	90	43	133
IV-B	31	12	43
Jabatan Fungsional	713	1119	1832
Jabatan Pelaksana	473	298	771
TOTAL	1.437	1.520	2.957

Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rote Ndao



Tabel 1.7
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat pendidikan

TINGKAT PENDIDIKAN			JUMLAH
JENJANG	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
SD	1	0	1
SLTP	8	2	10
SLTA Kejuruan	29	24	53
SLTA	269	129	398
D1	0	0	0
D2	24	10	34
D3	129	354	483
D4	44	32	76
S1	901	929	1.830
S2	31	40	71
S3	1	0	1
TOTAL	1.437	1.520	2.957

Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rote Ndao

Tabel 1.8
Jumlah pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jabatan

NAMA JABATAN	JUMLAH
Struktural	354
Fungsional Umum	1.832
Fungsional Tertentu	771
TOTAL	2.957

Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rote Ndao

5. Realisasi Pendapatan Daerah Menurut Jenis Pendapatan

Target pendapatan Daerah pada Tahun 2024 sebesar **Rp.874.185.558.047,00** realisasi sebesar **Rp.869.319.821.304,98** atau 99,44% dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.9
Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024 (Unaudited)	%
1	2	3	4	5
	PENDAPATAN	874.185.558.047,00	869.319.821.304,98	99,44
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	33.092.604.355,00	34.098.348.873,68	103,04
2	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	17.357.500.000,00	19.254.375.291,99	110,93
3	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	9.839.726.000,00	7.518.540.354,00	76,41
4	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	3.655.363.280,00	3.755.363.280,00	102,74
5	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	2.240.015.075,00	3.570.069.947,69	159,38
6	PENDAPATAN TRANSFER - LRA	835.497.700.063,00	829.066.162.017,00	99,23
7	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan LRA	680.434.266.378,00	678.046.028.880,00	99,65
8	Dana Bagi Hasil	5.342.765.610,00	5.594.766.550,00	104,72
9	Dana Alokasi Umum	464.932.554.000,00	461.709.069.310,00	99,31
10	Dana Alokasi Khusus Fisik	105.893.025.013,00	104.640.521.396,00	98,82
11	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	104.265.921.755,00	106.101.671.624,00	101,76
12	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	127.569.205.000,00	127.569.205.000,00	100,00
13	Insentif Fiskal	18.893.033.000,00	18.893.033.000,00	100,00
14	Dana Desa	108.676.172.000,00	108.676.172.000,00	100,00
15	Pendapatan Transfer Antar Daerah	27.494.228.685,00	23.450.928.137,00	85,29
16	Pendapatan Bagi Hasil	27.494.228.685,00	23.450.928.137,00	85,29
17	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	5.595.253.629,00	6.155.310.414,30	110,01
18	Pendapatan Hibah	200.000.000,00	215.254.685,30	107,63
19	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00
20	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	0,00	15.254.685,30	0,00



21	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.395.253.629,00	5.940.055.729,00	110,10
22	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	5.395.253.629,00	5.940.055.729,00	110,10

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao

6. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar **Rp.920.227.443.121,00** realisasi sebesar **Rp.867.604.940.265,05** atau 94,28% dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.10
Realisasi Belanja Daerah Tahun 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024 (Unaudited)	%
1	2	3	4	5
	BELANJA	920.277.443.121,00	867.604.940.265,05	94,28
1	BELANJA OPERASI	629.811.688.721,00	582.664.244.546,55	92,51
2	Belanja Pegawai	363.241.126.844,00	341.227.696.755,00	93,94
3	Belanja Barang dan Jasa	231.649.079.196,00	206.106.268.384,55	88,97
4	Belanja Hibah	34.821.482.681,00	35.230.279.407,00	101,17
5	Belanja Bantuan Sosial	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
6	BELANJA MODAL	129.780.773.081,00	125.988.888.811,50	97,08
7	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00
8	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.216.736.853,00	18.786.391.695,00	92,92
9	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	37.612.989.498,00	36.377.117.554,50	96,71
10	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	70.320.799.230,00	69.195.557.134,00	98,40
11	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.630.247.500,00	1.629.822.428,00	99,97
12	BELANJA TAK TERDUGA	1.806.369.319,00	325.000.000,00	17,99



13	Belanja Tak Terduga	1.806.369.319,00	325.000.000,00	17,99
14	BELANJA TRANSFER	158.878.612.000,00	158.626.806.907,00	99,84
15	Belanja Bagi Hasil	2.619.722.600,00	2.368.134.718,00	90,40
16	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	1.635.300.000,00	1.472.737.168,00	90,06
17	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	984.422.600,00	895.397.550,00	90,96
18	Belanja Bantuan Keuangan	156.258.889.400,00	156.258.672.189,00	100,00
19	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	156.258.889.400,00	156.258.672.189,00	100,00
20	SURPLUS / (DEFISIT)	-46.091.885.074,00	1.489.159.420,97	-3,23

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao

7. Realisasi pembiayaan menurut jenis pembiayaan

Anggaran dan realisasi pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 1.11
Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024 (Unaudited)	%
1	2	3	4	5
	PEMBIAYAAN			
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	56.591.885.074,00	56.699.068.590,59	100,19
2	Penggunaan SiLPA	56.591.885.074,00	56.591.885.074,35	100,00
3	Koreksi Saldo awal	0,00	107.183.516,24	0,00
4	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	10.500.000.000,00	10.500.000.000,00	100,00
5	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	10.500.000.000,00	10.500.000.000,00	100,00
	PEMBIAYAAN NETTO	46.091.885.074,00	46.199.068.590,59	100,23
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	47.688.228.011,56	0,00

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao



BAB II

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

2.1 LATAR BELAKANG PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2024

Latar belakang perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 adalah disebabkan oleh adanya perubahan kebijakan nasional dan daerah. Perubahan tersebut disusun dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan potensi, kondisi sosial, ekonomi daerah yang dikaitkan dengan tolak ukur rencana strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao. Namun pada pelaksanaannya, seringkali Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan terjadi perubahan sesuai dengan kondisi dan perkembangan. Penyesuaian dimaksud didasarkan pada pertimbangan antara lain:

1. Program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. yang sangat dibutuhkan dan disesuaikan dengan skala prioritas;
2. Capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) apabila asumsi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) induk tidak tercapai;
3. Capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) apabila melampaui asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) induk; dan
4. Penyesuaian terhadap target pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.



Oleh sebab itu, perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 dimaksudkan untuk dapat menjawab berbagai kondisi terkini serta dapat mendorong optimalisasi capaian kinerja pelaksanaan urusan pemerintahan pada sejumlah Perangkat Daerah khususnya dan mempercepat prioritas pembangunan dalam rangka pencapaian target-target kinerja dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024.

2.2 PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2024

Gambaran mengenai perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
PENDAPATAN DAERAH				
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	35.323.476.075	33.092.604.355	(2.230.871.720)
1.1	Pajak Daerah	16.353.000.000	17.357.500.000	1.004.500.000
1.2	Retribusi Daerah	9.844.226.000	9.839.726.000	(4.500.000)
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.000.000.000	3.655.363.280	(3.344.636.720)
1.4	Lain-lain PAD yang Sah	2.126.250.075	2.240.015.075	113.765.000
2	PENDAPATAN TRANSFER	818.368.383.410	835.497.700.063	17.129.316.653
2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	797.233.592.000	808.003.471.378	10.769.879.378
2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	21.134.791.410	27.494.228.685	6.359.437.275
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	6.802.200.000	5.595.253.629	(1.206.946.371)
3.1	Pendapatan Hibah	0	200.000.000	200.000.000
3.2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	6.802.200.000	5.395.253.629	(1.406.946.371)
Jumlah Pendapatan		860.494.059.485	874.185.558.047	13.691.498.562



NO	PROGRAM/KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)
BELANJA				
1	BELANJA OPERASI	592.194.202.176	629.811.688.721	37.617.486.545
1.1	Belanja Pegawai	349.020.604.857	363.241.126.844	14.220.521.987
1.2	Belanja Barang dan Jasa	211.355.255.119	231.649.079.196	20.293.824.077
1.3	Belanja Hibah	31.718.342.200	34.821.482.681	3.103.140.481
1.4	Belanja Bantuan Sosial	100.000.000	100.000.000	0
2	BELANJA MODAL	118.857.325.309	129.780.773.081	10.923.447.772
2.1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.244.949.351	20.216.736.853	4.971.787.502
2.2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	33.855.541.948	37.612.989.498	3.757.447.550
2.3	Belanja Modal Jalan. Jaringan. dan Irigasi	68.202.836.510	70.320.799.230	2.117.962.720
2.4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.553.997.500	1.630.247.500	76.250.000
3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.500.000.000	1.806.369.319	(1.693.630.681)
3.1	Belanja Tidak Terduga	3.500.000.000	1.806.369.319	(1.693.630.681)
4	BELANJA TRANSFER	155.554.732.000	158.878.612.000	3.323.880.000
4.1	Belanja Bagi Hasil	2.619.722.600	2.619.722.600	0
4.2	Belanja Bantuan Keuangan	152.935.009.400	156.258.889.400	3.323.880.000
Jumlah Belanja		870.106.259.485	920.277.443.121	50.171.183.636
Total Surplus/(Defisit)		(9.612.200.000)	(46.091.885.074)	(36.479.685.074)
PEMBIAYAAN				
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	20.112.200.000	56.591.885.074	36.479.685.074
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	20.112.200.000	56.591.885.074	36.479.685.074
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		20.112.200.000	56.591.885.074	36.479.685.074
2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	10.500.000.000	10.500.000.000	0
2.1	Penyertaan Modal Daerah	10.500.000.000	10.500.000.000	0
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		10.500.000.000	10.500.000.000	0
Pembiayaan Netto		9.612.200.000	46.091.885.074	36.479.685.074
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan		0	0	0



2.3 PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PADA PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2024

Gambaran mengenai program dan kegiatan yang ada pada setiap Perangkat Daerah pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. DINAS PENDIDIKAN. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Alokasi anggaran pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga semula **Rp.260.104.276.642.-** bertambah sebesar **Rp.15.117.294.850.-** menjadi **Rp.275.221.571.492.-** dengan rincian:

- a. Belanja Operasi semula **Rp.234.417.579.407.-** bertambah sebesar **Rp.11.918.707.800.-** menjadi **Rp.246.336.287.207.-**.
- b. Belanja Modal semula **Rp.25.686.697.235.-** bertambah sebesar **Rp.3.198.587.050.-** menjadi **Rp.28.885.284.285.-**.

Tabel 2.2
Penjabaran Perubahan Anggaran Dinas Pendidikan.
Kepemudaan dan Olahraga Tahun Anggaran 2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	182.367.020.223	194.742.347.023	12.375.326.800
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39.428.000	39.428.000	0
-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	34.428.000	34.428.000	0
-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000	5.000.000	0



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	181.843.603.623	194.218.930.423	12.375.326.800
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	181.597.527.623	193.922.854.423	12.325.326.800
-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	246.076.000	296.076.000	50.000.000
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	47.400.000	47.400.000	0
-	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	25.800.000	25.800.000	0
-	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	21.600.000	21.600.000	0
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	285.611.600	285.611.600	0
-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.370.000	2.370.000	0
-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	52.661.000	52.661.000	0
-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	45.534.000	45.534.000	0
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	32.718.600	32.718.600	0
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	152.328.000	152.328.000	0
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	81.071.000	81.071.000	0
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	81.071.000	81.071.000	0
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	69.906.000	69.906.000	0
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	69.906.000	69.906.000	0
II	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	70.459.235.419	73.201.203.469	2.741.968.050



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
7	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	42.473.197.835	43.956.764.635	1.483.566.800
-	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	838.000.000	923.410.000	85.410.000
-	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	734.000.000	805.200.000	71.200.000
-	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	794.440.000	0	(794.440.000)
-	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/ Penjaga Sekolah	1.015.000.000	763.555.000	(251.445.000)
-	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	213.001.000	88.850.000	(124.151.000)
-	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	154.775.000	148.400.000	(6.375.000)
-	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	289.800.000	339.800.000	50.000.000
-	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	100.000.000	438.730.000	338.730.000
-	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	7.912.500.000	8.057.250.000	144.750.000
-	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.079.750.000	1.179.750.000	100.000.000
-	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	46.741.400	46.741.400	0
-	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	17.893.696.000	17.893.696.000	0
-	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	1.632.389.000	1.214.702.000	(417.687.000)
-	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	35.000.000	85.000.000	50.000.000
-	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	650.000.000	650.000.000	0
-	Pembangunan Ruang Kelas Baru	2.132.800.000	2.132.800.000	0



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
-	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	0	291.980.000	291.980.000
-	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan KapasitasBidang Pendidikan	200.000.000	250.000.000	50.000.000
-	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	6.751.305.435	8.646.900.235	1.895.594.800
8	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	20.380.505.100	20.879.906.350	499.401.250
-	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	0	339.230.000	339.230.000
-	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	790.000.000	302.909.000	(487.091.000)
-	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	489.600.000	489.600.000	0
-	Pembangunan Laboratorium	1.897.073.000	1.656.131.250	(240.941.750)
-	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	2.284.236.000	1.644.120.000	(640.116.000)
-	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	0	322.578.000	322.578.000
-	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	328.419.000	0	(328.419.000)
-	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	0	265.740.000	265.740.000
-	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	140.859.000	566.930.000	426.071.000
-	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	133.730.000	159.980.000	26.250.000
-	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	225.000.000	425.000.000	200.000.000
-	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	594.699.100	694.699.100	100.000.000



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
-	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	111.780.000	161.780.000	50.000.000
-	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	11.034.320.000	11.034.320.000	0
-	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	35.000.000	85.000.000	50.000.000
-	Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.095.000.000	1.095.000.000	0
-	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan KapasitasBidang Pendidikan	123.389.000	173.389.000	50.000.000
-	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	650.000.000	650.000.000	0
-	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	447.400.000	813.500.000	366.100.000
9	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	5.972.132.484	6.731.132.484	759.000.000
-	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	126.940.000	202.108.000	75.168.000
-	Pengadaan Perlengkapan PAUD	180.000.000	0	(180.000.000)
-	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	0	1.028.000.000	1.028.000.000
-	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	50.000.000	50.000.000	0
-	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	981.000.000	981.000.000	0
-	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	66.500.000	66.500.000	0
-	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	204.160.000	204.160.000	0



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
-	Pengelolaan Dana BOP PAUD	2.254.200.000	2.215.200.000	(39.000.000)
-	Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.835.928.484	1.710.760.484	(125.168.000)
-	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	273.404.000	273.404.000	0
10	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.633.400.000	1.633.400.000	0
-	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1.621.500.000	1.621.500.000	0
-	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	11.900.000	11.900.000	0
III	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	260.930.000	260.930.000	0
11	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	260.930.000	260.930.000	0
-	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	215.930.000	215.930.000	0
-	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	45.000.000	45.000.000	0



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
IV	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	4.851.592.000	4.851.592.000	0
12	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	4.701.592.000	4.701.592.000	0
-	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	4.701.592.000	4.701.592.000	0
13	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000	150.000.000	0
-	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	150.000.000	150.000.000	0
V	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.090.499.000	2.090.499.000	0
14	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2.090.499.000	2.090.499.000	0
-	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	2.090.499.000	2.090.499.000	0



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
VI	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	75.000.000	75.000.000	0
15	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	75.000.000	75.000.000	0
-	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	75.000.000	75.000.000	0
TOTAL		260.104.276.642	275.221.571.492	15.117.294.850

2. DINAS KESEHATAN

Alokasi anggaran pada Dinas Kesehatan semula **Rp.132.849.604.885.-** bertambah sebesar **Rp.16.875.360.041.-** menjadi **Rp.149.724.964.926.-** dengan rincian:

1. Belanja Operasi semula **Rp.111.826.618.466.-** bertambah sebesar **Rp.13.268.600.359.-** menjadi **Rp.125.095.218.825.-**.
2. Belanja Modal semula **Rp.21.022.986.419.-** bertambah sebesar **Rp.3.606.759.682.-** menjadi **Rp.24.629.746.101.-**.



Tabel 2.3
Penjabaran Perubahan Anggaran Dinas Kesehatan
Tahun Anggaran 2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	53.235.555.572	62.056.907.172	8.821.351.600
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	76.601.910	76.601.910	0
-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	61.604.200	61.604.200	0
-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.997.710	14.997.710	0
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	52.619.902.329	61.441.253.929	8.821.351.600
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	52.334.774.329	61.156.125.929	8.821.351.600
-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	245.128.000	245.128.000	0
-	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	40.000.000	40.000.000	0
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	28.800.000	28.800.000	0
-	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	28.800.000	28.800.000	0
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	68.210.000	68.210.000	0
-	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	68.210.000	68.210.000	0
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	241.132.583	241.132.583	0
-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	98.426.950	98.426.950	0
-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	44.335.550	44.335.550	0



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
-	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	23.116.083	23.116.083	0
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.254.000	75.254.000	0
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	61.749.750	61.749.750	0
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	61.749.750	61.749.750	0
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	139.159.000	139.159.000	0
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	137.959.000	137.959.000	0
-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.200.000	1.200.000	0
II	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	30.914.189.738	35.828.893.936	4.914.704.198
8	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	20.325.541.064	21.810.701.539	1.485.160.475
-	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2.715.702.827	1.105.687.814	(1.610.015.013)
-	Pengembangan Puskesmas	0	11.743.072.400	11.743.072.400
-	Pengembangan fasilitas kesehatan lainnya	0	1.875.377.013	1.875.377.013
-	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	260.000.000	260.000.000	0
-	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	9.062.880.043	374.807.600	(8.688.072.443)
-	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	4.014.349.594	1.767.728.350	(2.246.621.244)



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
-	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	25.378.000	16.525.000	(8.853.000)
-	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	4.141.160.600	4.503.323.362	362.162.762
-	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	106.070.000	164.180.000	58.110.000
9	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10.061.533.760	13.489.442.815	3.427.909.055
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	220.821.816	501.247.857	280.426.041
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	170.524.578	47.024.578	(123.500.000)
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	74.560.000	112.596.000	38.036.000
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	116.670.662	545.383.162	428.712.500
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	48.746.350	208.157.350	159.411.000
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	124.599.533	124.599.533	0
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	26.948.300	26.948.300	0
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	18.999.800	18.999.800	0
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	331.037.000	263.868.300	(67.168.700)



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	54.684.400	54.684.400	0
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	235.621.200	183.296.400	(52.324.800)
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	52.480.000	52.480.000	0
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.544.246.790	2.507.587.941	963.341.151
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	9.435.000	9.435.000	0
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	699.384.424	924.724.674	225.340.250
-	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	261.071.858	272.361.400	11.289.542
-	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	225.912.499	227.658.300	1.745.801
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	33.466.500	31.331.600	(2.134.900)
-	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	536.660.250	853.493.940	316.833.690
-	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	4.228.883.300	5.506.712.300	1.277.829.000
-	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB Rujukan Nasional	197.112.000	11.760.000	(185.352.000)
-	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	371.757.200	374.350.000	2.592.800
-	Investigasi awal Kejadian tidak di harapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	3.060.000	3.060.000	0
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	474.850.300	322.434.680	(152.415.620)
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	0	305.247.300	305.247.300



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
10	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	100.979.000	122.800.000	21.821.000
-	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	100.979.000	122.800.000	21.821.000
11	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	426.135.914	405.949.582	(20.186.332)
-	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	426.135.914	405.949.582	(20.186.332)
III	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	10.298.087.311	10.662.803.040	364.715.729
12	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	9.679.837.099	9.204.572.000	(475.265.099)
-	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	9.127.000.000	9.127.000.000	0
-	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	552.837.099	77.572.000	(475.265.099)
13	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	618.250.212	1.458.231.040	839.980.828
-	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	618.250.212	1.458.231.040	839.980.828
IV	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	276.869.700	280.609.700	3.740.000
14	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	14.714.500	18.454.500	3.740.000



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
-	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	14.714.500	18.454.500	3.740.000
15	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	105.484.200	105.484.200	0
-	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	105.484.200	105.484.200	0
16	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	156.671.000	156.671.000	0
-	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	156.671.000	156.671.000	0
V	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	126.965.704	339.910.092	212.944.388
17	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	62.699.576	74.884.576	12.185.000



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
-	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	62.699.576	74.884.576	12.185.000
18	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	64.266.128	265.025.516	200.759.388
-	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	64.266.128	265.025.516	200.759.388
TOTAL		94.851.668.025	109.169.123.940	14.317.455.915
PUSKESMAS EAHUN		1.742.488.859	1.788.064.159	45.575.300
VI	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.729.343.559	1.781.335.459	51.991.900
19	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.729.343.559	1.774.594.459	45.250.900
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	71.108.400	70.356.000	(752.400)
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	12.847.500	17.697.600	4.850.100
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	66.000.000	33.000.000	(33.000.000)
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	29.700.000	1.800.000	(27.900.000)
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	14.400.000	6.600.000	(7.800.000)



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	332.818.300	388.728.400	55.910.100
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	23.400.000	17.400.000	(6.000.000)
-	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	8.695.800	28.828.800	20.133.000
-	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	279.750.000	153.600.000	(126.150.000)
-	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	638.570.859	638.570.859	0
-	Operasional Pelayanan Puskesmas	79.932.600	227.772.600	147.840.000
-	Investigasi Awal Kejadian Tidak di Harapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	3.300.000	3.300.000	0
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan HIV (ODHIV)	2.400.000	1.200.000	(1.200.000)
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	4.950.000	16.800.000	11.850.000
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	24.374.900	26.749.800	2.374.900
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	137.095.200	142.190.400	5.095.200
20	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	0	6.741.000	6.741.000
-	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0	6.741.000	6.741.000
VII	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	13.145.300	6.728.700	(6.416.600)
21	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	13.145.300	6.728.700	(6.416.600)



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
-	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	13.145.300	6.728.700	(6.416.600)
PUSKESMAS SOTIMORI		785.158.665	801.926.265	16.767.600
VIII	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	776.758.665	797.726.265	20.967.600
22	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	776.758.665	788.558.665	11.800.000
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	12.928.800	26.115.600	13.186.800
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	28.691.600	14.415.000	(14.276.600)
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	7.500.000	24.000.000	16.500.000
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	12.300.000	5.400.000	(6.900.000)
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	4.200.000	2.100.000	(2.100.000)
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	109.029.300	149.682.200	40.652.900
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	8.400.000	4.200.000	(4.200.000)
-	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	26.764.200	11.032.500	(15.731.700)
-	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	199.800.000	79.050.000	(120.750.000)
-	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	278.979.365	278.979.365	0
-	Operasional Pelayanan Puskesmas	48.607.200	107.252.400	58.645.200



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
-	Investigasi Awal Kejadian Tidak di Harapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	2.100.000	2.100.000	0
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan HIV (ODHIV)	3.600.000	966.600	(2.633.400)
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	2.100.000	2.100.000	0
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	5.165.000	0	(5.165.000)
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	26.593.200	81.165.000	54.571.800
23	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	0	9.167.600	9.167.600
-	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0	9.167.600	9.167.600
IX	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	8.400.000	4.200.000	(4.200.000)
24	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	8.400.000	4.200.000	(4.200.000)
-	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	8.400.000	4.200.000	(4.200.000)
PUSKESMAS KORBAFO		1.007.036.694	993.961.894	(13.074.800)
X	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.004.336.694	991.962.144	(12.374.550)



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
25	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.004.336.694	984.666.294	(19.670.400)
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	46.384.000	72.480.000	26.096.000
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	2.615.900	4.866.000	2.250.100
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	33.750.000	22.500.000	(11.250.000)
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	4.800.000	3.600.000	(1.200.000)
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	12.000.000	2.400.000	(9.600.000)
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	191.897.700	169.465.100	(22.432.600)
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	30.600.000	5.100.000	(25.500.000)
-	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	19.882.500	15.514.200	(4.368.300)
-	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	208.500.000	124.200.000	(84.300.000)
-	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	310.500.394	310.500.394	0
-	Operasional Pelayanan Puskesmas	43.827.000	150.246.600	106.419.600
-	Investigasi Awal Kejadian Tidak di Harapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1.200.000	450.000	(750.000)
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan HIV (ODHIV)	13.200.000	600.000	(12.600.000)
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	1.200.000	1.200.000	0
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	8.264.000	5.064.000	(3.200.000)



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	75.715.200	96.480.000	20.764.800
26	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	0	7.295.850	7.295.850
-	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0	7.295.850	7.295.850
XI	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	2.700.000	1.999.750	(700.250)
27	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.700.000	1.999.750	(700.250)
-	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2.700.000	1.999.750	(700.250)
PUSKESMAS SONIMANU		751.880.956	735.215.556	(16.665.400)
XII	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	750.281.956	733.616.556	(16.665.400)
28	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	750.281.956	726.985.956	(23.296.000)
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	54.232.500	46.525.500	(7.707.000)
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	2.699.200	1.716.000	(983.200)
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	16.500.000	16.500.000	0
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	17.550.000	9.450.000	(8.100.000)



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	7.800.000	450.000	(7.350.000)
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	117.316.500	111.130.100	(6.186.400)
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	25.200.000	8.700.000	(16.500.000)
-	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	7.815.300	11.230.800	3.415.500
-	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	144.600.000	88.650.000	(55.950.000)
-	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	230.351.256	230.351.256	0
-	Operasional Pelayanan Puskesmas	34.591.200	116.970.300	82.379.100
-	Investigasi Awal Kejadian Tidak di Harapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1.050.000	450.000	(600.000)
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan HIV (ODHIV)	900.000	450.000	(450.000)
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	2.100.000	1.050.000	(1.050.000)
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	1.966.000	1.966.000	0
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	85.610.000	81.396.000	(4.214.000)
29	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	0	6.630.600	6.630.600
-	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0	6.630.600	6.630.600
XIII	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.599.000	1.599.000	0
30	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.599.000	1.599.000	0



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
-	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1.599.000	1.599.000	0
PUSKESMAS FEAPPOI		1.034.015.863	1.062.603.663	28.587.800
XIV	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.030.415.863	1.047.313.663	16.897.800
31	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.030.415.863	1.040.276.763	9.860.900
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	28.790.400	38.400.000	9.609.600
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	7.531.000	12.300.000	4.769.000
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	15.300.000	30.600.000	15.300.000
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	23.550.000	12.900.000	(10.650.000)
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	18.000.000	2.400.000	(15.600.000)
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	114.670.400	168.100.000	53.429.600
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	18.000.000	11.700.000	(6.300.000)
-	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	19.182.900	37.350.000	18.167.100
-	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	282.600.000	94.950.000	(187.650.000)
-	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	351.229.763	351.229.763	0
-	Operasional Pelayanan Puskesmas	72.514.200	163.047.000	90.532.800



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
-	Investigasi Awal Kejadian Tidak di Harapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1.200.000	300.000	(900.000)
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan HIV (ODHIV)	3.600.000	1.800.000	(1.800.000)
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	4.800.000	2.400.000	(2.400.000)
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	16.260.800	26.400.000	10.139.200
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	53.186.400	86.400.000	33.213.600
32	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	0	7.036.900	7.036.900
-	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0	7.036.900	7.036.900
XV	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	3.600.000	15.290.000	11.690.000
33	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.600.000	15.290.000	11.690.000
-	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	3.600.000	15.290.000	11.690.000
PUSKESMAS BAA		3.212.901.969	3.281.934.335	69.032.366
XVI	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	3.211.651.969	3.244.999.735	33.347.766
34	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.211.651.969	3.229.078.697	17.426.728



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	145.449.000	139.104.000	(6.345.000)
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	16.844.100	13.248.000	(3.596.100)
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	112.500.000	72.000.000	(40.500.000)
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	33.900.000	23.100.000	(10.800.000)
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	39.600.000	11.400.000	(28.200.000)
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	415.165.400	494.611.500	79.446.100
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	28.050.000	24.150.000	(3.900.000)
-	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	42.930.000	39.327.000	(3.603.000)
-	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	561.300.000	268.800.000	(292.500.000)
-	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1.374.559.997	1.374.559.997	0
-	Operasional Pelayanan Puskesmas	114.744.672	421.842.600	307.097.928
-	Investigasi Awal Kejadian Tidak di Harapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	2.700.000	2.700.000	0
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan HIV (ODHIV)	10.800.000	9.000.000	(1.800.000)
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	10.800.000	5.400.000	(5.400.000)
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	51.580.800	103.161.600	51.580.800
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	250.728.000	226.674.000	(24.054.000)



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
35	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	0	15.921.038	15.921.038
-	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0	15.921.038	15.921.038
XVII	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.250.000	36.934.600	35.684.600
36	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.250.000	36.934.600	35.684.600
-	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1.250.000	36.934.600	35.684.600
PUSKESMAS OELE		925.421.465	909.158.265	(16.263.200)
XVIII	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	906.521.465	890.548.465	(15.973.000)
37	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	906.521.465	887.962.765	(18.558.700)
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	24.524.800	26.817.000	2.292.200
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	5.914.800	10.348.500	4.433.700
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	24.750.000	16.500.000	(8.250.000)
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	8.400.000	5.700.000	(2.700.000)
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	18.000.000	1.200.000	(16.800.000)



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	132.290.100	145.581.100	13.291.000
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	9.000.000	6.750.000	(2.250.000)
-	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	18.864.300	27.928.800	9.064.500
-	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	199.200.000	87.000.000	(112.200.000)
-	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	334.255.465	334.255.465	0
-	Operasional Pelayanan Puskesmas	37.824.000	132.783.100	94.959.100
-	Investigasi Awal Kejadian Tidak di Harapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1.050.000	150.000	(900.000)
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan HIV (ODHIV)	1.200.000	150.000	(1.050.000)
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	15.900.000	900.000	(15.000.000)
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	20.059.200	24.257.800	4.198.600
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	55.288.800	67.641.000	12.352.200
38	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	0	2.585.700	2.585.700
-	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0	2.585.700	2.585.700
XIX	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	18.900.000	18.609.800	(290.200)
39	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	18.900.000	18.609.800	(290.200)



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
-	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	18.900.000	18.609.800	(290.200)
PUSKESMAS BUSALANGGA		1.815.708.269	1.758.027.069	(57.681.200)
XX	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.814.458.269	1.752.978.569	(61.479.700)
40	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.814.458.269	1.746.317.569	(68.140.700)
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	79.171.200	86.335.200	7.164.000
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu BERSALIN	5.698.200	31.944.600	26.246.400
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	45.000.000	30.000.000	(15.000.000)
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	13.650.000	4.200.000	(9.450.000)
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	22.800.000	6.000.000	(16.800.000)
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	354.910.500	299.743.000	(55.167.500)
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	21.900.000	8.550.000	(13.350.000)
-	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	20.164.500	28.062.300	7.897.800
-	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	393.600.000	199.950.000	(193.650.000)
-	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	611.176.869	611.176.869	0
-	Operasional Pelayanan Puskesmas	72.628.800	252.595.200	179.966.400



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
-	Investigasi Awal Kejadian Tidak di Harapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	3.600.000	900.000	(2.700.000)
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan HIV (ODHIV)	15.300.000	1.800.000	(13.500.000)
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	6.000.000	1.950.000	(4.050.000)
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	9.696.600	31.975.200	22.278.600
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	139.161.600	151.135.200	11.973.600
41	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	0	6.661.000	6.661.000
-	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0	6.661.000	6.661.000
XXI	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.250.000	5.048.500	3.798.500
42	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.250.000	5.048.500	3.798.500
-	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1.250.000	5.048.500	3.798.500
PUSKESMAS OELABA		2.087.078.431	1.910.685.231	(176.393.200)
XXII	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.077.180.231	1.897.139.031	(180.041.200)



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
43	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.077.180.231	1.890.366.331	(186.813.900)
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	28.990.000	77.280.000	48.290.000
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	20.730.200	11.848.500	(8.881.700)
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	51.300.000	28.500.000	(22.800.000)
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	32.100.000	6.900.000	(25.200.000)
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	60.000.000	3.000.000	(57.000.000)
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	541.324.600	397.095.800	(144.228.800)
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	25.500.000	13.500.000	(12.000.000)
-	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	23.679.600	21.648.000	(2.031.600)
-	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	271.500.000	149.850.000	(121.650.000)
-	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	806.748.231	806.748.231	0
-	Operasional Pelayanan Puskesmas	167.310.000	216.465.800	49.155.800
-	Investigasi Awal Kejadian Tidak di Harapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1.500.000	750.000	(750.000)
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan HIV (ODHIV)	3.000.000	1.500.000	(1.500.000)
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	6.000.000	1.500.000	(4.500.000)
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	3.707.600	0	(3.707.600)



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	33.790.000	153.780.000	119.990.000
44	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	0	6.772.700	6.772.700
-	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0	6.772.700	6.772.700
XXIII	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	9.898.200	13.546.200	3.648.000
45	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	9.898.200	13.546.200	3.648.000
-	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	9.898.200	13.546.200	3.648.000
PUSKESMAS BATUTUA		3.247.049.610	3.333.316.610	86.267.000
XXIV	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	3.227.099.610	3.269.895.110	42.795.500
46	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.227.099.610	3.263.159.410	36.059.800
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	110.162.000	106.333.500	(3.828.500)
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	14.995.200	21.930.000	6.934.800
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	65.250.000	43.500.000	(21.750.000)
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	18.750.000	18.900.000	150.000



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV	37.800.000	11.400.000	(26.400.000)
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	420.168.000	495.609.000	75.441.000
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	16.650.000	16.650.000	0
-	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	64.030.200	46.895.400	(17.134.800)
-	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	477.750.000	246.300.000	(231.450.000)
-	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1.467.624.810	1.467.624.810	0
-	Operasional Pelayanan Puskesmas	133.953.000	410.451.400	276.498.400
-	Investigasi Awal Kejadian Tidak di Harapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	2.850.000	2.850.000	0
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan HIV (ODHIV)	9.000.000	3.000.000	(6.000.000)
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	6.000.000	6.000.000	0
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	54.446.400	108.892.800	54.446.400
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	327.670.000	256.822.500	(70.847.500)
47	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	0	6.735.700	6.735.700
-	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0	6.735.700	6.735.700
XXV	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	19.950.000	63.421.500	43.471.500
48	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	19.950.000	63.421.500	43.471.500



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
-	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	19.950.000	63.421.500	43.471.500
PUSKESMAS DELHA		1.134.371.428	1.156.584.862	22.213.434
XXVI	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.129.788.928	1.154.502.362	24.713.434
49	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.129.788.928	1.152.608.200	22.819.272
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	33.588.800	24.486.000	(9.102.800)
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	7.614.700	25.596.000	17.981.300
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	51.000.000	24.000.000	(27.000.000)
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	16.350.000	5.550.000	(10.800.000)
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV	31.500.000	6.300.000	(25.200.000)
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	145.542.087	167.612.400	22.070.313
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	17.100.000	12.300.000	(4.800.000)
-	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	19.099.200	34.812.000	15.712.800
-	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	190.200.000	118.200.000	(72.000.000)
-	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	445.138.900	445.138.900	0
-	Operasional Pelayanan Puskesmas	80.130.000	171.613.400	91.483.400



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
-	Investigasi Awal Kejadian Tidak di Harapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	2.100.000	0	(2.100.000)
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan HIV (ODHIV)	1.800.000	300.000	(1.500.000)
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	3.000.000	1.800.000	(1.200.000)
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	15.977.500	37.786.000	21.808.500
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	69.647.741	77.113.500	7.465.759
50	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	0	1.894.162	1.894.162
-	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0	1.894.162	1.894.162
XXVII	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	4.582.500	2.082.500	(2.500.000)
51	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4.582.500	2.082.500	(2.500.000)
-	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4.582.500	2.082.500	(2.500.000)
PUSKESMAS NDAO		627.237.495	638.871.795	11.634.300
XXVIII	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	622.887.495	633.224.795	10.337.300
52	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	622.887.495	625.603.695	2.716.200



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	32.521.600	25.650.000	(6.871.600)
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	9.000.000	18.000.000	9.000.000
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	13.500.000	5.550.000	(7.950.000)
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV	7.200.000	1.200.000	(6.000.000)
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	46.196.000	77.730.900	31.534.900
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	10.500.000	12.000.000	1.500.000
-	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	20.381.700	30.630.000	10.248.300
-	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	116.700.000	58.500.000	(58.200.000)
-	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	253.060.795	253.060.795	0
-	Operasional Pelayanan Puskesmas	48.340.200	91.682.000	43.341.800
-	Investigasi Awal Kejadian Tidak di Harapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1.500.000	1.500.000	0
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan HIV (ODHIV)	4.800.000	1.200.000	(3.600.000)
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	6.000.000	750.000	(5.250.000)
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	53.187.200	48.150.000	(5.037.200)
53	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	0	7.621.100	7.621.100
-	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0	7.621.100	7.621.100



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
XXIX	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	4.350.000	5.647.000	1.297.000
54	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4.350.000	5.647.000	1.297.000
-	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4.350.000	5.647.000	1.297.000
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAA		19.627.587.156	22.185.491.282	2.557.904.126
XXX	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	12.151.203.156	14.709.107.282	2.557.904.126
55	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	8.187.669.951	10.282.894.077	2.095.224.126
-	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	1.114.854.500	1.139.854.500	25.000.000
-	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	4.071.511.981	6.081.736.107	2.010.224.126
-	Pengembangan Rumah Sakit	3.001.303.470	3.061.303.470	60.000.000
56	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.270.284.205	3.732.964.205	462.680.000
-	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	3.215.056.205	3.677.736.205	462.680.000
-	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	55.228.000	55.228.000	0
57	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	693.249.000	693.249.000	0



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
-	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	693.249.000	693.249.000	0
XXXI	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	7.476.384.000	7.476.384.000	0
58	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	7.476.384.000	7.476.384.000	0
-	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	7.476.384.000	7.476.384.000	0
TOTAL		37.997.936.860	40.555.840.986	2.557.904.126
TOTAL (DINAS KESEHATAN + PUSKESMAS & RSUD)		132.849.604.885	149.724.964.926	16.875.360.041

3. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Alokasi anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang semula **Rp.75.343.838.422.-** bertambah sebesar **Rp. 2.575.746.783.-** menjadi sebesar **Rp.77.919.585.205.-** dengan rincian:

- Belanja Operasi semula **Rp.12.035.755.382.-** bertambah sebesar **Rp.474.484.063.-** menjadi **Rp..12.510.239.445.-**.
- Belanja Modal semula **Rp.63.308.083.040.-** bertambah sebesar **Rp.2.101.262.720.-** menjadi **Rp.65.409.345.760.-**.



Tabel 2.4
Penjabaran Perubahan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	4.172.954.632	4.272.923.032	99.968.400
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	110.000.000	110.000.000	0
-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	55.000.000	55.000.000	0
-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	55.000.000	55.000.000	0
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.094.870.232	3.194.838.632	99.968.400
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.899.870.232	2.999.838.632	99.968.400
-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	195.000.000	195.000.000	0
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	11.400.000	11.400.000	0
-	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	11.400.000	11.400.000	0
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	496.519.400	496.519.400	0
-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.950.000	1.950.000	0
-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	136.500.000	136.500.000	
-	Penyediaan Bahan Logistik	25.000.000	25.000.000	0
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.000.000	25.000.000	0
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	308.069.400	308.069.400	0



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	57.984.000	57.984.000	0
-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.984.000	3.984.000	0
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	54.000.000	54.000.000	0
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	402.181.000	402.181.000	0
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	187.096.000	187.096.000	0
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	211.500.000	211.500.000	0
-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.585.000	3.585.000	0
II	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	7.686.996.000	9.796.996.000	2.110.000.000
7	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	997.000.000	3.057.000.000	2.060.000.000
-	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	442.000.000	1.642.000.000	1.200.000.000
-	Normalisasi/Restorasi Sungai	0	860.000.000	860.000.000
-	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	555.000.000	555.000.000	0
8	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	6.689.996.000	6.739.996.000	50.000.000
-	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	2.341.983.000	2.341.983.000	0



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
-	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	4.111.915.000	4.161.915.000	50.000.000
-	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	236.098.000	236.098.000	0
III	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	6.492.397.000	6.492.397.000	0
9	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	6.492.397.000	6.492.397.000	0
-	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di kawasan Perdesaan	5.835.781.000	5.835.781.000	0
-	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di kawasan Perdesaan	656.616.000	656.616.000	0
IV	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	5.716.654.000	5.716.654.000	0
10	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	5.716.654.000	5.716.654.000	0
-	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	5.716.654.000	5.716.654.000	0
V	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	210.674.000	210.674.000	0
11	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	210.674.000	210.674.000	0



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
-	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	131.674.000	131.674.000	0
-	Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	79.000.000	79.000.000	0
VI	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	50.614.162.790	50.979.941.173	365.778.383
12	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	50.614.162.790	50.979.941.173	365.778.383
-	Survei Kondisi Jalan /Jembatan	390.874.750	390.874.750	0
-	Rekonstruksi Jalan	50.123.288.040	50.144.550.760	21.262.720
-	Rehabilitasi Jalan		210.000.000	210.000.000
-	Pemeliharaan Rutin Jalan	100.000.000	234.515.663	134.515.663
VII	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	450.000.000	450.000.000	0
13	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	400.000.000	400.000.000	0
-	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan	400.000.000	400.000.000	0
14	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	50.000.000	0
-	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	50.000.000	50.000.000	0
TOTAL		75.343.838.422	77.919.585.205	2.575.746.783



4. DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Alokasi anggaran pada Dinas Perumahan. Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup semula **Rp.5.703.716.500.-** bertambah sebesar **Rp.2.337.915.700.-** menjadi **Rp.8.041.632.200.-** dengan rincian:

a. Belanja Operasi semula **Rp.5.685.016.500.-** bertambah sebesar **Rp.1.372.915.700.-** menjadi **Rp.7.057.932.200.-**.

b. Belanja Modal semula **Rp.18.700.000.-** bertambah sebesar **Rp.965.000.000.-** menjadi **Rp.983.700.000.-**.

Tabel 2.5
Penjabaran Perubahan Anggaran Dinas Perumahan Rakyat.
Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
Tahun Anggaran 2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
I	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	2.604.983.800	2.668.399.500	63.415.700
1	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33.655.000	33.655.000	0
-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.355.000	18.355.000	0
-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.300.000	15.300.000	0
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.243.937.800	2.307.353.500	63.415.700
-	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	2.192.817.800	2.256.233.500	63.415.700
-	Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	51.120.000	51.120.000	0
3	Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	9.000.000	9.000.000	0
-	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	9.000.000	9.000.000	0
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	195.199.000	195.199.000	0



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.060.000	1.060.000	0
-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.700.000	18.700.000	0
-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000	25.000.000	0
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.000.000	22.000.000	0
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	128.439.000	128.439.000	0
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	42.117.000	42.117.000	0
-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.042.000	3.042.000	0
-	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air Dan Listrik	39.075.000	39.075.000	0
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	81.075.000	81.075.000	0
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	81.075.000	81.075.000	0
II	PENGEMBANGAN PERUMAHAN	95.200.000	95.200.000	0
7	Pembangunan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau -Relokasi Program Kabupaten/Kota	95.200.000	95.200.000	0
-	Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	95.200.000	95.200.000	0
III	KAWASAN PERMUKIMAN	1.273.015.700	2.357.515.700	1.084.500.000
8	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	441.470.000	441.470.000	0



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
-	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	441.470.000	441.470.000	0
9	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	831.545.700	1.916.045.700	1.084.500.000
-	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	831.545.700	1.916.045.700	1.084.500.000
IV	PENATAGUNAAN TANAH	200.000.000	200.000.000	0
10	Penggunaan Tanah Yang Hamparannya Dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000	200.000.000	0
-	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	200.000.000	200.000.000	0
V	PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	242.859.000	322.859.000	80.000.000
11	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	242.859.000	322.859.000	80.000.000
-	Pembuatan Dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	242.859.000	322.859.000	80.000.000
VI	PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	225.000.000	225.000.000	0
12	Pencegahan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	175.000.000	175.000.000	0
-	Koordinasi, Sinkronisasi Dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara Dan Laut	75.000.000	75.000.000	0
-	Koordinasi, Sinkronisasi Dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi Dan Adaptasi Perubahan Iklim	100.000.000	100.000.000	0



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
13	Penanggulangan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	50.000.000	50.000.000	0
-	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Masyarakat	50.000.000	50.000.000	0
VII	PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	0	1.110.000.000	1.110.000.000
14	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	0	1.110.000.000	1.110.000.000
-	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	0	1.110.000.000	1.110.000.000
VIII	PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	1.062.658.000	1.062.658.000	0
15	Pengelolaan Sampah	1.062.658.000	1.062.658.000	0
-	Penanganan Sampah Dengan Melakukan Pemilahan. Pengumpulan. Pengangkutan. Pengolahan. Dan Pemrosesan Akhir Sampah Di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	1.062.658.000	1.062.658.000	0
TOTAL		5.703.716.500	8.041.632.200	2.337.915.700

5. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PMPTSP)

Alokasi anggaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu semula **Rp.2.392.440.963.-** bertambah sebesar **Rp.206.510.999.-** menjadi **Rp.2.598.951.962.-** dengan rincian:

- Belanja Operasi semula **Rp.2.390.140.963.-** bertambah sebesar **Rp.189.710.999.-** menjadi **Rp.2.579.851.962.-**.
- Belanja Modal semula **Rp.2.300.000.-** bertambah sebesar **Rp.16.800.000.-** menjadi **Rp.19.100.000.-**.



Tabel 2.6
Penjabaran Perubahan Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun Anggaran 2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.020.764.963	2.248.020.962	227.255.999
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	56.070.000	56.070.000	0
-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	38.170.000	38.170.000	0
-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.900.000	17.900.000	0
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.786.708.463	1.943.219.462	156.510.999
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.720.408.463	1.876.919.462	156.510.999
-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	66.300.000	66.300.000	0
3	Administrasi Barang Milik Daerah Pada perangkat Daerah	4.200.000	4.200.000	0
-	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4.200.000	4.200.000	0
4	Administrasi Umum Perangkat daerah	86.939.000	86.939.000	0
-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	500.000	500.000	0
-	Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	2.300.000	2.300.000	0
-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.472.000	7.472.000	0
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.200.000	6.200.000	0
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70.467.000	70.467.000	0



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24.682.500	24.682.500	0
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.682.500	24.682.500	0
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	62.165.000	132.910.000	70.745.000
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	62.165.000	82.910.000	20.745.000
-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	50.000.000	50.000.000
II	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	85.236.000	64.491.000	(20.745.000)
7	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota	85.236.000	64.491.000	(20.745.000)
-	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	85.236.000	64.491.000	(20.745.000)
III	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	141.440.000	141.440.000	0
8	Pelayanan Perizinan dan Non perizinan secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	141.440.000	141.440.000	0
-	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	141.440.000	141.440.000	0
IV	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	145.000.000	145.000.000	0
9	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota	145.000.000	145.000.000	0



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
-	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	45.000.000	45.000.000	0
-	Pengawasan Penanaman Modal	100.000.000	100.000.000	0
TOTAL		2.392.440.963	2.598.951.962	206.510.999

6. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Alokasi anggaran pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Perindustrian dan Perdagangan semula **Rp.3.709.513.701.-** bertambah sebesar **Rp.1.923.631.350.-** menjadi **Rp.5.633.145.051.-** dengan rincian:

- Belanja Operasi semula **Rp.3.678.773.701.-** bertambah sebesar **Rp.1.923.631.350.-** menjadi **Rp.5.602.405.051.-**.
- Belanja Modal semula **Rp.30.740.000.-** tidak mengalami perubahan.

Tabel 2.7
Penjabaran Perubahan Anggaran Dinas Koperasi,
UKM, Perindustrian dan Perdagangan
Tahun Anggaran 2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.693.000.101	2.756.123.101	63.123.000



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
1	Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	102.565.300	102.565.300	0
-	Penyusunan dokumen Perencanaan perangkat daerah	75.813.000	75.813.000	0
-	Evaluasi kinerja perangkat daerah	26.752.300	26.752.300	0
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.311.263.501	2.374.386.501	63.123.000
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.241.463.501	2.304.586.501	63.123.000
-	Pelaksanaan Penatausahaan dan pegujian/verifikasi Keuangan SKPD	69.800.000	69.800.000	0
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	11.400.000	11.400.000	0
-	Pengamanan Barang milik Daerah SKPD	11.400.000	11.400.000	0
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	142.044.000	142.044.000	0
-	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	34.340.000	34.340.000	0
-	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	15.000.000	15.000.000	0
-	Penyediaan bahan/material	21.500.000	21.500.000	0
-	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	71.204.000	71.204.000	0
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	40.039.500	40.039.500	0
-	Penyediaan Jasa Komunikasi sumber Daya air dan listrik	40.039.500	40.039.500	0
6	Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85.687.800	85.687.800	0
-	Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perijinan kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	73.292.800	73.292.800	0



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	8.900.000	8.900.000	0
-	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	3.495.000	3.495.000	0
II	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	10.000.000	10.000.000	0
7	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000	10.000.000	0
-	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000	10.000.000	0
III	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	0	164.859.760	164.859.760
8	Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah	0	164.859.760	164.859.760
-	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan kompetensi SDM Kopersai	0	164.859.760	164.859.760
IV	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	0	178.624.240	178.624.240
9	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	0	178.624.240	178.624.240



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
-	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan UMKM serta kapasitas dan kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui pendidikan dan pelatihan	0	178.624.240	178.624.240
V	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	393.584.000	50.100.000	(343.484.000)
10	Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil	393.584.000	50.100.000	(343.484.000)
	Produksi dan pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi	393.584.000	50.100.000	(343.484.000)
VI	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	15.000.000	75.000.000	60.000.000
11	Pengendalian Harga dan Stok barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	15.000.000	75.000.000	60.000.000
-	Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam satu kabupaten/kota	15.000.000	75.000.000	60.000.000
VII	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	18.059.600	18.059.600	0
12	Pelaksanaan metrologi legal, berupa tera tera ulang dan pengawasan	18.059.600	18.059.600	0
-	Pelaksanaan metrologi legal berupa Tera ,Tera Ulang	18.059.600	18.059.600	0
VIII	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	554.500.000	2.355.008.350	1.800.508.350



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
13	Penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan Industri Kabupaten/Kota	554.500.000	2.355.008.350	1.800.508.350
-	koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	554.500.000	2.355.008.350	1.800.508.350
IX	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	25.370.000	25.370.000	0
14	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI,IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten Kota	25.370.000	25.370.000	0
-	Fasilitasi pengumpulan pengolahan dan analisis data industri data kawasan industri data kawasan industri serta data lain lingkup Kabupaten/Kota melalui System Informasi Industri Nasional (SIINAS)	12.661.000	12.661.000	0
-	Desimnasi, publikasi data informasi dan analisa industri Kabupaten/Kota melalui SINas	12.709.000	12.709.000	0
TOTAL		3.709.513.701	5.633.145.051	1.923.631.350



7. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Alokasi anggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil semula **Rp.2.588.563.927.-** bertambah sebesar **Rp.185.455.900.-** menjadi sebesar **Rp.2.774.019.827.-** atau dengan rincian :

- a. Belanja Operasi semula **Rp.2.564.163.927.-** bertambah sebesar **Rp.185.455.900.-** menjadi **Rp.2.749.619.827.-**.
- b. Belanja Modal semula **Rp.24.400.000.-** tidak mengalami perubahan.

Tabel 2.8
Penjabaran Perubahan Anggaran Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
I	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.878.314.927	1.947.770.827	69.455.900
1	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.365.000	22.365.000	0
-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.000.000	12.000.000	0
-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.365.000	10.365.000	0
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.646.699.927	1.716.155.827	69.455.900
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.593.509.927	1.662.965.827	69.455.900
-	Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian /Verifikasi Keunagan SKPD	53.190.000	53.190.000	0
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.800.000	4.800.000	0
-	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4.800.000	4.800.000	0
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	111.702.000	111.702.000	0
-	Penyediaan Bahan/Material	24.950.000	24.950.000	0



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.999.000	11.999.000	
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	74.753.000	74.753.000	0
5	Penyediaan Jasa Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah	49.680.000	49.680.000	0
-	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik	49.680.000	49.680.000	0
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	43.068.000	43.068.000	0
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	43.068.000	43.068.000	0
II	PENDAFTARAN PENDUDUK	299.897.000	349.897.000	50.000.000
7	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	299.897.000	349.897.000	50.000.000
-	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	299.897.000	349.897.000	50.000.000
III	PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (PIAK) DAN PEMANFAATAN DATA	410.352.000	476.352.000	66.000.000
8	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan Dan Penyajian Database Kependudukan	410.352.000	476.352.000	66.000.000
-	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	410.352.000	476.352.000	66.000.000
TOTAL		2.588.563.927	2.774.019.827	185.455.900



8. DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

Alokasi anggaran pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja semula **Rp.4.380.293.044,-** bertambah sebesar **Rp.196.489.300,-** menjadi **Rp.4.576.782.344,-** dengan rincian:

- a. Belanja Operasi semula **Rp.2.400.293.044,-** bertambah sebesar **Rp. 196.489.300,-** menjadi **Rp. 2.596.782.344,-**.
- b. Belanja Modal semula **Rp. 1.980.000.000,-** tidak mengalami perubahan.

Tabel 2.9
Penjabaran Perubahan Anggaran
Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Tahun Anggaran 2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.757.157.322	1.916.413.622	159.256.300
1	Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi KInerja Perangkat Daerah	9.830.054	9.830.054	0
-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.830.054	9.830.054	0
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.600.092.844	1.683.851.144	83.758.300
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.549.752.844	1.633.511.144	83.758.300
-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Daerah	50.340.000	50.340.000	0
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.800.000	4.800.000	0
-	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4.800.000	4.800.000	0
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	70.078.924	126.070.924	55.992.000



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.280.430	13.280.430	0
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.689.494	6.689.494	0
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.109.000	106.101.000	55.992.000
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	31.181.000	42.926.000	11.745.000
-	Penyediaan jasa surat menyurat	1.183.000	1.183.000	0
-	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	29.998.000	41.743.000	11.745.000
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	41.174.500	48.935.500	7.761.000
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	40.120.000	47.881.000	7.761.000
-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.054.500	1.054.500	0
II	PROGRAM PELATIHAN KERJA, PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	294.292.405	294.292.405	0
7	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	294.292.405	294.292.405	0
-	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster kompetensi	294.292.405	294.292.405	0
III	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	26.000.431	26.000.431	0
8	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	12.000.176	12.000.176	0



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
-	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	12.000.176	12.000.176	0
9	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kab/Kota	14.000.255	14.000.255	0
-	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yg berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah Kab/Kota	14.000.255	14.000.255	0
IV	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	2.168.999.916	2.168.999.916	0
10	Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (satu) daerah Kab/Kota	2.168.999.916	2.168.999.916	0
-	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk setempat & Transmigran	2.168.999.916	2.168.999.916	0
V	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	133.842.970	171.075.970	37.233.000
11	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	133.842.970	171.075.970	37.233.000
-	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Sarana Permukiman	133.842.970	171.075.970	37.233.000
TOTAL		4.380.293.044	4.576.782.344	196.489.300



9. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Alokasi Anggaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana semula **Rp.9.056.383.654,-** bertambah sebesar **Rp.819.233.195,-** menjadi **Rp.9.875.616.849,-** dengan rincian:

- a. Belanja Operasi semula **Rp.8.138.095.154,-** bertambah sebesar **Rp. 710.272.695,-** menjadi **Rp.8.848.367.849,-**.
- b. Belanja Modal semula **Rp. 918.288.500,-** bertambah sebesar **Rp. 108.960.500,-** menjadi **Rp. 1.027.249.000,-**.

Tabel 2.10
Penjabaran Perubahan Anggaran
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
I	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.303.574.954	2.733.817.154	430.242.200
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.930.036.654	2.360.979.054	430.942.400
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.828.036.654	2.258.979.054	430.942.400
-	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	102.000.000	102.000.000	0
2	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	9.600.000	9.600.000	0
-	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4.800.000	4.800.000	
-	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.800.000	4.800.000	0
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	155.025.800	154.325.600	(700.200)



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.995.000	4.995.000	0
-	Penyediaan Bahan Logistik	30.000.000	30.000.000	0
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.996.800	19.296.600	(700.200)
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.034.000	100.034.000	0
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35.474.500	35.474.500	0
-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	975.000	975.000	0
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	34.499.500	34.499.500	0
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	173.438.000	173.438.000	0
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	173.438.000	173.438.000	0
II	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	40.199.000	40.199.000	0
6	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	20.199.000	20.199.000	0
-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	20.199.000	20.199.000	0
7	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/kota	20.000.000	20.000.000	0



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
-	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	20.000.000	20.000.000	0
III	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	305.000.000	305.000.000	0
8	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/kota	65.000.000	65.000.000	0
-	Koordinasi Kebijakan, Program dan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kab/Kota	65.000.000	65.000.000	0
9	Penyedia Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/kota	188.360.000	188.360.000	0
-	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	188.360.000	188.360.000	0
10	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	51.640.000	51.640.000	0
-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	51.640.000	51.640.000	0
IV	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	20.000.000	20.000.000	0



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
11	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Dalam Daerah Kabupaten / kota	20.000.000	20.000.000	0
-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000	20.000.000	0
V	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	373.928.000	373.928.000	0
12	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/kota	158.728.000	158.728.000	0
-	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan kabupaten/Kota	65.000.000	65.000.000	0
-	Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota	93.728.000	93.728.000	0
13	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	150.800.000	150.800.000	0
-	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	150.800.000	150.800.000	0



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
14	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	64.400.000	64.400.000	0
-	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah Kabupaten/Kota	64.400.000	64.400.000	0
VI	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	239.399.900	289.399.900	50.000.000
15	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	239.399.900	289.399.900	50.000.000
-	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	60.000.000	60.000.000	0
-	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	89.400.000	89.400.000	0
-	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	89.999.900	139.999.900	50.000.000
VII	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	4.714.981.800	4.938.179.800	223.198.000
16	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal	1.152.468.800	1.102.468.800	(50.000.000)
-	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	226.468.700	226.468.700	0
-	Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	0	21.500.000	21.500.000



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
-	Promosi dan KIE Program KKBPk Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	150.000.100	128.500.100	(21.500.000)
-	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPk Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	150.000.000	150.000.000	0
-	Pengelolaan Operasional dan Sarana di balai Penyuluhan KKBPk	546.000.000	496.000.000	(50.000.000)
-	Pengendalian Program KKBPk	80.000.000	80.000.000	0
17	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	387.000.000	886.975.000	499.975.000
-	Penggerakan Kader Institusi Pedesaan (IMP)	387.000.000	387.000.000	0
-	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	0	499.975.000	499.975.000
18	Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah Kabupaten/kota	2.519.013.000	2.042.236.000	(476.777.000)
-	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	13.500.000	13.500.000	0
-	Peningkatan Kesetaraan Penggunaan Metode Kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	1.055.266.000	1.055.266.000	0
-	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1.017.975.000	541.198.000	(476.777.000)



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
-	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	15.800.000	15.800.000	0
-	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	416.472.000	416.472.000	0
19	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	656.500.000	906.500.000	250.000.000
-	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	200.000.000	450.000.000	250.000.000
-	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	456.500.000	456.500.000	0
VIII	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.059.300.000	1.175.092.995	115.792.995
20	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1.059.300.000	336.547.995	(722.752.005)
-	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	0	9.600.000	9.600.000
-	engadaan Sarana Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	300.000.000	326.947.995	26.947.995
-	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	759.300.000	0	(759.300.000)



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
21	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	0	838.545.000	838.545.000
-	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon	0	377.000.000	377.000.000
-	Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	0	461.545.000	461.545.000
TOTAL		9.056.383.654	9.875.616.849	819.233.195

10. DINAS PERHUBUNGAN

Alokasi anggaran pada Dinas Perhubungan semula sebesar **Rp.1.971.064.486.-** bertambah sebesar **Rp.209.028.800.-** menjadi **Rp. 2.180.093.286.-** dengan rincian:

- Belanja Operasi semula **Rp. 1.908.793.486.-** bertambah sebesar **Rp. 209.028.800.-** menjadi **Rp. 2.117.822.286.-**.
- Belanja Modal semula **Rp. 62.271.000.-** tidak mengalami perubahan.



Tabel 2.11
Penjabaran Perubahan Anggaran Dinas Perhubungan
Tahun Anggaran 2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
	BELANJA MODAL	62.271.000	62.271.000	0
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.873.064.486	2.082.093.286	209.028.800
1	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	60.181.000	60.181.000	0
-	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	30.151.000	30.151.000	0
-	Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	30.030.000	30.030.000	0
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.578.264.486	1.644.293.286	66.028.800
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.507.004.486	1.573.033.286	
-	Pelaksanaan Penata Usahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	71.260.000	71.260.000	
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	11.400.000	11.400.000	
-	Pengaman Barang Milik Daerah SKPD	11.400.000	11.400.000	0
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	89.520.000	89.520.000	0
-	Penyediaan komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan Kantor	1.075.000	1.075.000	0
-	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	22.861.000	22.861.000	0
-	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	15.148.000	15.148.000	0
-	Penyediaan Bahan/Material	12.000.000	12.000.000	0



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
-	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	38.436.000	38.436.000	0
5	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah	25.429.000	25.429.000	0
-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	390.000	390.000	0
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.039.000	25.039.000	0
6	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	108.270.000	251.270.000	143.000.000
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	108.270.000	251.270.000	143.000.000
II	PEYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	73.000.000	73.000.000	0
6	Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kab/kota	50.000.000	50.000.000	0
-	Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kab/kota	50.000.000	50.000.000	0
7	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	23.000.000	23.000.000	0
-	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	23.000.000	23.000.000	0
III	PENGELOLAAN PELAYARAN	25.000.000	25.000.000	0
8	Pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan local	25.000.000	25.000.000	0
-	Pengawasan pengoperasian pelabuhan pengumpan local	25.000.000	25.000.000	0
TOTAL		1.971.064.486	2.180.093.286	209.028.800



11. DINAS KOMUNIKASI. INFORMATIKA. STATISTIK DAN PERSANDIAN

Alokasi anggaran pada Dinas Komuniikasi. Informatika. Statistik dan Persandian semula **Rp. 2.372.913.823.-** bertambah sebesar **Rp. 348.350.200.-** menjadi **Rp. 2.721.264.023.-** dengan rincian:

a. Belanja Operasi semula **Rp.2.372.913.823.-** bertambah sebesar **Rp.205.734.200.-** menjadi **Rp. 2.578.648.023.-.**

b. Belanja Modal semula **Rp.0.-** bertambah sebesar **Rp. 142.616.000.-** menjadi **Rp. 142.616.000.-.**

Tabel 2.12
Penjabaran Perubahan Anggaran
Dinas Komunikasi. Informatika. Statistik dan Persandian
Tahun Anggaran 2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
I	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.088.276.324	2.229.176.524	140.900.200
1	Perencanaan. Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.502.710	7.502.710	0
-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.709.700	3.709.700	0
-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.793.010	3.793.010	0
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.901.867.814	2.042.768.014	140.900.200
-	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	1.845.827.814	1.986.728.014	140.900.200
-	Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	56.040.000	56.040.000	0
3	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	9.000.000	9.000.000	0
-	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	9.000.000	9.000.000	0



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	54.134.300	54.134.300	0
-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.495.000	20.495.000	0
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.200.300	10.200.300	0
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	23.439.000	23.439.000	0
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60.721.500	60.721.500	0
-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.991.000	3.991.000	0
-	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	56.730.500	56.730.500	0
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	55.050.000	55.050.000	0
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	55.050.000	55.050.000	0
II	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	25.513.000	100.513.000	75.000.000
6	PENGLOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	25.513.000	100.513.000	75.000.000
-	Pelayanan Informasi Publik	25.513.000	100.513.000	75.000.000
III	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	206.006.999	338.456.999	132.450.000
7	Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	206.006.999	338.456.999	132.450.000
-	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	106.880.000	106.880.000	0
-	Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	99.126.999	231.576.999	132.450.000



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
IV	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	29.127.500	29.127.500	0
8	Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	29.127.500	29.127.500	0
-	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	14.739.500	14.739.500	0
-	Membangun Metadata Statistik Sektoral	14.388.000	14.388.000	0
V	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	23.990.000	23.990.000	0
9	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	23.990.000	23.990.000	0
-	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	23.990.000	23.990.000	0
TOTAL		2.372.913.823	2.721.264.023	348.350.200



12. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Alokasi anggaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa semula **Rp.2.609.695.526,-** bertambah sebesar **Rp.325.018.708,-** menjadi **Rp.2.934.714.234,-** dengan rincian:

- a. Belanja Operasi semula **Rp.2.549.395.526,-** bertambah sebesar **Rp.325.018.708,-** menjadi **Rp.2.874.414.234,-**.
- b. Belanja Modal semula **Rp.60.300.000,-** tidak mengalami perubahan.

Tabel 2.13
Penjabaran Perubahan Anggaran
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun Anggaran 2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.137.695.526	2.297.620.234	159.924.708
1	Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	53.019.000	53.019.000	0
-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.000.000	50.000.000	0
-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.019.000	3.019.000	0
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.905.640.576	1.999.990.284	94.349.708
-	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	1.860.400.576	1.954.750.284	94.349.708
-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	45.240.000	45.240.000	0
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7.200.000	7.200.000	0



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
-	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	7.200.000	7.200.000	0
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	90.410.950	130.910.950	40.500.000
-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan	4.426.500	4.426.500	0
-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	0	40.500.000	40.500.000
-	Penyediaan bahan logistik kantor	20.068.150	20.068.150	0
-	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	26.499.300	26.499.300	0
-	Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	39.417.000	39.417.000	0
5	Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	38.425.000	38.425.000	0
-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.625.000	1.625.000	0
-	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	36.800.000	36.800.000	0
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	43.000.000	68.075.000	25.075.000
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	43.000.000	68.075.000	25.075.000
II	PENATAAN DESA	69.000.000	119.000.000	50.000.000
7	Penyelenggaraan Penataan Desa	69.000.000	119.000.000	50.000.000
-	Pembentukan. Penghapusan. Penggabungan. dan Perubahan Status Desa	69.000.000	119.000.000	50.000.000
III	ADMINISTRASI PEMERINTAH DESA	130.000.000	130.000.000	0
8	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintah desa	130.000.000	130.000.000	0



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
-	Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	25.000.000	25.000.000	0
-	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	25.000.000	25.000.000	0
-	Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja sama Desa	30.000.000	30.000.000	0
-	Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	25.000.000	25.000.000	0
-	Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	25.000.000	25.000.000	0
IV	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN KEMASYARAKAT HUKUM ADAT	273.000.000	388.094.000	115.094.000
9	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak dibidang Pembangunan Desa dan Lembaga Adat Tingkat daerah Provinsi serta Pemberdayan Masyarakat Hukum Adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam kabupaten	273.000.000	388.094.000	115.094.000
-	Fasilitas Penataan, Pemberdayan dan Pembangunan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT.RW.PKK.Posyandu.LPM. dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	23.500.000	23.500.000	0
-	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT.RW.PKK.Posyandu.LPM. dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	142.000.000	142.000.000	0



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
-	Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	7.500.000	7.500.000	0
-	Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	100.000.000	215.094.000	115.094.000
TOTAL		2.609.695.526	2.934.714.234	325.018.708

13. DINAS SOSIAL

Alokasi anggaran pada Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao semula sebesar **Rp.2.392.779.483.-** bertambah sebesar **Rp.80.932.400.-** menjadi sebesar **Rp.2.473.711.883.-** dengan rincian :

a. Belanja Operasi semula **Rp.2.392.779.483.-** bertambah sebesar **Rp.80.932.400.-** menjadi sebesar **Rp.2.473.711.883.-**.

Tabel 2.14
Penjabaran Perubahan Anggaran Dinas Sosial
Tahun Anggaran 2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
I	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.912.535.083	1.993.467.483	80.932.400
1	Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.418.000	35.418.000	0
-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.018.000	25.018.000	0



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.400.000	10.400.000	0
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.721.024.133	1.771.956.533	50.932.400
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.669.224.133	1.720.156.533	50.932.400
-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	51.800.000	51.800.000	0
3	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	11.100.000	11.100.000	0
-	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	11.100.000	11.100.000	0
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	50.577.100	50.577.100	0
-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	500.000	500.000	0
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.197.100	6.197.100	0
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	43.880.000	43.880.000	0
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19.865.850	19.865.850	0
-	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	19.865.850	19.865.850	0
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	74.550.000	104.550.000	30.000.000
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	73.950.000	103.950.000	30.000.000
-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	600.000	600.000	0
II	PEMBERDAYAAN SOSIAL	32.340.000	32.340.000	0



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
7	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	32.340.000	32.340.000	0
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	32.340.000	32.340.000	0
III	REHABILITASI SOSIAL	50.162.000	50.162.000	0
8	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar. Anak Terlantar. Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial	20.000.000	20.000.000	0
-	Pemberian Bimbingan Sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar. Anak Terlantar. Lanjut usia terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	20.000.000	20.000.000	0
9	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks) Lainnya Bukan Korban Hiv/Aids Dan Napza Di Luar Panti Sosial	30.162.000	30.162.000	0
-	Pemberian Bimbingan Fisik. Mental. Spiritual dan Sosial	30.162.000	30.162.000	0
IV	PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	122.689.400	122.689.400	0
10	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	122.689.400	122.689.400	0
-	Pengelolaan Data Fakir Miskin Daerah Kabupaten/Kota	87.658.000	87.658.000	0
-	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	17.227.400	17.227.400	0



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
-	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	17.804.000	17.804.000	0
V	PENANGANAN BENCANA	275.053.000	275.053.000	0
11	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Dan Sosial Kabupaten/Kota	275.053.000	275.053.000	0
-	Penyediaan Makanan	275.053.000	275.053.000	0
TOTAL		2.392.779.483	2.473.711.883	80.932.400

14. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Alokasi anggaran pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata semula **Rp.5.824.925.633,-** bertambah sebesar **Rp.219.562.500,-** menjadi **Rp. 6.044.488.133,-** dengan rincian:

- Belanja Operasi semula **Rp.4.349.503.633,-** bertambah sebesar **Rp.219.562.500,-** menjadi **Rp.4.569.066.133.-**.
- Belanja Modal semula **Rp.1.475.422.000,-** tidak mengalami perubahan.

Tabel 2.15
Penjabaran Perubahan Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Tahun Anggaran 2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.221.839.152	2.291.401.652	69.562.500



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
1	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	78.035.000	115.035.000	37.000.000
-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	78.035.000	115.035.000	37.000.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.882.214.027	1.931.776.527	49.562.500
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.817.594.027	1.867.156.527	49.562.500
-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	64.620.000	64.620.000	0
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.200.000	10.200.000	0
-	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	10.200.000	10.200.000	0
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	143.259.125	143.259.125	0
-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.522.000	33.522.000	0
-	Penyediaan Bahan logistik kantor	21.371.500	21.371.500	0
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.030.625	11.030.625	0
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	77.335.000	77.335.000	0
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	64.215.000	47.215.000	(17.000.000)
-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	715.000	715.000	0
-	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	63.500.000	46.500.000	(17.000.000)
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	43.916.000	43.916.000	0
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	43.166.000	43.166.000	0



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	750.000	750.000	0
II	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	362.257.281	362.257.281	0
7	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	362.257.281	362.257.281	0
-	Pembinaan Sumber Daya Manusia. Lembaga. dan Pranata Tradisional	362.257.281	362.257.281	0
III	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	297.197.600	297.197.600	0
8	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	297.197.600	297.197.600	0
-	Penetapan Cagar Budaya	297.197.600	297.197.600	0
IV	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	1.778.482.000	2.023.984.000	245.502.000
9	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1.778.482.000	2.023.984.000	245.502.000
-	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	0	150.000.000	150.000.000
-	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1.563.610.000	1.563.610.000	0
-	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	214.872.000	310.374.000	95.502.000
V	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	201.000.000	201.000.000	0
10	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik. Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	201.000.000	201.000.000	0



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
-	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	201.000.000	201.000.000	0
VI	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	964.149.600	868.647.600	(95.502.000)
11	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	964.149.600	868.647.600	(95.502.000)
-	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	74.402.600	74.402.600	0
-	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	889.747.000	794.245.000	(95.502.000)
TOTAL		5.824.925.633	6.044.488.133	219.562.500

15. DINAS PERIKANAN

Alokasi anggaran pada Dinas Perikanan semula **Rp.6.885.642.689.-** bertambah sebesar **Rp.1.732.574.400.-** menjadi **Rp.8.618.217.089.-** dengan rincian:

- a. Belanja Operasi semula **Rp.6.527.342.689.-** bertambah sebesar **Rp.1.716.274.400.-** menjadi **Rp.8.243.617.089.-**.
- b. Belanja Modal semula **Rp.358.300.000.-** bertambah sebesar **Rp.16.300.000.-** menjadi **Rp.374.600.000.-**.



Tabel 2.16
Penjabaran Perubahan Anggaran Dinas Perikanan
Tahun Anggaran 2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.643.297.989	1.709.135.389	65.837.400
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.000.000	40.000.000	0
-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35.000.000	35.000.000	0
-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000	5.000.000	0
2	Kegiatan Administrasi keuangan Perangkat Daerah	1.357.323.047	1.423.160.447	65.837.400
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.271.109.047	1.336.946.447	65.837.400
-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	86.214.000	86.214.000	0
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.200.000	4.200.000	0
-	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4.200.000	4.200.000	0
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	102.310.000	102.310.000	0
-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.587.000	19.587.000	0
-	Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	21.118.000	21.118.000	0
-	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	61.605.000	61.605.000	0
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	46.296.642	46.296.642	0



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
-	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Listrik dan Air	46.296.642	46.296.642	0
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	93.168.300	93.168.300	0
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	93.168.300	93.168.300	0
II	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	2.456.839.900	2.690.839.900	234.000.000
7	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.456.839.900	267.145.000	(2.189.694.900)
-	Penyediaan Prsarana Usaha Perikanan Tangkap	2.456.839.900	267.145.000	(2.189.694.900)
8	Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	0	2.423.694.900	2.423.694.900
-	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	0	2.423.694.900	2.423.694.900
III	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	2.508.499.800	3.941.236.800	1.432.737.000
9	Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan kecil	187.500.000	187.500.000	0
-	Pemberian Pendampingan Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Informasi serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	187.500.000	187.500.000	0
10	Kegiatan Pengelolaan Pembudidaya Ikan	2.320.999.800	3.753.736.800	1.432.737.000



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
-	Penyediaan Prasana Pembudidaya Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	436.163.000	216.163.000	(220.000.000)
-	Penjamin Ketersediaan Sarana Pembudidaya Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.884.836.800	3.537.573.800	1.652.737.000
IV	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	277.005.000	277.005.000	0
11	Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	44.947.000	44.947.000	0
-	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	44.947.000	44.947.000	0
12	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota	232.058.000	232.058.000	0
-	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah/Kabupaten	232.058.000	232.058.000	0
TOTAL		6.885.642.689	8.618.217.089	1.732.574.400



16. DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Alokasi anggaran pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan semula **Rp.25.351.098.036.-** bertambah sebesar **Rp. 2.214.613.494.-** menjadi **Rp. 27.565.711.530.-** dengan rincian:

- a. Belanja Operasi semula **Rp.25.300.718.221.-** bertambah sebesar **Rp.2.214.613.494.-** menjadi **Rp.27.515.331.715.-**.
- b. Belanja Modal semula **Rp.50.379.815.-** tidak mengalami perubahan.

Tabel 2.17
Penjabaran Perubahan Anggaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Tahun Anggaran 2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.079.036.586	7.116.904.080	(962.132.506)
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.379.500	24.379.500	0
-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23.079.500	23.079.500	0
-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.300.000	1.300.000	0
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.772.333.271	6.810.200.765	(962.132.506)
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.699.253.271	6.737.120.765	(962.132.506)
-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	73.080.000	73.080.000	0
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12.000.000	12.000.000	0
-	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12.000.000	12.000.000	0



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	165.671.815	165.671.815	0
-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.650.000	2.650.000	0
-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	47.203.815	47.203.815	0
-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.941.000	15.941.000	0
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.900.000	9.900.000	0
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	89.977.000	89.977.000	0
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24.006.000	24.006.000	0
-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	650.000	650.000	0
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.356.000	23.356.000	0
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80.646.000	80.646.000	0
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	80.646.000	80.646.000	0
II	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	2.762.061.450	4.539.301.950	1.777.240.500
7	Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	1.953.086.000	3.730.326.500	1.777.240.500
-	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas. Teknologi dan Spesifik Lokasi	1.953.086.000	3.730.326.500	1.777.240.500



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
8	Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan. Tumbuhan. dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	808.975.450	808.975.450	0
-	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	470.506.000	470.506.000	0
-	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	212.524.450	212.524.450	0
-	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	125.945.000	125.945.000	0
III	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	13.350.000.000	13.562.005.500	212.005.500
9	Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	13.350.000.000	13.562.005.500	212.005.500
-	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	2.185.796.000	2.396.055.500	210.259.500
-	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	3.500.000.000	3.500.000.000	0
-	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	7.664.204.000	7.665.950.000	1.746.000
IV	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	275.000.000	275.000.000	0
10	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	275.000.000	275.000.000	0
-	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	175.000.000	175.000.000	0
-	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	100.000.000	100.000.000	0
V	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	735.000.000	1.922.500.000	1.187.500.000



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
11	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	150.000.000	180.000.000	30.000.000
-	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	75.000.000	75.000.000	0
-	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	25.000.000	25.000.000	0
-	Pemantauan Stok Pangan	50.000.000	80.000.000	30.000.000
12	Kegiatan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	585.000.000	1.742.500.000	1.157.500.000
-	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	585.000.000	1.742.500.000	1.157.500.000
VI	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	75.000.000	75.000.000	0
13	Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	15.000.000	15.000.000	0
-	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	15.000.000	15.000.000	0
14	Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	60.000.000	60.000.000	0
-	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	60.000.000	60.000.000	0
VII	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	75.000.000	75.000.000	0



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
15	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	75.000.000	75.000.000	0
-	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	75.000.000	75.000.000	0
TOTAL		25.351.098.036	27.565.711.530	2.214.613.494

17. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Alokasi anggaran pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan semula **Rp.1.830.985.773.-** bertambah sebesar **Rp.85.494.600.-** menjadi **Rp.1.916.480.373.-** dengan rincian:

- Belanja Operasi semula **Rp.1.817.995.773.-** bertambah sebesar **Rp.85.494.600.-** menjadi **Rp.1.903.490.373.-**.
- Belanja Modal semula **Rp.12.990.000.-** tidak mengalami perubahan.



Tabel 2.18
Penjabaran Perubahan Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Tahun Anggaran 2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.319.599.073	1.380.093.673	60.494.600
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.100.000	5.100.000	0
-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.100.000	5.100.000	0
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.171.923.873	1.232.418.473	60.494.600
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.130.043.873	1.190.538.473	60.494.600
-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	41.880.000	41.880.000	0
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.400.000	5.400.000	0
-	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5.400.000	5.400.000	0
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	75.111.200	75.111.200	0
-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.386.000	16.386.000	0
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.814.200	6.814.200	0
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	51.911.000	51.911.000	0
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	23.464.000	23.464.000	0
-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	754.000	754.000	0
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.710.000	22.710.000	0



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	38.600.000	38.600.000	0
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	38.600.000	38.600.000	0
II	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	464.970.700	489.970.700	25.000.000
7	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/kota	421.730.200	446.730.200	25.000.000
-	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	46.463.000	71.463.000	25.000.000
-	Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	328.134.200	328.134.200	0
-	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	47.133.000	47.133.000	0
8	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	43.240.500	43.240.500	0
-	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	3.570.000	3.570.000	0
-	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	39.670.500	39.670.500	0
III	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	46.416.000	46.416.000	0
9	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	13.021.000	13.021.000	0
-	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	13.021.000	13.021.000	0



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
10	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/ Kota	33.395.000	33.395.000	0
-	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	33.395.000	33.395.000	0
TOTAL		1.830.985.773	1.916.480.373	85.494.600

18. DINAS PETERNAKAN

Alokasi anggaran pada Dinas Peternakan semula **Rp.11.968.263.376.-** bertambah sebesar **Rp.240.946.500.-** menjadi **Rp.12.209.209.876.-** dengan rincian:

- Belanja Operasi semula **Rp.11.956.063.376.-** bertambah sebesar **Rp.240.946.500.-** menjadi **Rp.12.197.009.876.-**
- Belanja Modal semula **Rp.12.200.000.-** tidak mengalami perubahan.



Tabel 2.19
Penjabaran Perubahan Anggaran Dinas Peternakan
Tahun Anggaran 2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.124.226.376	4.365.172.876	240.946.500
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	73.823.000	73.823.000	0
-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.000.000	50.000.000	0
-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.823.000	23.823.000	0
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.793.488.376	4.034.434.876	240.946.500
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.727.488.376	3.968.434.876	240.946.500
-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	66.000.000	66.000.000	0
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.200.000	4.200.000	0
-	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4.200.000	4.200.000	0
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	146.115.000	146.115.000	0
-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000	25.000.000	0
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.900.000	9.900.000	0
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	111.215.000	111.215.000	0
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	45.000.000	45.000.000	0
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	45.000.000	45.000.000	0



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	61.600.000	61.600.000	0
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	60.000.000	60.000.000	0
-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.600.000	1.600.000	0
II	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.044.000.000	1.044.000.000	0
7	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	944.000.000	944.000.000	0
-	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	944.000.000	944.000.000	0
8	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kab./Kota	60.000.000	60.000.000	0
-	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	60.000.000	60.000.000	0
9	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak dalam Kab./Kota	40.000.000	40.000.000	0
-	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	40.000.000	40.000.000	0
III	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	4.400.000.000	4.400.000.000	0
10	Pembangunan Prasarana Pertanian	4.400.000.000	4.400.000.000	0
-	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	4.400.000.000	4.400.000.000	0



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
IV	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	2.299.175.000	2.299.175.000	0
11	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kab./Kota	579.000.000	579.000.000	0
-	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	579.000.000	579.000.000	0
12	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.715.175.000	1.715.175.000	0
-	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	1.715.175.000	1.715.175.000	0
13	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	5.000.000	5.000.000	0
-	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	5.000.000	5.000.000	0
V	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	100.862.000	100.862.000	0
14	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	100.862.000	100.862.000	0
-	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan	100.862.000	100.862.000	0
TOTAL		11.968.263.376	12.209.209.876	240.946.500



19. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alokasi anggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja semula **Rp.6.665.687.275.-** bertambah sebesar **Rp.492.627.400.-** menjadi **Rp.7.158.314.675.-** dengan rincian:

- a. Belanja Operasi semula **Rp.6.648.402.275.-** bertambah sebesar **Rp. 492.627.400.-** menjadi **Rp. 7.141.029.675.-**.
- b. Belanja Moda semula **Rp. 17.285.000,-** tidak mengalami perubahan.

Tabel 2.20
Penjabaran Perubahan Anggaran
Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.045.757.875	2.288.385.275	242.627.400
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.005.000	8.005.000	0
-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.005.000	5.005.000	0
-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000	3.000.000	0
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.873.325.175	2.115.952.575	242.627.400
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.807.565.175	2.050.192.575	242.627.400
-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	65.760.000	65.760.000	0
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	9.600.000	9.600.000	0
-	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	9.600.000	9.600.000	0
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	67.422.700	67.422.700	0
-	Penyediaan peralatan dan Perlengkapan	23.435.000	23.435.000	0



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
	Kantor			
-	Penyediaa bahan logistik Kantor	11.192.000	11.192.000	0
-	Penyediaa barang cetak dan penggandaan	10.835.700	10.835.700	0
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	21.960.000	21.960.000	0
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerinthan Daerah	1.690.000	1.690.000	0
-	Penyediaan Jasa surat menyurat	1.690.000	1.690.000	0
6	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	85.715.000	85.715.000	0
-	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan dinas atau Dinas Jabatan	9.435.000	9.435.000	0
-	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	73.330.000	73.330.000	0
-	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	2.950.000	2.950.000	0
II	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4.584.724.400	4.834.724.400	250.000.000
7	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.554.400.000	4.804.400.000	250.000.000
-	Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota	33.540.000	33.540.000	0
-	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	400.000.000	500.000.000	100.000.000



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
-	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketertraman dan ketertiban umum	3.800.000.000	3.950.000.000	150.000.000
-	Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui diteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan	320.860.000	320.860.000	0
8	Penegakan Peraturan Daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota	30.324.400	30.324.400	0
-	Sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peratiran bupati/walikota	19.585.000	19.585.000	0
-	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota	10.739.400	10.739.400	0
III	PROGRAM PENCEGAHAN, PENAGGULANGAN, PENYELAMATAN, KEBAKARAN DAN PENYALAMATAN NON KEBAKARAN	35.205.000	35.205.000	0
9	Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	35.205.000	35.205.000	0
-	Pemedaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	35.205.000	35205000	0
TOTAL		6.665.687.275	7.158.314.675	492.627.400



20. SEKRETARIAT DPRD

Alokasi anggaran pada Sekretariat DPRD semula **Rp.27.328.582.321,-** bertambah sebesar **Rp.2.473.263.373,-** menjadi **Rp. 29.801.845.694,-** dengan rincian:

a. Belanja Operasi semula **Rp.27.328.582.321,-** bertambah sebesar **Rp.2.473.263.373,-** menjadi **Rp.29.801.845.694.-.**

Tabel 2.21
Penjabaran Perubahan Anggaran Sekretariat DPRD
Tahun Anggaran 2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.295.161.794	16.434.636.094	139.474.300
1	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	9.760.000	9.760.000	0
-	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	5.626.000	5.626.000	0
-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.134.000	4.134.000	0
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.652.455.641	1.781.429.941	128.974.300
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.547.275.641	1.676.249.941	128.974.300
-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	105.180.000	105.180.000	0
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	14.625.000	14.625.000	0
-	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	14.625.000	14.625.000	0



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	225.103.269	225.103.269	0
-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.015.000	10.015.000	0
-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	102.561.000	102.561.000	0
-	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	14.827.269	14.827.269	0
-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	16.500.000	16.500.000	0
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	81.200.000	81.200.000	0
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	207.545.714	207.545.714	0
-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	17.281.714	17.281.714	0
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	190.264.000	190.264.000	0
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	421.415.000	421.415.000	0
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	391.765.000	391.765.000	0
-	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	12.690.000	12.690.000	0
-	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	10.370.000	10.370.000	0
-	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	6.590.000	6.590.000	0
7	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	11.700.888.900	11.851.388.900	150.500.000
-	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan	10.564.254.525	10.714.754.525	150.500.000



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
	DPRD			
-	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	695.753.375	695.753.375	0
-	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	440.881.000	440.881.000	0
8	Layanan Administrasi DPRD	2.063.368.270	1.923.368.270	(140.000.000)
-	Fasilitasi Fraksi DPRD	90.012.120	90.012.120	0
-	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	293.356.150	293.356.150	0
-	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	1.680.000.000	1.540.000.000	(140.000.000)
II	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	11.033.420.527	13.367.209.600	2.333.789.073
9	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	4.325.335.400	4.325.335.400	0
-	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	228.343.900	228.343.900	0
-	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	4.079.816.500	4.079.816.500	0
-	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	17.175.000	17.175.000	0
10	Pembahasan Kebijakan Anggaran	266.500.000	266.500.000	0
-	Pembahasan KUA dan PPAS	14.985.000	14.985.000	0
-	Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS	14.985.000	14.985.000	0
-	Pembahasan APBD	91.265.000	91.265.000	0
-	Pembahasan APBD Perubahan	54.000.000	54.000.000	0
-	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	91.265.000	91.265.000	0
11	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	50.725.200	50.725.200	0
-	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	50.725.200	50.725.200	0



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
12	Peningkatan Kapasitas DPRD	1.253.810.927	1.415.480.000	161.669.073
-	Pendalaman Tugas DPRD	927.789.347	1.115.480.000	187.690.653
-	Penyediaan Kelompok Pakar Tim Ahli	90.000.000	90.000.000	0
-	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	210.000.000	210.000.000	0
-	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	26.021.580	0	(26.021.580)
13	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	3.049.560.000	3.049.560.000	0
-	Kunjungan Kerja dalam Daerah	191.400.000	191.400.000	0
-	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	11.790.000	11.790.000	0
-	Pelaksanaan Reses	2.846.370.000	2.846.370.000	0
14	Fasilitasi Tugas DPRD	2.087.489.000	4.259.609.000	2.172.120.000
-	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	2.012.489.000	4.184.609.000	2.172.120.000
-	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	75.000.000	75.000.000	0
TOTAL		27.328.582.321	29.801.845.694	2.473.263.373

21. INSPEKTORAT

Alokasi anggaran pada Inspektorat semula **Rp. 3.923.369.791.-** bertambah sebesar **Rp.229.749.496.-** menjadi **Rp. 4.153.119.287.-** dengan rincian:

- Belanja Operasi semula **Rp. 3.904.055.791.-** bertambah sebesar **Rp. 229.749.496.-** menjadi **Rp. 4.133.805.287,-**.
- Belanja Modal semula **Rp. 19.314.000.-** tidak mengalami perubahan.



Tabel 2.22
Penjabaran Perubahan Anggaran Inspektorat
Tahun Anggaran 2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
I	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.969.151.491	3.138.900.987	169.749.496
1	Perencanaan. Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.450.000	3.450.000	0
-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.725.000	1.725.000	0
-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.725.000	1.725.000	0
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.736.373.941	2.906.123.437	169.749.496
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.685.733.941	2.855.483.437	169.749.496
-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan Daerah	50.640.000	50.640.000	0
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.200.000	4.200.000	0
-	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.200.000	4.200.000	0
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.693.200	5.693.200	0
-	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5.693.200	5.693.200	0
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	105.310.800	105.310.800	0
-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.435.500	2.435.500	0
-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.878.300	18.878.300	0
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.000.000	11.000.000	0



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	66.037.000	66.037.000	0
-	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	6.960.000	6.960.000	0
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19.314.000	19.314.000	0
-	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	19.314.000	19.314.000	0
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	32.477.000	32.477.000	0
-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	906.000	906.000	0
-	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	31.571.000	31.571.000	0
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	62.332.550	62.332.550	0
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.	50.232.700	50.232.700	0
-	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	12.099.850	12.099.850	0
II	PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	946.718.300	1.006.718.300	60.000.000
9	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	808.800.500	868.800.500	60.000.000
-	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	149.458.500	189.458.500	40.000.000
-	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	144.034.000	164.034.000	20.000.000
-	Reviu Laporan Kinerja	33.150.000	33.150.000	0
-	Reviu Laporan Keuangan	150.960.000	150.960.000	0
-	Pengawasan Desa	88.535.200	88.535.200	0



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
-	Kerjasama Pengawasan Internal	98.186.000	98.186.000	0
-	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	144.476.800	144.476.800	0
10	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	137.917.800	137.917.800	0
-	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah	4.151.000	4.151.000	0
-	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	133.766.800	133.766.800	0
III	PERUMUSAN KEBIJAKAN. PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	7.500.000	7.500.000	0
11	Pendampingan dan Asistensi	7.500.000	7.500.000	0
-	Koordinasi. Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	7.500.000	7.500.000	0
TOTAL		3.923.369.791	4.153.119.287	229.749.496



22. BADAN PERENCANAAN. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Alokasi anggaran pada Badan Perencanaan. Penelitian dan Pengembangan Daerah semula **Rp. 5.945.994.998,-** bertambah sebesar **Rp. 515.197.020,-** menjadi **Rp. 6.461.192.018,-** dengan rincian:

- a. Belanja Operasi semula **Rp.5.870.847.998,-** bertambah sebesar **Rp.420.722.000,-** menjadi **Rp.6.291.569.998.-**.
- b. Belanja Modal semula **Rp. 75.147.000,-** bertambah sebesar **Rp. 94.475.020,-** menjadi **Rp. 169.622.020,-**.

Tabel 2.23
Penjabaran Perubahan Anggaran
Badan Perencanaan. Penelitian dan Pengembangan Daerah
Tahun Anggaran 2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.208.776.860	2.737.828.993	529.052.133
1	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	12.549.580	12.549.580	0
-	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	10.079.715	10.079.715	0
-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.469.865	2.469.865	0
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.968.567.222	2.375.697.335	407.130.113
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.902.909.162	2.310.039.275	407.130.113
-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	65.658.060	65.658.060	0
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	11.160.000	11.160.000	0
-	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	11.160.000	11.160.000	0



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	101.485.648	195.960.668	94.475.020
-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.047.950	2047950	0
-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	77.747.000	172.222.020	94.475.020
-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.030.515	10.030.515	0
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.700.183	5.700.183	0
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.960.000	5.960.000	0
5	Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	63.995.000	63.995.000	0
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	63.995.000	63.995.000	0
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	51.019.410	78.466.410	27.447.000
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45.443.000	69.449.000	24.006.000
-	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	3.100.000	6.541.000	3.441.000
-	Pemeliharaan / rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	2.476.410	2.476.410	0
II	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	935.871.864	922.001.864	(13.870.000)
7	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	703.269.202	689.399.202	(13.870.000)
-	Pelaksanaan Konsultasi Publik	16.009.315	16.009.315	0
-	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	45.145.500	45.145.500	0
-	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	96.546.820	82.676.820	(13.870.000)



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
-	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	98.947.567	98947567	0
-	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	446.620.000	446620000	0
8	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	184.714.222	184.714.222	0
-	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	184.714.222	184.714.222	0
9	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	47.888.440	47.888.440	0
-	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan di Bidang Pembangunan Daerah	47.888.440	47.888.440	0
III	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	385.380.268	385.380.268	0
10	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	164.509.622	164.509.622	0
-	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	14.999.942	14.999.942	0
-	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	32.971.252	32.971.252	0
-	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	14.999.980	14.999.980	0
-	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	101.538.448	101.538.448	0



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
11	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	108.923.546	108.923.546	0
-	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	9.999.710	9.999.710	0
-	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	52.250.757	52.250.757	0
-	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	9.999.710	9.999.710	0
-	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	36.673.369	36.673.369	0
12	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	111.947.100	111.947.100	0
-	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	10.000.000	10.000.000	0
-	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	30.572.400	30.572.400	0
-	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	9.999.800	9.999.800	0
-	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	61.374.900	61.374.900	0
IV	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	2.401.992.506	2.402.007.393	14.887



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
13	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	1.955.527.539	1.955.527.539	0
-	Fasilitas Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	659.614.375	659.614.375	0
-	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	120.000.000	120.000.000	0
-	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan / atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	755.801.600	755.801.600	0
-	Fasilitas dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	420.111.564	420.111.564	0
14	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	216.095.590	216.110.477	14.887
-	Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	216.095.590	216.110.477	14.887
15	Pengembangan inovasi dan teknologi	230.369.377	230.369.377	
-	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	230.369.377	230.369.377	
V	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	13.973.500	13.973.500	0
16	Perencanaan dan Fasilitas Kerja Sama	13.973.500	13.973.500	0
-	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	13.973.500	13.973.500	0
TOTAL		5.945.994.998	6.461.192.018	515.197.020



23. BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Alokasi anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah semula **Rp.191.171.995.021.-** berkurang sebesar **Rp.8.505.577.104.-** menjadi **Rp.182.666.417.917.-** dengan rincian:

- a. Belanja Operasi semula **Rp.32.099.383.521.-** berkurang sebesar **Rp.10.267.838.423.-** menjadi **Rp.21.831.545.098.-.**
- b. Belanja Modal semula **Rp.17.879.500.-** bertambah sebesar **Rp. 132.012.000.-** menjadi **Rp.149.891.500.-.**
- c. Belanja Tidak Terduga semula **Rp.3.500.000.000.-** berkurang sebesar **Rp.1.693.630.681.-** menjadi **Rp.1.806.369.319.-.**
- d. Belanja Transfer semula **Rp.155.554.732.000.-** bertambah sebesar **Rp.3.323.880.000.-** menjadi **Rp.158.878.612.000.-.**

Tabel 2.24

**Penjabaran Perubahan Anggaran Daerah Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah
Sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2024**

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	28.317.263.871	17.600.434.448	(10.716.829.423)
1	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	112.434.600	146.934.600	34.500.000
-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	62.624.600	97.124.600	34.500.000



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	41.220.000	41.220.000	0
-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.590.000	8.590.000	0
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	27.786.491.801	16.961.162.378	(10.825.329.423)
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	27.487.773.801	16.627.444.378	(10.860.329.423)
-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	289.088.000	324.088.000	35.000.000
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.630.000	9.630.000	0
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	18.000.000	18.000.000	0
-	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	18.000.000	18.000.000	0
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	252.623.470	296.623.470	44.000.000
-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60.896.820	60.896.820	0
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	54.739.650	54.739.650	0
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	136.987.000	180.987.000	44.000.000
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	44.400.000	44.400.000	0
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	44.400.000	44.400.000	0
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	103.314.000	133.314.000	30.000.000
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	90.064.000	120.064.000	30.000.000



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.250.000	13.250.000	0
II	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	162.293.052.150	164.458.754.469	2.165.702.319
7	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.959.963.150	2.265.416.150	305.453.000
-	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	115.492.500	162.842.500	47.350.000
-	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	112.690.650	158.540.650	45.850.000
-	Koordinasi, Penyusunan dan Verikasi RKA SKPD	113.836.000	134.236.000	20.400.000
-	Koordinasi, Penyusunan dan Verikasi Perubahan RKA SKPD	134.535.000	178.735.000	44.200.000
-	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA - SKPD	11.622.000	11.622.000	0
-	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA - SKPD	11.418.000	11.418.000	0
-	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	425.062.100	425.062.100	0
-	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	405.690.500	553.343.500	147.653.000
-	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	50.462.000	50.462.000	0
-	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	82.318.400	82.318.400	0
-	Koordinasi Perencanaan Anggaran	22.480.000	22.480.000	0



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
	Pembiayaan			
-	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota	474.356.000	474.356.000	0
8	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	576.811.500	741.811.500	165.000.000
-	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	300.915.000	365.915.000	65.000.000
-	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	55.323.000	55.323.000	0
-	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	55.040.500	155.040.500	100.000.000
-	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	56.109.000	56.109.000	0
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan / Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	50.000.000	50.000.000	0
-	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait.	59.424.000	59.424.000	0
9	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	654.878.000	719.878.000	65.000.000
-	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	62.573.000	62.573.000	0



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
-	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	56.836.000	56.836.000	0
-	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	78.461.000	78.461.000	0
-	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	151.082.000	216.082.000	65.000.000
-	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten / Kota	250.748.000	250.748.000	0
-	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	55.178.000	55.178.000	0
10	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	159.054.732.000	160.684.981.319	1.630.249.319
-	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	152.935.009.400	156.258.889.400	3.323.880.000
-	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	3.500.000.000	1.806.369.319	(1.693.630.681)
-	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	2.619.722.600	2.619.722.600	0
11	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	46.667.500	46.667.500	0



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
-	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	46.667.500	46.667.500	0
III	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	561.679.000	607.229.000	45.550.000
12	Pengelolaan Barang Milik Daerah	561.679.000	607.229.000	45.550.000
-	Penyusunan Standar Harga	117.615.000	117.615.000	0
-	Penatausahaan Barang Milik Daerah	79.660.900	79.660.900	0
-	Inventarisasi Barang Milik Daerah	50.500.000	96.050.000	45.550.000
-	Pengamanan Barang Milik Daerah	61.825.000	61.825.000	0
-	Penilaian Barang Milik Daerah	56.660.000	56.660.000	0
-	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	104.731.000	104.731.000	0
-	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	64.305.000	64.305.000	0
-	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	26.382.100	26.382.100	0
TOTAL		191.171.995.021	182.666.417.917	(8.505.577.104)



24. BADAN PENDAPATAN DAERAH

Alokasi anggaran pada Badan Pendapatan Daerah semula **Rp.5.695.491.782.-** bertambah sebesar **Rp. 279.513.350.-** menjadi **Rp. 5.975.005.132.-** dengan rincian:

- a. Belanja Operasi semula **Rp.5.693.349.482.-** bertambah sebesar **Rp.220.794.350.-** menjadi **Rp. 5.914.143.832,-**.
- b. Belanja Modal semula **Rp.2.142.300.-** bertambah sebesar **Rp.58.719.000.-** menjadi **Rp.60.861.300.-**.

Tabel 2.25
Penjabaran Perubahan Anggaran Badan Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran 2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	4.823.665.759	5.050.598.659	226.932.900
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	37.540.955	37.540.955	0
-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	31.469.913	31.469.913	0
-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.071.042	6.071.042	0
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.437.847.364	4.586.067.264	148.219.900
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.373.527.364	4.521.747.264	148.219.900
-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	64.320.000	64.320.000	0



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	26.120.000	26.120.000	0
-	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	26.120.000	26.120.000	0
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	240.571.840	299.290.840	58.719.000
-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	58.719.000	58.719.000
-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.366.950	14.366.950	0
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	174.883.890	174.883.890	0
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	51.321.000	51.321.000	0
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	33.530.000	33.530.000	0
-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.105.000	1.105.000	0
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32.425.000	32.425.000	0
6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48.055.600	68.049.600	19.994.000
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	41.395.600	61.389.600	19.994.000
-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.660.000	6.660.000	0
II	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	871.826.023	924.406.473	52.580.450
7	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	871.826.023	924.406.473	52.580.450
-	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	50.970.732	50.970.732	0



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
-	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	387.219.907	439.800.357	52.580.450
-	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	219.893.885	219.893.885	0
-	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	134.596.588	134.596.588	0
-	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	79.144.911	79.144.911	0
TOTAL		5.695.491.782	5.975.005.132	279.513.350

25. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Alokasi anggaran pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah semula **Rp.4.482.708.334.-** bertambah sebesar **Rp.406.037.900.-** menjadi **Rp. 4.888.746.234** dengan rincian:

a. Belanja Operasi semula **Rp.4.482.708.334.-** bertambah sebesar **Rp.406.037.900.-** menjadi **Rp. 4.888.746.234.-.**



Tabel 2.26
Penjabaran Perubahan Anggaran
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Tahun Anggaran 2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.374.919.602	2.437.071.502	62.151.900
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.538.750	34.538.750	0
-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.000.000	25.000.000	0
-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.538.750	9.538.750	0
2	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	2.081.847.782	2.124.496.682	42.648.900
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.015.442.782	2.058.091.682	42.648.900
-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	66.405.000	66.405.000	0
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	13.500.000	13.500.000	0
-	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	13.500.000	13.500.000	0
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	179.643.770	194.136.770	14.493.000
-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.395.685	30.395.685	0
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.445.085	25.445.085	0
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	123.803.000	138.296.000	14.493.000
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	13.200.000	13.200.000	0



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.200.000	13.200.000	0
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	52.189.300	57.199.300	5.010.000
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	47.660.500	52.670.500	5.010.000
-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.528.800	4.528.800	0
II	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.779.110.779	2.122.996.779	343.886.000
7	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	202.223.719	546.109.719	343.886.000
-	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	16.427.033	16.427.033	0
-	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	154.743.179	498.629.179	343.886.000
-	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	18.800.901	18.800.901	0
-	Pengelolaan Data Kepegawaian	12.252.606	12.252.606	0
8	Mutasi dan Promosi ASN	272.446.855	272.446.855	0
-	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	43.367.210	43.367.210	0
-	Pengelolaan Promosi ASN	229.079.645	229.079.645	0
9	Pengembangan Kompetensi ASN	1.272.165.775	1.272.165.775	0
-	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	40.596.716	40.596.716	
-	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikat ASN	29.999.417	29.999.417	0
-	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	1.201.569.642	1.201.569.642	0



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
10	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	32.274.430	32.274.430	0
-	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	5.154.955	5.154.955	0
-	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	27.119.475	27.119.475	0
III	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	328.677.953	328.677.953	0
11	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	328.677.953	328.677.953	0
-	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	328.677.953	328.677.953	0
TOTAL		4.482.708.334	4.888.746.234	406.037.900

26. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Alokasi anggaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah semula **Rp.2.206.364.000,-** bertambah sebesar **Rp.378.215.500,-** menjadi **Rp.2.584.579.500,-** dengan rincian:

- Belanja Operasi semula **Rp. 2.188.864.000,-** bertambah sebesar **Rp.359.915.500,-** menjadi **Rp.2.548.779.500,-**
- Belanja Modal semula **Rp.17.500.000,-** bertambah sebesar **Rp.18.300.000,-** menjadi **Rp.35.800.000,-**



Tabel 2.27
Penjabaran Perubahan Anggaran
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tahun Anggaran 2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	1.289.614.000	1.443.818.000	154.204.000
1	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	6.635.400	6.635.400	0
-	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	4.430.400	4.430.400	0
-	Evaluasi kinerja perangkat daerah	2.205.000	2.205.000	0
2	Administrasi keuangan perangkat daerah	901.544.000	1.055.748.000	154.204.000
-	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	859.664.000	1.013.868.000	154.204.000
-	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	41.880.000	41.880.000	0
3	Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	9.000.000	9.000.000	0
-	Pengamanan barang milik daerah SKPD	9.000.000	9.000.000	0
4	Administrasi umum perangkat daerah	76.062.100	76.062.100	0
-	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	525.000	525.000	0
-	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	17.500.000	17.500.000	0
-	Penyediaan bahan logistik kantor	8.127.100	8.127.100	0
-	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	11.300.000	11.300.000	0
-	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	38.610.000	38.610.000	0



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
5	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	25.567.500	25.567.500	0
-	Penyediaan jasa surat menyurat	1.092.000	1.092.000	0
-	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	24.475.500	24.475.500	0
6	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	270.805.000	270.805.000	0
-	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	268.645.000	268.645.000	0
-	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	2.160.000	2.160.000	0
II	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	916.750.000	1.140.761.500	224.011.500
7	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	546.230.000	546.230.000	0
-	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten / kota	485.000.000	485.000.000	0
-	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana kabupaten / kota	61.230.000	61.230.000	0
8	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	370.520.000	594.531.500	224.011.500
-	Respon cepat darurat bencana kabupaten / kota	100.520.000	100.520.000	0
-	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	50.000.000	274.011.500	224.011.500
-	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	220.000.000	220.000.000	0
TOTAL		2.206.364.000	2.584.579.500	378.215.500



27. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Alokasi anggaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik semula **Rp. 22.209.005.600.-** bertambah sebesar **Rp. 3.320.250.181.-** menjadi **Rp. 25.529.255.781.-** dengan rincian:

a. Belanja Operasi semula **Rp.22.209.005.600.-** bertambah sebesar **Rp.3.320.250.181.-** menjadi **Rp.25.529.255.781.-**.

Tabel 2.28
Penjabaran Perubahan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Tahun Anggaran 2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
I	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.249.488.400	1.500.251.100	250.762.700
1	Perencanaan. Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.970.000	6.970.000	0
-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.970.000	6.970.000	0
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	980.839.700	1.231.602.400	250.762.700
-	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	916.159.700	1.166.922.400	250.762.700
-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Skpd	64.680.000	64.680.000	0
3	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	4.800.000	4.800.000	0
-	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4.800.000	4.800.000	0
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	191.547.700	191.547.700	0
-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.355.000	4.355.000	0



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.800.000	19.800.000	0
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.418.700	22.418.700	0
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	144.974.000	144.974.000	0
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.851.000	20.851.000	0
-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.495.000	1.495.000	0
-	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	19.356.000	19.356.000	0
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	44.480.000	44.480.000	0
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan. Pajak Dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	44.480.000	44.480.000	0
II	PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER BANGSA	676.501.000	761.478.000	84.977.000
7	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	676.501.000	761.478.000	84.977.000
-	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Pancasila, Wawasan kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	676.501.000	761.478.000	84.977.000
III	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	19.970.086.200	22.887.226.681	2.917.140.481



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
8	Perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di daerah	19.970.086.200	22.887.226.681	2.917.140.481
-	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	19.670.086.200	22.587.226.681	2.917.140.481
-	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	300.000.000	300.000.000	0
IV	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	13.270.000	13.270.000	0
9	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional Dan Penganan Konflik Sosial	13.270.000	13.270.000	0



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
-	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran ORMAS ,Pemberdayaan ORMAS,Evaluasi dan Mediasai Sengketa ORMAS dan ORMAS Asing di Daerah	13.270.000	13.270.000	0
V	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI. SOSIAL DAN BUDAYA	25.220.000	25.220.000	0
10	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pementapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya	25.220.000	25.220.000	0
-	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Ketahanan Ekonomi. Sosial. Budaya Dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika. Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama Dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	25.220.000	25.220.000	0
VI	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITAS PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	274.440.000	341.810.000	67.370.000
11	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pementapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	274.440.000	341.810.000	67.370.000
-	Pelaksanaan Koordinasi Bidang Kewaspadaan Dini ,kerjasam Intelijen,pemantauan orang asing ,kewaspadaan antar Negara ,fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penangan Konflik di Daerah	18.580.000	85.950.000	67.370.000



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
-	Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah	255.860.000	255.860.000	0
TOTAL		22.209.005.600	25.529.255.781	3.320.250.181

28. BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Alokasi anggaran pada Bagian Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao semula **Rp.2.334.412.500.-** bertambah sebesar **Rp.700.589.000.-** menjadi **Rp.3.035.001.500.-** dengan rincian:

- Belanja Operasi semula **Rp.1.904.412.500,-** bertambah sebesar **Rp.470.589.000.-** menjadi **Rp.2.375.001.500.-**
- Belanja Modal semula **Rp.430.000.000.-** bertambah sebesar **Rp.230.000.000.-** menjadi **Rp.660.000.000.-**



Tabel 2.29
Penjabaran Perubahan Anggaran
Bagian Pemerintahan dan Kesra Tahun Anggaran 2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	758.664.000	988.664.000	230.000.000
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	61.620.000	61.620.000	0
-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	61.620.000	61.620.000	0
2	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	13.800.000	13.800.000	0
-	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	13.800.000	13.800.000	0
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	211.348.000	241.348.000	30.000.000
-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.000.000	45.000.000	30.000.000
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000	15.000.000	0
-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	38.912.000	38.912.000	0
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	142.436.000	142.436.000	0
4	Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.846.000	13.846.000	0
-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.846.000	1.846.000	0
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000	12.000.000	0
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	458.050.000	658.050.000	200.000.000



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	39.600.000	39.600.000	0
-	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	3.450.000	3.450.000	0
-	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	415.000.000	615.000.000	200.000.000
II	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1.575.748.500	2.046.337.500	470.589.000
6	Administrasi Tata Pemerintahan	750.748.500	1.146.337.500	395.589.000
-	Penataan Administrasi Pemerintahan	309.783.000	309.783.000	0
-	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	50.000.000	50.000.000	0
-	Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	390.965.500	786.554.500	395.589.000
7	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	825.000.000	900.000.000	75.000.000
-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	825.000.000	900.000.000	75.000.000
TOTAL		2.334.412.500	3.035.001.500	700.589.000



29. BAGIAN PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Alokasi anggaran pada Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao semula **Rp.395.449.000.-** bertambah sebesar **Rp.635.468.000.-** menjadi **Rp.1.030.917.000.-** dengan rincian:

- a. Belanja operasi semula **Rp.395.449.000.-** bertambah sebesar **Rp.595.068.000.-** menjadi **Rp.990.517.000.**
- b. Belanja Modal semula **Rp.0.-** bertambah sebesar **Rp.40.400.000.-** menjadi **Rp.40.400.000.-**

Tabel 2.30
Penjabaran Perubahan Anggaran
Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Tahun Anggaran 2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
I	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	152.307.000	152.307.000	0
1	Perencanaan. Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja	15.675.000	15.675.000	0
-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.000.000	12.000.000	0
-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.675.000	3.675.000	0
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	45.280.000	45.280.000	0
-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	45.280.000	45.280.000	0
3	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	4.200.000	4.200.000	0
-	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4.200.000	4.200.000	0
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	63.940.000	63.940.000	0
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.000.000	12.000.000	0



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	51.940.000	51.940.000	0
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.612.000	1.612.000	0
-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.612.000	1.612.000	0
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21.600.000	21.600.000	0
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	19.700.000	19.700.000	0
-	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	1.900.000	1.900.000	0
II	PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	243.142.000	878.610.000	635.468.000
7	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	35.080.000	92.700.000	57.620.000
-	Koordinasi. Sinkronisasi. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD/BLUD	16.275.000	16.275.000	0
-	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	18.805.000	76.425.000	57.620.000
8	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	179.459.000	757.307.000	577.848.000
-	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	18.800.000	485.048.000	466.248.000
-	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	58.599.000	170.199.000	111.600.000
-	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	102.060.000	102.060.000	0
9	Pemantauan Kebijakan Terkait SDA	28.603.000	28.603.000	0
-	Koordinasi. Sinkronisasi. dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	28.603.000	28.603.000	0
TOTAL		395.449.000	1.030.917.000	635.468.000



30. BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA

Alokasi Anggaran pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao semula **Rp.809.329.000.-** tidak mengalami perubahan.- dengan rincian:

a. Belanja Operasi semula **Rp.809.329.000.-** tidak mengalami perubahan.

Tabel 2.31
Penjabaran Perubahan Anggaran
Bagian Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
I	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	174.828.800	174.828.800	0
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	40.460.000	40.460.000	0
-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	40.460.000	40.460.000	0
2	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.200.000	4.200.000	0
-	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4.200.000	4.200.000	0
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	102.876.300	102.876.300	0
-	Penyediaan bahan logistik kantor	22.876.000	22.876.000	0
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.150.300	9.150.300	0
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70.850.000	70.850.000	0
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	780.000	780.000	0
-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	780.000	780.000	0



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	26.512.500	26.512.500	0
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan.Biaya Pemeliharaan.Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	26.512.500	26.512.500	0
II	PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	634.500.200	634.500.200	0
6	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	634.500.200	634.500.200	0
-	Pengelolaan Barang dan Jasa	366.391.000	366.391.000	0
-	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	257.109.200	257.109.200	0
-	Pembinaan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	11.000.000	11.000.000	0
TOTAL		809.329.000	809.329.000	0

31. BAGIAN HUKUM

Alokasi anggaran pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao semula **Rp.312.379.900.-** bertambah sebesar **Rp. 112.133.000.-** menjadi **Rp. 424.512.900.-**, dengan rincian:

- Belanja Operasi semula **Rp. 312.379.900.-** bertambah sebesar **Rp. 90.713.000.-** menjadi **Rp. 403.092.900.-**,
- Belanja Modal semula **Rp.0,-** bertambah sebesar **Rp. 21.420.000.-** menjadi **Rp. 21.420.000.-**,



Tabel 2.32
Penjabaran Perubahan Anggaran
Bagian Hukum Tahun Anggaran 2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	146.677.900	158.810.900	12.133.000
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	33.628.000	33.628.000	0
-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	33.628.000	33.628.000	0
2	Administrasi Barang Milik Daerah	4.800.000	4.800.000	0
-	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4.800.000	4.800.000	0
3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	72.879.900	85.012.900	12.133.000
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	45.459.900	45.459.900	0
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	27.420.000	39.553.000	12.133.000
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.200.000	13.200.000	0
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.200.000	13.200.000	0
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	22.170.000	22.170.000	0



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
-	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan dan kendaraan dinas operasional atau lapangan	22.170.000	22.170.000	0
II	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	165.702.000	265.702.000	100.000.000
6	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	165.702.000	265.702.000	100.000.000
-	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	51.279.600	51.279.600	0
-	Fasilitasi Bantuan Hukum	49.675.000	149.675.000	100.000.000
-	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	64.747.400	64.747.400	0
TOTAL		312.379.900	424.512.900	112.133.000



32. BAGIAN ORGANISASI

Alokasi anggaran pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao semula **Rp.276.560.000.-** bertambah sebesar **Rp. 90.000.000.-** menjadi **Rp. 366.560.000.-** dengan rincian:

a. Belanja Operasi semula **Rp.276.560.000.-** bertambah sebesar **Rp. 90.000.000.-** menjadi **Rp. 366.560.000.-**.

Tabel 2.33
Penjabaran Perubahan Anggaran
Bagian Organisasi Tahun Anggaran 2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	276.560.000	366.560.000	90.000.000
1	Perencanaan. Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.999.200	24.999.200	0
-	Penyusunan Dokumen perencanaan Perangkat Daerah	17.500.000	17.500.000	0
-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.499.200	7.499.200	0
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	37.144.000	37.144.000	0
-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	37.144.000	37.144.000	0
3	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	4.200.000	4.200.000	0
-	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4.200.000	4.200.000	0
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	59.484.200	74.484.200	15.000.000
-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.958.000	4.958.000	0
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.771.200	4.771.200	0



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	49.755.000	64.755.000	15.000.000
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.000.000	12.000.000	0
-	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000	12.000.000	0
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24.450.000	24.450.000	0
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	21.500.000	21.500.000	0
-	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	2.950.000	2.950.000	0
7	Penataan Organisasi	114.282.600	189.282.600	75.000.000
-	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	29.410.000	104.410.000	75.000.000
-	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tatalaksana	31.066.000	31.066.000	0
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	53.806.600	53.806.600	0
TOTAL		276.560.000	366.560.000	90.000.000



33. BAGIAN UMUM

Alokasi anggaran pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao semula **Rp. 19.217.087.123.-** bertambah sebesar **Rp. 1.781.585.800.-** menjadi **Rp. 20.998.672.923.-** dengan rincian:

- a. Belanja Operasi semula **Rp.16.050.217.623.-** bertambah sebesar **Rp.1.679.450.000.-** menjadi **Rp.17.729.667.623.-**
- b. Belanja Modal semula **Rp. 3.166.869.500.-** bertambah sebesar **Rp. 102.135.800.-** menjadi **Rp. 3.269.005.300.-**

Tabel 2.34
Penjabaran Perubahan Anggaran
Bagian Umum Tahun Anggaran 2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	19.217.087.123	20.998.672.923	1.781.585.800
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000	10.000.000	0
-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.000.200	8.000.200	0
-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.999.800	1.999.800	0
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.648.829.413	6.006.401.213	357.571.800
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.460.777.413	5.818.349.213	357.571.800



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	188.052.000	188.052.000	0
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	94.662.000	94.662.000	0
-	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	94.662.000	94.662.000	0
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.082.500.000	1.082.500.000	0
-	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.082.500.000	1.082.500.000	0
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.471.855.600	1.940.791.400	468.935.800
-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	44.710.000	44.710.000	0
-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.600.000	105.965.800	84.365.800
-	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	157.100.000	175.970.000	18.870.000
-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	262.525.000	330.525.000	68.000.000
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	46.978.600	46.978.600	0
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	938.942.000	1.236.642.000	297.700.000
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.046.850.000	2.991.050.000	(55.800.000)



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
-	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3.046.850.000	2.991.050.000	(55.800.000)
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.560.385.000	1.608.085.000	47.700.000
-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.997.000	9.997.000	0
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.550.388.000	1.598.088.000	47.700.000
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.171.645.460	2.123.945.460	(47.700.000)
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	249.045.500	201.345.500	(47.700.000)
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.064.303.500	1.064.303.500	0
-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	46.000.000	46.000.000	0
-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	775.211.460	775.211.460	0
-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	37.085.000	37.085.000	0
9	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	716.224.400	716.224.400	0
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	105.436.000	105.436.000	0



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
-	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	189.790.000	189.790.000	0
-	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	120.998.400	120.998.400	0
-	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	300.000.000	300.000.000	0
10	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	1.218.872.000	2.229.750.200	1.010.878.200
-	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	1.218.872.000	2.112.750.200	893.878.200
-	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	0	117.000.000	117.000.000
11	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	2.195.263.250	2.195.263.250	0
-	Fasilitas Keprotokolan	395.261.750	395.261.750	0
-	Fasilitas Komunikasi Pimpinan	1.450.974.000	1.450.974.000	0
-	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	349.027.500	349.027.500	0
TOTAL		19.217.087.123	20.998.672.923	1.781.585.800



34. KECAMATAN LOBALAIN

Alokasi anggaran pada Kecamatan Lobalain semula **Rp.4.091.085.464.-** bertambah sebesar **Rp.355.397.608.-** menjadi **Rp. 4.446.483.072.-** dengan rincian:

- a. Belanja Operasi semula **Rp. 4.057.955.464.-** bertambah sebesar **Rp.323.247.608.-** menjadi **Rp. 4.381.203.072.-**.
- b. Belanja Modal semula **Rp.33.130.000.-** bertambah sebesar **Rp. 32.150.000.-** menjadi **Rp. 65.280.000.-**.

Tabel 2.35
Penjabaran Perubahan Anggaran
Kecamatan Lobalain Tahun Anggaran 2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	3.178.673.464	3.450.671.072	271.997.608
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	53.450.000	53.452.000	2.000
-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	53.450.000	53.452.000	2.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.022.619.464	3.266.450.072	243.830.608
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	2.974.485.464	3.218.316.072	243.830.608
-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	48.134.000	48.134.000	0
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.800.000	4.800.000	0
-	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4.800.000	4.800.000	0
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	46.059.000	62.224.000	16.165.000



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.300.000	16.300.000	0
-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.760.000	10.760.000	0
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.359.000	4.359.000	0
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14.640.000	30.805.000	16.165.000
5	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	5.090.000	5.090.000	0
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	5.090.000	5.090.000	0
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	46.655.000	58.655.000	12.000.000
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	46.655.000	58.655.000	12.000.000
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	860.912.000	944.312.000	83.400.000
7	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	10.012.000	10.012.000	0
-	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10.012.000	10.012.000	0
8	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	850.900.000	934.300.000	83.400.000
-	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	67.992.500	67.992.500	0



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
-	Pembanguna Sarana Prasarana Kelurahan	18.100.000	18.100.000	0
-	Pemberdayaan Kelurahan	607.800.000	631.200.000	23.400.000
-	Evaluasi Kelurahan	157.007.500	217.007.500	60.000.000
III	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	51.500.000	51.500.000	0
9	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	51.500.000	51.500.000	0
-	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	51.500.000	51.500.000	0
TOTAL		4.091.085.464	4.446.483.072	355.397.608



35. KECAMATAN ROTE BARAT LAUT

Alokasi anggaran pada Kecamatan Rote Barat Laut semula **Rp.2.477.495.872.-** bertambah sebesar **Rp.109.394.800.-** menjadi **Rp.2.586.890.672.-** dengan rician:

a. Belanja Operasi semula **Rp. 2.477.495.872.-** bertambah sebesar **Rp.109.394.800.-** menjadi **Rp.2.586.890.672.-**.

Tabel 2.36
Penjabaran Perubahan Anggaran Kecamatan Rote Barat Laut
Tahun Anggaran 2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	2.157.852.872	2.241.847.672	83.994.800
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.966.000	24.966.000	0
-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24.966.000	24.966.000	0
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.045.556.872	2.099.917.672	54.360.800
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	1.985.276.872	2.039.637.672	54.360.800
-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	60.280.000	60.280.000	0
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	9.600.000	9.600.000	0



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
-	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	9.600.000	9.600.000	0
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	26.920.000	44.711.000	17.791.000
-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.530.000	11.530.000	0
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.620.000	7.620.000	0
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.770.000	25.561.000	17.791.000
5	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	6.600.000	6.600.000	0
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	6.600.000	6.600.000	0
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	44.210.000	56.053.000	11.843.000
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	44.210.000	56.053.000	11.843.000
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	294.015.000	319.415.000	25.400.000
7	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	26.015.000	26.015.000	0
-	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	15.458.000	15.458.000	0



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
-	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10.557.000	10.557.000	0
8	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	268.000.000	293.400.000	25.400.000
-	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	75.000.000	75.000.000	0
-	Pemberdayaan Kelurahan	118.000.000	143.400.000	25.400.000
-	Evaluasi Kelurahan	75.000.000	75.000.000	0
III	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	25.628.000	25.628.000	0
9	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	25.628.000	25.628.000	0
-	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	25.628.000	25.628.000	0
TOTAL		2.477.495.872	2.586.890.672	109.394.800



36. KECAMATAN ROTE BARAT

Alokasi anggaran pada Kecamatan Rote Barat semula **Rp. 1.522.188.547,-** bertambah sebesar **Rp. 58.113.900,-** menjadi **Rp. 1.580.302.447,-** dengan rincian :

- a. Belanja Operasi semula **Rp. 1.513.488.547,-** bertambah sebesar **Rp. 58.113.900,-** menjadi **Rp. 1.571.602.447,-**.
- b. Belanja Modal semula **Rp. 8.700.000,-** tidak mengalami perubahan.

Tabel 2.37
Penjabaran Perubahan Anggaran Kecamatan Rote Barat
Tahun Anggaran 2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	1.491.788.547	1.549.902.447	58.113.900
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	61.540.000	61.540.000	0
-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	61.540.000	61.540.000	0
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.341.348.647	1.370.547.547	29.198.900
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	1.294.538.647	1.323.737.547	29.198.900
-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	46.810.000	46.810.000	0
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	9.600.000	9.600.000	0
-	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	9.600.000	9.600.000	0
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	34.903.900	45.878.900	10.975.000
-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.700.000	8.700.000	0
-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.300.000	5.300.000	0



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.643.900	5.643.900	0
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15.260.000	26.235.000	10.975.000
5	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	11.766.000	11.766.000	0
-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.146.000	3.146.000	0
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	8.620.000	8.620.000	0
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	32.630.000	50.570.000	17.940.000
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	32.630.000	50.570.000	17.940.000
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	10.000.000	10.000.000	0
7	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	10.000.000	10.000.000	0
-	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10.000.000	10.000.000	0
III	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	20.400.000	20.400.000	0
8	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	20.400.000	20.400.000	0
-	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	20.400.000	20.400.000	0
TOTAL		1.522.188.547	1.580.302.447	58.113.900



37. KECAMATAN ROTE BARAT DAYA

Alokasi anggaran pada Kecamatan Rote Barat Daya semula **Rp.1.358.980.712.-** bertambah sebesar **Rp.62.344.700.-** menjadi **Rp. 1.421.325.412.-** dengan rincian:

a. Belanja Operasi semula **Rp.1.358.980.712.-** bertambah sebesar **Rp.62.344.700.-** menjadi **Rp. 1.421.325.412.-**

Tabel 2.38
Penjabaran Perubahan Anggaran Kecamatan Rote Barat Daya
Tahun Anggaran 2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	1.292.680.712	1.342.286.512	49.605.800
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.216.500.712	1.250.275.512	33.774.800
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	1.132.065.712	1.165.840.512	33.774.800
-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	84.435.000	84.435.000	0
2	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	9.000.000	9.000.000	0
-	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	9.000.000	9.000.000	0
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	31.145.000	46.976.000	15.831.000
-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.845.000	18.845.000	0
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.300.000	12.300.000	0
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	15.831.000	15.831.000



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
4	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	11.335.000	11.335.000	0
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	11.335.000	11.335.000	0
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24.700.000	24.700.000	0
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	24.700.000	24.700.000	0
II	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	66.300.000	79.038.900	12.738.900
6	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	66.300.000	79.038.900	12.738.900
-	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	66.300.000	79.038.900	12.738.900
TOTAL		1.358.980.712	1.421.325.412	62.344.700



38. KECAMATAN ROTE SELATAN

Alokasi anggaran pada Kecamatan Rote Selatan semula **Rp.1.340.412.486.-** bertambah sebesar **Rp.60.354.700.-** menjadi **Rp. 1.400.767.186.-** dengan rincian:

- a. Belanja Operasi semula **Rp.1.328.212.486.-** bertambah sebesar **Rp.46.854.700.-** menjadi **Rp.1.375.067.186.-**.
- b. Belanja Modal semula **Rp. 12.200.000.-** bertambah sebesar **Rp. 13.500.000.-** menjadi **Rp. 25.700.000.-**.

Tabel 2.39
Penjabaran Perubahan Anggaran Kecamatan Rote Selatan
Tahun Anggaran 2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	1.281.665.486	1.342.020.186	60.354.700
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.690.000	50.690.000	0
-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	49.690.000	49.690.000	0
-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.000.000	1.000.000	0
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.160.059.486	1.190.685.186	30.625.700
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	1.118.179.486	1.148.805.186	30.625.700
-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	41.880.000	41.880.000	0
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	9.000.000	9.000.000	0
-	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	9.000.000	9.000.000	0
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	24.366.000	54.095.000	29.729.000



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.055.000	1.055.000	0
-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.200.000	25.700.000	13.500.000
-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.031.000	7.031.000	0
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.000.000	1.000.000	0
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.080.000	19.309.000	16.229.000
5	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	4.050.000	4.050.000	0
-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.040.000	1.040.000	0
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	3.010.000	3.010.000	0
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	33.500.000	33.500.000	0
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	32.600.000	32.600.000	0
-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	900.000	900.000	0
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	22.895.000	22.895.000	0



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
7	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	22.895.000	22.895.000	0
-	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	17.795.000	17.795.000	0
-	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5.100.000	5.100.000	0
III	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	35.852.000	35.852.000	0
8	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	35.852.000	35.852.000	0
-	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	35.852.000	35.852.000	0
TOTAL		1.340.412.486	1.400.767.186	60.354.700



39. KECAMATAN ROTE TENGAH

Alokasi anggaran pada Kecamatan Rote Tengah semula **Rp.2.186.204.649,-** bertambah sebesar **Rp.179.481.800,-** menjadi **Rp.2.365.686.449,-** dengan rincian:

- a. Belanja Operasi semula **Rp.2.169.554.649,-** bertambah sebesar **Rp.168.931.800,-** menjadi **Rp. 2.338.486.449.-**.
- b. Belanja Modal semula **Rp.16.650.000,-** bertambah sebesar **Rp. 10.550.000,-** menjadi **Rp. 27.200.000.-**

Tabel 2.40
Penjabaran Perubahan Anggaran Kecamatan Rote Tengah
Tahun Anggaran 2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	1.863.844.649	2.019.726.449	155.881.800
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	56.454.000	56.454.000	0
-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	54.408.000	54.408.000	0
-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.046.000	2.046.000	0
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.708.094.649	1.834.819.449	126.724.800
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	1.660.454.649	1.787.179.449	126.724.800
-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	47.640.000	47.640.000	0
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.200.000	4.200.000	0
-	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4.200.000	4.200.000	0
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	53.006.000	70.319.000	17.313.000



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.000.000	1.000.000	0
-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.650.000	16.650.000	0
-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.954.000	12.954.000	0
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.622.000	6.622.000	0
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15.780.000	33.093.000	17.313.000
5	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	14.310.000	14.310.000	0
-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.210.000	2.210.000	0
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	12.100.000	12.100.000	0
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	27.780.000	39.624.000	11.844.000
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	25.880.000	37.724.000	11.844.000
-	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	1.900.000	1.900.000	0
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	313.510.000	337.110.000	23.600.000
7	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	22.610.000	22.610.000	0
-	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	13.900.000	13.900.000	0
-	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8.710.000	8.710.000	0
8	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	290.900.000	314.500.000	23.600.000



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
-	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	50.000.000	50.000.000	0
-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	165.900.000	169.500.000	3.600.000
-	Evaluasi Kelurahan	75.000.000	95.000.000	20.000.000
III	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8.850.000	8.850.000	0
9	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	8.850.000	8.850.000	0
-	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	8.850.000	8.850.000	0
TOTAL		2.186.204.649	2.365.686.449	179.481.800



40. KECAMATAN PANTAI BARU

Alokasi anggaran pada Kecamatan Pantai Baru semula **Rp.2.178.947.097.-** bertambah sebesar **Rp.377.285.562.-** menjadi **Rp. 2.556.232.659.-** dengan rincian:

a. Belanja Operasi semula **Rp. 2.175.647.097.-** bertambah sebesar **Rp. 363.785.562.-** menjadi **Rp. 2.539.432.659.-.**

b. Belanja Modal semula **Rp. 3.300.000.-** bertambah sebesar **Rp. 13.500.000.-** menjadi **Rp. 16.800.000.-.**

Tabel 2.41
Penjabaran Perubahan Anggaran Kecamatan Pantai Baru
Tahun Anggaran 2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	1.891.587.097	2.247.072.659	355.485.562
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.150.000	50.150.000	0
-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.150.000	50.150.000	0
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.750.497.097	2.076.363.659	325.866.562
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	1.706.667.097	2.032.533.659	325.866.562
-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	43.830.000	43.830.000	0
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	11.520.000	11.520.000	0
-	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	11.520.000	11.520.000	0
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	41.550.000	59.035.000	17.485.000



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.492.000	15.492.000	0
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.950.000	10.950.000	0
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15.108.000	32.593.000	17.485.000
5	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	13.770.000	13.770.000	0
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	13.770.000	13.770.000	0
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24.100.000	36.234.000	12.134.000
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	24.100.000	36.234.000	12.134.000
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	280.700.000	302.500.000	21.800.000
7	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	36.300.000	36.300.000	0
-	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	36.300.000	36.300.000	0
8	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	244.400.000	266.200.000	21.800.000
-	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	36.540.000	36.540.000	0
-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	29.158.000	29.158.000	0
-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	103.702.000	105.502.000	1.800.000
-	Evaluasi Kelurahan	75.000.000	95.000.000	20.000.000



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
III	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	6.660.000	6.660.000	0
9	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	6.660.000	6.660.000	0
-	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6.660.000	6.660.000	0
TOTAL		2.178.947.097	2.556.232.659	377.285.562

41. KECAMATAN ROTE TIMUR

Alokasi anggaran pada Kecamatan Rote Timur Semula **Rp.1.587.225.576.-** bertambah sebesar **Rp.109.143.800.-** menjadi **Rp.1.696.369.376.-** dengan rincian:

- Belanja Operasi semula **Rp.1.554.275.576.-** bertambah sebesar **Rp.109.143.800.-** menjadi **Rp.1.663.419.376.-**.
- Belanja Modal semula **Rp. 32.950.000.-** tidak mengalami perubahan.



Tabel 2.42
Penjabaran Perubahan Anggaran Kecamatan Rote Timur
Tahun Anggaran 2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	1.236.016.576	1.321.560.376	85.543.800
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.862.000	17.862.000	0
-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17.862.000	17.862.000	0
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.142.825.576	1.199.692.376	56.866.800
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	1.091.440.576	1.148.307.376	56.866.800
-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	51.385.000	51.385.000	0
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.200.000	10.200.000	0
-	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	10.200.000	10.200.000	0
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	31.149.000	46.826.000	15.677.000
-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.054.000	10.054.000	0
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.005.000	6.005.000	0
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15.090.000	30.767.000	15.677.000
5	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	4.700.000	4.700.000	0
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	4.700.000	4.700.000	0



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	29.280.000	42.280.000	13.000.000
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	29.280.000	42.280.000	13.000.000
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	316.195.000	339.795.000	23.600.000
7	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	45.395.000	45.395.000	0
-	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	28.921.000	28.921.000	0
-	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	16.474.000	16.474.000	0
8	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	270.800.000	294.400.000	23.600.000
-	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	75.000.000	75.000.000	0
-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	120.800.000	124.400.000	3.600.000
-	Evaluasi Kelurahan	75.000.000	95.000.000	
III	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	35.014.000	35.014.000	0
9	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	35.014.000	35.014.000	0
-	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	35.014.000	35.014.000	0
TOTAL		1.587.225.576	1.696.369.376	109.143.800



42. KECAMATAN LANDU LEKO

Alokasi anggaran pada Kecamatan Landu Leko Semula **Rp.848.603.949.-** bertambah sebesar **Rp.102.993.212.-** menjadi **Rp.951.597.161.-** dengan rincian:

a. Belanja Operasi semula **Rp.848.603.949.-** bertambah sebesar **Rp.102.993.212.-** menjadi **Rp.951.597.161.-**.

Tabel 2.43
Penjabaran Perubahan Anggaran Kecamatan Landu Leko
Tahun Anggaran 2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	760.796.949	863.790.161	102.993.212
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.020.000	14.020.000	0
-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.110.000	7.110.000	0
-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.910.000	6.910.000	0
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	649.936.949	723.111.161	73.174.212
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	611.101.949	684.276.161	73.174.212
-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	38.835.000	38.835.000	0
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	9.000.000	9.000.000	0
-	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	9.000.000	9.000.000	0



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	41.530.000	58.349.000	16.819.000
-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.060.000	14.060.000	0
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.450.000	9.450.000	0
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18.020.000	34.839.000	16.819.000
5	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	16.020.000	16.020.000	0
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	16.020.000	16.020.000	0
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30.290.000	43.290.000	13.000.000
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	27.520.000	40.520.000	13.000.000
-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.770.000	2.770.000	0
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	41.665.000	41.665.000	0
7	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	41.665.000	41.665.000	0
-	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	23.295.000	23.295.000	0
-	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	18.370.000	18.370.000	0
III	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	20.130.000	20.130.000	0



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
8	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	20.130.000	20.130.000	0
-	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	20.130.000	20.130.000	0
IV	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	26.012.000	26.012.000	0
9	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	26.012.000	26.012.000	0
-	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	26.012.000	26.012.000	0
TOTAL		848.603.949	951.597.161	102.993.212



43. KECAMATAN NDAO NUSE

Alokasi anggaran pada Kecamatan Ndao Nuse semula **Rp.658.708.345,-** bertambah sebesar **Rp.196.515.000,-** menjadi **Rp.855.223.345,-** dengan rincian:

a. Belanja Operasi semula **Rp.658.708.345,-** bertambah sebesar **Rp.196.515.000,-** menjadi **Rp.855.223.345,-**.

Tabel 2.44
Penjabaran Perubahan Anggaran Kecamatan Ndao Nuse
Tahun Anggaran 2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	611.508.345	808.023.345	196.515.000
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60.050.000	60.050.000	0
-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60.050.000	60.050.000	0
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	460.608.345	632.288.345	171.680.000
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	421.048.345	592.728.345	171.680.000
-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	39.560.000	39.560.000	0
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.200.000	4.200.000	0
-	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4.200.000	4.200.000	0
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	30.950.000	53.060.000	22.110.000
-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.450.000	7.450.000	0
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.500.500	12.500.500	



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.999.500	10.999.500	0
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	22.110.000	22.110.000
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	55.700.000	58.425.000	2.725.000
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	55.700.000	58.425.000	2.725.000
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	29.600.000	29.600.000	0
6	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	29.600.000	29.600.000	0
-	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	17.700.000	17.700.000	0
-	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	11.900.000	11.900.000	0
III	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	17.600.000	17.600.000	0
7	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	17.600.000	17.600.000	0
-	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	17.600.000	17.600.000	0
TOTAL		658.708.345	855.223.345	196.515.000



44. KECAMATAN LOAHOLU

Alokasi anggaran pada Kecamatan Loaholu semula **Rp.1.505.489.580.-** berkurang sebesar **Rp.2.554.082,-** menjadi **Rp.1.502.935.498.-** dengan rincian:

a. Belanja Operasi semula **Rp.1.505.489.580.-** berkurang sebesar **Rp.2.554.082,-** menjadi **Rp.1.502.935.498.-**.

Tabel 2.45
Penjabaran Perubahan Anggaran Kecamatan Loaholu
Tahun Anggaran 2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	1.461.229.580	1.458.675.498	(2.554.082)
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	67.320.000	67.320.000	0
-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	67.320.000	67.320.000	0
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.331.039.580	1.304.378.498	(26.661.082)
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	1.287.599.580	1.260.938.498	(26.661.082)
-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	43.440.000	43.440.000	0
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.200.000	4.200.000	0
-	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4.200.000	4.200.000	0
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	23.320.000	35.613.000	12.293.000
-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.630.000	13.630.000	0
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.690.000	9.690.000	0



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	2	3	4	5
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	12.293.000	12.293.000
5	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	9.250.000	9.250.000	0
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	9.250.000	9.250.000	0
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	26.100.000	37.914.000	11.814.000
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	26.100.000	37.914.000	11.814.000
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	14.300.000	14.300.000	0
7	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	14.300.000	14.300.000	0
-	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	14.300.000	14.300.000	0
III	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	29.960.000	29.960.000	0
8	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	29.960.000	29.960.000	0
-	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	29.960.000	29.960.000	0
TOTAL		1.505.489.580	1.502.935.498	(2.554.082)



BAB III

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

3.1 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

1. CAPAIAN KINERJA PROGRAM SESUAI DENGAN TARGET KINERJA YANG DITETAPKAN DALAM PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah:

- Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
- Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; dan
- Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Adapun perjanjian kinerja antara Kepala Perangkat Daerah bersama Bupati Rote Ndao sebagai berikut :

1. DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAAN DAN OLAHRAGA

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan		Rata-rata sekolah lama	7,83 Tahun	7,82 Tahun
			Harapan Sekolah Lama	13,23 Tahun	13,22 Tahun
2		Meningkatnya akses layanan pendidikan masyarakat	Persentase penduduk usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	86,09%	77,68%
			Angka Partisipasi Kasar	100%	92,23%
			Angka partisipasi murni	88,79%	76,33%
			Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	100%
			Angka putus sekolah	5 Orang	15 Orang
			Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	50,80%	72,62%
			Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	97,00%	97,05%
		Meningkatnya Prestasi Olahraga dan peran serta kepemudaan dalam pembangunan	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan yang aktif	100%	88,89%
			Peringkat Kabupaten Rote Ndao dalam Pekan Olah Raga Daerah (POPDA)	14%	0%



NO	PROGRAM	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	194.742.347.023	188.844.947.611	96,97
II	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	73.201.203.469	70.980.221.144,50	96,97
III	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	260.930.000	178.761.441	68,51
IV	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	4.851.592.000	4.812.409.211	99,19
V	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.090.499.000	1.420.725.480	67,96
VI	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	75.000.000	75.000.000	100
TOTAL		275.221.571.492	266.312.064.887,50	96,76

2. DINAS KESEHATAN

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat		Usia Harapan Hidup	66 tahun	66 tahun
			Prevalensi Balita Stunitng	19%	19%
		1. Meningkatkan Kesehatan Ibu, Anak dan Gizi Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	118,50Per 100.000 KH	116,99 Per 100.000 KH
			Angka Kematian Bayi (AKB)	15,50 Per 1000 KH	15,21 Per 1000 KH
			Angka Kematian Balita (AKBA)	19,50 Per 1000 KH	15,79 Per 1000 KH
			Prevalensi Balita Gizi Buruk	0,75%	0,55%
		2. Meningkatkan Ketersediaan dan Mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna	50%	50%
			Persentase Rumah Sakit Terakreditasi Paripurna	100%	100%
		3. Meningkatkan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Persentase Succes Rate Tuberculosis	87,5%	83,19%
			Prevalensi HIV/AIDS	0,30 Per 1000 Penduduk	0,34 Per 1000 Penduduk



NO	PROGRAM	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	62.056.907.172	57.267.269.878	92,28
II	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	35.828.893.936	29.942.308.652	83,57
III	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	10.662.803.040	7.245.126.554	67,95
IV	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	280.609.700	180.082.365	64,18
V	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	339.910.092	330.060.262	97,10
	PUSKESMAS EAHUN	1.788.064.159	1.303.527.972	72,90
VI	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.781.335.459	1.302.627.972	73,13
VII	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	6.728.700	900.000	13,38
	PUSKESMAS SOTIMORI	801.926.265	476.376.907	59,40
VIII	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	797.726.265	473.676.907	59,38
IX	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	4.200.000	2.700.000	64,29
	PUSKESMAS KORBAFO	989.822.870	508.640.948	51,39
X	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	987.823.120	508.640.948	51,49
XI	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.999.750	0	0,00
	PUSKESMAS SONIMANU	735.215.556	544.874.904	74,11
XII	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	733.616.556	544.874.904	74,27
XIII	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.599.000	0	0,00
	PUSKESMAS FEAPOPI	1.062.603.663	856.773.281	80,63



XIV	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.047.313.663	848.183.281	80,99
XV	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	15.290.000	8.590.000	56,18
	PUSKESMAS BAA	3.202.788.110	2.883.834.972	90,04
XVI	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	3.165.853.510	2.849.650.372	90,01
XVII	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	36.934.600	34.184.600	92,55
	PUSKESMAS OELE	891.252.822	609.918.239	68,43
XVIII	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	872.643.022	608.868.239	69,77
XIX	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	18.609.800	1.050.000	5,64
	PUSKESMAS BUSALANGGA	1.732.276.198	1.614.541.637	93,20
XX	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.727.227.698	1.610.892.137	93,26
XXI	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	5.048.500	3.649.500	72,29
	PUSKESMAS OELABA	1.858.898.102	1.456.408.273	78,35
XXII	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.845.351.902	1.443.311.623	78,21
XXIII	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	13.546.200	13.096.650	96,68
	PUSKESMAS BATUTUA	3.242.142.048	1.389.205.076	42,85
XXIV	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	3.178.720.548	1.389.205.076	43,70
XXV	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	63.421.500	0	0,00
	PUSKESMAS DELHA	1.156.584.862	1.026.611.794	88,76
XXVI	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.154.502.362	1.024.529.294	88,74



XXVII	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	2.082.500	2.082.500	100,00
	PUSKESMAS NDAO	608.645.609	363.847.863	59,78
XXVIII	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	602.998.609	363.847.863	60,34
XXIX	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	5.647.000	0	0,00
	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAA	22.185.491.282	21.299.725.251	96,01
XXX	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	14.709.107.282	13.923.691.251	94,66
XXXI	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	7.476.384.000	7.376.034.000	98,66
TOTAL		149.424.835.486	129.299.134.828	86,53

3. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Konektivitas		Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi baik	40,68	33,47
		Meningkatnya infrastruktur jalan antar wilayah	Persentase jalan Kabupaten Kondisi mantap	50,75	44,83
			Panjang Jalan Strategis Desa Terbangun	37,54	41,26
2	Meningkatnya layanan daerah irigasi dalam kondisi mantap		Persentase Luas area yang terlayani oleh jaringan irigasi	13,50	14,00
		Meningkatnya infrastruktur irigasi dan sumber daya air	Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik	30,00	31,79
3	Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan bersanitasi dan air minum layak		Persentase perumahan bersanitasi dan air minum layak	73,96	73,37
		Meningkatkan ketersediaan infrastruktur air limbah dan air minum	Persentase rumah Tangga bersanitasi layak	80,69	80,69
			Persentase rumah tangga berakses air minum layak	73,96	73,37



4	Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang		Ketaatan Terhadap RTRW	97,40	97,31
		Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Presentase Pemanfaatan Ruang Wilayah Perkotaan	84,47	81,47

ANGGARAN					
NO	PROGRAM	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	4.272.923.032	4.054.079.113	94,88	
II	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	9.796.996.000	9.361.348.078	95,55	
III	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	6.492.397.000	6.303.463.324	97,09	
IV	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	5.716.654.000	5.549.831.100	97,08	
V	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	210.674.000	198.358.400	94,15	
VI	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	50.979.941.173	50.434.759.987	98,93	
VII	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	450.000.000	312.804.623	69,51	
TOTAL		77.919.585.205	76.214.644.625	97,81	

4. DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KERJA	TARGET	REALIASI
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman		Presentase Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Layak	84,82 %	81,64 %
		Meningkatnya pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat	Persentase Rumah Layak Huni terbangun	56,20 %	56,46 %
2	Meningkatnya pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	77,46 Poin	68,17 Poin
		Terjaganya kualitas air sesuai standar baku mutu lingkungan	Indeks Kualitas Air	52,00 Poin	53,33 Poin
		Meningkatnya penanganan sampah	Volume Sampah yang dikurangi	1.555 Ton	1.038 Ton



NO	PROGRAM	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
I	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	2.668.399.500	2.484.445.561	93,11
II	PENGEMBANGAN PERUMAHAN	95.200.000	95.200.000	100
III	KAWASAN PERMUKIMAN	2.357.515.700	2.326.318.043	98,68
IV	PENATAGUNAAN TANAH	200.000.000	190.382.298	95,19
V	PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	322.859.000	315.693.823	97,78
VI	PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	225.000.000	220.777.700	98,12
VII	PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	1.110.000.000	925.659.472	83,39
VIII	PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	1.062.658.000	1.008.788.500	94,93
TOTAL		8.041.632.200	7.567.265.397	94,10

5. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Menurunnya angka gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terjadi di Kabupaten Rote Ndao	Angka kriminalitas	100%	100%
			Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	100%	100%
			Presentase penegakan PERDA	3 PERDA	3 PERDA
			Cakupan petugas perlindungan masyarakat (linmas)	50%	50%
2.		Meningkatnya pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran yang terjadi di Kabupaten Rote Ndao	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	10 kejadian	12 kejadian
			Tingkat waktu tanggap (respons time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)	15 menit	15 menit



NO	PROGRAM	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.288.385.275	2.215.459.226	96,81
II	PROGRAM PENCEGAHAN, PENAGGULANGAN, PENYELAMATAN, KEBAKARAN DAN PENYALAMATAN NON KEBAKARAN	4.834.724.400	4.823.500.400	99,77
III	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	35.205.000	35.205.000	100,00
TOTAL		7.158.314.675	7.074.164.626	98,82

6. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas kinerja pembinaan politik kesatuan bangsa dan kewaspadaan dini	Terwujudnya Pembinaan Politik, Kesatuan Bangsa dan Kewaspadaan Dini	Persentase layanan pembinaan politik kesatuan bangsa dan kewaspadaan dini	100%	100%
			Cakupan Pembinaan Idiologi Wawasan Kebangsaan	100%	100%
			Persentase Ormas/LSM yang dibina	100%	100%
			Presentase Partai Politik yang diverifikasi	100%	100%
			Cakupan Pembinaan Seni Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi	100%	100%

NO	PROGRAM	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
I	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.500.251.100	1.443.036.607	96,19
II	PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER BANGSA	761.478.000	755.747.300	99,25
III	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	22.887.226.681	22.836.441.515	99,78
IV	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	25.220.000	25.220.000	100,00



V	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	13.270.000	13.120.000	99
VI	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITAS PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	341.810.000	321.566.000	94,08
TOTAL		25.529.255.781	25.395.131.422	99,47

7. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1					
1	Terwujudnya kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana		Indeks Resiko Bencana	116%	108,99%
2		Meningkatnya pengelolaan manajemen bencana dan penanganan bencana	Presentase Desa Tangguh Bencana	4,20 %	4,20%
			Persentase penanganan pra bencana	100%	100 %
			Persentase penanganan keadaan darurat bencana	100%	107%
			Persentase penanganan pasca bencana	65%	66 %

NO	PROGRAM	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	1.443.818.000	1.401.003.699	97,03
II	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.140.761.500	1.131.953.530	99,23
TOTAL		2.584.579.500	2.532.957.229	98,00



8. DINAS SOSIAL

NO	Tujuan	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1		2	3	4	5
1	Tercapainya penanganan keberfungsian social Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)		Persentase PMKS Mandiri (%)	2,70 %	3,93 %
2		Meningkatnya pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase PMKS yang dilayani	66,69 %	76,37 %

ANGGARAN

NO	PROGRAM	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
I	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.993.467.483	1.733.802.055	86,97
II	PEMBERDAYAAN SOSIAL	32.340.000	32.229.000	99,66
III	REHABILITASI SOSIAL	50.162.000	49.017.500	97,72
IV	PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	122.689.400	117.263.051	95,58
V	PENANGANAN BENCANA	275.053.000	216.471.000	78,70
	TOTAL	2.473.711.883	2.148.782.606	86,86

9. DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Perlindungan KetenagaKerja		Tingkat Pengangguran Terbuka	3,40%	3,53%
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	78,56%	70,81%
		Meningkatnya Ketrampilan / Kompetensi Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja lokal yang terampil dan produktif (bersertifikat)	100%	121,50%



		Terciptanya Hubungan Industrial yang harmonis antara Pekerja dan Pengusaha	Persentase Penyelesaian kasus perselisihan Hubungan Industrial	100%	140%
2.	Terwujudnya Transmigran yang mandiri		Persentase Transmigran yang mandiri	53,80%	100%
		Meningkatnya pembinaan Tranmigran local	Persentase Transmigran lokal yang dibina	100%	100%

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.916.413.622	1.723.222.942	89,92
II	PROGRAM PELATIHAN KERJA, PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	294.292.405	285.799.279	97,11
III	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	26.000.431	25.835.000	99,36
IV	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	2.168.999.916	2.147.899.000	99,03
V	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	171.075.970	171.074.949	100
TOTAL		4.576.782.344	4.353.831.170	95,13

10. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6
1	Mewujudkan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,53 Poin	85,28 Poin
		Terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG)	Presentasi Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	4,70 %	7,9%
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	49,53 Point	49,07 Point



2	Meningkatnya pengendalian jumlah penduduk		Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,50 %	1,58
		Terwujudnya Pengendalian Penduduk	Total Fertility Rate (TFR)	3,40 %	3,27
		Meningkatnya Kualitas dan akseibilitas pelayanan KB, Ketahanan Keluarga, dan Kesehatan Reproduksi serta mengendalikan angka kelahiran	Persentase Perangkat daerah (dinas/badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui Kampung KB	100 %	100
			Rasio Aseptor KB	58 %	58
			Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah 15-49	57,00 %	52,79
			Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun (AFR 15-19)	10 %	18%
			Cakupan PUS yang ingin ber – KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need)	5,30 %	6,50
3	Meningkatnya Kualitas perlindungan terhadap Perempuan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan Anak		Rasio KDRT	0,06%	0,11
		Terwujudnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	97 %	97,00%

NO	PROGRAM	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
I	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.733.817.154	2.388.690.222	87,38
II	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	40.199.000	36.034.500	89,64
III	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	305.000.000	252.763.675	82,87
IV	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	20.000.000	17.407.000	87,04
V	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	373.928.000	365.411.000	97,72
VI	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	289.399.900	244.989.800	84,65
VII	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	4.938.179.800	3.645.876.552	73,83
VIII	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.175.092.995	1.118.516.380	95,19
	TOTAL	9.875.616.849	8.069.689.129	81,71

11. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan dan catatan sipil		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89 Poin	89,95 Poin
2		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Rasio penduduk ber-KTP persatuan penduduk	100%	94,19%
			Persentase kepemilikan Akta Kelahiran pada anak 0-17 tahun	100%	88,75%
			Rasio Pasangan Berakta Nikah	75%	64,39%
			Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	40%	37,42%



NO	PROGRAM	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
I	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.947.770.827	1.873.486.229	96,19
II	PENDAFTARAN PENDUDUK	349.897.000	349.782.000	99,97
III	PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (PIAK) DAN PEMANFAATAN DATA	476.352.000	463.337.000	97
TOTAL		2.774.019.827	2.686.605.229	96,85

12. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1		2	3	4	5
1	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Indeks Desa Membangun	0,65	0,65
			Persentase Desa Maju dan Berkembang	74,50%	75,00%
			Realisasi APBDes	100%	100%
			Persentase Bumdes berkembang	28,57%	23,76%

NO	PROGRAM	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.297.620.234	2.251.154.779	97,98
II	PENATAAN DESA	119.000.000	97.803.190	82,19
III	ADMINISTRASI PEMERINTAH DESA	130.000.000	129.700.000	99,77
IV	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN KEMASYARAKAT HUKUM ADAT	388.094.000	368.032.617	94,83
TOTAL		2.934.714.234	2.846.690.586	97,00

13. DINAS PERHUBUNGAN

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Perhubungan		Presentase Kualitas Layanan Perhubungan	34,96	33,52



		Meningkatnya Layanan dan Sarana Perhubungan	Presentase angkutan barang dan penumpang yang layak fungsi	16,37%	13,97%
			Presentase uji kir angkutan barang dan penumpang	21,42%	13,97%
			Persentase penyediaan fasilitas keselamatan jalan pada ruas jalan kabupaten	53,55%	53,07%

NO	PROGRAM	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.082.093.286	2.037.602.146	97,86
II	PEYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	73.000.000	72.940.000	99,92
III	PENGELOLAAN PELAYARAN	25.000.000	25.000.000	100
	TOTAL	2.180.093.286	2.135.542.146	97,96

14. DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	99,90 Point	99,90 Point
		Meningkatnya pelayanan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) skor	3,00 Skor	3,35 Skor
			Indeks Keterbukaan Informasi Publik	85 Skor	100 Skor
			Presentase Perangkat Daerah yang terintegrasi dalam sistem satu Data	90,91%	100 %
			Presentase aplikasi perangkat daerah yang menerapkan keamanan informasi	85 %	100 %



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
I	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.229.176.524	2.138.472.813	95,93
II	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	100.513.000	100.513.000	100
III	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	338.456.999	338.311.750	99,96
IV	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	29.127.500	29.127.400	100
V	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	23.990.000	23.990.000	100
TOTAL		2.721.264.023	2.630.414.963	96,66

15. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	2	3	3	4	5
1	Meningkatnya Kontribusi sektor Perdagangan dan Industri terhadap PDRB	Meningkatnya kontribusi dan daya saing peran Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	Kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB	7,69%	7,50%
			Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	8,74%	1,26%
			Persentase Koperasi Aktif	84,73%	84,73%
			Persentase Peningkatan jumlah usaha mikro menjadi kecil	3,55%	5.49%
			Persentase laju pertumbuhan sektor perdagangan	100%	1.67%
			Persentase laju pertumbuhan sektor perindustrian	0,18%	1,84%



NO	PROGRAM	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.756.123.101	2.599.574.233	94,32
II	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	10.000.000	9.985.000	99,85
III	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	164.859.760	150.459.760	91,27
IV	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	178.624.240	178.624.240	100
V	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	50.100.000	45.090.000	90,00
VI	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	75.000.000	74.805.000	99,74
VII	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	18.059.600	17.664.300	97,81
VIII	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	2.355.008.350	2.289.643.800	97,22
IX	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	25.370.000	24.588.000	96,92
TOTAL		5.633.145.051	5.390.434.333	95,69

16. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	2	3		4	5
1	Meningkatnya Investasi Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Realisasi Investasi Daerah	Rp. 290.000.00 0.000	Rp. 334.134.9 39.346
			Rata-rata nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Point	92,04 Point
		Meningkatnya Investasi di Daerah	Persentase meningkatnya Investasi berskala Nasional	9%	7,5%
			Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMA/PMDN)	Rp. 952.317.17 1.750	Rp. 1.242.350.94 5.000
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perijinan	Persentase Bangunan/Usaha Berijin	88	92,04



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.248.020.962	2.151.950.147	95,73
II	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	64.491.000	63.995.700	99,23
III	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	141.440.000	140.959.520	99,66
IV	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	145.000.000	144.800.000	99,86
TOTAL		2.598.951.962	2.501.705.367	96,26

17. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1		2	3	4	5
1	Meningkatnya Pariwisata dalam Perekonomian Daerah		PDRB Sektor Pariwisata	Rp. 7.941.000.000	Rp. 6.950.000.000
			Persentase Benda, situs dan Kawasan cagar budaya yang dilestarikan	20,88%	18,68%
		Meningkatnya Peran Budaya dan Pariwisata dalam Perekonomian Daerah	Retribusi Jasa Usaha Pariwisata	Rp. 45.000.000	Rp. 50.552.000
			Jumlah kunjungan Wisata	17.500 Orang	16.374 orang
			Rata-rata lama tinggal	4 hari	4 Hari
			Persentase Benda, situs dan Kawasan cagar budaya yang dilestarikan	20,88%	18,68%



NO	PROGRAM	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.291.401.652	2.175.124.776	94,93
II	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	362.257.281	361.154.000	99,70
III	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	297.197.600	274.697.600	92,43
IV	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	2.023.984.000	2.004.146.750	99,02
V	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	201.000.000	201.000.000	100
VI	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	868.647.600	860.501.600	99,06
TOTAL		6.044.488.133	5.876.624.726	97,22

18. DINAS PERIKANAN

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1		2	3	4	5
1	Meningkatnya produksi perikanan		Persentase Produksi Perikanan Meningkat	5,37 %	7,98%
		Meningkatnya produksi perikanan tangkap dan budidaya	Produksi Perikanan laut	13.292 Ton	13.621 Ton
			Produksi perikanan darat	15,00 Ton	18,40 Ton
		Meningkatnya Konsumsi ikan	Konsumsi ikan	58,55 Kg/kpt	59,51 Kg/kpt

NO	PROGRAM	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.709.135.389	1.623.099.632	94,97
II	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	2.690.839.900	2.609.864.890	96,99
III	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.941.236.800	3.758.284.600	95,36
IV	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	277.005.000	276.378.000	99,77
TOTAL		8.618.217.089	8.267.627.122	95,93



19. DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1		2	3	4	5
1	Meningkatnya Produksi Pertanian dan Perkebunan		Produksi Sektor Pertanian dan Perkebunan	162.214,00 Ton	130.527,80 Ton
		Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Pertanian dan Perkebunan	Produksi Padi	114.437,34 Ton	114.437,50 Ton
			Produksi Jagung	14.987,84 Ton	11.937,00 Ton
			Produksi Sayur-sayuran	26.800,00 Ton	20.208,87 Ton
			Produksi Buah-buahan	5.685,00 Ton	5.397,40 Ton
			Produksi Tembakau	17,00 Ton	16,50 Ton
			Produktivitas Padi	5,12 Ton/Ha	5 Ton/Ha
			Ketersediaan Pangan Utama	38,02 %	37,83 %

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.116.904.080	6.484.261.027	91,11
II	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	4.539.301.950	4.524.343.038	99,67
III	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	13.562.005.500	10.853.174.500	80,03
IV	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	275.000.000	273.420.000	99,43
V	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1.922.500.000	1.915.611.600	99,64
VI	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	75.000.000	71.521.000	95,36
VII	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	75.000.000	73.000.500	97,33
	TOTAL	27.565.711.530	24.195.331.665	87,77



20. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	87,25 Poin	91,92 Poin
			Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	14,60 Poin	65,02 Poin
		Meningkatnya kualitas Pelayanan Perpustakaan	Persentase Pengunjung Perpustakaan	89,76%	148,72%
			Persentase peningkatan koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	70,00%	180,59%
			Persentase peningkatan koleksi judul buku yang tersedia perpustakaan daerah	65,00%	151,11%
2	Meningkatnya tata kelola kearsipan pemerintah daerah		Persentase peningkatan arsip terpelihara dan dokumentasi kegiatan daerah	9,90%	9,90%
		Meningkatnya pengelolaan Kearsipan Daerah	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	13,56%	55,56%

NO	PROGRAM	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.380.093.673	1.297.522.727	94,02
II	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	489.970.700	472.507.282	96,44
III	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	46.416.000	46.416.000	100
	TOTAL	1.916.480.373	1.816.446.009	94,78



21. DINAS PETERNAKAN

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Produksi Peternakan		Persentase Peningkatan Produksi Peternakan	3,32%	3,16%
		Meningkatnya Populasi Ternak	Populasi Ternak Besar	101.415 Ekor	101.251 Ekor
			Populasi Ternak Kecil	144.492 Ekor	144.377 Ekor
			Populasi Ternak Unggas	118.429 Ekor	118.310 Ekor

NO	PROGRAM	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.365.172.876	4.219.199.804	96,66
II	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.044.000.000	1.043.613.000	99,96
III	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	4.400.000.000	4.385.837.344	99,68
IV	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	2.299.175.000	2.211.909.605	96,20
V	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	100.862.000	100.782.000	99,92
TOTAL		12.209.209.876	11.961.341.753	97,97

22. SEKRETARIAT DAERAH

A. BAGIAN UMUM

NO	Tujuan	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah		Persentase pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%	100%
		Terwujudnya pelayanan kedinasan KDH WKDH	Persentase kegiatan kedinasan KDH dan WKDH yg terfasilitasi dengan baik sesuai standar keprotokalan	100%	100%



NO	PROGRAM	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	20.998.672.923	19.778.016.177	94,19
	TOTAL	20.998.672.923	19.778.016.177	94,19

B. BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya penyelenggaraan adminitrasi pemerintahan umum dan kesejahteraan rakyat		Presentase penyelenggaraan administrasi pemerintahan umum dan kesejahteraan rakyat	100%	102,78 %
		Terwujudnya penyelenggaraan administrasi pemerintahan umum dan kesejahteraan rakyat	Persentase layanan penyelenggaraan administrasi tata pemerintahan	100%	105,56 %
			Persentase pelaksanaan kegiatan kesejahteraan rakyat	100%	100%

NO	PROGRAM	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	988.664.000	982.216.500	99,35
II	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	2.046.337.500	2.027.118.225	99,06
	TOTAL	3.035.001.500	3.009.334.725	99,15



C. BAGIAN HUKUM

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Penerbitan Produk Hukum Daerah		Persentase Produk Hukum Daerah yang harmonis dan terpublikasi	100%	100%
		Terwujudnya harmonisasi dan publikasi produk hokum	Persentase produk hukum daerah yang diharmonisasi dan diasistensi	100%	100%
			Persentase fasilitasi bantuan hukum untuk penanganan kasus perdata dan Tata Usaha Negara Pemerintah Daerah	100%	33%
			Persentase Publikasi produk hukum daerah pada masyarakat dan aparaturn Pemerintah	100%	100%

NO	PROGRAM	ANGGARAN		
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	158.810.900	156.908.529	98,80
II	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	265.702.000	265.675.000	100
	TOTAL	424.512.900	422.583.529	99,55

D. BAGIAN ORGANISASI

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Pelaksanaan Kinerja Bagian Organisasi		Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan LKIP tepat waktu	100%	100%
			Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja (PK)	100%	100%
		Meningkatnya Kinerja dan Kelembagaan PD yang efektif dan efesien	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki SOTK	100%	100%
			Persentase Perangkat Daerah yang memiliki dokumen ABK dan ANJAB	100%	100%
		Meningkatnya ketatalaksanaan yang efektif dan	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki SOP	100%	100%



		efisien menuju optimalisasi pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	85 Poin	90,22 Poin

NO	PROGRAM	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	366.560.000	361.383.480	98,59
	TOTAL	366.560.000	361.383.480	98,59

E. BAGIAN PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan pelayanan bidang perekonomian dan administrasi pembangunan		Presentase capaian layanan bidang perekonomian dan administrasi pembangunan	100%	99,34%
		Terwujudnya pelayanan bidang perekonomian dan administrasi pembangunan	Presentase perangkat daerah yang menyampaikan laporan fisik keuangan tepat waktu	100%	98,03%
			Persentase Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang sehat	100%	100%
			Ketersediaan data potensi sumber daya alam	100%	100%

NO	PROGRAM	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	152.307.000	152.064.520	99,84
II	PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	878.610.000	873.840.506	99,46
	TOTAL	1.030.917.000	1.025.905.026	99,51



F. BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1		2	3	4	5
1	Terwujudnya tata kelola pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku		Persentase pengadaan barang/jasa melalui e-procurement	80%	44%
		Terwujudnya administrasi layanan pengadaan barang/jasa	Persentase fasilitasi pengadaan barang/jasa	100%	100%
			Persentase jumlah jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa (JF.PPBJ)	60%	38,46%

NO	PROGRAM	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
I	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	174.828.800	174.828.800	100
II	PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	634.500.200	596.251.645	93,97
	TOTAL	809.329.000	771.080.445	95,27

23. SEKRETARIAT DPRD

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas layanan lembaga DPRD dalam rangka mendukung tugas, fungsi dan wewenang		Persentase fasilitasi kegiatan DPRD	100%	100%
		Terwujudnya pelayanan dalam rangka fasilitasi kegiatan DPRD	Persentase rancangan Perda menjadi Perda	100%	175%
			Persentase Keputusan DPRD yang dihasilkan	100%	170%
			Persentase rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD yang dihasilkan	100%	100%



NO	PROGRAM	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.434.636.094	16.200.586.842	98,58
II	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	13.367.209.600	11.714.987.700	87,64
	TOTAL	29.801.845.694	27.915.574.542	93,67

24. KECAMATAN LOBALAIN

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas pelayanan public kecamatan		Rata-rata nilai Index Kepuasan Masyarakat (IKM)	75 Point	83,86 Point
		Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.	Presentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	100 %	100 %
			Presentase desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi desa	100 %	100 %
			Presentase Lembaga Kemasayarakatan yang aktif	100 %	100 %

NO	PROGRAM	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	3.450.671.072	3.409.716.308	98,81
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	944.312.000	942.885.000	99,85
III	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	51.500.000	51.500.000	100
	TOTAL	4.446.483.072	4.404.101.308	99,05



25. KECAMATAN ROTE BARAT LAUT

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas pelayanan public kecamatan		Rata-rata nilai Index Kepuasan Masyarakat (IKM)	75 Point	75 Point
		Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.	Presentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	100 %	100 %
			Presentase desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi desa	100 %	100 %
			Presentase Lembaga Kemasayarakatan yang aktif	100 %	100 %

ANGGARAN				
NO	PROGRAM	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	2.241.847.672	2.044.186.500	91,18
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	319.415.000	319.415.000	100
III	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	25.628.000	25.628.000	100
	TOTAL	2.586.890.672	2.389.229.500	92,36

26. KECAMATAN ROTE BARAT DAYA

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas pelayanan public kecamatan		Rata-rata nilai Index Kepuasan Masyarakat (IKM)	89,08 Point	91,32 Point
		Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.	Presentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	100 %	100 %
			Presentase desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi desa	100 %	100 %
			Presentase Lembaga Kemasayarakatan yang aktif	100 %	100 %



NO	PROGRAM	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	1.342.286.512	1.218.967.193	90,81
II	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	79.038.900	79.037.300	100
	TOTAL	1.421.325.412	1.298.004.493	91,32

27. KECAMATAN ROTE BARAT

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas pelayanan public kecamatan		Rata-rata nilai Index Kepuasan Masyarakat (IKM)	77,00 Point	86,44 Point
		Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.	Presentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	100 %	100 %
			Presentase desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi desa	100 %	100 %
			Presentase Lembaga Kemasayarakatan yang aktif	100 %	100 %

NO	PROGRAM	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	1.549.902.447	1.344.029.584	86,72
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	10.000.000	10.000.000	100
III	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	20.400.000	20.400.000	100
	TOTAL	1.580.302.447	1.374.429.584	86,97



28. KECAMATAN ROTE SELATAN

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan		Rata-rata nilai Index Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,50 Point	91,10 Point
		Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.	Presentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	100 %	100 %
			Presentase desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi desa	100 %	100 %
			Presentase Lembaga Kemasayarakatan yang aktif	100 %	100 %

NO	PROGRAM	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	1.342.020.186	1.204.865.073	89,78
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	22.895.000	22.400.000	97,84
III	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	35.852.000	34.882.000	97,29
	TOTAL	1.400.767.186	1.262.147.073	90,10

29. KECAMATAN ROTE TENGAH

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan		Rata-Rata nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81 Poin	87,78 Poin
		Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan	Presentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	100%	100%
			Presentase desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi desa	100%	100%
			Presentase Lembaga Kemasayarakatan yang aktif	100%	100%



NO	PROGRAM	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	2.019.726.449	1.927.191.795	95,42
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	337.110.000	337.049.000	99,98
III	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8.850.000	8.850.000	100
TOTAL		2.365.686.449	2.273.090.795	96,09

30. KECAMATAN PANTAI BARU

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas pelayanan public kecamatan		Rata-rata nilai Index Kepuasan Masyarakat (IKM)	78 Point	86,67 Point
		Meningkatkan Kinerja	Presentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	100 %	100 %
		Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.	Presentase desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi desa	100 %	100 %
			Presentase Lembaga Kemasayarakatan yang aktif	100 %	100 %

NO	PROGRAM	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	2.247.072.659	2.217.414.152	98,68
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	302.500.000	302.500.000	100
III	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	6.660.000	6.660.000	100
TOTAL		2.556.232.659	2.526.574.152	98,84



31. KECAMATAN ROTE TIMUR

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	
1	Meningkatnya kualitas pelayanan public kecamatan		Rata-rata nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78 Poin	86,39 Poin
		Meningkatkan Kinerja	Presentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	100 %	100 %
		Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan.	Presentase desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi desa	100 %	100 %
			Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	100 %	100 %

NO	PROGRAM	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	1.321.560.376	1.265.001.965	95,72
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	339.795.000	339.725.000	100
III	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	35.014.000	35.014.000	100
TOTAL		1.696.369.376	1.639.740.965	96,66

32. KECAMATAN NDAO NUSE

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas pelayanan public kecamatan		Rata-rata nilai Index Kepuasan Masyarakat (IKM)	75 Point	92 Point
		Meningkatkan Kinerja	Presentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	100 %	100 %
		Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.	Presentase desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi desa	100 %	100 %
			Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	100 %	100 %



NO	PROGRAM	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	808.023.345	751.775.183	93,04
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	29.600.000	29.600.000	100
III	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	17.600.000	17.600.000	100
TOTAL		855.223.345	798.975.183	93,42

33. KECAMATAN LANDU LEKO

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas pelayanan public kecamatan		Rata-rata nilai Index Kepuasan Masyarakat (IKM)	86 Point	87,83 Point
		Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.	Presentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	100 %	100 %
			Presentase desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi desa	100 %	100 %
			Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	100 %	100 %

NO	PROGRAM	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	863.790.161	830.465.915	96,14
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	41.665.000	41.665.000	100
III	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	20.130.000	20.130.000	100
IV	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	26.012.000	26.012.000	100
TOTAL		951.597.161	918.272.915	96,50



34. KECAMATAN LOAHOLU

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas pelayanan public kecamatan		Rata-rata nilai Index Kepuasan Masyarakat (IKM)	89,50 Point	91,39 Point
		Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.	Presentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	100 %	100 %
			Presentase desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi desa	100 %	100 %
			Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	100 %	100 %

ANGGARAN				
NO	PROGRAM	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	1.458.675.498	1.329.941.885	91,17
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	14.300.000	14.300.000	100
III	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	29.960.000	29.945.000	100
	TOTAL	1.502.935.498	1.374.186.885	91,43

35. INSPEKTORAT

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Efektifitas Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		Jumlah Temuan BPK	2 Temuan	5 Temuan
			Persentase Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	54,35	100%
			Level SPIP	2	N/A
		Meningkatnya kualitas dan kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	Level 2	Level 2
			Persentase Aparatur Pemeriksa (Auditor dan P2UPD) yang Profesional	80%	76%
		Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan TLHP	Persentase TLHP APIP	73%	75%
			Persentase TLHP BPK	75%	75,33%



NO	PROGRAM	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.138.900.987	3.057.613.744	97,41
II	PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.006.718.300	999.739.000	99,31
III	PERUMUSAN KEBIJAKAN. PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	7.500.000	7.500.000	100
TOTAL		4.153.119.287	4.064.852.744	97,87

36. BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah		Nilai Perencanaan Kinerja SAKIP	Poin	20,00	20,42
			Indeks Inovasi Daerah	Skor	40,00	40,18
2		Terwujudnya Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100	100
			Persentase Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	%	80	96,49
3		Penerapan kelitbangan untuk pembangunan daerah	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	%	100	100
			Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah	%	100	100

NO	PROGRAM	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.737.828.993	2.589.775.497	94,59
II	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	922.001.864	918.055.600	99,57
III	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	385.380.268	370.044.200	96,02



IV	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	2.402.007.393	2.337.007.710	97,29
V	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	13.973.500	13.273.500	94,99
TOTAL		6.461.192.018	6.228.156.507	96,39

37. BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah		Opini BPK terhadap Hasil Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	73,000%	75,899%
2		Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah	Penetapan APBD	TEPAT WAKTU	TEPAT WAKTU
			Persentase Pengelolaan Aset Daerah	75,56%	75,65%
			Persentase SILPA terhadap APBD	3,00%	4,94%

ANGGARAN				
NO	PROGRAM	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	17.600.434.448	12.638.577.207	71,81
II	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	164.458.754.469	162.387.607.476	98,74
III	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	607.229.000	553.375.276	91,13
TOTAL		182.666.417.917	175.579.559.959	96,12

38. BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Persentase realisasi PAD	100%	101,32%
		Meningkatnya Kontribusi Pendapat Asli Daerah (PAD)	Persentase PAD terhadap pendapatan	4,25%	3,82%



NO	PROGRAM	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.050.598.659	3.841.026.065	76,05
II	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	924.406.473	873.284.235	94,47
	TOTAL	5.975.005.132	4.714.310.300	78,90

39. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	TARGET	REALISASI
1	3	3	4	5	6
1	Terwujudnya Peningkatan Kompetensi ASN		Persentase cakupan pemenuhan jabatan pada perangkat daerah	93,23%	92,18%
			Persentase tingkat disiplin ASN	99,93%	99,93%
		Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas instansi pemerintah	Persentase Jabatan pimpinan tinggi pratama yang terisi pada perangkat daerah	94,12%	78,78%
			Persentase jabatan administrator dan pengawas yang terisi pada perangkat daerah	93,14%	88,77%
			Persentase Indeks Profesional ASN	62,00%	76,60%
		Meningkatnya kompetensi aparatur sesuai bidang keahlian yang dibutuhkan	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	100%	100%
			Persentase ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	100%	100%

NO	PROGRAM	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.437.071.502	2.138.474.010	87,75
II	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	2.122.996.779	1.756.818.850	82,75
III	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	328.677.953	303.707.300	92,40
	TOTAL	4.888.746.234	4.199.000.160	85,89



2. REALISASI ANGGARAN

Adapun alokasi anggaran, program/kegiatan dan realisasi yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut :

1. DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Pada Tahun Anggaran 2024 Dinas Pendidikan, Kemudaan dan Olahraga Kabupaten Rote Ndao mendapat alokasi anggaran sebesar **Rp.275.221.571.492,-** realisasi sebesar **Rp.266.312.064.887,50,-** atau 96,76% dengan rincian sebagai berikut:

- a. Belanja Operasi sebesar **Rp.246.336.287.207,-** realisasi sebesar **Rp.237.745.696.186,-** atau 96,51%
- b. Belanja Modal sebesar **Rp. 28.885.284.285,-** realisasi sebesar **Rp. 28.566.368.701,50,-** atau 98,90%

Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Dinas Pendidikan, Kemudaan dan Olahraga Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut :

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	2	3	4	5
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	194.742.347.023	188.844.947.611	96,97
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39.428.000	39.338.000	99,77
-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	34.428.000	34.338.000	99,74
-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000	5.000.000	100
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	194.218.930.423	188.337.287.782	96,97
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	193.922.854.423	188.044.686.782	96,97
-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	296.076.000	292.601.000	98,83
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	47.400.000	47.400.000	100



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	2	3	4	5
-	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	25.800.000	25.800.000	100
-	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	21.600.000	21.600.000	100
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	285.611.600	284.454.217	99,59
-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.370.000	2.353.000	99,28
-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	52.661.000	52.392.000	99,49
-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	45.534.000	45.530.000	99,99
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	32.718.600	32.718.600	100
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	152.328.000	151.460.617	99,43
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	81.071.000	68.978.202	85,08
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	81.071.000	68.978.202	85,08
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	69.906.000	67.489.410	96,54
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	69.906.000	67.489.410	96,54
II	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	73.201.203.469	70.980.221.144,50	96,97
7	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	43.956.764.635	42.265.391.085,50	96,15
-	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	923.410.000	922.680.000	99,92
-	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	805.200.000	805.110.000	99,99
-	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/ Penjaga Sekolah	763.555.000	760.605.000	99,61
-	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	88.850.000	87.945.000	98,98
-	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	148.400.000	148.345.000	99,96
-	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	339.800.000	333.286.000	98,08
-	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	438.730.000	438.727.000	100,00



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	2	3	4	5
-	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	8.057.250.000	6.887.250.000	85,48
-	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.179.750.000	995.026.571	84,34
-	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	46.741.400	42.536.400	91,00
-	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	17.893.696.000	17.889.879.400	99,98
-	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	1.214.702.000	1.214.522.000	99,99
-	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	85.000.000	62.266.000	73,25
-	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	650.000.000	647.950.000	99,68
-	Pembangunan Ruang Kelas Baru	2.132.800.000	1.976.468.800	92,67
-	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	291.980.000	290.000.000	99,32
-	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	250.000.000	193.754.534	77,50
-	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	8.646.900.235	8.569.039.380,50	99,10
8	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	20.879.906.350	20.557.224.692	98,45
-	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	339.230.000	338.910.000	99,91
-	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	302.909.000	300.039.000	99,05
-	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	489.600.000	469.202.000	95,83
-	Pembangunan Laboratorium	1.656.131.250	1.655.151.250	99,94
-	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.644.120.000	1.625.881.000	98,89
-	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	322.578.000	321.748.000	99,74
-	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	265.740.000	257.640.000	96,95
-	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	566.930.000	566.610.000	99,94
-	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	159.980.000	159.917.100	99,96
-	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	425.000.000	423.229.000	99,58



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	2	3	4	5
-	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	694.699.100	532.280.787	76,62
-	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	161.780.000	132.243.187	81,74
-	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	11.034.320.000	11.021.021.000	99,88
-	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	85.000.000	62.670.000	73,73
-	Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.095.000.000	1.084.769.368	99,07
-	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	173.389.000	152.803.000	88,13
-	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	650.000.000	645.950.000	99,38
-	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	813.500.000	807.160.000	99,22
9	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	6.731.132.484	6.581.765.367	97,78
-	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	202.108.000	202.108.000	100,00
-	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	1.028.000.000	1.025.840.400	99,79
-	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	50.000.000	49.094.000	98,19
-	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	981.000.000	981.000.000	100,00
-	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	66.500.000	60.800.000	91,43
-	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	204.160.000	203.081.967	99,47
-	Pengelolaan Dana BOP PAUD	2.215.200.000	2.192.952.000	99,00
-	Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.710.760.484	1.599.985.000	93,52
-	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	273.404.000	266.904.000	97,62
10	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.633.400.000	1.575.840.000	96,48
-	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	1.621.500.000	1.570.400.000	96,85
-	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	11.900.000	5.440.000	45,71



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	2	3	4	5
III	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	260.930.000	178.761.441	68,51
11	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	260.930.000	178.761.441	68,51
-	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	215.930.000	135.387.441	62,70
-	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	45.000.000	43.374.000	96,39
IV	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	4.851.592.000	4.812.409.211	99,19
12	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	4.701.592.000	4.662.409.211	99,17
-	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	4.701.592.000	4.662.409.211	99,17
13	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000	150.000.000	100
-	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	150.000.000	150.000.000	100
V	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.090.499.000	1.420.725.480	67,96
14	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2.090.499.000	1.420.725.480	67,96



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	2	3	4	5
-	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	2.090.499.000	1.420.725.480	67,96
VI	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	75.000.000	75.000.000	100
15	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	75.000.000	75.000.000	100
-	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	75.000.000	75.000.000	100
TOTAL		275.221.571.492	266.312.064.887,50	96,76

2. DINAS KESEHATAN

Pada Tahun Anggaran 2024 Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao mendapat alokasi anggaran sebesar **Rp.149.424.835.486,-** realisasi sebesar **Rp.129.299.134.828,-** atau 86,53% dengan rincian sebagai berikut:

- Belanja Operasi sebesar **Rp.125.095.218.825,-** realisasi sebesar **Rp.106.536.488.892,-** atau 85,16%.
- Belanja Modal sebesar **Rp.24.629.746.101,-** realisasi sebesar **Rp.22.768.906.696,-** atau 92,44%.

Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut :

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	2	3	4	5
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	62.056.907.172	57.267.269.878	92,28
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	76.601.910	75.174.799	98,14
-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	61.604.200	61.589.089	99,98
-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.997.710	13.585.710	90,59



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	2	3	4	5
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	61.441.253.929	56.682.736.604	92,26
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	61.156.125.929	56.398.279.604	92,22
-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	245.128.000	245.017.000	99,95
-	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	40.000.000	39.440.000	98,60
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	28.800.000	28.800.000	100
-	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	28.800.000	28.800.000	100
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	68.210.000	64.600.000	94,71
-	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	68.210.000	64.600.000	94,71
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	241.132.583	233.367.402	96,78
-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	98.426.950	95.716.000	97,25
-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	44.335.550	44.319.500	99,96
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	23.116.083	23.115.600	100
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.254.000	70.216.302	93,31
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	61.749.750	46.714.978	75,65
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	61.749.750	46.714.978	75,65
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	139.159.000	135.876.095	97,64
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	137.959.000	134.676.095	97,62
-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.200.000	1.200.000	100
II	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	35.828.893.936	29.942.308.652	83,57
8	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	21.810.701.539	19.608.568.887	89,90



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	2	3	4	5
-	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.105.687.814	943.040.710	85,29
-	Pengembangan Puskesmas	11.743.072.400	11.173.105.562	95,15
-	Pengembangan fasilitas kesehatan lainnya	1.875.377.013	1.864.157.800	99,40
-	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	260.000.000	179.332.887	68,97
-	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	374.807.600	207.015.000	55,23
-	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.767.728.350	964.095.260	54,54
-	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	16.525.000	8.869.100	53,67
-	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	4.503.323.362	4.123.486.218	91,57
-	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	164.180.000	145.466.350	88,60
9	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	13.489.442.815	9.932.858.589	73,63
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	501.247.857	443.004.357	88,38
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	47.024.578	46.993.578	99,93
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	112.596.000	67.436.180	59,89
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	545.383.162	493.018.862	90,40
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	208.157.350	78.907.200	37,91
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	124.599.533	85.795.801	68,86
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	26.948.300	24.804.300	92,04
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	18.999.800	18.255.800	96,08
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	263.868.300	259.603.150	98,38



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	2	3	4	5
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	54.684.400	46.663.000	85,33
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	183.296.400	177.233.200	96,69
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	52.480.000	51.539.000	98,21
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2.507.587.941	1.638.746.237	65,35
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	9.435.000	6.970.000	73,87
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	924.724.674	785.309.924	84,92
-	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	272.361.400	180.794.800	66,38
-	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	227.658.300	124.932.635	54,88
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	31.331.600	26.367.000	84,15
-	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	853.493.940	442.295.545	51,82
-	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	5.506.712.300	4.283.297.200	77,78
-	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB Rujukan Nasional	11.760.000	2.660.000	22,62
-	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	374.350.000	347.507.865	92,83
-	Investigasi awal Kejadian tidak di harapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	3.060.000	3.060.000	100,00
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	322.434.680	266.093.955	82,53
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	305.247.300	31.569.000	10,34
10	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	122.800.000	118.920.424	96,84
-	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	122.800.000	118.920.424	96,84
11	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	405.949.582	281.960.752	69,46
-	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	405.949.582	281.960.752	69,46



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	2	3	4	5
III	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	10.662.803.040	7.245.126.554	67,95
12	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	9.204.572.000	6.203.444.750	67,40
-	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	9.127.000.000	6.132.250.000	67,19
-	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	77.572.000	71.194.750	91,78
13	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.458.231.040	1.041.681.804	71,43
-	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.458.231.040	1.041.681.804	71,43
IV	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	280.609.700	180.082.365	64,18
14	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	18.454.500	15.311.365	82,97
-	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	18.454.500	15.311.365	82,97
15	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	105.484.200	95.130.000	90,18



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	2	3	4	5
-	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	105.484.200	95.130.000	90,18
16	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	156.671.000	69.641.000	44,45
-	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	156.671.000	69.641.000	44,45
V	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	339.910.092	330.060.262	97,10
17	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	74.884.576	68.546.076	91,54
-	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	74.884.576	68.546.076	91,54
18	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	265.025.516	261.514.186	98,68
-	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	265.025.516	261.514.186	98,68
TOTAL		109.169.123.940	94.964.847.711	86,99
PUSKESMAS EAHUN		1.788.064.159	1.303.527.972	72,90
VI	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.781.335.459	1.302.627.972	73,13
19	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.774.594.459	1.297.632.972	73,12



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	2	3	4	5
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	70.356.000	60.258.000	85,65
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	17.697.600	16.389.600	92,61
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	33.000.000	33.000.000	100,00
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.800.000	1.800.000	100,00
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	6.600.000	6.600.000	100,00
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	388.728.400	290.520.000	74,74
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	17.400.000	6.600.000	37,93
-	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	28.828.800	25.024.800	86,80
-	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	153.600.000	141.300.000	91,99
-	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	638.570.859	604.908.172	94,73
-	Operasional Pelayanan Puskesmas	227.772.600	34.834.400	15,29
-	Investigasi Awal Kejadian Tidak di Harapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	3.300.000	0	0,00
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan HIV (ODHIV)	1.200.000	0	0,00
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	16.800.000	16.800.000	100,00
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	26.749.800	26.598.000	99,43
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	142.190.400	33.000.000	23,21
20	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	6.741.000	4.995.000	74,10
-	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	6.741.000	4.995.000	74,10
VII	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	6.728.700	900.000	13,38
21	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	6.728.700	900.000	13,38



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	2	3	4	5
-	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	6.728.700	900.000	13,38
PUSKESMAS SOTIMORI		801.926.265	476.376.907	59,40
VIII	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	797.726.265	473.676.907	59,38
22	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	788.558.665	469.236.907	59,51
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	26.115.600	24.090.000	92,24
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	14.415.000	4.582.500	31,79
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	24.000.000	9.600.000	40,00
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	5.400.000	1.500.000	27,78
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	2.100.000	1.800.000	85,71
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	149.682.200	92.649.500	61,90
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4.200.000	2.100.000	50,00
-	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	11.032.500	3.150.000	28,55
-	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	79.050.000	24.450.000	30,93
-	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	278.979.365	267.314.907	95,82
-	Operasional Pelayanan Puskesmas	107.252.400	3.200.000	2,98
-	Investigasi Awal Kejadian Tidak di Harapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	2.100.000	0	0,00
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan HIV (ODHIV)	966.600	900.000	93,11
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	2.100.000	900.000	42,86
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	81.165.000	33.000.000	40,66
23	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	9.167.600	4.440.000	48,43



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	2	3	4	5
-	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	9.167.600	4.440.000	48,43
IX	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	4.200.000	2.700.000	64,29
24	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4.200.000	2.700.000	64,29
-	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4.200.000	2.700.000	64,29
PUSKESMAS KORBAFO		989.822.870	508.640.948	51,39
X	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	987.823.120	508.640.948	51,49
25	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	980.527.270	503.645.948	51,36
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	72.480.000	4.800.000	6,62
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	4.866.000	0	0,00
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	22.500.000	22.500.000	100,00
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	3.600.000	0	0,00
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	2.400.000	0	0,00
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	169.465.100	134.170.000	79,17
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5.100.000	0	0,00
-	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	15.514.200	0	0,00
-	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	124.200.000	21.600.000	17,39
-	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	306.361.370	296.380.948	96,74
-	Operasional Pelayanan Puskesmas	150.246.600	4.995.000	3,32
-	Investigasi Awal Kejadian Tidak di Harapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	450.000	0	0,00



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	2	3	4	5
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan HIV (ODHIV)	600.000	0	0,00
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	1.200.000	0	0,00
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	5.064.000	0	0,00
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	96.480.000	19.200.000	19,90
26	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	7.295.850	4.995.000	68,46
-	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	7.295.850	4.995.000	68,46
XI	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.999.750	0	0,00
27	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.999.750	0	0,00
-	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1.999.750	0	0,00
PUSKESMAS SONIMANU		735.215.556	544.874.904	74,11
XII	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	733.616.556	544.874.904	74,27
28	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	726.985.956	539.879.904	74,26
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	46.525.500	46.525.500	100,00
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	1.716.000	0	0,00
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	16.500.000	16.500.000	100,00
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	9.450.000	4.200.000	44,44
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	450.000	0	0,00
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	111.130.100	87.195.100	78,46
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	8.700.000	4.200.000	48,28



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	2	3	4	5
-	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	11.230.800	600.000	5,34
-	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	88.650.000	63.450.000	71,57
-	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	230.351.256	226.686.004	98,41
-	Operasional Pelayanan Puskesmas	116.970.300	9.861.300	8,43
-	Investigasi Awal Kejadian Tidak di Harapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	450.000	0	0,00
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan HIV (ODHIV)	450.000	0	0,00
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	1.050.000	0	0,00
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	1.966.000	1.966.000	100
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	81.396.000	78.696.000	96,68
29	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	6.630.600	4.995.000	75,33
-	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	6.630.600	4.995.000	75,33
XIII	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.599.000	0	0,00
30	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.599.000	0	0,00
-	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1.599.000	0	0,00
PUSKESMAS FEAPOPI		1.062.603.663	856.773.280,54	80,63
XIV	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.047.313.663	848.183.280,54	80,99
31	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.040.276.763	843.188.280,54	81,05
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	38.400.000	24.870.000	64,77
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	12.300.000	10.800.000	87,80



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	2	3	4	5
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	30.600.000	25.500.000	83,33
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	12.900.000	5.700.000	44,19
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	2.400.000	2.400.000	100,00
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	168.100.000	127.300.000	75,73
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	11.700.000	5.400.000	46,15
-	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	37.350.000	30.150.000	80,72
-	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	94.950.000	85.800.000	90,36
-	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	351.229.763	332.680.926,54	94,72
-	Operasional Pelayanan Puskesmas	163.047.000	77.537.354	47,56
-	Investigasi Awal Kejadian Tidak di Harapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	300.000	0	0,00
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan HIV (ODHIV)	1.800.000	450.000	25,00
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	2.400.000	1.800.000	75,00
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	26.400.000	26.400.000	100
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	86.400.000	86.400.000	100
32	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	7.036.900	4.995.000	70,98
-	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	7.036.900	4.995.000	70,98
XV	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	15.290.000	8.590.000	56,18
33	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	15.290.000	8.590.000	56,18
-	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	15.290.000	8.590.000	56,18
PUSKESMAS BAA		3.202.788.110	2.883.834.972	90,04



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	2	3	4	5
XVI	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	3.165.853.510	2.849.650.372	90,01
34	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.149.932.472	2.844.655.372	90,31
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	139.104.000	139.104.000	100
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	13.248.000	10.998.000	83,02
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	72.000.000	72.000.000	100
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	23.100.000	17.100.000	74,03
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	11.400.000	11.400.000	100
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	494.611.500	366.081.500	74,01
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	24.150.000	20.700.000	85,71
-	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	39.327.000	37.227.000	94,66
-	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	268.800.000	252.750.000	94,03
-	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1.295.413.772	1.261.189.052	97,36
-	Operasional Pelayanan Puskesmas	421.842.600	314.270.220	74,50
-	Investigasi Awal Kejadian Tidak di Harapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	2.700.000	2.700.000	100
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan HIV (ODHIV)	9.000.000	6.300.000	70,00
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	5.400.000	3.000.000	55,56
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	103.161.600	103.161.600	100
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	226.674.000	226.674.000	100
35	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	15.921.038	4.995.000	31,37
-	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	15.921.038	4.995.000	31,37



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	2	3	4	5
XVII	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	36.934.600	34.184.600	92,55
36	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Kabupaten/Kota	36.934.600	34.184.600	92,55
-	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	36.934.600	34.184.600	92,55
PUSKESMAS OELE		891.252.822	609.918.239,37	68,43
XVIII	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	872.643.022	608.868.239,37	69,77
37	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	870.057.322	606.668.239,37	69,73
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	26.817.000	21.121.200	78,76
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	10.348.500	8.248.500	79,71
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	16.500.000	15.300.000	92,73
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	5.700.000	5.100.000	89,47
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	1.200.000	0	0,00
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	145.581.100	73.715.000	50,64
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	6.750.000	2.100.000	31,11
-	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	27.928.800	0	0,00
-	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	87.000.000	75.300.000	86,55
-	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	316.350.022	302.721.139,37	95,69
-	Operasional Pelayanan Puskesmas	132.783.100	16.061.400	12,10
-	Investigasi Awal Kejadian Tidak di Harapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	150.000	0	0,00
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan HIV (ODHIV)	150.000	0	0,00



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	2	3	4	5
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	900.000	900.000	100
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	24.257.800	24.257.800	100
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	67.641.000	61.843.200	91,43
38	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	2.585.700	2.200.000	85,08
-	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	2.585.700	2.200.000	85,08
XIX	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	18.609.800	1.050.000	5,64
39	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Kabupaten/Kota	18.609.800	1.050.000	5,64
-	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	18.609.800	1.050.000	5,64
PUSKESMAS BUSALANGGA		1.732.276.198	1.614.541.636,64	93,20
XX	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.727.227.698	1.610.892.136,64	93,26
40	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.720.566.698	1.605.897.136,64	93,34
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	86.335.200	84.703.500	98,11
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu BERSALIN	31.944.600	29.694.600	92,96
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	30.000.000	30.000.000	100
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	4.200.000	4.200.000	100
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	6.000.000	6.000.000	100,00
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	299.743.000	262.543.000	87,59
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	8.550.000	6.900.000	80,70
-	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	28.062.300	13.965.000	49,76



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	2	3	4	5
-	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	199.950.000	197.700.000	98,87
-	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	585.425.998	549.231.220,64	93,82
-	Operasional Pelayanan Puskesmas	252.595.200	233.499.416	92,44
-	Investigasi Awal Kejadian Tidak di Harapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	900.000	900.000	100
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan HIV (ODHIV)	1.800.000	1.800.000	100
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	1.950.000	1.950.000	100
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	31.975.200	31.975.200	100
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	151.135.200	150.835.200	99,80
41	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	6.661.000	4.995.000	74,99
-	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	6.661.000	4.995.000	74,99
XXI	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	5.048.500	3.649.500	72,29
42	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Kabupaten/Kota	5.048.500	3.649.500	72,29
-	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	5.048.500	3.649.500	72,29
PUSKESMAS OELABA		1.858.898.102	1.456.408.273	78,35
XXII	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.845.351.902	1.443.311.623	78,21
43	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.838.579.202	1.438.316.623	78,23
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	77.280.000	73.716.000	95,39
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	11.848.500	8.248.500	69,62



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	2	3	4	5
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	28.500.000	28.500.000	100,00
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	6.900.000	3.750.000	54,35
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	3.000.000	3.000.000	100,00
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	397.095.800	347.100.800	87,41
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	13.500.000	7.500.000	55,56
-	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	21.648.000	9.999.000	46,19
-	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	149.850.000	130.350.000	86,99
-	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	754.961.102	551.368.973	73,03
-	Operasional Pelayanan Puskesmas	216.465.800	132.667.350	61,29
-	Investigasi Awal Kejadian Tidak di Harapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	750.000	0	0,00
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan HIV (ODHIV)	1.500.000	1.500.000	100,00
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	1.500.000	0	0,00
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	153.780.000	140.616.000	91,44
44	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	6.772.700	4.995.000	73,75
-	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	6.772.700	4.995.000	73,75
XXIII	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	13.546.200	13.096.650	96,68
45	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	13.546.200	13.096.650	96,68
-	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	13.546.200	13.096.650	96,68
PUSKESMAS BATUTUA		3.242.142.048	1.389.205.076	42,85



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	2	3	4	5
XXIV	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	3.178.720.548	1.389.205.076	43,70
46	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.171.984.848	1.384.210.076	43,64
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	106.333.500	34.615.800	32,55
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	21.930.000	18.330.000	83,58
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	43.500.000	0	0,00
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	18.900.000	0	0,00
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV	11.400.000	0	0,00
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	495.609.000	226.809.500	45,76
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	16.650.000	0	0,00
-	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	46.895.400	4.382.400	9,35
-	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	246.300.000	43.050.000	17,48
-	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1.376.450.248	1.012.661.976	73,57
-	Operasional Pelayanan Puskesmas	410.451.400	33.560.400	8,18
-	Investigasi Awal Kejadian Tidak di Harapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	2.850.000	0	0,00
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan HIV (ODHIV)	3.000.000	0	0,00
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	6.000.000	0	0,00
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	108.892.800	0	0,00
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	256.822.500	10.800.000	4,21
47	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	6.735.700	4.995.000	74,16
-	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	6.735.700	4.995.000	74,16



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	2	3	4	5
XXV	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	63.421.500	0	0,00
48	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	63.421.500	0	0,00
-	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	63.421.500	0	0,00
PUSKESMAS DELHA		1.156.584.862	1.026.611.794	88,76
XXVI	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.154.502.362	1.024.529.294	88,74
49	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.152.608.200	1.023.419.294	88,79
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	24.486.000	24.153.000	98,64
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	25.596.000	19.063.200	74,48
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	24.000.000	24.000.000	100
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	5.550.000	5.550.000	100
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV	6.300.000	6.300.000	100,00
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	167.612.400	138.812.400	82,82
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12.300.000	7.200.000	58,54
-	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	34.812.000	34.512.000	99,14
-	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	118.200.000	117.000.000	98,98
-	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	445.138.900	429.785.975	96,55
-	Operasional Pelayanan Puskesmas	171.613.400	100.643.219	58,65
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan HIV (ODHIV)	300.000	300.000	100
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	1.800.000	1.800.000	100



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	2	3	4	5
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	37.786.000	37.786.000	100
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	77.113.500	76.513.500	99,22
50	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	1.894.162	1.110.000	58,60
-	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1.894.162	1.110.000	58,60
XXVII	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	2.082.500	2.082.500	100
51	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.082.500	2.082.500	100
-	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2.082.500	2.082.500	100
PUSKESMAS NDAO		608.645.609	363.847.863	59,78
XXVIII	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	602.998.609	363.847.863	60,34
52	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	595.377.509	358.852.863	60,27
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	25.650.000	13.625.100	53,12
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	18.000.000	0	0,00
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	5.550.000	300.000	5,41
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV	1.200.000	600.000	50,00
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	77.730.900	49.935.900	64,24
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12.000.000	3.750.000	31,25
-	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	30.630.000	4.200.000	13,71
-	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	58.500.000	43.200.000	73,85
-	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	222.834.609	200.993.163	90,20



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	2	3	4	5
-	Operasional Pelayanan Puskesmas	91.682.000	10.928.700	11,92
-	Investigasi Awal Kejadian Tidak di Harapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1.500.000	0	0,00
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan HIV (ODHIV)	1.200.000	0	0,00
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	750.000	0	0,00
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	48.150.000	31.320.000	65,05
53	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	7.621.100	4.995.000	65,54
-	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	7.621.100	4.995.000	65,54
XXIX	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	5.647.000	0	0,00
54	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.647.000	0	0,00
-	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	5.647.000	0	0,00
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAA		22.185.491.282	21.299.725.251	96,01
XXX	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	14.709.107.282	13.923.691.251	94,66
55	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	10.282.894.077	10.064.947.784	97,88
-	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	1.139.854.500	1.139.843.080	100
-	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	6.081.736.107	5.883.951.704	96,75
-	Pengembangan Rumah Sakit	3.061.303.470	3.041.153.000	99,34
56	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.732.964.205	3.320.148.331	88,94



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	2	3	4	5
-	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	3.677.736.205	3.311.514.831	90,04
-	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	55.228.000	8.633.500	15,63
57	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	693.249.000	538.595.136	77,69
-	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	693.249.000	538.595.136	77,69
XXXI	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	7.476.384.000	7.376.034.000	98,66
58	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	7.476.384.000	7.376.034.000	98,66
-	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	7.476.384.000	7.376.034.000	98,66
TOTAL		40.255.711.546	34.334.287.117	85,29
TOTAL (DINAS KESEHATAN + PUSKESMAS & RSUD)		149.424.835.486	129.299.134.828	86,53

3. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Pada Tahun Anggaran 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rote Ndao mendapat alokasi anggaran sebesar **Rp.77.919.585.205,-** realisasi sebesar **Rp.76.214.644.625,-** atau 99,30% dengan rincian sebagai berikut:

- Belanja Operasi sebesar **Rp. 12.510.239.445,-** realisasi sebesar **Rp.11.889.377.268,-** atau 95,04%.
- Belanja Modal sebesar **Rp.65.409.345.760,-** realisasi sebesar **Rp.64.325.267.357,-** atau 98,34%



Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut :

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	2	3	4	5
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	4.272.923.032	4.054.079.113	94,88
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	110.000.000	109.691.200	99,72
-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	55.000.000	54.846.800	99,72
-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	55.000.000	54.844.400	99,72
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.194.838.632	2.992.317.535	93,66
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.999.838.632	2.797.320.535	93,25
-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	195.000.000	194.997.000	100
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	11.400.000	11.400.000	100
-	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	11.400.000	11.400.000	100
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	496.519.400	495.675.471	99,83
-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.950.000	1.945.000	99,74
-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	136.500.000	136.500.000	100
-	Penyediaan Bahan Logistik	25.000.000	24.539.130	98,16
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.000.000	24.995.300	99,98
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	308.069.400	307.696.041	99,88
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	57.984.000	53.294.351	91,91
-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.984.000	3.978.000	99,85
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	54.000.000	49.316.351	91,33
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	402.181.000	391.700.556	97,39
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	187.096.000	177.016.556	94,61



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	2	3	4	5
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	211.500.000	211.499.000	100
-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.585.000	3.185.000	88,84
II	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	9.796.996.000	9.361.348.078	95,55
7	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.057.000.000	2.728.592.375	89,26
-	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	1.642.000.000	1.485.302.375	90,46
-	Normalisasi/Restorasi Sungai	860.000.000	734.540.000	85,41
-	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	555.000.000	508.750.000	91,67
8	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	6.739.996.000	6.632.755.703	98,41
-	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	2.341.983.000	2.312.052.903	98,72
-	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	4.161.915.000	4.084.604.800	98,14
-	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	236.098.000	236.098.000	100
III	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	6.492.397.000	6.303.463.324	97,09
9	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	6.492.397.000	6.303.463.324	97,09
-	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di kawasan Perdesaan	5.835.781.000	5.668.463.324	97,13
-	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di kawasan Perdesaan	656.616.000	635.000.000	96,71
IV	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	5.716.654.000	5.549.831.100	97,08
10	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	5.716.654.000	5.549.831.100	97,08



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	2	3	4	5
-	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	5.716.654.000	5.549.831.100	97,08
V	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	210.674.000	198.358.400	94,15
11	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	210.674.000	198.358.400	94,15
-	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	131.674.000	124.280.000	94,38
-	Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	79.000.000	74.078.400	93,77
VI	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	50.979.941.173	50.434.759.987	98,93
12	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	50.979.941.173	50.434.759.987	98,93
-	Survei Kondisi Jalan /Jembatan	390.874.750	387.149.130	99,05
-	Rekonstruksi Jalan	50.144.550.760	49.603.595.194	98,92
-	Rehabilitasi Jalan	210.000.000	209.500.000	99,76
-	Pemeliharaan Rutin Jalan	234.515.663	234.515.663	100
VII	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	450.000.000	312.804.623	69,51
13	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	400.000.000	279.262.123	69,82
-	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan	400.000.000	279.262.123	69,82
14	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	33.542.500	67,09
-	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	50.000.000	33.542.500	67,09
TOTAL		77.919.585.205	76.214.644.625	97,81



4. DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Pada Tahun Anggaran 2024, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao mendapat alokasi anggaran sebesar **Rp. 8.041.632.200,-** realisasi sebesar **Rp. 7.567.265.397,-** atau 94,10% dengan rincian sebagai berikut :

- a. Belanja Operasi sebesar **Rp. 7.057.932.200,-** realisasi sebesar **Rp. 6.767.598.088,-** atau 95,89%
- b. Belanja Modal sebesar **Rp. 983.700.000,-** realisasi sebesar **Rp.799.667.309,-** atau 81,29%.

Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut :

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	1		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	2	3	4	5
I	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	2.668.399.500	2.484.445.561	93,11
1	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33.655.000	33.643.500	99,97
-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.355.000	18.345.500	99,95
-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.300.000	15.298.000	99,99
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.307.353.500	2.134.723.787	92,52
-	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	2.256.233.500	2.083.603.787	92,35
-	Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	51.120.000	51.120.000	100
3	Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	9.000.000	9.000.000	100
-	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	9.000.000	9.000.000	100
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	195.199.000	195.092.000	99,95
-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.060.000	1.060.000	100



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	1		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	2	3	4	5
-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.700.000	18.700.000	100
-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000	25.000.000	100
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.000.000	22.000.000	100
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	128.439.000	128.332.000	99,92
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	42.117.000	35.591.700	84,51
-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.042.000	3.034.000	99,74
-	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air Dan Listrik	39.075.000	32.557.700	83,32
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	81.075.000	76.394.574	94,23
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	81.075.000	76.394.574	94,23
II	PENGEMBANGAN PERUMAHAN	95.200.000	95.200.000	100
7	Pembangunan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau - Relokasi Program Kabupaten/Kota	95.200.000	95.200.000	100
-	Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	95.200.000	95.200.000	100
III	KAWASAN PERMUKIMAN	2.357.515.700	2.326.318.043	98,68
8	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	441.470.000	425.278.343	96,33
-	Penyusunan/Review/Legalisisasi Kebijakan Bidang PKP	441.470.000	425.278.343	96,33
9	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1.916.045.700	1.901.039.700	99,22
-	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	1.916.045.700	1.901.039.700	99,22
IV	PENATAGUNAAN TANAH	200.000.000	190.382.298	95,19
10	Penggunaan Tanah Yang Hamparannya Dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000	190.382.298	95,19
-	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	200.000.000	190.382.298	95,19



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	1		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	2	3	4	5
V	PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	322.859.000	315.693.823	97,78
11	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	322.859.000	315.693.823	97,78
-	Pembuatan Dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	322.859.000	315.693.823	97,78
VI	PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	225.000.000	220.777.700	98,12
12	Pencegahan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	175.000.000	170.994.700	97,71
-	Koordinasi. Sinkronisasi Dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah. Air. Udara Dan Laut	75.000.000	74.077.800	98,77
-	Koordinasi. Sinkronisasi Dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca. Mitigasi Dan Adaptasi Perubahan Iklim	100.000.000	96.916.900	96,92
13	Penanggulangan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	50.000.000	49.783.000	99,57
-	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Masyarakat	50.000.000	49.783.000	99,57
VII	PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	1.110.000.000	925.659.472	83,39
14	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	1.110.000.000	925.659.472	83,39
-	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1.110.000.000	925.659.472	83,39
VIII	PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	1.062.658.000	1.008.788.500	94,93
15	Pengelolaan Sampah	1.062.658.000	1.008.788.500	94,93
-	Penanganan Sampah Dengan Melakukan Pemilahan. Pengumpulan. Pengangkutan. Pengolahan. Dan Pemrosesan Akhir Sampah Di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	1.062.658.000	1.008.788.500	94,93
TOTAL		8.041.632.200	7.567.265.397	94,10



5. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Pada Tahun Anggaran 2024 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao mendapat alokasi anggaran sebesar **Rp.7.158.314.675,-** realisasi sebesar **Rp.7.074.164.626,-** atau 98,82% dengan rincian sebagai berikut :

- a. Belanja Operasi sebesar **Rp.7.141.029.675,-** realisasi sebesar **Rp.7.056.879.626,-** atau 98,82%.
- b. Belanja Hibah sebesar **Rp.17.285.000,-** realisasi sebesar **Rp.17.285.000,-** atau 100%.

Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut :

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	2	3	4	5
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.288.385.275	2.215.459.226	96,81
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.005.000	8.005.000	100
-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.005.000	5.005.000	100
-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000	3.000.000	100
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.115.952.575	2.048.492.326	97
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.050.192.575	1.982.737.326	97
-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	65.760.000	65.755.000	100
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	9.600.000	9.600.000	100
-	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	9.600.000	9.600.000	100
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	67.422.700	65.682.700	97
-	Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.435.000	21.695.000	93
-	Penyediaan bahan logistik Kantor	11.192.000	11.192.000	100
-	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	10.835.700	10.835.700	100
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	21.960.000	21.960.000	100



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	2	3	4	5
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerinthan Daerah	1.690.000	1.690.000	100
-	Penyediaan Jasa surat menyurat	1.690.000	1.690.000	100
6	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	85.715.000	81.989.200	96
-	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan dinas atau Dinas Jabatan	9.435.000	9.435.000	100
-	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	73.330.000	69.604.200	95
-	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	2.950.000	2.950.000	100
II	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4.834.724.400	4.823.500.400	100
7	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.804.400.000	4.793.176.000	100
-	Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota	33.540.000	30.179.000	90
-	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	500.000.000	499.963.000	100
-	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketertraman dan ketertiban umum	3.950.000.000	3.942.174.000	100
-	Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui diteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan	320.860.000	320.860.000	100
8	Penegakan Peraturan Daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota	30.324.400	30.324.400	100



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	2	3	4	5
-	Sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peratiran bupati/walikota	19.585.000	19.585.000	100
-	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota	10.739.400	10.739.400	100
-	PROGRAM PENCEGAHAN, PENAGGULANGAN, PENYELAMATAN, KEBAKARAN DAN PENYALAMATAN NON KEBAKARAN	35.205.000	35.205.000	100
9	Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	35.205.000	35.205.000	100
-	Pemedaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	35.205.000	35205000	100
TOTAL		7.158.314.675	7.074.164.626	98,82

6. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Pada Tahun Anggaran 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao mendapatkan alokasi anggaran sebesar **Rp.25.529.255.781,-** realisasi sebesar **Rp.25.395.131.422,-** atau 99,47% dengan rincian sebagai berikut:

- Belanja Operasi sebesar **Rp.25.529.255.781,-** realisasi sebesar **Rp.25.395.131.422,-** atau 99,47%.



Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut :

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	2	3	4	5
I	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.500.251.100	1.443.036.607	96,19
1	Perencanaan. Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.970.000	5.270.000	75,61
-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.970.000	5.270.000	75,61
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.231.602.400	1.181.654.234	95,94
-	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	1.166.922.400	1.116.974.234	95,72
-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	64.680.000	64.680.000	100
3	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	4.800.000	4.800.000	100
-	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4.800.000	4.800.000	100
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	191.547.700	189.686.700	99,03
-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.355.000	4.355.000	100
-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.800.000	19.800.000	100
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.418.700	22.418.700	100
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	144.974.000	143.113.000	98,72
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.851.000	19.652.673	94,25
-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.495.000	1.488.000	99,53
-	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	19.356.000	18.164.673	93,85
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	44.480.000	41.973.000	94,36
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan. Pajak Dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	44.480.000	41.973.000	94,36
II	PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER BANGSA	761.478.000	755.747.300	99,25



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	2	3	4	5
7	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	761.478.000	755.747.300	99,25
-	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Pancasila, Wawasan kebangsaan, Bela Negaram, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	761.478.000	755.747.300	99,25
III	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	22.887.226.681	22.836.441.515	99,78
8	Perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di daerah	22.887.226.681	22.836.441.515	99,78
-	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	22.587.226.681	22.576.524.007	99,95
-	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	300.000.000	259.917.508	86,64
IV	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	13.270.000	13.120.000	98,87



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	2	3	4	5
9	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional Dan Penganan Konflik Sosial	13.270.000	13.120.000	98,87
-	Pelaksnaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran ORMAS ,Pemberdayaan ORMAS,Evaluasi dan Mediasai Sengketa ORMAS dan ORMAS Asing di Daerah	13.270.000	13.120.000	98,87
V	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI. SOSIAL DAN BUDAYA	25.220.000	25.220.000	100
10	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pementapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya	25.220.000	25.220.000	100
-	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Ketahanan Ekonomi. Sosial. Budaya Dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika. Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama Dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	25.220.000	25.220.000	100
VI	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITAS PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	341.810.000	321.566.000	94,08
11	Perumusan Kebiajakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	341.810.000	321.566.000	94,08
-	Pelaksanaan Koordinasi Bidang Kewaspadaan Dini ,kerjasam Intelijen,pemantauan orang asing ,kewsapadaan antar Negara ,fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penangan Konflik di Daerah	85950000	83106000	96,69



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	2	3	4	5
-	Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah	255.860.000	238.460.000	93,20
TOTAL		25.529.255.781	25.395.131.422	99,47

7. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Pada Tahun Anggaran 2024 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao mendapat alokasi anggaran sebesar **Rp.2.584.579.500,-** realisasi sebesar **Rp.2.532.957.229,-** atau 98% dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja Operasi sebesar **Rp. 2.548.779.500,-** realisasi sebesar **Rp.2.497.157.229,-** atau 97,97%
- Belanja Modal sebesar **Rp.35.800.000,-** realisasi sebesar **Rp.35.800.000** atau 100%

Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut :

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	2	3	4	5
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	1.443.818.000	1.401.003.699	97,03
1	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	6.635.400	4.635.100	69,85
-	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	4.430.400	2.430.100	54,85
-	Evaluasi kinerja perangkat daerah	2.205.000	2.205.000	100
2	Administrasi keuangan perangkat daerah	1.055.748.000	1.038.956.108	98,41



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	2	3	4	5
-	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	1.013.868.000	997.076.108	98,34
-	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	41.880.000	41.880.000	100
3	Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	9.000.000	8.650.000	96,11
-	Pengamanan barang milik daerah SKPD	9.000.000	8.650.000	96,11
4	Administrasi umum perangkat daerah	76.062.100	75.951.700	99,85
-	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	525.000	525.000	100
-	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	17.500.000	17.500.000	100
-	Penyediaan bahan logistik kantor	8.127.100	8.127.000	100
-	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	11.300.000	11.200.000	99,12
-	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	38.610.000	38.599.700	99,97
5	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	25.567.500	13.227.500	51,74
-	Penyediaan jasa surat menyurat	1.092.000	1.092.000	100
-	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	24.475.500	12.135.500	49,58
6	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	270.805.000	259.583.291	95,86
-	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	268.645.000	258.833.291	96,35
-	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	2.160.000	750.000	34,72
II	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.140.761.500	1.131.953.530	99,23
7	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	546.230.000	539.719.000	98,81
-	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten / kota	485.000.000	478.905.000	98,74
-	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana kabupaten / kota	61.230.000	60.814.000	99,32
8	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	594.531.500	592.234.530	99,61



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	2	3	4	5
-	Respon cepat darurat bencana kabupaten / kota	100.520.000	99.060.000	98,55
-	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	274.011.500	273.174.530	99,69
-	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	220.000.000	220.000.000	100
TOTAL		2.584.579.500	2.532.957.229	98,00

8. DINAS SOSIAL

Pada Tahun Anggaran 2024 Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao mendapat alokasi anggaran sebesar **Rp.2.473.711.883,-** realisasi sebesar **Rp. 2.148.782.606,-** atau 86,86% dengan rincian sebagai berikut :

- a. Belanja Operasi sebesar **Rp.2.473.711.883,-** realisasi sebesar **Rp.2.148.782.606,-** atau 86,86%.

Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Dinas Sosial Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut :

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	2	3	4	5
I	PENUNJANG PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA URUSAN DAERAH	1.993.467.483	1.733.802.055	86,97
1	Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.418.000	35.173.000	99,31
-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.018.000	24.998.000	99,92
-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.400.000	10.175.000	97,84
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.771.956.533	1.514.503.604	85,47
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.720.156.533	1.462.703.604	85,03
-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	51.800.000	51.800.000	100
3	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	11.100.000	11.100.000	100



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	2	3	4	5
-	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	11.100.000	11.100.000	100
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	50.577.100	50.504.000	99,86
-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	500.000	500.000	100
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.197.100	6.197.000	100
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	43.880.000	43.807.000	99,83
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19.865.850	19.642.101	98,87
-	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	19.865.850	19.642.101	98,87
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	104.550.000	102.879.350	98,40
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	103.950.000	102.279.350	98,39
-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	600.000	600.000	100
II	PEMBERDAYAAN SOSIAL	32.340.000	32.229.000	99,66
7	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	32.340.000	32.229.000	99,66
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	32.340.000	32.229.000	99,66
III	REHABILITASI SOSIAL	50.162.000	49.017.500	97,72
8	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar. Anak Terlantar. Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial	20.000.000	19.741.000	98,71
-	Pemberian Bimbingan Sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar. Anak Terlantar. Lanjut usia terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	20.000.000	19.741.000	98,71



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	2	3	4	5
9	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks) Lainnya Bukan Korban Hiv/Aids Dan Napza Di Luar Panti Sosial	30.162.000	29.276.500	97,06
-	Pemberian Bimbingan Fisik. Mental. Spiritual dan Sosial	30.162.000	29.276.500	97,06
IV	PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	122.689.400	117.263.051	95,58
10	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	122.689.400	117.263.051	95,58
-	Pengelolaan Data Fakir Miskin Daerah Kabupaten/Kota	87.658.000	83.672.051	95,45
-	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	17.227.400	16.840.000	97,75
-	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	17.804.000	16.751.000	94,09
V	PENANGANAN BENCANA	275.053.000	216.471.000	78,70
11	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Dan Sosial Kabupaten/Kota	275.053.000	216.471.000	78,70
-	Penyediaan Makanan	275.053.000	216.471.000	78,70
TOTAL		2.473.711.883	2.148.782.606	86,86

9. DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

Pada Tahun Anggaran 2024 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Rote Ndao mendapat alokasi anggaran sebesar **Rp.4.576.782.344,-** realisasi sebesar **Rp.4.353.831.170,-** atau 95,13% dengan rincian sebagai berikut :

- a. Belanja Operasi sebesar **Rp.2.596.782.344,-** realisasi sebesar **Rp.2.394.831.170,-** atau 92,22%.
- b. Belanja Modal sebesar **Rp.1.980.000.000,-** realisasi sebesar **Rp.1.959.000.000,-** atau 98,94%.



Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut :

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	2	3	4	5
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.916.413.622	1.723.222.942	89,92
1	Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.830.054	9.829.800	100
-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.830.054	9.829.800	100
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.683.851.144	1.501.814.342	89,19
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.633.511.144	1.451.474.342	88,86
-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Daerah	50.340.000	50.340.000	100
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.800.000	4.800.000	100
-	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4.800.000	4.800.000	100
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	126.070.924	126.068.700	100
-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.280.430	13.279.000	99,99
-	Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan	6.689.494	6.689.000	99,99
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	106.101.000	106.100.700	100
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	42.926.000	31.838.600	74,17
-	Penyediaan jasa surat menyurat	1.183.000	1.183.000	100
-	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	41.743.000	30.655.600	73,44
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48.935.500	48.871.500	99,87
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	47.881.000	47.817.500	99,87
-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.054.500	1.054.000	99,95
II	PROGRAM PELATIHAN KERJA, PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	294.292.405	285.799.279	97,11



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	2	3	4	5
7	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	294.292.405	285.799.279	97,11
-	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster kompetensi	294.292.405	285.799.279	97,11
III	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	26.000.431	25.835.000	99,36
8	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	12.000.176	11.835.000	98,62
-	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	12.000.176	11.835.000	98,62
9	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kab/Kota	14.000.255	14.000.000	100
-	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yg berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah Kab/Kota	14.000.255	14.000.000	100
IV	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	2.168.999.916	2.147.899.000	99,03
10	Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (satu) daerah Kab/Kota	2.168.999.916	2.147.899.000	99,03
-	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk setempat & Transmigran	2.168.999.916	2.147.899.000	99,03
V	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	171.075.970	171.074.949	100
11	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	171.075.970	171.074.949	100
-	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Sarana Permukiman	171.075.970	171.074.949	100
TOTAL		4.576.782.344	4.353.831.170	95,13



10. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Pada Tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao mendapat alokasi anggaran sebesar **Rp. 9.875.616.849,-** realisasi sebesar **Rp. 8.069.689.129,-** atau 81,71% dengan rincian sebagai berikut:

- a. Belanja Operasi sebesar **Rp.8.848.367.849,-** realisasi sebesar **Rp. 7.070.690.429,-** atau 79,91%.
- b. Belanja Modal sebesar **Rp. 1.027.249.000,-** realisasi sebesar **Rp. 998.998.700,-** atau 97,25%.

Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut :

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	2	3	4	5
I	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.733.817.154	2.388.690.222	87,38
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.360.979.054	2.063.391.972	87,40
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.258.979.054	1.978.011.972	87,56
-	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	102.000.000	85.380.000	83,71
2	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	9.600.000	9.600.000	100
-	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	9.600.000	9.600.000	100
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	154.325.600	152.205.850	98,63
-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.995.000	3.455.000	69,17
-	Penyediaan Bahan Logistik	30.000.000	30.000.000	100
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.296.600	19.198.450	99,49
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.034.000	99.552.400	99,52
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35.474.500	26.736.800	75,37
-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	975.000	975.000	100
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	34.499.500	25.761.800	74,67



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	2	3	4	5
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	173.438.000	136.755.600	78,85
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	173.438.000	136.755.600	78,85
II	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	40.199.000	36.034.500	89,64
6	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	20.199.000	16.034.500	79,38
-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	20.199.000	16.034.500	79,38
7	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/kota	20.000.000	20.000.000	100
-	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	20.000.000	20.000.000	100
III	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	305.000.000	252.763.675	82,87
8	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/kota	65.000.000	60.440.000	92,98
-	Koordinasi Kebijakan, Program dan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kab/Kota	65.000.000	60.440.000	92,98
9	Penyedia Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/kota	188.360.000	140.709.675	74,70
-	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	188.360.000	140.709.675	74,70
10	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	51.640.000	51.614.000	99,95
-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	51.640.000	51.614.000	99,95



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	2	3	4	5
IV	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	20.000.000	17.407.000	87,04
11	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Dalam Daerah Kabupaten / kota	20.000.000	17.407.000	87,04
-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000	17.407.000	87,04
V	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	373.928.000	365.411.000	97,72
12	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/kota	158.728.000	151.416.000	95,39
-	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan kabupaten/Kota	65.000.000	59.782.500	91,97
-	Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota	93.728.000	91.633.500	97,77
13	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	150.800.000	149.721.000	99,28
-	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	150.800.000	149.721.000	99,28
14	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	64.400.000	64.274.000	99,80
-	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah Kabupaten/Kota	64.400.000	64.274.000	99,80
VI	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	289.399.900	244.989.800	84,65
15	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	289.399.900	244.989.800	84,65
-	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	60.000.000	59.855.000	99,76
-	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	89.400.000	80.880.000	90,47
-	Pengolahan dan Pelaporan Data	139.999.900	104.254.800	74,47



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	2	3	4	5
	Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB			
VII	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	4.938.179.800	3.645.876.552	73,83
16	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal	1.102.468.800	644.064.052	58,42
-	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	226.468.700	100.193.306	44,24
-	Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	21.500.000	0	0,00
-	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	128.500.100	117.635.100	91,54
-	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	150.000.000	123.821.500	82,55
-	Pengelolaan Operasional dan Sarana di balai Penyuluhan KKBPK	496.000.000	254.139.146	51,24
-	Pengendalian Program KKBPK	80.000.000	48.275.000	60,34
17	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	886.975.000	871.195.500	98,22
-	Penggerakan Kader Institusi Pedesaan (IMP)	387.000.000	383.825.800	99,18
-	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	499.975.000,00	487.369.700	97,48
18	Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah Kabupaten/kota	2.042.236.000	1.302.264.200	63,77
-	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	13.500.000	11.459.000	84,88
-	Peningkatan Kesetaraan Penggunaan Metode Kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	1.055.266.000	529.846.200	50,21
-	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	541.198.000	515.893.000	95,32
-	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	15.800.000	4.200.000	26,58



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	2	3	4	5
-	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	416.472.000	240.866.000	57,83
19	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	906.500.000	828.352.800	91,38
-	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	450.000.000	393.039.300	87,34
-	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	456.500.000	435.313.500	95,36
VIII	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.175.092.995	1.118.516.380	95,19
20	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	336.547.995	321.080.792	95,40
-	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	9.600.000	0	0,00
-	engadaan Sarana Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	326.947.995	321.080.792	98,21
21	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	838.545.000	797.435.588	95,10
-	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon	377.000.000	371.664.088	98,58
-	Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	461.545.000	425.771.500	92,25
TOTAL		9.875.616.849	8.069.689.129	81,71



11. DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Pada Tahun Anggaran 2024 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao mendapat alokasi anggaran sebesar **Rp.2.774.019.827,-** realisasi sebesar **Rp.2.686.605.229,-** atau 96,85% dengan rincian sebagai berikut :

- a. Belanja Operasi sebesar **Rp.2.749.619.827,-** realisasi sebesar **Rp. 2.662.205.229,-** atau 96,82%.
- b. Belanja Modal sebesar **Rp.24.400.000,-** realisasi sebesar **Rp.24.400.000,-** atau 100%.

Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut :

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	2	3	4	5
I	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.947.770.827	1.873.486.229	96,19
1	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.365.000	22.332.000	99,85
-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.000.000	11.985.000	99,88
-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.365.000	10.347.000	100
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.716.155.827	1.649.545.729	96,12
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.662.965.827	1.596.370.729	96,00
-	Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian /Verifikasi Keunagan SKPD	53.190.000	53.175.000	99,97
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.800.000	4.800.000	100
-	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4.800.000	4.800.000	100
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	111.702.000	109.279.309	97,83
-	Penyediaan Bahan/Material	24.950.000	24.581.500	98,52
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.999.000	9.945.000	82,88
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	74.753.000	74.752.809	100



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	2	3	4	5
5	Penyediaan Jasa Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah	49.680.000	45.861.191	92,31
-	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik	49.680.000	45.861.191	92,31
6	Pemeliharaan Barang Milik Daearh Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	43.068.000	41.668.000	96,75
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	43.068.000	41.668.000	96,75
II	PENDAFTARAN PENDUDUK	349.897.000	349.782.000	99,97
7	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	349.897.000	349.782.000	99,97
-	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	349.897.000	349.782.000	99,97
III	PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (PIAK) DAN PEMANFAATAN DATA	476.352.000	463.337.000	97,27
8	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan Dan Penyajian Database Kependudukan	476.352.000	463.337.000	97,27
-	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	476.352.000	463.337.000	97,27
TOTAL		2.774.019.827	2.686.605.229	96,85

12. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Pada Tahun Anggaran 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao mendapat alokasi anggaran sebesar **Rp.2.934.714.234,-** realisasi sebesar **Rp.2.846.690.586,-** atau 97% dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja Operasi sebesar **Rp.2.874.414.234,-** realisasi sebesar **Rp.2.806.190.586,-** atau 97,63%
- Belanja Modal sebesar **Rp.60.300.000,-** realisasi sebesar **Rp. 40.500.000,-** atau 67,16%



Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut :

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	2	3	4	5
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.297.620.234	2.251.154.779	97,98
1	Perencanaan. penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	53.019.000	53.019.000	100
-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.000.000	50.000.000	100
-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.019.000	3.019.000	100
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.999.990.284	1.960.743.814	98,04
-	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	1.954.750.284	1.916.803.814	98,06
-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	45.240.000	43.940.000	97,13
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7.200.000	7.200.000	100
-	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	7.200.000	7.200.000	100
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	130.910.950	130.442.439	99,64
-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan	4426500	4.426.000	99,99
-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	40.500.000	40.500.000	100
-	Penyediaan bahan logistik kantor	20.068.150	19.933.150	99,33
-	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	26.499.300	26.499.300	100
-	Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	39.417.000	39.083.989	99,16
5	Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	38.425.000	35.774.526	93,10
-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.625.000	1.625.000	100
-	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	36.800.000	34.149.526	92,80
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	68.075.000	63.975.000	93,98
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	68.075.000	63.975.000	93,98



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	2	3	4	5
II	PENATAAN DESA	119.000.000	97.803.190	82,19
7	Penyelenggaraan Penataan Desa	119.000.000	97.803.190	82,19
-	Pembentukan. Penghapusan. Penggabungan. dan Perubahan Status Desa	119.000.000	97.803.190	82,19
III	ADMINISTRASI PEMERINTAH DESA	130.000.000	129.700.000	99,77
8	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintah desa	130.000.000	129.700.000	99,77
-	Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	25.000.000	24.830.000	99,32
-	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	25.000.000	25.000.000	100
-	Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja sama Desa	30.000.000	29.870.000	99,57
-	Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	25.000.000	25.000.000	100
-	Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	25.000.000	25.000.000	100
IV	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN KEMASYARAKAT HUKUM ADAT	388.094.000	368.032.617	94,83
9	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak dibidang Pembangunan Desa dan Lembaga Adat Tingkat daerah Provinsi serta Pemberdayan Masyarakat Hukum Adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam kabupaten	388.094.000	368.032.617	94,83
-	Fasilitas Penataan, Pemberdayan dan Pembangunan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT.RW.PKK.Posyandu.LPM. dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	23.500.000	23.500.000	100
-	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT.RW.PKK.Posyandu.LPM. dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	142.000.000	129.312.800	91,07
-	Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	7.500.000	7.500.000	100



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	2	3	4	5
-	Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	215.094.000	207.719.817	96,57
TOTAL		2.934.714.234	2.846.690.586	97,00

13. DINAS PERHUBUNGAN

Pada Tahun Anggaran 2024 Dinas Perhubungan Kabupaten Rote Ndao mendapat Alokasi Anggaran sebesar **Rp. 2.180.093.286,-** realisasi sebesar **Rp. 2.135.542.146,-** atau 97,96% dengan rincian sebagai berikut:

- Belanja Operasi sebesar **Rp. 2.117.822.286,-** realisasi sebesar **Rp. 2.073.331.146,-** atau 97,90%
- Belanja Modal sebesar **Rp. 62.271.000,-** realisasi sebesar **Rp. 62.211.000,-** atau 99,90%.

Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut :

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	2	3	4	5
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.082.093.286	2.037.602.146	97,86
1	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	60.181.000	60.155.000	99,96
-	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	30.151.000	30.125.000	99,91
-	Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	30.030.000	30.030.000	100
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.644.293.286	1.603.462.307	97,52
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.573.033.286	1.532.202.307	97,40
-	Pelaksanaan Penata Usahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	71.260.000	71.260.000	100
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	11.400.000	11.400.000	100
-	Pengaman Barang Milik Daerah SKPD	11.400.000	11.400.000	100



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	2	3	4	5
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	89.520.000	89.343.000	99,80
-	Penyediaan komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan Kantor	1.075.000	1.075.000	100
-	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	22.861.000	22.861.000	100
-	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	15.148.000	15.148.000	100
-	Penyediaan Bahan/Material	12.000.000	12.000.000	100
-	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	38.436.000	38.259.000	99,54
5	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah	25.429.000	22.454.150	88,30
-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	390.000	390.000	100
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.039.000	22.064.150	88,12
6	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	251.270.000	250.787.689	99,81
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	251.270.000	250.787.689	99,81
II	PEYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	73.000.000	72.940.000	99,92
6	Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kab/kota	50.000.000	49.940.000	99,88
-	Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kab/kota	50.000.000	49.940.000	99,88
7	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	23.000.000	23.000.000	100
-	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	23.000.000	23.000.000	100
III	PENGELOLAAN PELAYARAN	25.000.000	25.000.000	100
8	Pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan local	25.000.000	25.000.000	100
-	Pengawasan pengoperasian pelabuhan pengumpan local	25.000.000	25.000.000	100
TOTAL		2.180.093.286	2.135.542.146	97,96



14. DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Pada Tahun Anggaran 2024 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rote Ndao mendapat alokasi anggaran sebesar **Rp.2.721.264.023,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 2.630.414.963,-** atau 96,66% dengan rincian sebagai berikut:

- a. Belanja Operasi sebesar **Rp.2.578.648.023,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 2.372.913.823,-** atau 92,02%.
- b. Belanja Modal sebesar **Rp.142.616.000,-** dengan realisasi sebesar **Rp.142.487.350,-** atau 99,91%.

Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	2	3	4	5
I	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.229.176.524	2.138.472.813	96,93
1	Perencanaan. Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.502.710	7.502.500	100
-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.709.700	3.709.700	100
-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.793.010	3.792.800	99,99
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.042.768.014	1.953.929.663	95,65
-	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	1.986.728.014	1.906.289.663	95,95
-	Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	56.040.000	47.640.000	85,01
3	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	9.000.000	9.000.000	100
-	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	9.000.000	9.000.000	100
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	54.134.300	54.134.150	100
-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.495.000	20.495.000	100
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.200.300	10.200.150	100



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	2	3	4	5
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	23.439.000	23.439.000	100
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60.721.500	60.617.100	99,83
-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.991.000	3.991.000	100
-	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	56.730.500	56.626.100	99,82
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	55.050.000	53.289.400	96,80
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	55.050.000	53.289.400	96,80
II	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	100.513.000	100.513.000	100
6	PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	100.513.000	100.513.000	100
-	Pelayanan Informasi Publik	100.513.000	100.513.000	100
III	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	338.456.999	338.311.750	99,96
7	Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	338.456.999	338.311.750	99,96
-	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	106.880.000	106.880.000	100
-	Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	231.576.999	231.431.750	99,94
IV	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	29.127.500	29.127.400	100
8	Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	29.127.500	29.127.400	100
-	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	14.739.500	14.739.400	100
-	Membangun Metadata Statistik Sektoral	14.388.000	14.388.000	100
V	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	23.990.000	23.990.000	100



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	2	3	4	5
9	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	23.990.000	23.990.000	100
-	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	23.990.000	23.990.000	100
TOTAL		2.721.264.023	2.630.414.963	96,66

15. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Pada Tahun Anggaran 2024 Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rote Ndao mendapat alokasi anggaran sebesar **Rp.5.633.145.051,-** realisasi sebesar **Rp.5.390.434.333,-** atau 95,69% dengan rincian sebagai berikut:

- Belanja Operasi sebesar **Rp. 5.602.405.051,-** realisasi sebesar **Rp. 5.359.719.333,-** atau 95,67%.
- Belanja Modal sebesar **Rp.30.740.000,-** realisasi sebesar **Rp.30.715.000,-** atau 99,92%.

Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut :

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	2	3	4	5
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.756.123.101	2.599.574.233	94,32
1	Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	102.565.300	102.460.300	99,90
-	Penyusunan dokumen Perencanaan perangkat daerah	75.813.000	75.753.000	99,92
-	Evaluasi kinerja perangkat daerah	26.752.300	26.707.300	99,83
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.374.386.501	2.224.298.433	93,68
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.304.586.501	2.154.499.433	93



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	2	3	4	5
-	Pelaksanaan Penatausahaan dan pegujian/verifikasi Keuangan SKPD	69.800.000	69.799.000	100
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	11.400.000	11.400.000	100,00
-	Pengamanan Barang milik Daerah SKPD	11.400.000	11.400.000	100
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	142.044.000	142.019.000	99,98
-	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	34.340.000	34.315.000	100
-	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	15.000.000	15.000.000	100
-	Penyediaan bahan/material	21.500.000	21.500.000	100
-	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	71.204.000	71.204.000	100
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	40.039.500	33.772.000	84,35
-	Penyediaan Jasa Komunikasi sumber Daya air dan listrik	40.039.500	33.772.000	84,35
6	Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85.687.800	85.624.500	99,93
-	Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perijinan kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	73.292.800	73.229.500	99,91
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	8.900.000	8.900.000	100
-	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	3.495.000	3.495.000	100
II	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	10.000.000	9.985.000	99,85
7	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000	9.985.000	99,85
-	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000	9.985.000	99,85
III	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	164.859.760	150.459.760	91,27
8	Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah	164.859.760	150.459.760	91,27
-	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan kompetensi SDM Kopersai	164.859.760	150.459.760	91,27
IV	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH USAHA	178.624.240	178.624.240	100



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	2	3	4	5
	KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)			
9	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	178.624.240	178.624.240	100
-	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan UMKM serta kapasitas dan kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui pendidikan dan pelatihan	178.624.240	178.624.240	100
V	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	50.100.000	45.090.000	90,00
10	Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil	50.100.000	45.090.000	90,00
	Produksi dan pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi	50.100.000	45.090.000	90,00
VI	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	75.000.000	74.805.000	99,74
11	Pengendalian Harga dan Stok barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	75.000.000	74.805.000	99,74
-	Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam satu kabupaten/kota	75.000.000	74.805.000	99,74
VII	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	18.059.600	17.664.300	97,81
12	Pelaksanaan metrologi legal, berupa tera tera ulang dan pengawasan	18.059.600	17.664.300	97,81
-	Pelaksanaan metrologi legal berupa Tera ,Tera Ulang	18.059.600	17.664.300	97,81
VIII	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	2.355.008.350	2.289.643.800	97,22
13	Penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan Industri Kabupaten/Kota	2.355.008.350	2.289.643.800	97,22
-	koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	2.355.008.350	2.289.643.800	97,22
IX	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	25.370.000	24.588.000	96,92



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	2	3	4	5
14	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI,IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten Kota	25.370.000	24.588.000	96,92
-	Fasilitasi pengumpulan pengolahan dan analisis data industri data kawasan industri data kawasan industri serta data lain lingkup Kabupaten/Kota melalui System Informasi Industri Nasional (SIINAS)	12.661.000	12.269.000	96,90
-	Desimnasi, publikasi data informasi dan analisa industri Kabupaten/Kota melalui SINas	12.709.000	12.319.000	96,93
TOTAL		5.633.145.051	5.390.434.333	95,69

16. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Pada tahun Anggaran 2024 Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Rote Ndao mendapat alokasi anggaran sebesar **Rp.2.598.951.962,-** realisasi sebesar **Rp.2.501.705.367,-** atau 96,26% dengan rincian sebagai berikut:

- Belanja Operasi sebesar **Rp.2.579.851.962,-** realisasi sebesar **Rp.2.482.605.367,-** atau 96,23%.
- Belanja Modal sebesar **Rp.19.100.000,-** realisasi sebesar **Rp.19.100.000,-** atau 100%.

Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut :

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	2	3	4	5
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.248.020.962	2.151.950.147	95,73
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	56.070.000	55.950.000	99,79
-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	38.170.000	38.170.000	100



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	2	3	4	5
-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.900.000	17.780.000	99,33
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.943.219.462	1.881.053.936	96,80
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.876.919.462	1.819.793.936	96,96
-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	66.300.000	61.260.000	92,40
3	Administrasi Barang Milik Daerah Pada perangkat Daerah	4.200.000	4.200.000	100
-	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4.200.000	4.200.000	100
4	Administrasi Umum Perangkat daerah	86.939.000	86.939.000	100
-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	500.000	500.000	100
-	Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	2.300.000	2.300.000	100
-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.472.000	7.472.000	100
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.200.000	6.200.000	100
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70.467.000	70.467.000	100
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24.682.500	18.597.341	75,35
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.682.500	18.597.341	75,35
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	132.910.000	105.209.870	79,16
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	82.910.000	82.834.870	99,91
-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	50.000.000	22.375.000	44,75
II	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	64.491.000	63.995.700	99,23
7	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota	64.491.000	63.995.700	99,23
-	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	64.491.000	63.995.700	99,23



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	2	3	4	5
III	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	141.440.000	140.959.520	99,66
8	Pelayanan Perizinan dan Non perizinan secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	141.440.000	140.959.520	99,66
-	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	141.440.000	140.959.520	99,66
IV	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	145.000.000	144.800.000	99,86
9	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota	145.000.000	144.800.000	99,86
-	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	45.000.000	44.800.000	99,56
-	Pengawasan Penanaman Modal	100.000.000	100.000.000	100
TOTAL		2.598.951.962	2.501.705.367	96,26

17. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Pada Tahun Anggaran 2024 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rote Ndao mendapat alokasi anggaran sebesar **Rp.6.044.488.133,-** realisasi sebesar **Rp.5.876.624.726,-** atau 97,22% dengan rincian sebagai berikut:

- a. Belanja Operasi sebesar **Rp.4.569.066.133,-** realisasi sebesar **Rp.4.313.554.726,-** atau 94,41%
- b. Belanja Modal sebesar **Rp.1.475.422.000,-** realisasi sebesar **Rp.1.471.390.000,-** Atau 99,73%



Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut :

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	2	3	4	5
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.291.401.652	2.175.124.776	94,93
1	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	115.035.000	115.035.000	100
-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	115.035.000	115.035.000	100
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.931.776.527	1.828.620.000	94,66
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.867.156.527	1.764.000.000	94,48
-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	64.620.000	64.620.000	100
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.200.000	10.200.000	100
-	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	10.200.000	10.200.000	100
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	143.259.125	143.050.900	99,85
-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.522.000	33.485.000	99,89
-	Penyediaan Bahan logistik kantor	21.371.500	21.371.500	100
-	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.030.625	11.030.400	100
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	77.335.000	77.164.000	99,78
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	47.215.000	35.847.896	75,92
-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	715.000	709.000	99,16
-	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	46.500.000	35.138.896	75,57
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	43.916.000	42.370.980	96,48
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	43.166.000	41.620.980	96,42
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	750.000	750.000	100
II	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	362.257.281	361.154.000	99,70
7	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	362.257.281	361.154.000	99,70
-	Pembinaan Sumber Daya Manusia. Lembaga. dan Pranata Tradisional	362.257.281	361.154.000	99,70
III	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	297.197.600	274.697.600	92,43
8	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	297.197.600	274.697.600	92,43



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	2	3	4	5
-	Penetapan Cagar Budaya	297.197.600	274.697.600	92,43
IV	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	2.023.984.000	2.004.146.750	99,02
9	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2.023.984.000	2.004.146.750	99,02
-	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	150.000.000	146.994.000	98,00
-	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1.563.610.000	1.556.614.750	99,55
-	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	310.374.000	300.538.000	96,83
V	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	201.000.000	201.000.000	100
10	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik. Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	201.000.000	201.000.000	100
-	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	201.000.000	201.000.000	100
VI	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	868.647.600	860.501.600	99,06
11	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	868.647.600	860.501.600	99,06
-	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	74.402.600	73.076.600	98,22
-	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	794.245.000	787.425.000	99,14
TOTAL		6.044.488.133	5.876.624.726	97,22

18. DINAS PERIKANAN

Pada Tahun Anggaran 2024 Dinas Perikanan Kabupaten Rote Ndao mendapat alokasi anggaran sebesar **Rp.8.618.217.089,-** realisasi sebesar **Rp.8.267.627.122,-** atau 95,93% dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja Operasi sebesar **Rp.8.243.617.089,-** realisasi sebesar **Rp. 8.043.127.122,-** atau 97,57%
- Belanja Modal sebesar **Rp.374.600.000,-** realisasi sebesar **Rp.224.500.000,-** atau 59,93%



Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Dinas Perikanan Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut :

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	2	3	4	5
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.709.135.389	1.623.099.632	94,97
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.000.000	39.820.000	99,55
-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35.000.000	34.850.000	99,57
-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000	4.970.000	99,40
2	Kegiatan Administrasi keuangan Perangkat Daerah	1.423.160.447	1.365.511.932	95,95
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.336.946.447	1.279.436.932	95,70
-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	86.214.000	86.075.000	99,84
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.200.000	4.200.000	100
-	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4.200.000	4.200.000	100
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	102.310.000	102.295.500	99,99
-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.587.000	19.587.000	100
-	Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	21.118.000	21.118.000	100
-	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	61.605.000	61.590.500	99,98
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	46.296.642	25.082.900	54,18
-	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Listrik dan Air	46.296.642	25.082.900	54,18
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	93.168.300	86.189.300	92,51
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	93.168.300	86.189.300	92,51
II	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	2.690.839.900	2.609.864.890	96,99



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	2	3	4	5
7	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	267.145.000	266.987.000	99,94
-	Penyediaan Prsarana Usaha Perikanan Tangkap	267.145.000	266.987.000	99,94
8	Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.423.694.900	2.342.877.890	96,67
-	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	2.423.694.900	2.342.877.890	96,67
III	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.941.236.800	3.758.284.600	95,36
9	Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan kecil	187.500.000	182.430.000	97,30
-	Pemberian Pendampingan Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Informasi serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	187.500.000	182.430.000	97,30
10	Kegiatan Pengelolaan Pembudidaya Ikan	3.753.736.800	3.575.854.600	95,26
-	Penyediaan Prasana Pembudidaya Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	216.163.000	65.946.200	30,51
-	Penjamin Ketersediaan Sarana Pembudidaya Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.537.573.800	3.509.908.400	99,22
IV	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	277.005.000	276.378.000	99,77
11	Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	44.947.000	44.569.000	99,16
-	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	44.947.000	44.569.000	99,16
12	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota	232.058.000	231.809.000	99,89
-	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah/Kabupaten	232.058.000	231.809.000	99,89
TOTAL		8.618.217.089	8.267.627.122	95,93



19. DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Pada Tahun Anggaran 2024 Dinas Pertanian Kabupaten Rote Ndao mendapat alokasi anggaran sebesar **Rp.27.565.711.530,-** realisasi sebesar **Rp.24.195.331.665,-** atau 87,77% dengan rincian sebagai berikut:

- a. Belanja Operasi sebesar **Rp. 27.515.331.715,-** realisasi sebesar **Rp.24.144.955.665,-** atau 87,75%
- b. Belanja Modal sebesar **Rp.50.379.815,-** realisasi sebesar **Rp.50.376.000,-** atau 99,99%

Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut :

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	2	3	4	5
	BELANJA OPERASI	27.515.331.715	24.144.955.665	87,75
	BELANJA MODAL	50.379.815	50.376.000	99,99
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.116.904.080	6.484.261.027	91,11
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.379.500	24.274.500	99,57
-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23.079.500	22.974.500	99,55
-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.300.000	1.300.000	100
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.810.200.765	6.197.601.727	91,00
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.737.120.765	6.124.521.727	90,91
-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	73.080.000	73.080.000	100
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12.000.000	12.000.000	100
-	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12.000.000	12.000.000	100
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	165.671.815	157.373.500	94,99
-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.650.000	2.650.000	100,00
-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	47.203.815	47.200.000	99,99



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	2	3	4	5
-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.941.000	15.784.500	99,02
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.900.000	9.900.000	100
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	89.977.000	81.839.000	90,96
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24.006.000	16.357.600	68,14
-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	650.000	643.800	99,05
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.356.000	15.713.800	67,28
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80.646.000	76.653.700	95,05
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	80.646.000	76.653.700	95,05
II	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	4.539.301.950	4.524.343.038	99,67
7	Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	3.730.326.500	3.718.804.800	99,69
-	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas. Teknologi dan Spesifik Lokasi	3.730.326.500	3.718.804.800	99,69
8	Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan. Tumbuhan. dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	808.975.450	805.538.238	99,58
-	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	470.506.000	468.008.500	99,47
-	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	212.524.450	211.599.738	99,56
-	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	125.945.000	125.930.000	99,99
III	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	13.562.005.500	10.853.174.500	80,03
9	Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	13.562.005.500	10.853.174.500	80,03
-	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	2.396.055.500	2.395.949.500	100



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	2	3	4	5
-	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	3.500.000.000	795.000.000	22,71
-	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	7.665.950.000	7.662.225.000	99,95
IV	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	275.000.000	273.420.000	99,43
10	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	275.000.000	273.420.000	99,43
-	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	175.000.000	175.000.000	100
-	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	100.000.000	98.420.000	98,42
V	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1.922.500.000	1.915.611.600	99,64
11	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	180.000.000	173.889.000	96,61
-	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	75.000.000	69.366.000	92,49
-	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	25.000.000	24.704.000	98,82
-	Pemantauan Stok Pangan	80.000.000	79.819.000	99,77
12	Kegiatan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	1.742.500.000	1.741.722.600	99,96
-	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1.742.500.000	1.741.722.600	99,96
VI	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	75.000.000	71.521.000	95,36
13	Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	15.000.000	12.798.000	85,32



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	2	3	4	5
-	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	15.000.000	12.798.000	85,32
14	Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	60.000.000	58.723.000	97,87
-	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	60.000.000	58.723.000	97,87
VII	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	75.000.000	73.000.500	97,33
15	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	75.000.000	73.000.500	97,33
-	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	75.000.000	73.000.500	97,33
TOTAL		27.565.711.530	24.195.331.665	87,77

20. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Pada Tahun Anggaran 2024 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Rote Ndao mendapat alokasi anggaran sebesar **Rp.1.916.480.373,-** realisasi sebesar **Rp.1.816.446.009,-** atau 97,99% dengan rincian sebagai berikut:

- Belanja Operasi sebesar **Rp. 1.903.490.373,-** realisasi sebesar **Rp. 1.803.456.009,-** atau 94,74%
- Belanja Modal sebesar **Rp.12.990.000,-** realisasi sebesar **Rp.12.990.000,-** atau 100%

Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut :

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	2	3	4	5
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.380.093.673	1.297.522.727	94,02
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.100.000	5.100.000	100
-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.100.000	5.100.000	100



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	2	3	4	5
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.232.418.473	1.151.491.084	93,43
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.190.538.473	1.109.611.084	93,20
-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	41.880.000	41.880.000	100
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.400.000	5.400.000	100
-	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5.400.000	5.400.000	100
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	75.111.200	75.111.200	100
-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.386.000	16.386.000	100
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.814.200	6.814.200	100
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	51.911.000	51.911.000	100
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	23.464.000	21.820.443	93,00
-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	754.000	754.000	100
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.710.000	21.066.443	92,76
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	38.600.000	38.600.000	100
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	38.600.000	38.600.000	100
II	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	489.970.700	472.507.282	96,44
7	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/kota	446.730.200	429.426.530	96,13
-	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	71.463.000	61.463.000	86,01
-	Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	328.134.200	324.982.700	99,04
-	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	47.133.000	42.980.830	91,19
8	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	43.240.500	43.080.752	99,63



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	2	3	4	5
-	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	3.570.000	3.570.000	100
-	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	39.670.500	39.510.752	99,60
III	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	46.416.000	46.416.000	100
9	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	13.021.000	13.021.000	100
-	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	13.021.000	13.021.000	100
10	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/ Kota	33.395.000	33.395.000	100
-	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	33.395.000	33.395.000	100
TOTAL		1.916.480.373	1.816.446.009	94,78

21. DINAS PETERNAKAN

Pada Tahun Anggaran 2024 Dinas Peternakan Kabupaten Rote Ndao mendapat alokasi anggaran sebesar **Rp.12.209.209.876,-** realisasi sebesar **Rp. 11.961.341.753,-** atau 97,97% dengan rincian sebagai berikut:

- a. Belanja Operasi sebesar **Rp. 12.197.009.876,-** realisasi sebesar **Rp. 11.949.141.753,-** atau 97,97%
- b. Belanja Modal sebesar **Rp. 12.200.000,-** realisasi sebesar **Rp. 12.200.000,-** atau 100%

Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Dinas Peternakan Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut :

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	2	3	4	5
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.365.172.876	4.219.199.804	96,66
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	73.823.000	72.328.000	97,97



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	2	3	4	5
-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.000.000	48.620.000	97,24
-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.823.000	23.708.000	99,52
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.034.434.876	3.894.677.207	96,54
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.968.434.876	3.829.217.207	96,49
-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	66.000.000	65.460.000	99,18
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.200.000	4.200.000	100
-	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4.200.000	4.200.000	100
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	146.115.000	146.114.867	100
-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000	25.000.000	100
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.900.000	9.900.000	100
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	111.215.000	111.214.867	100
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	45.000.000	40.821.800	90,72
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	45.000.000	40.821.800	90,72
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	61.600.000	61.057.930	99,12
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	60.000.000	59.457.930	99,10
-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.600.000	1.600.000	100
II	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.044.000.000	1.043.613.000	99,96
7	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	944.000.000	943.613.000	99,96
-	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	944.000.000	943.613.000	99,96
8	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kab./Kota	60.000.000	60.000.000	100



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	2	3	4	5
-	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	60.000.000	60.000.000	100
9	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak dalam Kab./Kota	40.000.000	40.000.000	100
-	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	40.000.000	40.000.000	100
III	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	4.400.000.000	4.385.837.344	99,68
10	Pembangunan Prasarana Pertanian	4.400.000.000	4.385.837.344	99,68
-	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	4.400.000.000	4.385.837.344	99,68
IV	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	2.299.175.000	2.211.909.605	96,20
11	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kab./Kota	579.000.000	497.970.000	86,01
-	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	579.000.000	497.970.000	86,01
12	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.715.175.000	1.708.959.605	99,64
-	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	1.715.175.000	1.708.959.605	99,64
13	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	5.000.000	4.980.000	99,60
-	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	5.000.000	4.980.000	99,60
V	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	100.862.000	100.782.000	99,92



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	2	3	4	5
14	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	100.862.000	100.782.000	99,92
-	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan	100.862.000	100.782.000	99,92
TOTAL		12.209.209.876	11.961.341.753	97,97

22. SEKRETARIAT DAERAH

A. BAGIAN UMUM

Pada Tahun Anggaran 2024 Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao mendapat alokasi anggaran sebesar **Rp.20.998.672.923,-** realisasi sebesar **Rp.19.778.016.177,-** atau 94,19% dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja Operasi sebesar **Rp. 17.729.667.623,-** realisasi sebesar **Rp. 16.604.804.927,-** atau 93,66%
- Belanja Modal sebesar **Rp. 3.269.005.300,-** realisasi sebesar **Rp. 3.173.211.250,-** atau 97,07%

Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Bagian Umum Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut :

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	2	3	4	5
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	20.998.672.923	19.778.016.177	94,19
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000	10.000.000	100
-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.000.200	8.000.200	100
-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.999.800	1.999.800	100
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.006.401.213	5.720.187.076	95,23



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	2	3	4	5
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.818.349.213	5.532.151.076	95,08
-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	188.052.000	188.036.000	99,99
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	94.662.000	91.769.000	96,94
-	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	94.662.000	91.769.000	96,94
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.082.500.000	998.250.000	92,22
-	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.082.500.000	998.250.000	92,22
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.940.791.400	1.866.580.350	96,18
-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	44710000	44544300	99,63
-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	105.965.800	105.778.550	99,82
-	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	175.970.000	175.363.200	99,66
-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	330.525.000	318.440.000	96,34
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	46.978.600	46.978.600	100
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.236.642.000	1.175.475.700	95,05
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.991.050.000	2.896.050.000	96,82
-	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.991.050.000	2.896.050.000	96,82
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.608.085.000	1.596.622.673	99,29
-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.997.000	9.996.000	99,99
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.598.088.000	1.586.626.673	99,28
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.123.945.460	2.015.821.478	94,91
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	201.345.500	181.044.000	89,92



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	2	3	4	5
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.064.303.500	977.069.278	91,80
-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	46.000.000	46.000.000	100
-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	775.211.460	774.630.200	99,93
-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	37.085.000	37.078.000	99,98
9	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	716.224.400	452.410.888	63,17
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	105.436.000	23.370.688	22,17
-	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	189.790.000	73.959.300	38,97
-	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	120.998.400	120.998.400	100
-	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	300.000.000	234.082.500	78,03
10	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	2.229.750.200	2.106.625.550	94,48
-	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	2.112.750.200	2.106.625.550	99,71
-	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	117.000.000	0	0,00
11	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	2.195.263.250	2.023.699.162	92,18
-	Fasilitasi Keprotokolan	395.261.750	355.143.000	89,85
-	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1.450.974.000	1.337.199.162	92,16
-	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	349.027.500	331.357.000	94,94
TOTAL		20.998.672.923	19.778.016.177	94,19



B. BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Pada Tahun Anggaran 2024 Bagian Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao mendapat alokasi anggaran sebesar **Rp.3.035.001.500,-** realisasi sebesar **Rp.3.009.334.725,-** atau 99,15% dengan rincian sebagai berikut:

- a. Belanja Operasi sebesar **Rp. 2.375.001.500,-** realisasi sebesar **Rp. 2.350.746.125,-** atau 98,98%.
- b. Belanja Modal sebesar **Rp. 660.000.000,-** realisasi sebesar **Rp. 658.588.600,-** atau 99,79%.

Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Bagian Pemerintahan dan Kesra Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut :

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	2	3	4	5
	BELANJA OPERASI	2.375.001.500	2.350.746.125	98,98
	BELANJA MODAL	660.000.000	658.588.600	99,79
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	988.664.000	982.216.500	99
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	61.620.000	61.620.000	100
-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	61.620.000	61.620.000	100
2	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	13.800.000	13.800.000	100
-	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	13.800.000	13.800.000	100
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	241.348.000	239.981.000	99,43
-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.000.000	45.000.000	100
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000	15.000.000	100
-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	38.912.000	38.912.000	100
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	142.436.000	141.069.000	99,04
4	Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.846.000	12.388.150	89,47
-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.846.000	1.846.000	100



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	2	3	4	5
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000	10.542.150	87,85
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	658.050.000	654.427.350	99,45
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	39.600.000	37.388.750	94,42
-	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	3.450.000	3.450.000	100
-	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	615.000.000	613.588.600	99,77
II	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	2.046.337.500	2.027.118.225	99,06
6	Administrasi Tata Pemerintahan	1.146.337.500	1.133.368.225	98,87
-	Penataan Administrasi Pemerintahan	309.783.000	301.106.000	97,20
-	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	50.000.000	49.697.000	99,39
-	Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	786.554.500	782.565.225	99,49
7	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	900.000.000	893.750.000	99,31
-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	900.000.000	893.750.000	99,31
TOTAL		3.035.001.500	3.009.334.725	99,15

C. BAGIAN HUKUM

Pada Tahun Anggaran 2024 Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao mendapat alokasi anggaran sebesar **Rp.424.512.900,-** realisasi sebesar **Rp.422.583.529,-** atau 99,55% dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja Operasi sebesar **Rp. 403.092.900,-** realisasi sebesar **Rp. 304.105.900,-** atau 99,52%.
- Belanja Modal sebesar **Rp. 21.420.000,-** realisasi sebesar **Rp.21.420.000,-** atau 100%.



Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Bagian Hukum Tahun
Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut :

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	2	3	4	5
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	158.810.900	156.908.529	99
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	33.628.000	33.628.000	100
-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	33.628.000	33.628.000	100
2	Administrasi Barang Milik Daerah	4.800.000	4.800.000	100
-	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4.800.000	4.800.000	100
3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	85.012.900	85.010.529	100
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	45.459.900	45.459.900	100
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	39.553.000	39.550.629	99,99
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.200.000	13.200.000	100
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.200.000	13.200.000	100
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	22.170.000	20.270.000	91,43
-	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan dan kendaraan dinas operasional atau lapangan	22.170.000	20.270.000	91,43
II	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	265.702.000	265.675.000	100
6	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	265.702.000	265.675.000	99,99
-	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	51.279.600	51.279.600	100
-	Fasilitasi Bantuan Hukum	149.675.000	149.675.000	100
-	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	64.747.400	64.720.400	99,96
TOTAL		424.512.900	422.583.529	99,55



D. BAGIAN ORGANISASI

Pada Tahun Anggaran 2024 Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao mendapat alokasi anggaran sebesar **Rp.366.560.000,-** realisasi sebesar **Rp.361.383.480,-** atau 98,59% dengan rincian sebagai berikut:

a. Belanja Operasi sebesar **Rp.366.560.000,-** realisasi sebesar **Rp.361.383.480,-** atau 98,59%.

Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Bagian Organisasi Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut :

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	2	3	4	5
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	366.560.000	361.383.480	98,59
1	Perencanaan. Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.999.200	24.979.200	99,92
-	Penyusunan Dokumen perencanaan Perangkat Daerah	17.500.000	17.490.000	99,94
-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.499.200	7.489.200	99,87
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	37.144.000	37.124.000	99,95
-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	37.144.000	37.124.000	99,95
3	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	4.200.000	4.200.000	100
-	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4.200.000	4.200.000	100
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	74.484.200	73.430.680	98,59
-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.958.000	4.958.000	100
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.771.200	4.771.200	100
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	64.755.000	63.701.480	98,37
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.000.000	10.028.000	83,57
-	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000	10.028.000	83,57



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	2	3	4	5
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24.450.000	24.448.000	99,99
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	21.500.000	21.498.000	99,99
-	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	2.950.000	2.950.000	100
7	Penataan Organisasi	189.282.600	187.173.600	98,89
-	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	104.410.000	103.027.000	98,68
-	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tatalaksana	31.066.000	31.066.000	100
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	53.806.600	53.080.600	98,65
TOTAL		366.560.000	361.383.480	98,59

E. BAGIAN PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Pada Tahun Anggaran 2024 Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao mendapat alokasi anggaran sebesar **Rp. 1.030.917.000,-** realisasi sebesar **Rp. 1.025.905.026,-** atau 99,51% dengan rincian sebagai berikut :

- a. Belanja Operasi sebesar **Rp. 990.517.000,-** realisasi sebesar **Rp. 985.505.026,-** atau 99,49%.
- b. Belanja Modal sebesar **Rp. 40.400.000,-** realisasi sebesar **Rp. 40.400.000,-** atau 100%.



Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut :

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	2	3	4	5
I	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	152.307.000	152.064.520	99,84
1	Perencanaan. Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja	15.675.000	15.673.000	99,99
-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.000.000	11.998.000	99,98
-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.675.000	3.675.000	100
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	45.280.000	45.230.000	99,89
-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	45.280.000	45.230.000	99,89
3	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	4.200.000	4.200.000	100
-	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4.200.000	4.200.000	100
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	63.940.000	63.920.000	99,97
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.000.000	12.000.000	100
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	51.940.000	51.920.000	99,96
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.612.000	1.612.000	100
-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.612.000	1.612.000	100
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21.600.000	21.429.520	99,21
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	19.700.000	19.529.520	99,13
-	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	1.900.000	1.900.000	100
II	PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	878.610.000	873.840.506	99,46
7	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	92.700.000	91.752.064	98,98
-	Koordinasi. Sinkronisasi. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD/BLUD	16.275.000	16.275.000	100



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	2	3	4	5
-	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	76.425.000	75.477.064	98,76
8	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	757.307.000	753.741.442	99,53
-	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	485.048.000	482.039.442	99,38
-	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	170.199.000	170.099.000	99,94
-	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	102.060.000	101.603.000	99,55
9	Pemantauan Kebijakan Terkait SDA	28.603.000	28.347.000	99,10
-	Koordinasi. Sinkronisasi. dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	28.603.000	28.347.000	99,10
TOTAL		1.030.917.000	1.025.905.026	99,51

F. BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pada Tahun Anggaran 2024 Bagian Pengadaan Barang/jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao mendapatkan alokasi anggaran sebesar **Rp.809.329.000,-** realisasi sebesar **Rp.771.080.445,-** atau 95,27% dengan rincian sebagai berikut:

- a. Belanja Operasi sebesar **Rp.809.329.000,-** realisasi sebesar **Rp.771.080.445,-** atau 95,27%.

Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Bagian Pengadaan Barang/jasa Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut :

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	2	3	4	5
I	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	174.828.800	174.828.800	100
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	40.460.000	40.460.000	100
-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	40.460.000	40.460.000	100
2	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.200.000	4.200.000	100



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	2	3	4	5
-	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4.200.000	4.200.000	100
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	102.876.300	102.876.300	100
-	Penyediaan bahan logistik kantor	22.876.000	22.876.000	100
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.150.300	9.150.300	100
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70.850.000	70.850.000	100
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	780.000	780.000	100
-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	780.000	780.000	100
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	26.512.500	26.512.500	100
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan.Biaya Pemeliharaan.Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	26.512.500	26.512.500	100
II	PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	634.500.200	596.251.645	93,97
6	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	634.500.200	596.251.645	93,97
-	Pengelolaan Barang dan Jasa	366.391.000	328.391.000	89,63
-	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	257.109.200	256.860.645	99,90
-	Pembinaan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	11.000.000	11.000.000	100
TOTAL		809.329.000	771.080.445	95,27

23. SEKRETARIAT DPRD

Pada Tahun Anggaran 2024 Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao mendapatkan alokasi anggaran sebesar **Rp.29.801.845.694,-** realisasi sebesar **Rp.27.915.574.542,-** atau 93,67% dengan rincian sebagai berikut:

- Belanja Operasi sebesar **Rp.29.801.845.694,-** realisasi sebesar **Rp.27.915.574.542,-** atau 93,67%.



Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Sekretariat DPRD Tahun
Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut :

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	2	3	4	5
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.434.636.094	16.200.586.842	98,58
1	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	9.760.000	9.760.000	100
-	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	5.626.000	5.626.000	100
-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.134.000	4.134.000	100
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.781.429.941	1.754.101.492	98,47
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.676.249.941	1.648.933.492	98,37
-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	105.180.000	105.168.000	99,99
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	14.625.000	14.580.000	99,69
-	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	14.625.000	14.580.000	99,69
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	225.103.269	219.271.000	97,41
-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.015.000	10.000.000	99,85
-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	102.561.000	102.560.000	100
-	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	14.827.269	14.820.000	99,95
-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	16.500.000	16.250.000	98,48
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	81.200.000	75.641.000	93,15
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	207.545.714	183.594.000	88,46
-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	17.281.714	17.280.000	99,99
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	190.264.000	166.314.000	87,41
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	421.415.000	413.042.000	98,01
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	391.765.000	384.342.000	98,11



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	2	3	4	5
-	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	12.690.000	11.740.000	92,51
-	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	10.370.000	10.370.000	100
-	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	6.590.000	6.590.000	100
7	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	11.851.388.900	11.699.312.100	98,72
-	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	10.714.754.525	10.569.887.100	98,65
-	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	695.753.375	691.500.000	99,39
-	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	440.881.000	437.925.000	99,33
8	Layanan Administrasi DPRD	1.923.368.270	1.906.926.250	99,15
-	Fasilitasi Fraksi DPRD	90.012.120	75.306.250	83,66
-	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	293.356.150	291.620.000	99,41
-	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	1.540.000.000	1.540.000.000	100
II	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	13.367.209.600	11.714.987.700	87,64
9	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	4.325.335.400	3.349.710.900	77,44
-	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	228.343.900	78.406.000	34,34
-	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	4.079.816.500	3.254.129.900	79,76
-	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	17.175.000	17.175.000	100
10	Pembahasan Kebijakan Anggaran	266.500.000	265.361.000	99,57
-	Pembahasan KUA dan PPAS	14.985.000	14.985.000	100
-	Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS	14.985.000	14.985.000	100
-	Pembahasan APBD	91265000	90.225.000	98,86
-	Pembahasan APBD Perubahan	54.000.000	53.955.000	99,92
-	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	91.265.000	91.211.000	99,94
11	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	50.725.200	50.719.200	100



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	2	3	4	5
-	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	50.725.200	50.719.200	100
12	Peningkatan Kapasitas DPRD	1415480000	1163764000	82,22
-	Pendalaman Tugas DPRD	1115480000	971.264.000	87,07
-	Penyediaan Kelompok Pakar Tim Ahli	90.000.000		0,00
-	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	210.000.000	192.500.000	91,67
13	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	3.049.560.000	2.937.930.000	96,34
-	Kunjungan Kerja dalam Daerah	191.400.000	79.782.000	41,68
-	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	11.790.000	11.778.000	99,90
-	Pelaksanaan Reses	2.846.370.000	2.846.370.000	100
14	Fasilitasi Tugas DPRD	4.259.609.000	3.947.502.600	92,67
-	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	4.184.609.000	3.898.203.600	93,16
-	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	75.000.000	49.299.000	65,73
TOTAL		29.801.845.694	27.915.574.542	93,67

24. KECAMATAN LOBALAIN

Pada Tahun Anggaran 2024 Kantor Kecamatan Lobalain Mendapat alokasi anggaran sebesar **Rp.4.446.483.072,-** realisasi sebesar **Rp.4.404.101.308,-** atau 99,05% dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja Operasi sebesar **Rp. 4.381.203.072,-** realisasi sebesar **Rp. 4.338.821.308,-** atau 99,03%
- Belanja Modal sebesar **Rp. 65.280.000,-** realisasi sebesar **Rp.65.280.0000,-** atau 100%

Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Kecamatan Lobalain Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut :

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	2	3	4	5
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	3.450.671.072	3.409.716.308	98,81
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	53.452.000	53.450.000	100



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	2	3	4	5
-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	53.452.000	53.450.000	100
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.266.450.072	3.226.623.398	98,78
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	3.218.316.072	3.178.489.398	98,76
-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	48.134.000	48.134.000	100
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.800.000	4.800.000	100
-	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4.800.000	4.800.000	100
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	62.224.000	62.212.000	100
-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.300.000	16.300.000	100
-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.760.000	10.760.000	100
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.359.000	4.359.000	100
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.805.000	30.793.000	99,96
5	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	5.090.000	5.083.000	100
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	5.090.000	5.083.000	100
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	58.655.000	57.547.910	98,11
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	58.655.000	57.547.910	98,11
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	10.012.000	8.913.000	89,02
7	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	10.012.000	8.913.000	89,02
-	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10.012.000	8.913.000	89,02
III	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	51.500.000	51.500.000	100
8	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	51.500.000	51.500.000	100



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	2	3	4	5
-	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	51.500.000	51.500.000	100
TOTAL		3.512.183.072	3.470.129.308	98,80

Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Kelurahan Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut :

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	2	3	4	5
1	KELURAHAN METINA			
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	298.600.000	298.318.000	99,91
-	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	27.885.000	27.885.000	100
-	Pembanguna Sarana Prasarana Kelurahan	18.100.000	18.100.000	100
-	Pemberdayaan Kelurahan	185.500.000	185.500.000	100
-	Evaluasi Kelurahan	67.115.000	66.833.000	99,58
2	KELURAHAN MOKDALE			
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	342.900.000	342.900.000	100
-	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	26.707.500	26.707.500	100
-	Pemberdayaan Kelurahan	247.900.000	247.900.000	100
-	Evaluasi Kelurahan	68.292.500	68.292.500	100
3	KELURAHAN NAMODALE			
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	292.800.000	292.754.000	99,98
-	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	13.400.000	13.400.000	100,00
-	Pemberdayaan Kelurahan	197.800.000	197.800.000	100,00
-	Evaluasi Kelurahan	81.600.000	81.554.000	99,94
TOTAL		934.300.000	933.972.000	99,96



25. KECAMATAN ROTE BARAT LAUT

Pada Tahun Anggaran 2024 Kecamatan Rote Barat Laut mendapat alokasi anggaran sebesar **Rp.2.586.890.672,-** realisasi sebesar **Rp.2.389.229.500,-** atau 92,36% dengan rincian sebagai berikut:

- a. Belanja Operasi sebesar **Rp.2.586.890.672,-** realisasi sebesar **Rp.2.389.229.500,-** atau 92,36%.

Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Kantor Kecamatan Rote Barat Laut Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut :

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	2	3	4	5
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	2.241.847.672	2.044.186.500	91,18
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.966.000	24.966.000	100
-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24.966.000	24.966.000	100
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.099.917.672	1.905.156.500	90,73
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	2.039.637.672	1.844.876.500	90,45
-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	60.280.000	60.280.000	100
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	9.600.000	9.600.000	100
-	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	9.600.000	9.600.000	100
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	44.711.000	44.711.000	100
-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.530.000	11.530.000	100
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.620.000	7.620.000	100
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.561.000	25.561.000	100
5	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	6.600.000	6.600.000	100
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	6.600.000	6.600.000	100
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	56.053.000	53.153.000	95



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	2	3	4	5
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	56.053.000	53.153.000	95
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	26.015.000	26.015.000	100
7	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	26.015.000	26.015.000	100
-	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	15.458.000	15.458.000	100
-	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10.557.000	10.557.000	100
III	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	25.628.000	25.628.000	100
8	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	25.628.000	25.628.000	100
-	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	25.628.000	25.628.000	100
TOTAL		2.293.490.672	2.095.829.500	91,38

Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Kelurahan Busalangga Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut :

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
I	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	293.400.000	293.400.000	100
1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	293.400.000	293.400.000	100
-	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	75.000.000	75.000.000	100
-	Pemberdayaan Kelurahan	143.400.000	143.400.000	100
-	Evaluasi Kelurahan	75.000.000	75.000.000	100
TOTAL		293.400.000	293.400.000	100



26. KECAMATAN ROTE BARAT DAYA

Pada Tahun Anggaran 2024 Kantor Kecamatan Rote Barat Daya mendapat alokasi anggaran sebesar **Rp.1.421.325.412,-** realisasi sebesar **Rp.1.298.004.493,-** atau 91,32% dengan rincian sebagai berikut :

- a. Belanja Operasi sebesar **Rp.1.421.325.412,-** realisasi sebesar **Rp.1.298.004.493,-** atau 91,32%.

Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Kecamatan Rote Barat Daya Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut :

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	2	3	4	5
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	1.342.286.512	1.218.967.193	90,81
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.250.275.512	1.126.956.193	90,14
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	1.165.840.512	1.042.521.193	89,42
-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	84.435.000	84.435.000	100
2	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	9.000.000	9.000.000	100
-	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	9.000.000	9.000.000	100
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	46.976.000	46.976.000	100
-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.845.000	18.845.000	100
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.300.000	12.300.000	100
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15831000	15.831.000	100
4	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	11.335.000	11.335.000	100
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	11.335.000	11.335.000	100
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24.700.000	24.700.000	100
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	24.700.000	24.700.000	100
II	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	79.038.900	79.037.300	100



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	2	3	4	5
6	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	79.038.900	79.037.300	100
-	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	79.038.900	79.037.300	100
TOTAL		1.421.325.412	1.298.004.493	91,32

27. KECAMATAN ROTE BARAT

Pada Tahun Anggaran 2024 Kantor Kecamatan Rote Barat mendapat alokasi anggaran sebesar **Rp.1.580.302.447,-** realisasi sebesar **Rp.1.374.429.584,-** atau 86,97% dengan rincian sebagai berikut:

- Belanja Operasi sebesar **Rp. 1.571.602.447,-** realisasi sebesar **Rp. 1.365.729.584,-** atau 86,90%.
- Belanja Modal sebesar **Rp.8.700.000,-** realisasi sebesar **Rp.8.700.000,-** atau 100%.

Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Kecamatan Rote Barat Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut :

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	2	3	4	5
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	1.549.902.447	1.344.029.584	86,72
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	61.540.000	61.540.000	100
-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	61.540.000	61.540.000	100
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.370.547.547	1.164.675.584	84,98
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	1.323.737.547	1.117.865.584	84,45
-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	46.810.000	46.810.000	100
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	9.600.000	9.600.000	100



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	2	3	4	5
-	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	9.600.000	9.600.000	100
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	45.878.900	45.878.000	100
-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.700.000	8.700.000	100
-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.300.000	5.299.100	99,98
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.643.900	5.643.900	100
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26.235.000	26.235.000	100
5	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	11.766.000	11.766.000	100
-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.146.000	3.146.000	100
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	8.620.000	8.620.000	100
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50.570.000	50.570.000	100
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	50.570.000	50.570.000	100
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	10.000.000	10.000.000	100
7	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	10.000.000	10.000.000	100
-	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10.000.000	10.000.000	100
III	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	20.400.000	20.400.000	100
8	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	20.400.000	20.400.000	100
-	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	20.400.000	20.400.000	100
TOTAL		1.580.302.447	1.374.429.584	86,97



28. KECAMATAN ROTE SELATAN

Pada Tahun Anggaran 2024 Kantor Kecamatan Rote Selatan mendapat alokasi anggaran sebesar **Rp.1.400.767.186,-** realisasi sebesar **Rp.1.262.147.073,-** atau 90,10% dengan rincian sebagai berikut :

- a. Belanja Operasi sebesar **Rp.1.375.067.186,-** realisasi sebesar **Rp. 1.236.447.0733,-** atau 89,92%
- b. Belanja Modal sebesar **Rp.25.700.000,-** realisasi sebesar **Rp.25.700.000,-** atau 100%.

Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Kecamatan Rote Selatan Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut :

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	2	3	4	5
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	1.342.020.186	1.204.865.073	89,78
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.690.000	50.690.000	100
-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	49.690.000	49.690.000	100
-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.000.000	1.000.000	100
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.190.685.186	1.058.956.073	88,94
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	1.148.805.186	1.017.076.073	88,53
-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	41.880.000	41.880.000	100
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	9.000.000	9.000.000	100
-	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	9.000.000	9.000.000	100
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	54.095.000	49.436.000	91,39
-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.055.000	1.055.000	100
-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.700.000	25.700.000	100
-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.031.000	7.031.000	100
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.000.000	1.000.000	100



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	2	3	4	5
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19.309.000	14.650.000	75,87
5	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	4.050.000	4.046.000	99,90
-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.040.000	1.040.000	100
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	3.010.000	3.006.000	99,87
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	33.500.000	32.737.000	97,72
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	32.600.000	32.587.000	99,96
-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	900.000	150.000	16,67
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	22.895.000	22.400.000	97,84
7	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	22.895.000	22.400.000	97,84
-	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	17.795.000	17.300.000	97,22
-	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5.100.000	5.100.000	100
III	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	35.852.000	34.882.000	97,29
8	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	35.852.000	34.882.000	97,29
-	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	35.852.000	34.882.000	97,29
TOTAL		1.400.767.186	1.262.147.073	90,10



29. KECAMATAN ROTE TENGAH

Pada Tahun Anggaran 2024 Kantor Kecamatan Rote Tengah mendapat alokasi anggaran sebesar **Rp. 2.365.686.449,-** realisasi sebesar **Rp.2.273.090.795,-** atau 96,09% dengan rincian sebagai berikut :

- a. Belanja Operasi sebesar **Rp. 2.338.486.449,-** realisasi sebesar **Rp. 2.246.140.795,-** atau 96,05%.
- b. Belanja Modal sebesar **Rp. 27.200.000,-** realisasi sebesar **Rp.26.950.000,-** atau 99,08%.

Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Kecamatan Rote Tengah Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut :

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	2	3	4	5
	BELANJA OPERASI	2.338.486.449	2.246.140.795	96,05
	BELANJA MODAL	27.200.000	26.950.000	99,08
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	2.019.726.449	1.927.191.795	95,42
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	56.454.000	56.454.000	100
-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	54.408.000	54.408.000	100
-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.046.000	2.046.000	100
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.834.819.449	1.743.312.925	95,01
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	1.787.179.449	1.695.672.925	94,88
-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	47.640.000	47.640.000	100
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.200.000	4.200.000	100
-	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4.200.000	4.200.000	100
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	70.319.000	70.069.000	99,64
-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.000.000	1.000.000	100
-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.650.000	16.400.000	98,50
-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.954.000	12.954.000	100
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.622.000	6.622.000	100
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	33.093.000	33.093.000	100
5	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	14.310.000	14.310.000	100
-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.210.000	2.210.000	100
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	12.100.000	12.100.000	100
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	39.624.000	38.845.870	98,04



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	2	3	4	5
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	37.724.000	37.724.000	100
-	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	1.900.000	1.121.870	59,05
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	22.610.000	22.549.000	99,73
7	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	22.610.000	22.549.000	99,73
-	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	13.900.000	13.900.000	100
-	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8.710.000	8.649.000	99,30
III	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8.850.000	8.850.000	100
8	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	8.850.000	8.850.000	100
-	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	8.850.000	8.850.000	100
TOTAL		2.051.186.449	1.958.590.795	95,49

Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Kelurahan Onatali Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut :

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
I	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	314.500.000	314.500.000	100
1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	314.500.000	314.500.000	100
-	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	50.000.000	50.000.000	100
-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	169.500.000	169.500.000	100
-	Evaluasi Kelurahan	95.000.000	95.000.000	100
TOTAL		314.500.000	314.500.000	100



30. KECAMATAN PANTAI BARU

Pada Tahun Anggaran 2024 Kecamatan Pantai Baru mendapat alokasi anggaran sebesar **Rp.2.556.232.659,-** realisasi sebesar **Rp.2.526.574.152,-** atau 98,84% dengan rincian sebagai berikut:

- a. Belanja Operasi sebesar **Rp.2.539.432.659,-** realisasi sebesar **Rp.2.509.774.152,-** atau 98,83%
- b. Belanja Modal sebesar **Rp.16.800.000,-** realisasi sebesar **Rp.16.800.000,-** atau 100%.

Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Kantor Kecamatan Pantai Baru Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut :

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	2	3	4	5
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	2.247.072.659	2.217.414.152	98,68
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.150.000	50.150.000	100
-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.150.000	50.150.000	100
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.076.363.659	2.049.691.752	98,72
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	2.032.533.659	2.005.861.752	98,69
-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	43.830.000	43.830.000	100
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	11.520.000	10.960.000	95,14
-	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	11.520.000	10.960.000	95,14
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	59.035.000	59.035.000	100
-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.492.000	15.492.000	100
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.950.000	10.950.000	100
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32.593.000	32.593.000	100
5	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	13.770.000	11.810.813	85,77
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	13.770.000	11.810.813	85,77
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36.234.000	35.766.587	98,71



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	2	3	4	5
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	36.234.000	35.766.587	98,71
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	36.300.000	36.300.000	100
7	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	36.300.000	36.300.000	100
-	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	36.300.000	36.300.000	100
III	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	6.660.000	6.660.000	100
8	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	6.660.000	6.660.000	100
-	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6.660.000	6.660.000	100
TOTAL		2.290.032.659	2.260.374.152	98,70

Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Kelurahan Olafulihaa Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut :

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
I	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	266.200.000	266.200.000	100
1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	266.200.000	266.200.000	100
-	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	36.540.000	36.540.000	100
-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	29.158.000	29.158.000	100
-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	105.502.000	105.502.000	100
-	Evaluasi Kelurahan	95.000.000	95.000.000	100
TOTAL		266.200.000	266.200.000	100



31. KECAMATAN ROTE TIMUR

Pada Tahun Anggaran 2024 Kantor Kecamatan Rote Timur Mendapat alokasi anggaran sebesar **Rp.1.696.369.376,-** dengan realisasi sebesar **Rp.1.639.740.965,-** atau 96,66% dengan rincian sebagai berikut:

- a. Belanja Operasi sebesar **Rp.1.663.419.376,-** dengan realisasi sebesar **Rp.1.606.790.965,-** atau 96,60%
- b. Belanja Modal sebesar **Rp. 32.950.0000,-** realisasi sebesar **Rp.32.950.000,-** atau 100%.

Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Kecamatan Rote Timur Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut :

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	2	3	4	5
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	1.321.560.376	1.265.001.965	95,72
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.862.000	17.862.000	100
-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17.862.000	17.862.000	100
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.199.692.376	1.143.133.965	95,29
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	1.148.307.376	1.091.748.965	95,07
-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	51.385.000	51.385.000	100
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.200.000	10.200.000	100
-	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	10.200.000	10.200.000	100
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	46.826.000	46.826.000	100
-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.054.000	10.054.000	100
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.005.000	6.005.000	100
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.767.000	30.767.000	100
5	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	4.700.000	4.700.000	100
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	4.700.000	4.700.000	100



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	2	3	4	5
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	42.280.000	42.280.000	100
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	42.280.000	42.280.000	100
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	45.395.000	45.395.000	100
7	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	45.395.000	45.395.000	100
-	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	28.921.000	28.921.000	100
-	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	16.474.000	16.474.000	100
III	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	35.014.000	35.014.000	100
8	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	35.014.000	35.014.000	100
-	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	35.014.000	35.014.000	100
TOTAL		1.401.969.376	1.345.410.965	95,97

Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Kelurahan Londalusi Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut :

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
I	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	294.400.000	294.330.000	99,98
1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	294.400.000	294.330.000	99,98
-	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	75.000.000	74.930.000	99,91
-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	124.400.000	124.400.000	100
-	Evaluasi Kelurahan	95.000.000	95.000.000	100
TOTAL		294.400.000	294.330.000	99,98



32. KECAMATAN NDAO NUSE

Pada Tahun Anggaran 2024 Kantor Kecamatan Ndao Nuse mendapat alokasi anggaran sebesar **Rp.855.223.345,-** realisasi sebesar **Rp.798.975.183,-** atau 93,42% dengan rincian sebagai berikut:

- a. Belanja Operasi sebesar **Rp.855.223.345,-** realisasi sebesar **Rp.798.975.183,-** atau 93,42%.

Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Kecamatan Ndao Nuse Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut :

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	2	3	4	5
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	808.023.345	751.775.183	93,04
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60.050.000	60.050.000	100
-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60.050.000	60.050.000	100
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	632.288.345	576.040.183	91,10
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	592.728.345	536.480.183	90,51
-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	39.560.000	39.560.000	100
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.200.000	4.200.000	100
-	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4.200.000	4.200.000	100
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	53.060.000	53.060.000	100
-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.450.000	7.450.000	100
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.500.500	12.500.500	100
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.999.500	10.999.500	100
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	22.110.000	22.110.000	100
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	58.425.000	58.425.000	100



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	2	3	4	5
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	58.425.000	58.425.000	100
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	29.600.000	29.600.000	100
6	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	29.600.000	29.600.000	100
-	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	17.700.000	17.700.000	100
-	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	11.900.000	11.900.000	100
III	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	17.600.000	17.600.000	100
7	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	17.600.000	17.600.000	100
-	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	17.600.000	17.600.000	100
TOTAL		855.223.345	798.975.183	93,42

33. KECAMATAN LANDU LEKO

Pada Tahun Anggaran 2024 Kantor Kecamatan Landu Leko mendapat alokasi anggaran sebesar **Rp.951.597.161,-** realisasi sebesar **Rp.918.272.915,-** atau 96,50% dengan rincian sebagai berikut:

- a. Belanja Operasi sebesar **Rp.951.597.161,-** realisasi sebesar **Rp.918.272.915,-** atau 96,50%



Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Kecamatan Landu Leko
Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut :

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	2	3	4	5
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	863.790.161	830.465.915	96,14
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.020.000	14.020.000	100
-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.110.000	7.110.000	100
-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.910.000	6.910.000	100
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	723.111.161	690.212.115	95,45
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	684.276.161	651.377.115	95,19
-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	38.835.000	38.835.000	100
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	9.000.000	9.000.000	100
-	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	9.000.000	9.000.000	100
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	58.349.000	58.349.000	100
-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.060.000	14.060.000	100
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.450.000	9.450.000	100
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	34.839.000	34.839.000	100
5	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	16.020.000	16.020.000	100
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	16.020.000	16.020.000	100
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	43.290.000	42.864.800	99,02
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	40.520.000	40.094.800	98,95
-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.770.000	2.770.000	100
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	41.665.000	41.665.000	100



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	2	3	4	5
7	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	41.665.000	41.665.000	100
-	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	23.295.000	23.295.000	100
-	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	18.370.000	18.370.000	100
III	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	20.130.000	20.130.000	100
8	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	20.130.000	20.130.000	100
-	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	20.130.000	20.130.000	100
IV	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	26.012.000	26.012.000	100
9	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	26.012.000	26.012.000	100
-	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	26.012.000	26.012.000	100
TOTAL		951.597.161	918.272.915	96,50

34. KECAMATAN LOAHOLU

Pada Tahun Anggaran 2024 Kantor Kecamatan Loaholu mendapat alokasi anggaran sebesar **Rp.1.502.935.498,-** realisasi sebesar **Rp.1.374.186.885,-** atau 91,43% dengan rincian sebagai berikut:

- a. Belanja Operasi sebesar **Rp.1.502.935.498,-** realisasi sebesar **Rp.1.374.186.885,-** atau 91,43%.



Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Kecamatan Loaholu Tahun
Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut :

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	2	3	4	5
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	1.458.675.498	1.329.941.885	91
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	67.320.000	67.320.000	100
-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	67.320.000	67.320.000	100
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.304.378.498	1.177.164.385	90,25
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	1.260.938.498	1.133.724.385	89,91
-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	43.440.000	43.440.000	100
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.200.000	4.200.000	100
-	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4.200.000	4.200.000	100
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	35.613.000	35.613.000	100
-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.630.000	13.630.000	100
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.690.000	9.690.000	100
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.293.000	12.293.000	100
5	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	9.250.000	9.250.000	100
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	9.250.000	9.250.000	100
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37.914.000	36.394.500	96
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	37.914.000	36.394.500	96
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	14.300.000	14.300.000	100
7	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	14.300.000	14.300.000	100



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	2	3	4	5
-	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	14.300.000	14.300.000	100
III	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	29.960.000	29.945.000	100
8	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	29.960.000	29.945.000	100
-	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	29.960.000	29.945.000	100
TOTAL		1.502.935.498	1.374.186.885	91,43

35. INSPEKTORAT

Pada Tahun Anggaran 2024 Inspektorat Kabupaten Rote Ndao mendapat alokasi anggaran sebesar **Rp. 4.153.119.287,-** realisasi sebesar **Rp.4.064.852.744,-** atau 97,87% dengan rincian sebagai berikut:

- Belanja Operasi sebesar **Rp.4.133.805.287,-** realisasi sebesar **Rp.4.045.538.744,-** atau 97,86%.
- Belanja Modal sebesar **Rp. 19.314.000,-** realisasi sebesar **Rp.19.314.000,-** atau 100%.

Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Inspektorat Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut :

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	2	3	4	5
I	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.138.900.987	3.057.613.744	97,41
1	Perencanaan. Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.450.000	3.450.000	100
-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.725.000	1.725.000	100



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	2	3	4	5
-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.725.000	1.725.000	100
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.906.123.437	2.842.196.744	97,80
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.855.483.437	2.791.556.744	97,76
-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan Daerah	50.640.000	50.640.000	100
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.200.000	4.200.000	100
-	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.200.000	4.200.000	100
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.693.200	5.693.000	100
-	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5.693.200	5.693.000	100
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	105.310.800	105.310.500	100
-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	2.435.500	2.435.500	100
-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.878.300	18.878.000	100
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.000.000	11.000.000	100
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	66.037.000	66.037.000	100
-	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	6.960.000	6.960.000	100
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19.314.000	19.314.000	100
-	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	19.314.000	19.314.000	100
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	32.477.000	17.438.000	53,69
-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	906.000	906.000	100
-	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	31.571.000	16.532.000	52,36
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	62.332.550	60.011.500	96,28
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.	50.232.700	47.912.500	95,38



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	2	3	4	5
-	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	12.099.850	12.099.000	99,99
II	PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.006.718.300	999.739.000	99,31
9	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	868.800.500	862.420.000	99,27
-	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	189.458.500	189.458.500	100
-	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	164.034.000	164.034.000	100
-	Reviu Laporan Kinerja	33.150.000	33.150.000	100
-	Reviu Laporan Keuangan	150.960.000	150.960.000	100
-	Pengawasan Desa	88.535.200	88.365.000	99,81
-	Kerjasama Pengawasan Internal	98.186.000	97.804.000	99,61
-	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	144.476.800	138.648.500	95,97
10	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	137.917.800	137.319.000	99,57
-	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah	4.151.000	4.151.000	100
-	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	133.766.800	133.168.000	99,55
III	PERUMUSAN KEBIJAKAN. PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	7.500.000	7.500.000	100
11	Pendampingan dan Asistensi	7.500.000	7.500.000	100
-	Koordinasi. Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	7.500.000	7.500.000	100
TOTAL		4.153.119.287	4.064.852.744	97,87



36. BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Pada Tahun Anggaran 2024 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Rote Ndao mendapat alokasi anggaran sebesar **Rp.6.461.192.018,-** realisasi sebesar **Rp.6.228.156.507,-** atau 96,39% dengan rincian sebagai berikut:

- a. Belanja Operasi sebesar **Rp.6.291.569.988,-** realisasi sebesar **Rp.6.100.436.207,-** atau 96,96%
- b. Belanja modal sebesar **Rp.169.622.020,-** realisasi sebesar **Rp.127.720.300,-** atau 75,30%

Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut :

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	2	3	4	5
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.737.828.993	2.589.775.497	94,59
1	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	12.549.580	12.548.550	99,99
-	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	10.079.715	10.078.700	99,99
-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.469.865	2.469.850	100
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.375.697.335	2.275.352.857	95,78
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.310.039.275	2.209.705.857	95,66
-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	65.658.060	65.647.000	99,98
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	11.160.000	11.160.000	100
-	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	11.160.000	11.160.000	100
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	195.960.668	154.056.850	78,62
-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2047950	2047950	100
-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	172.222.020	130.320.300	75,67
-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.030.515	10.030.450	100



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	2	3	4	5
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.700.183	5.700.150	100
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.960.000	5.958.000	99,97
5	Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	63.995.000	63.995.000	100
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	63.995.000	63.995.000	100
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	78.466.410	72.662.240	92,60
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	69.449.000	63.644.840	91,64
-	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	6.541.000	6.541.000	100
-	Pemeliharaan / rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	2.476.410	2.476.400	100
II	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	922.001.864	918.055.600	99,57
7	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	689.399.202	685.610.150	99,45
-	Pelaksanaan Konsultasi Publik	16.009.315	16.009.250	100
-	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	45.145.500	44.845.450	99,34
-	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	82.676.820	82.638.750	99,95
-	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	98947567	98.947.500	100
-	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	446620000	443.169.200	99,23
8	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	184.714.222	184.713.200	100
-	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	184.714.222	184.713.200	100
9	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	47.888.440	47.732.250	99,67



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	2	3	4	5
-	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan di Bidang Pembangunan Daerah	47.888.440	47.732.250	99,67
III	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	385.380.268	370.044.200	96,02
10	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	164.509.622	155.982.650	94,82
-	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	14.999.942	14.291.900	95,28
-	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	32.971.252	32.228.400	97,75
-	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	14.999.980	14.289.950	95,27
-	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	101.538.448	95.172.400	93,73
11	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	108.923.546	105.194.450	96,58
-	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	9.999.710	9.299.700	93,00
-	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	52.250.757	50.621.700	96,88
-	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	9.999.710	9.299.700	93,00
-	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	36.673.369	35.973.350	98,09
12	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	111.947.100	108.867.100	97,25



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	2	3	4	5
-	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	10.000.000	9.300.000	93,00
-	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	30.572.400	29.612.400	96,86
-	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	9.999.800	9.279.800	92,80
-	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	61.374.900	60.674.900	98,86
IV	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	2.402.007.393	2.337.007.710	97,29
13	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	1.955.527.539	1.902.831.810	97,31
-	Fasilitas Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	659.614.375	645.830.300	97,91
-	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	120.000.000	100.000.000	83,33
-	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan / atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	755.801.600	737.290.060	97,55
-	Fasilitas dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	420.111.564	419.711.450	99,90
14	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	216.110.477	213.975.550	99,01
-	Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	216.110.477	213.975.550	99,01
15	Pengembangan inovasi dan teknologi	230.369.377	220.200.350	95,59
-	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	230.369.377	220.200.350	95,59



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	2	3	4	5
V	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	13.973.500	13.273.500	94,99
16	Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama	13.973.500	13.273.500	94,99
-	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	13.973.500	13.273.500	94,99
TOTAL		6.461.192.018	6.228.156.507	96,39

37. BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Pada Tahun Anggaran 2024 Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rote Ndao mendapat alokasi anggaran sebesar **Rp. 182.666.417.917,-** realisasi sebesar **Rp. 175.579.559.959,-** atau 96,12% dengan rincian sebagai berikut:

- Belanja Operasi sebesar **Rp. 21.831.545.098,-** realisasi sebesar **Rp. 16.478.179.104,-** atau 75,48%.
- Belanja Modal sebesar **Rp.149.891.500,-** realisasi sebesar **Rp.149.573.948,-** atau 99,79%.
- Belanja Tidak Terduga sebesar **Rp. 1.806.369.319,-** realisasi sebesar **Rp. 325.000.000,-** atau 17,99%.
- Belanja Transfer sebesar **Rp.158.878.612.000,-** realisasi sebesar **Rp.158.626.806.907,-** atau 99,84%.

Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut :

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	2	3	4	5
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	17.600.434.448	12.638.577.207	71,81
1	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	146.934.600	146.331.521	99,59
-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	97.124.600	96.914.524	99,78



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	2	3	4	5
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	41.220.000	41.195.997	99,94
-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.590.000	8.221.000	95,70
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.961.162.378	12.013.572.731	70,83
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.627.444.378	11.683.948.011	70,27
-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	324.088.000	320.046.720	98,75
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.630.000	9.578.000	99,46
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	18.000.000	17.955.640	99,75
-	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	18.000.000	17.955.640	99,75
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	296.623.470	295.739.761	99,70
-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60.896.820	60.894.137	100
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	54.739.650	54.738.902	100
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180.987.000	180.106.722	99,51
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	44.400.000	37.275.560	83,95
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	44.400.000	37.275.560	83,95
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	133.314.000	127.701.994	95,79
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	120.064.000	114.620.364	95,47
-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.250.000	13.081.630	98,73
II	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	164.458.754.469	162.387.607.476	98,74
7	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	2.265.416.150	1.983.308.344	87,55
-	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	162.842.500	154.099.182	94,63
-	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	158.540.650	134.768.085	85,01



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	2	3	4	5
-	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA SKPD	134.236.000	134.122.600	99,92
-	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA SKPD	178.735.000	134.083.000	75,02
-	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA - SKPD	11.622.000	9.105.000	78,34
-	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA - SKPD	11.418.000	8.874.000	77,72
-	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	425.062.100	335.074.658	78,83
-	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	553.343.500	497.109.345	89,84
-	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	50.462.000	48.712.893	96,53
-	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	82.318.400	77.649.101	94,33
-	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	22.480.000	9.052.000	40,27
-	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota	474.356.000	440.658.480	92,90
8	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	741.811.500	695.085.362	93,70
-	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	365.915.000	365.744.425	99,95
-	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	55.323.000	55.197.782	99,77
-	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	155.040.500	110.534.630	71,29
-	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	56.109.000	55.577.000	99,05
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan / Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	50.000.000	49.647.444	99,29



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	2	3	4	5
-	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait.	59.424.000	58.384.081	98,25
9	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	719.878.000	710.739.458	98,73
-	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	62.573.000	61.615.817	98,47
-	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	56.836.000	55.179.700	97,09
-	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	78.461.000	75.891.553	96,73
-	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	216.082.000	212.799.317	98,48
-	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten / Kota	250.748.000	250.325.287	99,83
-	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	55.178.000	54.927.784	99,55
10	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	160.684.981.319	158.951.806.907	98,92
-	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	156.258.889.400	156.258.672.189	100
-	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1.806.369.319	325.000.000	17,99
-	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	2.619.722.600	2.368.134.718	90,40
11	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	46.667.500	46.667.405	100
-	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	46.667.500	46.667.405	100



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	2	3	4	5
III	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	607.229.000	553.375.276	91,13
12	Pengelolaan Barang Milik Daerah	607.229.000	553.375.276	91,13
-	Penyusunan Standar Harga	117.615.000	114.803.695	97,61
-	Penatausahaan Barang Milik Daerah	79.660.900	73.303.151	92,02
-	Inventarisasi Barang Milik Daerah	96.050.000	94.064.141	97,93
-	Pengamanan Barang Milik Daerah	61.825.000	55.904.502	90,42
-	Penilaian Barang Milik Daerah	56.660.000	52.540.959	92,73
-	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	104.731.000	72.245.238	68,98
-	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	64.305.000	64.168.860	99,79
-	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	26.382.100	26.344.730	99,86
TOTAL		182.666.417.917	175.579.559.959	96,12

38. BADAN PENDAPATAN DAERAH

Pada Tahun Anggaran 2024 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rote Ndao mendapat alokasi anggaran sebesar **Rp.5.975.005.132,-** realisasi sebesar **Rp. 4.714.310.300,-** atau 78,90% dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja Operasi sebesar **Rp. 5.914.143.832,-** realisasi sebesar **Rp.4.654.192.700,-** atau 78,70%.
- Belanja Modal sebesar **Rp. 60.861.300,-** realisasi sebesar **Rp.60.117.600,-** atau 98,78%.

Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut :

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	2	3	4	5
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.050.598.659	3.841.026.065	76,05
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	37.540.955	37.457.455	99,78



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	2	3	4	5
-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	31.469.913	31.386.413	99,73
-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.071.042	6.071.042	100
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.586.067.264	3.384.748.831	73,81
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.521.747.264	3.320.428.831	73,43
-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	64.320.000	64.320.000	100
3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	26.120.000	25.955.000	99,37
-	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	26.120.000	25.955.000	99,37
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	299.290.840	296.554.698	99,09
-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	58.719.000	57.975.300	98,73
-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.366.950	14.366.950	100
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	174.883.890	174.883.800	100
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	51.321.000	49.328.648	96,12
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	33.530.000	30.635.481	91,37
-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.105.000	1.105.000	100
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32.425.000	29.530.481	91,07
6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	68.049.600	65.674.600	96,51
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	61.389.600	60.474.600	98,51
-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.660.000	5.200.000	78,08
II	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	924.406.473	873.284.235	94,47
7	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	924.406.473	873.284.235	94,47
-	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	50.970.732	50.219.444	98,53



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	2	3	4	5
-	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	439.800.357	427.770.907	97,26
-	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	219.893.885	184.656.385	83,98
-	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	134.596.588	132.305.588	98,30
-	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	79.144.911	78.331.911	98,97
TOTAL		5.975.005.132	4.714.310.300	78,90

39. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Pada Tahun Anggaran 2024 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Rote Ndao mendapat alokasi anggaran sebesar **Rp.4.888.746.234,-** realisasi sebesar **Rp. 4.199.000.160,-** atau 85,89% dengan rincian sebagai berikut:

- a. Belanja Operasi sebesar **Rp.4.888.746.234,-** realisasi sebesar **Rp.4.199.000.160,-** atau 85,89%.

Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut :

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	2	3	4	5
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.437.071.502	2.138.474.010	87,75
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.538.750	34.412.600	99,63
-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.000.000	24.874.000	99,50
-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.538.750	9.538.600	100



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	2	3	4	5
2	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	2.124.496.682	1.829.549.510	86,12
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.058.091.682	1.763.147.510	85,67
-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	66.405.000	66.402.000	100
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	13.500.000	13.039.000	96,59
-	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	13.500.000	13.039.000	96,59
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	194.136.770	193.079.200	99,46
-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.395.685	30.387.800	99,97
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.445.085	25.444.800	100,00
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	138.296.000	137.246.600	99,24
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	13.200.000	12.675.250	96,02
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.200.000	12.675.250	96,02
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	57.199.300	55.718.450	97,41
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	52.670.500	51.189.650	97,19
-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.528.800	4.528.800	100
II	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	2.122.996.779	1.756.818.850	82,75
7	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	546.109.719	505.029.550	92,48
-	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	16.427.033	16.118.000	98,12
-	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	498.629.179	459.298.900	92,11
-	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	18.800.901	18.329.050	97,49
-	Pengelolaan Data Kepegawaian	12.252.606	11.283.600	92,09
8	Mutasi dan Promosi ASN	272.446.855	78.453.900	28,80
-	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	43.367.210	43.298.850	99,84



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	2	3	4	5
-	Pengelolaan Promosi ASN	229.079.645	35.155.050	15,35
9	Pengembangan Kompetensi ASN	1.272.165.775	1.141.071.800	89,70
-	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	40.596.716	40.591.650	99,99
-	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikat ASN	29.999.417	27.888.200	92,96
-	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	1.201.569.642	1.072.591.950	89,27
10	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	32.274.430	32.263.600	99,97
-	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	5.154.955	5.147.300	99,85
-	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	27.119.475	27.116.300	99,99
III	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	328.677.953	303.707.300	92,40
11	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	328.677.953	303.707.300	92,40
-	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	328.677.953	303.707.300	92,40
TOTAL		4.888.746.234	4.199.000.160	85,89



3. Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/urusan penunjang/urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya

A. Pelaksanaan Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	Pendidikan	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Tidak ada	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				
				a. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				
				1. Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	3 ruang	3 ruang	-	-
				2. Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	4 ruang	4 ruang	-	-
				3. Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/ Penjaga Sekolah	4 ruang	4 ruang	-	-
				4. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1 ruang	1 ruang	-	-
				5. Rehabilitasi Sedang/Berat	1 unit	1 unit		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Perpustakaan Sekolah				
				6. Pengadaan Perlengkapan Sekolah	4 unit	4 unit		
				7. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	4 paket	4 paket	-	-
				8. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	698 orang	698 orang	-	-
				9. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.298 orang	1.298 orang	-	-
				10. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	50 sekolah	50 sekolah	-	-
				11. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	148 SD	148 SD	-	-
				12. Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	4 ruang	4 ruang	-	-
				13. Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	60 Orang	30 Orang	-	-
				14. Pengadaan	2.000	2.000	-	-



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Perlengkapan Peserta Didik				
				15. Pembangunan Ruang Kelas Baru	7 ruang	3 ruang	-	-
				16. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3 ruang	3 ruang	-	-
				17. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	249 orang	249 orang	-	-
				18. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	52 ruang	52 ruang	-	-
				b. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				
				1. Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1 ruang	1 ruang	-	-
				2. Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1 ruang	1 ruang		
				3. Pembangunan Perpustakaan	1 ruang	1 ruang	-	-



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Sekolah				
				4. Pembangunan Laboratorium	3 ruang	3 ruang	-	-
				5. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	12 ruang	12 ruang	-	-
				6. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	2 ruang	2 ruang	-	-
				7. Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	2 ruang	2 ruang	-	-
				8. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	5 ruang	5 ruang	-	-
				9. Pengadaan Perlengkapan Sekolah	3 paket	3 paket	-	-
				10. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	5 paket	5 paket	-	-
				11. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	617 orang	617 orang	-	-
				12. Pembinaan	48 sekolah	48 sekolah	-	-



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Kelembagaan dan Manajemen Sekolah				
				13. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	43 satuan pendidikan	43 satuan pendidikan	-	-
				14. Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	50 orang	30 orang	-	-
				15. Pembangunan Ruang Kelas Baru	4 ruang	4 ruang	-	-
				16. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	43 orang	43 orang	-	-
				17. Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	2.000 paket	2.000 paket	-	-
				18. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	3 ruang	3 ruang	-	-
				c. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	-	-	-
				1. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1 ruang	1 ruang	-	-



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				2. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	99 paket	99 paket	-	-
				3. Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	4.831	4.831	-	-
				4. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	225 orang	225 orang	-	-
				5. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	150 orang	150 orang	-	-
				6. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	25 sekolah	25 sekolah	-	-
				7. Pengelolaan Dana BOP PAUD	133 satuan pendidikan	133 satuan pendidikan	-	-
				8. Pembangunan Ruang Kelas Baru	7 ruang	6 ruang	-	-
				9. Bimbingan Teknis,	820 orang	820 orang	-	-



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan KapasitasBidang Pendidikan				
				10. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1 ruang	1 ruang	-	-
				11. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	99 paket	99 paket	-	-
				12. Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	4.831	4.831	-	-
				13. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	225 orang	225 orang	-	-
				14. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada SatuanPendidika n PAUD	150 orang	150 orang	-	-



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				15. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	25 sekolah	25 sekolah	-	-
				16. Pengelolaan Dana BOP PAUD	133 satuan pendidikan	133 satuan pendidikan	-	-
				17. Pembangunan Ruang Kelas Baru	7 ruang	6 ruang	-	-
				18. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	820 orang	820 orang	-	-
				d. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan			-	-
				1. Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	4 satuan pendidikan	4 satuan pendidikan	-	-
				2. Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	450	450	-	-



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan				
				a. Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan				
				1. Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non formal/ Kesetaraan	193	193	-	-
				2. Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan	11	11	-	-



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Non formal/ Kesetaraan				
2	Kesehatan	Dinas Kesehatan	Tidak ada	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat				
				a. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				
				1. Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya				
				Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	3 unit	3 unit		
				2. Pengembangan Puskesmas				
				Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	33 unit	31 unit	Dua unit Pustu tidak selesai pengerjaannya, progress fisik Pustu Modosinal hanya mencapai 50% dan Pustu Oenitas hanya 45%, dikarenakan	Pengusulan kembali untuk melanjutkan pembangunan di tahun berikutnya sehingga dapat dimanfaatkan sebagai tempat pelayanan kesehatan



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							keterlambatan diperolehnya surat hibah dari pemilik lahan mengakibatkan pekerjaan terlambat dilakukan	
				3. Pengembangan fasilitas kesehatan lainnya				
				Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 unit	1 unit		
				4. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas				
				Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 unit	1 unit	Realisasi fisik rehabilitasi Puskesmas Korbafo hanya mencapai 60%, sisa 40% dilanjutkan dengan kontrak denda berjalan melewati tahun anggaran.	Pengusulan untuk pembayaran di tahun anggaran berikut



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							Permasalahannya karena material ACP dan ACP cutting Lazer yg di pakai harus dengan warna yang sama sesuai kebutuhan di lokasi sehingga perlu dilakukan pemesanan luar Rote dan Kupang. Selain itu juga karena kendala dalam pendropingan	
				5. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya				
				Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 unit	1 unit		
				6. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Fasilitas Pelayanan Kesehatan				
				Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	167 unit	164 unit	1. Pengadaan ambulance tidak terealisasi. Proses pengadaan berjalan namun terjadi kecelakaan laut saat proses pendistribusian sehingga ambulance tidak sampai ke Rote 2. Realisasi fisik belanja modal mesin foging 100% namun realisasi keuangannya 0%. Hak pihak ketiga belum terbayarkan karena	1. Melakukan adendum 50 hari agar pihak ketiga dapat menyelesaikan pekerjaannya namun tidak terealisasi sehingga diusulkan kembali pada tahun anggaran 2025 2. Diusulkan untuk melakukan pembayaran hak pihak ketiga pada tahun anggaran 2025



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							sampai dengan batas waktu pemasukan SPM, tidak bisa dilakukan penginputan data rekanan ke Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebab pada saat itu SIPD tidak berfungsi dengan baik, sehingga menyebabkan keterlambatan dalam penginputan dan pengajuan SPM LS ke Badan Keuangan dan Aset Daerah	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							Daerah Kabupaten Rote Ndao	
				7. Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan				
				Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	8 unit	7 unit	Kalibrasi hanya dilakukan terhadap 7 unit karena 1 unit Alat (pH Meter) dalam kondisi rusak	Pengusulan untuk penyediaan alat pH meter baru
				8. Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan				
				Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	6 paket	6 paket	Pekerjaan sudah terlaksana namun tidak semua jenis obat terpenuhi. Masih terdapat juga hak pihak ketiga yang belum	Diusulkan untuk melakukan pembayaran hak pihak ketiga pada tahun anggaran 2025



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							terbayarkan (pengadaan obat PKD instalasi farmasi) karena sampai dengan batas waktu pemasukan SPM, tidak bisa dilakukan penginputan data rekanan ke Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebab pada saat itu SIPD tidak berfungsi dengan baik	
				9. Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya				
				Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP),	9 paket	9 paket		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya				
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				
				Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3485 orang	1740 orang	1. Standar kuantitas dan kualitas K6 belum mencapai target karena masih kurangnya kompetensi tenaga kesehatan dalam melakukan Penjangkaran serta Pelayanan ANC dimana ada beberapa alat USG	1. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan ANC agar dapat bekerja sesuai standar, melibatkan lintas sektor dalam Penjangkaran ibu hamil baru dan pelaksanaan kelas ibu hamil, serta perbaikan alat yang



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							yang rusak (Puskesmas Busalangga dan Baa). Selain Itu kurangnya Pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya Pemeriksaan Ibu hamil secara teratur 2. Pencatatan dan pelaporan pelayanan Ibu Hamil pada jaringan dan fasilitas pelayanan kesehatan swasta ataupun fasilitas pelayanan kesehatan di luar wilayah Kabupaten	rusak. Selain itu perlunya sosialisasi dan edukasi yang baik terhadap masyarakat tentang pentingnya Pemeriksaan Ibu hamil 2. Meningkatkan koordinasi dan mewajibkan Fasilitas Pelayanan Kesehatan termasuk swasta untuk mencatat dan melaporkan hasil pelayanan ibu hamil kepada Fasyankes dalam wilayah kerjanya setiap bulan dan



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							maupun Provinsi belum terintegrasi secara baik	melaporkan secara berjenjang
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				
				Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3475 orang	2043 orang	1. Kurangnya ketersediaan tenaga kesehatan (bidan) untuk tinggal di desa karena sarana prasarana yang kurang memadai (bangunan pustu rusak) 2. Masih tingginya pertolongan persalinan di rumah/tidak di fasilitas kesehatan karena kurangnya dukungan	1. Pengadaan dan perbaikan sarana prasarana oleh Dinas Kesehatan 2. Rapat koordinasi tingkat kecamatan dengan semua stakeholder untuk berkomitmen agar semua persalinan di fasilitas kesehatan yang diatur dalam Peraturan Desa



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							keluarga	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				
				Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3419 orang	1998 orang	1. Standar kuantitas dan kualitas bayi baru lahir belum mencapai target 2. Kurangnya Pengetahuan keluarga akan pentingnya membawa bayi baru lahir ke Puskesmas/Posyandu/Kelas ibu Balita 3. Kurangnya pengetahuan tenaga dalam pelayanan NICU dan Implementasi SOP Pelayanan Bayi baru Lahir	1. Penyediaan logistik sesuai jumlah sasaran 2. Peningkatan KIE kepada orang tua bayi pada saat kunjungan ke puskesmas/kunjungan rumah dan juga melalui kelas ibu balita 3. Peningkatan kapasitas SDM bagi tenaga kesehatan melalui pelatihan NICU Dasar, penguatan standar operasional pelayanan bayi baru lahir
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	13.504 orang	11.644 orang	1. Kurangnya tenaga Kesehatan yang terlatih pelayanan SDIDTK 2. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan balita yaitu SDIDTK Kit 3. Pelaksanaan pelayanan MTBS di puskesmas belum maksimal karena belum semua tenaga kesehatan terlatih MTBS 4. Pencatatan dan pelaporan pelayanan balita (kohort)	1. Pelatihan/Orientasi tenaga kesehatan terkait pelayanan SDIDTK 2. Perlu pengadaan SDIDTK Kit terstandar di semua desa/kelurahan 3. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan Kader (Komunikasi Antar Pribadi) 4. Integrasi program terkait dan evaluasi berkala serta penegasan pencatatan dan pelaporan pada kohort secara



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							tidak lengkap 5. Kurangnya KIE/konseling kepada sasaran pada saat posyandu (meja 4) 6. Kurangnya koordinasi lintas program dan lintas sektor dalam pelayanan kesehatan terhadap balita	manual maupun melalui aplikasi ePPGBM 5. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan kader (Komunikasi Antar Pribadi) 6. Rapat koordinasi dan pembentukan tim pelayanan tingkat Kabupaten, kecamatan dan Desa dengan stakeholder terkait pembuatan komitmen
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				
				Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang	28.807 orang	24.560 orang	1. Pelayanan kesehatan	1. Perlu dilakukan



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			belum mencakup seluruh peserta didik di sekolah karena ada siswa yang tidak hadir 2. Pelayanan kesehatan hanya dilakukan pada anak usia pendidikan dasar di sekolah 3. Tim Pembina UKS/M Kabupaten belum aktif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya	kegiatan sweeping terhadap siswa/i yang belum mendapat pelayanan kesehatan dan meningkatkan kinerja pelayanan di tahun berikutnya 2. Koordinasi lintas sektor terkait melakukan pelayanan Kesehatan kepada anak usia Pendidikan dasar di luar sekolah 3. Meningkatkan koordinasi Tim Pembina UKS/M Kabupaten
				Pengelolaan Pelayanan				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Kesehatan pada Usia Produktif				
				Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	88.793 orang	52.763 orang	1. Belum semua sasaran berpartisipasi aktif dalam pemeriksaan kesehatan 2. Kurangnya integrasi dan koordinasi dalam Pencatatan dan Pelaporan pelaksanaan SPM Usia Produktif	1. Meningkatkan KIE dan kerjasama linsek untuk menggerakkan sasaran 2. Meningkatkan integrasi sistem pencatatan dan pelaporan pelaksanaan SPM Usia Produktif
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut				
				Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	15.331 orang	12.058 orang	1. Kurangnya logistik BMHP untuk skrining faktor resiko 2. Pencatatan/ pelaporan di Posbindu PTM, pos	1. Pengadaan BMHP sesuai jumlah sasaran dan kebutuhan 2. Koordinasi dan pembinaan secara



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							lansia, pustu, pos UKK, dan pelayanan terpadu di FKTP belum akurat dan valid 3. Pengelola program Lansia Puskesmas selalu diganti sehingga pelaksanaan pelayanan pada lansia dan tatalaksana tidak sesuai standar	terintegrasi tentang pencatatan dan pelaporan di tingkat Posbindu PTM, pos lansia, pustu, pos UKK dan FKTP 3. Pengelola program di tetapkan dalam surat Keputusan Kepala Puskesmas untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 3 tahun
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				
				Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5.935 orang	5.551 orang	1. Belum semua penderita hipertensi berpartisipasi	1. Meningkatkan KIE dan partisipasi aktif penderita



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							aktif dalam melakukan kunjungan rutin ke fasilitas pelayanan kesehatan 2. Ketersediaan obat penderita hipertensi masih kurang	hipertensi untuk melakukan kunjungan rutin ke fasilitas pelayanan kesehatan 2. Pengusulan pengadaan obat hipertensi berdasarkan kebutuhan jumlah penderita hipertensi melalui Instalasi Farmasi Kabupaten
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus				
				Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.406 orang	642 orang	1. Belum semua penderita diabetes mellitus berpartisipasi aktif dalam	1. Meningkatkan KIE dan partisipasi aktif penderita diabetes mellitus



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							melakukan kunjungan rutin ke fasilitas pelayanan kesehatan 2. Pos pelayanan kesehatan pemberdayaan masyarakat (Posbindu PTM, pos lansia dan pos UKK) belum beroperasi secara maksimal sehingga pencatatan dan pelaporan hasil skrining penderita diabetes mellitus belum valid dan akurat	untuk melakukan kunjungan rutin ke fasilitas pelayanan kesehatan 2. Meningkatkan koordinasi dan peran serta lintas sektor dan program terkait 3. Pengusulan pengadaan obat diabetes melitus berdasarkan kebutuhan jumlah penderita diabetes mellitus melalui Instalasi Farmasi Kabupaten



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							3. Ketersediaan obat penderita diabetes melitus masih kurang	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat				
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	122 orang	173 orang	1. Pencatatan dan pelaporan hasil skrinning masalah kesehatan jiwa pada Aplikasi Simkeswa masih sangat rendah 2. Kurang Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat dan keluarga pasien terkait	1. Perlu monitoring dan evaluasi progres penginputan data yang dilakukan pengelola Puskesmas, minimal 1 kali setiap akhir bulan 2. Meningkatkan koordinasi dan peran serta lintas program dan lintas sektor terkait untuk Komunikasi, Informasi dan



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							Kepatuhan Minum Obat 3. Adanya laporan bahwa sebagian besar Penderita ODGJ tidak memiliki kelengkapan administrasi kependudukan seperti Akta Kelahiran, KTP dan KK yang merupakan syarat untuk mendapatkan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/KIS) yang dapat membantu dalam pelayanan pengobatan dan rujukan	Edukasi (KIE) kepada masyarakat dan keluarga pasien serta kunjungan rumah terintegrasi 3. Berkoordinasi dengan perangkat Desa setempat terkait data pasien dan berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil untuk pemecahan masalah tersebut



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2.351 orang	1.135 orang	1. Sesuai instruksi dari Subdit TBC Kemenkes pada bulan Juni tahun 2021 bahwa semua tindakan pemeriksaan TBC wajib di Fasilitas Tes Cepat Molekuler (TCM), di Kabupaten Rote Ndao baru tersedia 2 alat TCM yaitu di RSUD Ba'a dan Puskesmas Batutua 2. Rendahnya dukungan	1. Penambahan alat TCM dan dukungan anggaran atau biaya transport bagi petugas rujuk sampel ke faskes TCM 2. Menaikan alokasi anggaran terhadap program Tuberkulosis (TBC) guna menjawab kebutuhan SPM 3. Petugas kesehatan beberapa kali berkunjung memberikan edukasi dan menitipkan pot dahak



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							anggaran sehingga menyulitkan untuk pelaksanaan kegiatan diluar gedung atau Active Case Detection (ACD) berupa penjangkaran maupun Investigasi Kontak (IK) 3. Banyak sasaran/masyarakat yang secara klinis menunjukkan gejala sebagai teduga TBC namun tidak bisa	4. Koordinasi dan pembinaan secara terintegrasi tentang pencatatan dan pelaporan di tingkat Fasyankes



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							mengeluarkan dahak secara sempurna 4. Pencatatan/ pelaporan melalui SITB online bagi semua Fasyankes belum maksimal sehingga semua pelaporan belum akurat dan valid	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV				
				Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	4.049 orang	5.411 orang	1. Masih ada layanan yang satelitnya dalam bentuk Perawatan Dukungan Pengobatan (PDP)	1. Mengaktifkan layanan satelit PDP menjadi layanan PDP 2. Perlu dilakukan pelatihan terhadap



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							2. Belum adanya tenaga terlatih dalam hal Perawatan Dukungan Pengobatan 3. Logistik reagen 1, 2 dan 3 masih tergantung dari ketersediaan di IFK Dinas Kesehatan Provinsi NTT serta roses pengiriman logistik yang membutuhkan waktu yang lama (minimal 2 minggu) 4. Pencatatan dan pelaporan belum maksimal karena	tenaga yang terdiri dari dokter, perawat/bidan, petugas farmasi, petugas pencatatan dan pelaporan dan ahli Teknik laboratorium medik 3. Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao perlu menyediakan logistik yang dibutuhkan baik reagen 1, 2, 3 untuk mencapai target pelayanan 4. Perlu adanya pengadaan laptop/computer bagi setiap



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							keterbatasan sarana khususnya laptop/komputer bagi penanggung jawab program di Puskesmas yang mengakibatkan pelaporannya tidak real time	penanggung jawab program di Puskesmas
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 dokumen	1 dokumen		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 dokumen	1 dokumen		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 dokumen	1 dokumen		
				Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				
				Jumlah Dokumen Hasil pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 dokumen	1 dokumen		
				Pengelolaan Surveilans Kesehatan				
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 dokumen	1 dokumen		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA				
				Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	11 orang	11 orang		
				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	4 dokumen	4 dokumen		
				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan	1 dokumen	1 dokumen		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Kesehatan Masyarakat				
				Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB Rujukan Nasional				
				Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	1 paket	1 paket		
				Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota				
				Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	8 unit	8 unit		
				Investigasi awal Kejadian tidak di harapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				
				Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 laporan	1 laporan		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Jumlah Orang Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Malaria	12.296 orang	5.794 orang	Setiap Faskes tidak secara maksimal menjalankan kegiatan Active Case Detection (ACD) berupa Mass Blood Survey (MBS) dan Screening malaria pada Ibu Hamil	Mengupayakan setiap Faskes agar melaksanakan kegiatan diluar gedung (ACD) berupa survey Darah Jari Malaria Massal (MBS), screening Malaria pada setiap ibu hamil yang berkunjung pada pemeriksaan pertama, survey migrasi dan survey kontak pada setiap kasus malaria
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak				
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	1 dokumen	1 dokumen		
				Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				
				Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 dokumen	1 dokumen		
				Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
				Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan				
				Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	12 unit	12 unit		
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan				
				Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				
				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Standar				
				Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	1001 orang	996 orang	Terjadi pengurangan jumlah pegawai karena mutasi maupun pensiun	Rekrutmen Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan melalui Formasi CPNS dan PPPK Tahun 2024
				Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				
				Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 dokumen	1 dokumen		
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Daerah Kabupaten/Kota				
				Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	664 orang	652 orang	Dokter Umum yang akan mengikuti Uji Kompetensi telah berangkat mengikuti pendidikan tubel dokter spesialis (7 orang), dan yang berhalangan hadir/sakit 3 orang, Uji Kompetensi Dokter Gigi tidak dapat dilaksanakan karena 1 (satu) orang Penguji berhalangan hadir karena sedang mengikuti test pendidikan dokter spesialis	Dokter Umum dan Drg yang tidak dapat mengikuti Uji Kompetensi pada tahun 2024 mengikuti Uji Kompetensi dengan Metode Computer Assisted Test(CAT) dari Kementrian Kesehatan sesuai regulasi yang baru
				Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman				
				Pemberian Izin Apotek,				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				
				Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				
				Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional(UMOT)	1 dokumen	1 dokumen		
				Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1 dokumen	1 dokumen		
				Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga				
				Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan				
				Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga	40 produk	22 produk	Pemeriksaan seharusnya dilakukan dalam dua tahap,	Diusulkan untuk pemeriksaan lagi pada tahun anggaran berikut



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan			tahap pertama untuk 22 produk dan sisanya pada tahap kedua namun dikarenakan Laboratorium rujukan pemeriksaan sedang dalam proses rehabilitasi, baru aktif kembali pada tanggal 15 Desember sehingga pemeriksaan tahap kedua tidak dilaksanakan	
				Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Kabupaten/Kota				
				Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				
				Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 dokumen	1 dokumen		
				Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				
				Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 dokumen	1 dokumen		
				Program Pemenuhan				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat				
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				
				Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	345 orang	172 orang	1. Standar kuantitas dan kualitas K6 belum mencapai target karena masih kurangnya kompetensi tenaga kesehatan dalam melakukan Penjangkaran serta Pelayanan ANC dimana ada beberapa alat USG yang rusak (Puskesmas	1. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan ANC agar dapat bekerja sesuai standar, melibatkan lintas sektor dalam Penjangkaran ibu hamil baru dan pelaksanaan kelas ibu hamil, serta perbaikan alat yang rusak. Selain itu perlunya



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							Busalangga dan Baa). Selain Itu kurangnya Pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya Pemeriksaan Ibu hamil secara teratur 2. Pencatatan dan pelaporan pelayanan Ibu Hamil pada jaringan dan fasilitas pelayanan kesehatan swasta ataupun fasilitas pelayanan kesehatan di luar wilayah Kabupaten maupun Provinsi	sosialisasi dan edukasi yang baik terhadap masyarakat tentang pentingnya Pemeriksaan Ibu hamil 2. Meningkatkan koordinasi dan mewajibkan Fasilitas Pelayanan Kesehatan termasuk swasta untuk mencatat dan melaporkan hasil pelayanan ibu hamil kepada Fasyankes dalam wilayah kerjanya setiap bulan dan melaporkan secara



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							belum terintegrasi secara baik	berjenjang
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin				
				Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	345 orang	215 orang	1. Kurangnya ketersediaan tenaga kesehatan (bidan) untuk tinggal di desa karena sarana prasarana yang kurang memadai (bangunan pustu rusak) 2. Masih tingginya pertolongan persalinan di rumah/tidak di fasilitas kesehatan karena kurangnya dukungan keluarga	1. Pengadaan dan perbaikan sarana prasarana oleh Dinas Kesehatan 2. Rapat koordinasi tingkat kecamatan dengan semua stakeholder untuk berkomitmen agar semua persalinan di fasilitas kesehatan yang diatur dalam Peraturan Desa



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				
				Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2.790 orang	2.440 orang	1. Pelayanan kesehatan belum mencakup seluruh peserta didik di sekolah karena ada siswa yang tidak hadir Pelayanan kesehatan hanya dilakukan pada anak usia pendidikan dasar di sekolah 2. Tim Pembina UKS/M Kabupaten belum aktif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya	1. Perlu dilakukan kegiatan sweeping terhadap siswa/i yang belum mendapat pelayanan kesehatan dan meningkatkan kinerja pelayanan di tahun berikutnya 2. Melakukan kordinasi lintas sektor terkait melakukan pelayanan Kesehatan kepada anak usia Pendidikan dasar di luar sekolah



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								3. Meningkatkan koordinasi Tim Pembina UKS/M Kabupaten
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	192 orang	74 orang	Rendahnya dukungan Anggaran guna mendukung kegiatan program pelayanan diluar gedung/Active Case Detection (ACD) berupa Penjaringan, Investigasi kontak dan ILTB	Dukungan anggaran kegiatan diluar Gedung
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV				
				Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	398 orang	411 orang	1. Masih ada layanan yang satelitnya dalam Perawatan Dukungan	1. Mengaktifkan layanan satelit PDP menjadi layanan PDP 2. Perlu



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							Pengobatan (PDP) 2. Belum adanya tenaga terlatih dalam hal Perawatan Dukungan Pengobatan 3. Logistik reagen 1, 2 dan 3 masih tergantung dari ketersediaan di IFK Dinas Kesehatan Provinsi NTT serta roses pengiriman logistik yang membutuhkan waktu yang lama (minimal 2 minggu) 4. Pencatatan dan pelaporan belum	dilakukan pelatihan terhadap tenaga yang terdiri dari dokter, perawat/bidan, petugas farmasi, petugas pencatatan dan pelaporan dan ahli Teknik laboratorium medik 3. Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao perlu menyediakan logistik yang dibutuhkan baik reagen 1, 2, 3 untuk mencapai target pelayanan 4. Perlu adanya



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							maksimal karena keterbatasan sarana khususnya laptop/komputer bagi penanggung jawab program di Puskesmas yang mengakibatkan pelaporannya tidak real time	pengadaan laptop/computer bagi setiap penanggung jawab program di Puskesmas
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 dokumen	1 dokumen		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 dokumen	1 dokumen		
				Pengelolaan Surveilans Kesehatan				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 dokumen	1 dokumen		
				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 dokumen	1 dokumen		
				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 dokumen	1 dokumen		
				Operasional Pelayanan Puskesmas				
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 dokumen	1 dokumen		
				Investigasi awal Kejadian tidak di harapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				
				Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat	1 laporan	1 laporan		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Massal)				
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan HIV (ODHIV)				
				Jumlah Orang Dengan HIV (ODHIV) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 orang	1 orang		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis				
				Jumlah Orang dengan tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	14 orang	3 orang		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi				
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	1 dokumen	1 dokumen		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak				
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	1 dokumen	1 dokumen		
				Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 dokumen	1 dokumen		
				Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan				
				Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				
				Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 dokumen	1 dokumen		
				Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat				
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Kabupaten/Kota				
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				
				Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	126 orang	125 orang	1. Standar kuantitas dan kualitas K6 belum mencapai target karena masih kurangnya kompetensi tenaga kesehatan dalam melakukan Penjangkaran serta Pelayanan ANC dimana ada beberapa alat USG yang rusak (Puskesmas Busalangga dan Baa). Selain Itu kurangnya Pengetahuan masyarakat terhadap	1. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan ANC agar dapat bekerja sesuai standar, melibatkan lintas sektor dalam Penjangkaran ibu hamil baru dan pelaksanaan kelas ibu hamil, Serta perbaikan alat yang rusak. Selain itu perlunya sosialisasi dan edukasi yang baik terhadap masyarakat tentang pentingnya



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							pentingnya Pemeriksaan Ibu hamil secara teratur 2. Pencatatan dan pelaporan pelayanan Ibu Hamil pada jaringan dan fasilitas pelayanan kesehatan swasta ataupun fasilitas pelayanan kesehatan di luar wilayah Kabupaten maupun Provinsi belum terintegrasi secara baik	Pemeriksaan Ibu hamil 2. Meningkatkan koordinasi dan mewajibkan Fasilitas Pelayanan Kesehatan termasuk swasta untuk mencatat dan melaporkan hasil pelayanan ibu hamil kepada Fasyankes dalam wilayah kerjanya setiap bulan dan melaporkan secara berjenjang
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin				
				Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan	126 orang	56 orang	1. Kurangnya ketersediaan	1. Pengadaan dan



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			tenaga kesehatan (bidan) untuk tinggal di desa karena sarana prasarana yang kurang memadai (bangunan pustu rusak) 2. Masih tingginya pertolongan persalinan di rumah/tidak di fasilitas kesehatan karena kurangnya dukungan keluarga	perbaikan sarana prasarana oleh Dinas Kesehatan 2. Rapat koordinasi tingkat kecamatan dengan semua stakeholder untuk berkomitmen agar semua persalinan di fasilitas kesehatan yang diatur dalam Peraturan Desa
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				
				Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1021 orang	893 orang	1. Pelayanan kesehatan belum mencakup seluruh	1. Perlu dilakukan kegiatan sweeping terhadap



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							peserta didik di sekolah karena ada siswa yang tidak hadir 2. Pelayanan kesehatan hanya dilakukan pada anak usia pendidikan dasar di sekolah 3. Tim Pembina UKS/M Kabupaten belum aktif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya	siswa/i yang belum mendapat pelayanan kesehatan dan meningkatkan kinerja pelayanan di tahun berikutnya 2. Melakukan kordinasi lintas sektor terkait melakukan pelayanan Kesehatan kepada anak usia Pendidikan dasar di luar sekolah 3. Meningkatkan koordinasi Tim Pembina UKS/M Kabupaten
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	116 orang	21 orang	Banyak sasaran terduga yang dititip pot dahak namun tidak mengembalikan dengan alasan tidak dapat mengeluarkan dahak	Selalu melakukan follow up pada setiap suspek dengan bantuan keluarga atau Kader
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV				
				Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	153 orang	253 orang	Kurangnya dukungan anggaran untuk kegiatan di luar gedung	Menyediakan anggaran untuk kegiatan di luar gedung khususnya di daerah kepulauan
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 dokumen	1 dokumen		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan	1 dokumen	1 dokumen		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Kesehatan Lingkungan				
				Pengelolaan Surveilans Kesehatan				
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 dokumen	1 dokumen		
				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 dokumen	1 dokumen		
				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 dokumen	1 dokumen		
				Operasional Pelayanan Puskesmas				
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 dokumen	1 dokumen		
				Investigasi awal Kejadian tidak di harapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				
				Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak	1 laporan	1 laporan		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan HIV (ODHIV)				
				Jumlah Orang Dengan HIV (ODHIV) Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 orang	1 orang		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis				
				Jumlah Orang dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11 orang	6 orang	1. Semua sampel Pemeriksaan awal wajib menggunakan Tes Cepat Molekuler (TCM) sehingga menyulitkan bagi puskesmas dengan jarak tempuh jauh, oleh karena	1. Penambahan Alat TCM ke Wilayah kerja Faskes yang ada di Kabupaten Rote Ndao 2. Mengalokasikan dukungan anggaran pelaksanaan kegiatan ILTB dan IK ke Desa atau ke sasaran Indeks



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							ketersediaan alat TCM di Rote Ndao hanya tersedia 2 Unit yaitu RSUD Baa dan Puskesmas Batutua 2. Belum secara maksimal pelaksanaan kegiatan Inveksi Laten Tuberkulosis (ILTB) melalui investigasi Kontak (IK) oleh karena kurangnya dukungan anggaran	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi				
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	1 dokumen	1 dokumen		
				Pengelolaan Pelayanan				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Kesehatan Ibu dan Anak				
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	1 dokumen	1 dokumen		
				Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				
				Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 dokumen	1 dokumen		
				Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan				
				Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				
				Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan	1 dokumen	1 dokumen		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				
				Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat				
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				
				Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	214 orang	68 orang	1. Standar kuantitas dan kualitas K6 belum mencapai target karena masih kurangnya kompetensi tenaga kesehatan	1. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan ANC agar dapat bekerja sesuai standar, melibatkan lintas sektor dalam



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							dalam melakukan Penjaringan serta Pelayanan ANC dimana ada beberapa alat USG yang rusak (Puskesmas Busalangga dan Baa). Selain Itu kurangnya Pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya Pemeriksaan Ibu hamil secara teratur 2. Pencatatan dan pelaporan pelayanan Ibu Hamil pada jaringan dan fasilitas pelayanan	Penjaringan ibu hamil baru dan pelaksanaan kelas ibu hamil, Serta perbaikan alat yang rusak. Selain itu perlunya sosialisasi dan edukasi yang baik terhadap masyarakat tentang pentingnya Pemeriksaan Ibu hamil 2. Meningkatkan koordinasi dan mewajibkan Fasilitas Pelayanan Kesehatan termasuk swasta untuk mencatat dan melaporkan hasil



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							kesehatan swasta ataupun fasilitas pelayanan kesehatan di luar wilayah Kabupaten maupun Provinsi belum terintegrasi secara baik	pelayanan ibu hamil kepada Fasyankes dalam wilayah kerjanya setiap bulan dan melaporkan secara berjenjang
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				
				Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	214 orang	105 orang	1. Kurangnya ketersediaan tenaga kesehatan (bidan) untuk tinggal di desa karena sarana prasarana yang kurang memadai (bangunan pustu rusak) 2. Masih tingginya	1. Pengadaan dan perbaikan sarana prasarana oleh Dinas Kesehatan 2. Rapat koordinasi tingkat kecamatan dengan semua stakeholder untuk berkomitmen



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							pertolongan persalinan di rumah/tidak di fasilitas kesehatan karena kurangnya dukungan keluarga	agar semua persalinan di fasilitas kesehatan yang diatur dalam Peraturan Desa
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				
				Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.732 orang	1.553 orang	1. Pelayanan kesehatan belum mencakup seluruh peserta didik di sekolah karena ada siswa yang tidak hadir 2. Pelayanan kesehatan hanya dilakukan pada anak usia pendidikan dasar di sekolah	1. Perlu dilakukan kegiatan sweeping terhadap siswa/i yang belum mendapat pelayanan kesehatan dan meningkatkan kinerja pelayanan di tahun berikutnya 2. Melakukan kordinasi lintas sektor



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							3. Tim Pembina UKS/M Kabupaten belum aktif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya	terkait melakukan pelayanan Kesehatan kepada anak usia Pendidikan dasar di luar sekolah 3. Meningkatkan koordinasi Tim Pembina UKS/M Kabupaten
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	144 orang	41 orang	Penanggung Jawab program lebih cenderung dalam pengelolaan program bersifat pasive case Detection (PCD) sehingga cakupan pemeriksaan rendah	Penanggung jawab harus menjalankan program bersifat Active Case Detection (ACD)
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Dengan Resiko Terinfeksi HIV				
				Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	247 orang	660 orang	1. Masih ada layanan yang satelitnya dalam Perawatan Dukungan Pengobatan (PDP) 2. Belum adanya tenaga terlatih dalam hal Perawatan Dukungan Pengobatan 3. Logistik reagen 1, 2 dan 3 masih tergantung dari ketersediaan di IFK Dinas Kesehatan Provinsi NTT serta roses pengiriman logistik yang membutuhka	1. Mengaktifkan layanan satelit PDP menjadi layanan PDP 2. Perlu dilakukan pelatihan terhadap tenaga yang terdiri dari dokter, perawat/bidan, petugas farmasi, petugas pencatatan dan pelaporan dan ahli Teknik laboratorium medik 3. Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao perlu menyediakan



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							n waktu yang lama (minimal 2 minggu) 4. Pencatatan dan pelaporan belum maksimal karena keterbatasan sarana khususnya laptop/komputer bagi penanggung jawab program di Puskesmas yang mengakibatkan pelaporannya tidak real time	logistik yang dibutuhkan baik reagen 1, 2, 3 untuk mencapai target pelayanan 4. Perlu adanya pengadaan laptop/computer bagi setiap penanggung jawab program di Puskesmas
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi	1 dokumen	1 dokumen		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Masyarakat				
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 dokumen	1 dokumen		
				Pengelolaan Surveilans Kesehatan				
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 dokumen	1 dokumen		
				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 dokumen	1 dokumen		
				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 dokumen	1 dokumen		
				Operasional Pelayanan Puskesmas				
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 dokumen	1 dokumen		
				Investigasi awal Kejadian tidak di harapkan (Kejadian Ikutan Pasca				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				
				Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 laporan	1 laporan		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan HIV (ODHIV)				
				Jumlah Orang Dengan HIV (ODHIV) Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3 orang	3 orang		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis				
				Jumlah Orang dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	13 orang	6 orang	1. Banyaknya Pasien yang ditemukan dan diobati sampai tuntas/sembuh sehingga potensi terjadi penularan makin	Penambahan Alat TCM ke Wilayah kerja Faskes yang ada di Kabupaten Rote Ndao



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							rendah 2. Semua sampel Pemeriksaan awal wajib menggunakan Tes Cepat Molekuler (TCM) sehingga menyulitkan bagi puskesmas dengan jarak jauh oleh karena ketersediaan alat TCM di Rote Ndao hanya tersedia 2 Unit yaitu di RSUD Baa dan Puskesmas Batutua.	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi				
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	1 dokumen	1 dokumen		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak				
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	1 dokumen	1 dokumen		
				Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				
				Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 dokumen	1 dokumen		
				Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan				
				Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				
				Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan	1 dokumen	1 dokumen		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				
				Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat				
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				
				Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	134 orang	74 orang	1. Standar kuantitas dan kualitas K6 belum mencapai target karena masih kurangnya kompetensi tenaga kesehatan dalam melakukan Penjaringan serta Pelayanan ANC dimana ada beberapa	1. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan ANC agar dapat bekerja sesuai standar, melibatkan lintas sektor dalam Penjaringan ibu hamil baru dan pelaksanaan kelas ibu hamil, Serta perbaikan



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							alat USG yang rusak (Puskesmas Busalangga dan Baa). Selain Itu kurangnya Pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya Pemeriksaan Ibu hamil secara teratur 2. Pencatatan dan pelaporan pelayanan Ibu Hamil pada jaringan dan fasilitas pelayanan kesehatan swasta ataupun fasilitas pelayanan kesehatan di luar wilayah	alat yang rusak. Selain itu perlunya sosialisasi dan edukasi yang baik terhadap masyarakat tentang pentingnya Pemeriksaan Ibu hamil 2. Meningkatkan koordinasi dan mewajibkan fasyankes termasuk swasta untuk mencatat dan melaporkan hasil pelayanan ibu hamil kepada Puskesmas dalam wilayah kerjanya setiap bulan dan melaporkan



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							Kabupaten maupun Provinsi belum terintegrasi secara baik	secara berjenjang
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin				
				Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	134 orang	58 orang	1. Kurangnya ketersediaan tenaga kesehatan (bidan) untuk tinggal di desa karena sarana prasarana yang kurang memadai (bangunan pustu rusak) 2. Masih tingginya pertolongan persalinan di rumah/tidak di fasilitas kesehatan karena kurangnya	1. Pengadaan dan perbaikan sarana prasarana oleh Dinas Kesehatan 2. Rapat koordinasi tingkat kecamatan dengan semua stakeholder untuk berkomitmen agar semua persalinan di fasilitas kesehatan yang diatur dalam Peraturan



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							dukungan keluarga	Desa
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				
				Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.086 orang	950 orang	1. Pelayanan kesehatan belum mencakup seluruh peserta didik di sekolah karena ada siswa yang tidak hadir 2. Pelayanan kesehatan hanya dilakukan pada anak usia pendidikan dasar di sekolah 3. Tim Pembina UKS/M Kabupaten belum aktif dalam melaksanakan	1. Perlu dilakukan kegiatan sweeping terhadap siswa/i yang belum mendapat pelayanan kesehatan dan meningkatkan kinerja pelayanan di tahun berikutnya 2. Melakukan kordinasi lintas sektor terkait melakukan pelayanan Kesehatan kepada anak usia



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							n tugas dan fungsinya	Pendidikan dasar di luar sekolah 3. Meningkatkan koordinasi Tim Pembina UKS/M Kabupaten
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	136 orang	25 orang	Penanggung Jawab program lebih cenderung dalam pengelolaan program bersifat pasive case Detection (PCD) sehingga cakupan pemeriksaan rendah	Penanggung jawab harus menjalankan program bersifat Active Case Detection (ACD)
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV				
				Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	158 orang	171 orang	1. Masih ada layanan yang satelitnya dalam	1. Mengaktifkan layanan satelit PDP menjadi



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							bentuk Perawatan Dukungan Pengobatan (PDP) 2. Belum adanya tenaga terlatih dalam hal Perawatan Dukungan Pengobatan 3. Logistik reagen 1, 2 dan 3 masih tergantung dari ketersediaan di IFK Dinas Kesehatan Provinsi NTT serta roses pengiriman logistik yang membutuhkan waktu yang lama (minimal 2 minggu) 4. Pencatatan	layanan PDP 2. Perlu dilakukan pelatihan terhadap tenaga yang terdiri dari dokter, perawat/bidan, petugas farmasi, petugas pencatatan dan pelaporan dan ahli Teknik laboratorium medik 3. Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao perlu menyediakan logistik yang dibutuhkan baik reagen 1, 2, 3 untuk mencapai target



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							dan pelaporan belum maksimal karena keterbatasan sarana khususnya laptop/komputer bagi penanggung jawab program di Puskesmas yang mengakibatkan pelaporannya tidak real time	4. pelayanan Perlu adanya pengadaan laptop/computer bagi setiap penanggung jawab program di Puskesmas
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 dokumen	1 dokumen		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan	1 dokumen	1 dokumen		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Kesehatan Lingkungan				
				Pengelolaan Surveilans Kesehatan				
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 dokumen	1 dokumen		
				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 dokumen	1 dokumen		
				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 dokumen	1 dokumen		
				Operasional Pelayanan Puskesmas				
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 dokumen	1 dokumen		
				Investigasi awal Kejadian tidak di harapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				
				Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak	1 laporan	1 laporan		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan HIV (ODHIV)				
				Jumlah Orang Dengan HIV (ODHIV) Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2 orang	2 orang		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis				
				Jumlah Orang dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4 orang	9 orang	1. Semua sampel Pemeriksaan awal wajib menggunakan Tes Cepat Molekuler (TCM) 2. Kurangnya dukungan alokasi anggaran terhadap kegiatan pelayanan diluar	1. Penambahan Alat TCM ke Wilayah kerja Faskes yang ada di Kabupaten Rote Ndao 2. Mengalokasikan dukungan anggaran pelaksanaan kegiatan Penjaringan ILTB dan IK ke Desa atau ke sasaran



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							Gedung/Active Case Detectin (ACD) berupa Penjaringan, Investigasi Kontak (IK) dan Inveksi Laten Tuberkulosis (ILTB)	Indeks
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi				
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	1 dokumen	1 dokumen		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak				
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	1 dokumen	1 dokumen		
				Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				
				Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 dokumen	1 dokumen		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan				
				Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				
				Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 dokumen	1 dokumen		
				Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat				
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				
				Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	214 orang	124 orang	1. Standar kuantitas dan kualitas K6 belum mencapai target karena masih kurangnya kompetensi tenaga kesehatan dalam melakukan Penjangkaran serta Pelayanan ANC dimana ada beberapa alat USG yang rusak (Puskesmas Busalangga dan Baa). Selain Itu kurangnya Pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya	1. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan ANC agar dapat bekerja sesuai standar, melibatkan lintas sektor dalam Penjangkaran ibu hamil baru dan pelaksanaan kelas ibu hamil, Serta perbaikan alat yang rusak. Selain itu perlunya sosialisasi dan edukasi yang baik terhadap masyarakat tentang pentingnya Pemeriksaan



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							Pemeriksaan Ibu hamil secara teratur 2. Pencatatan dan pelaporan pelayanan Ibu Hamil pada jaringan dan fasilitas pelayanan kesehatan swasta ataupun fasilitas pelayanan kesehatan di luar wilayah Kabupaten maupun Provinsi belum terintegrasi secara baik	Ibu hamil 2. Meningkatkan koordinasi dan mewajibkan Fasilitas Pelayanan Kesehatan termasuk swasta untuk mencatat dan melaporkan hasil pelayanan ibu hamil kepada Fasyankes dalam wilayah kerjanya setiap bulan dan melaporkan secara berjenjang
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin				
				Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	214 orang	115 orang	1. Kurangnya ketersediaan tenaga	1. Pengadaan dan perbaikan



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Sesuai Standar			kesehatan (bidan) untuk tinggal di desa karena sarana prasarana yang kurang memadai (bangunan pustu rusak) 2. Masih tingginya pertolongan persalinan di rumah/tidak di fasilitas kesehatan karena kurangnya dukungan keluarga	sarana prasarana oleh Dinas Kesehatan 2. Rapat koordinasi tingkat kecamatan dengan semua stakeholder untuk berkomitmen agar semua persalinan di fasilitas kesehatan yang diatur dalam Peraturan Desa
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				
				Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.732 orang	1.476 orang	1. Pelayanan kesehatan belum mencakup seluruh peserta didik	1. Perlu dilakukan kegiatan sweeping terhadap siswa/i yang



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							di sekolah karena ada siswa yang tidak hadir 2. Pelayanan kesehatan hanya dilakukan pada anak usia pendidikan dasar di sekolah 3. Tim Pembina UKS/M Kabupaten belum aktif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya	belum mendapat pelayanan kesehatan dan meningkatkan kinerja pelayanan di tahun berikutnya 2. Melakukan kordinasi lintas sektor terkait melakukan pelayanan Kesehatan kepada anak usia Pendidikan dasar di luar sekolah 3. Meningkatkan koordinasi Tim Pembina UKS/M Kabupaten
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	164 orang	16 orang	Tidak ada dukungan anggaran guna kegiatan diluar Gedung yaitu Penjaringan dan Investigasi kontak	Lebih cenderung melakukan penemuan kasus dengan Pasive Case Detection (PCD) atau pelayanan dalam gedung
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV				
				Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	254 orang	405 orang	1. Masih ada layanan yang satelitnya dalam Perawatan Dukungan Pengobatan (PDP) 2. Belum adanya tenaga terlatih dalam hal Perawatan Dukungan Pengobatan 3. Logistik reagen 1, 2 dan 3 masih	1. Mengaktifkan layanan satelit PDP menjadi layanan PDP 2. Perlu dilakukan pelatihan terhadap tenaga yang terdiri dari dokter, perawat/bidan, petugas farmasi, petugas pencatatan dan pelaporan



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							tergantung dari ketersediaan di IFK Dinas Kesehatan Provinsi NTT serta roses pengiriman logistik yang membutuhkan waktu yang lama (minimal 2 minggu) 4. Pencatatan dan pelaporan belum maksimal karena keterbatasan sarana khususnya laptop/komputer bagi penanggung jawab program di Puskesmas yang mengakibatkan	dan ahli Teknik laboratorium medik 3. Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao perlu menyediakan logistik yang dibutuhkan baik reagen 1, 2, 3 untuk mencapai target pelayanan 4. Perlu adanya pengadaan laptop/computer bagi setiap penanggung jawab program di Puskesmas



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							an pelaporanny a tidak real time	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 dokumen	1 dokumen		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 dokumen	1 dokumen		
				Pengelolaan Surveilans Kesehatan				
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 dokumen	1 dokumen		
				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 dokumen	1 dokumen		
				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				
				Jumlah Dokumen Hasil	1 dokumen	1 dokumen		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				
				Operasional Pelayanan Puskesmas				
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 dokumen	1 dokumen		
				Investigasi awal Kejadian tidak di harapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				
				Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 laporan	1 laporan		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan HIV (ODHIV)				
				Jumlah Orang Dengan HIV (ODHIV) Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 orang	0 orang		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Jumlah Orang dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	14 orang	6 orang	1. Semua sampel Pemeriksaan awal wajib menggunakan Tes Cepat Molekuler (TCM) 2. Kurangnya dukungan alokasi anggaran terhadap kegiatan pelayanan diluar Gedung/Active Case Detectin (ACD) berupa Penjaringan, Investigasi Kontak (IK) dan Inveksi Laten Tuberkulosis (ILTB)	1. Penambahan Alat TCM ke Wilayah kerja Faskes yang ada di Kabupaten Rote Ndao 2. Mengalokasikan dukungan anggaran pelaksanaan kegiatan Penjaringan ILTB dan IK ke Desa atau ke sasaran Indeks
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi				
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan	1 dokumen	1 dokumen		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Kesehatan Reproduksi				
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak				
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	1 dokumen	1 dokumen		
				Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				
				Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 dokumen	1 dokumen		
				Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan				
				Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 dokumen	1 dokumen		
				Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat				
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				
				Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	745 orang	319 orang	1. Standar kuantitas dan kualitas K6 belum mencapai target karena masih kurangnya kompetensi tenaga kesehatan dalam melakukan Penjaringan serta Pelayanan ANC dimana	1. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan ANC agar dapat bekerja sesuai standar, melibatkan lintas sektor dalam Penjaringan ibu hamil baru dan pelaksanaan kelas ibu hamil, Serta



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							ada beberapa alat USG yang rusak (Puskesmas Busalangga dan Baa). Selain Itu kurangnya Pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya Pemeriksaan Ibu hamil secara teratur 2. Pencatatan dan pelaporan pelayanan Ibu Hamil pada jaringan dan fasilitas pelayanan kesehatan swasta ataupun fasilitas pelayanan kesehatan di	perbaiki alat yang rusak. Selain itu perlunya sosialisasi dan edukasi yang baik terhadap masyarakat tentang pentingnya Pemeriksaan Ibu hamil 2. Meningkatkan koordinasi dan mewajibkan Fasilitas Pelayanan Kesehatan termasuk swasta untuk mencatat dan melaporkan hasil pelayanan ibu hamil kepada Fasyankes dalam wilayah kerjanya



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							luar wilayah Kabupaten maupun Provinsi belum terintegrasi secara baik	setiap bulan dan melaporkan secara berjenjang
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin				
				Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	745 orang	454 orang	1. Kurangnya ketersediaan tenaga kesehatan (bidan) untuk tinggal di desa karena sarana prasarana yang kurang memadai (bangunan pustu rusak) 2. Masih tingginya pertolongan persalinan di rumah/tidak di fasilitas kesehatan karena	1. Pengadaan dan perbaikan sarana prasarana oleh Dinas Kesehatan 2. Rapat koordinasi tingkat kecamatan dengan semua stakeholder untuk berkomitmen agar semua persalinan di fasilitas kesehatan yang diatur dalam



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							kurangnya dukungan keluarga	Peraturan Desa
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				
				Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6.019 orang	5.263 orang	1. Pelayanan kesehatan belum mencakup seluruh peserta didik di sekolah karena ada siswa yang tidak hadir 2. Pelayanan kesehatan hanya dilakukan pada anak usia pendidikan dasar di sekolah	1. Perlu dilakukan kegiatan sweeping terhadap siswa/i yang belum mendapat pelayanan kesehatan dan meningkatkan kinerja pelayanan di tahun berikutnya 2. Melakukan kordinasi lintas sektor terkait melakukan pelayanan Kesehatan kepada anak usia



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								Pendidikan dasar di luar sekolah
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	460 orang	225 orang	Banyak sasaran terduga yang dititip pot dahak namun tidak mengembalikan dengan alasan tidak dapat mengeluarkan dahak	Selalu melakukan follow up pada setiap suspek dengan bantuan keluarga atau Kader
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV				
				Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	910 orang	1293 orang	1. Masih ada layanan yang satelitnya dalam Perawatan Dukungan Pengobatan (PDP) 2. Belum adanya tenaga	1. Mengaktifkan layanan satelit PDP menjadi layanan PDP 2. Perlu dilakukan pelatihan terhadap tenaga yang terdiri dari



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							terlatih dalam hal Perawatan Dukungan Pengobatan 3. Logistik reagen 1, 2 dan 3 masih tergantung dari ketersediaan di IFK Dinas Kesehatan Provinsi NTT serta roses pengiriman logistik yang membutuhkan waktu yang lama (minimal 2 minggu) 4. Pencatatan dan pelaporan belum maksimal karena keterbatasan sarana khususnya	dokter, perawat/bidan, petugas farmasi, petugas pencatatan dan pelaporan dan ahli Teknik laboratorium medik 3. Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao perlu menyediakan logistik yang dibutuhkan baik reagen 1, 2, 3 untuk mencapai target pelayanan 4. Perlu adanya pengadaan laptop/computer bagi setiap penanggung jawab



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							laptop/komputer bagi penanggung jawab program di Puskesmas yang mengakibatkan pelaporannya tidak real time	program di Puskesmas
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 dokumen	1 dokumen		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 dokumen	1 dokumen		
				Pengelolaan Surveilans Kesehatan				
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 dokumen	1 dokumen		
				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Tidak Menular				
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 dokumen	1 dokumen		
				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 dokumen	1 dokumen		
				Operasional Pelayanan Puskesmas				
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 dokumen	1 dokumen		
				Investigasi awal Kejadian tidak di harapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				
				Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 laporan	1 laporan		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan HIV (ODHIV)				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Jumlah Orang Dengan HIV (ODHIV) Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6 orang	6 orang		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis				
				Jumlah Orang dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	34 orang	31 orang	1. Semua sampel Pemeriksaan awal wajib menggunakan Tes Cepat Molekuler (TCM) 2. Banyaknya Pasien yang ditemukan dan diobati sampai tuntas/sembuh sehingga potensi terjadi penularan makin rendah.	1. Penambahan Alat TCM ke Wilayah kerja Faskes yang ada di Kabupaten Rote Ndao 2. Adanya kegiatan ILTB ke semua pasien TBC agar memastikan kondisi penularan yang terjadi di masyarakat.
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	1 dokumen	1 dokumen		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak				
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	1 dokumen	1 dokumen		
				Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				
				Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 dokumen	1 dokumen		
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				
				Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Daya Masyarakat (UKBM)				
				Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 dokumen	1 dokumen		
				Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat				
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				
				Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	145 orang	73 orang	1. Standar kuantitas dan kualitas K6 belum mencapai target karena masih kurangnya kompetensi tenaga kesehatan dalam	1. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan ANC agar dapat bekerja sesuai standar, melibatkan lintas sektor dalam Penjaringan



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							melakukan Penjaringan serta Pelayanan ANC dimana ada beberapa alat USG yang rusak (Puskesmas Busalangga dan Baa). Selain Itu kurangnya Pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya Pemeriksaan Ibu hamil secara teratur 2. Pencatatan dan pelaporan pelayanan Ibu Hamil pada jaringan dan fasilitas pelayanan kesehatan	ibu hamil baru dan pelaksanaan kelas ibu hamil, Serta perbaikan alat yang rusak. Selain itu perlunya sosialisasi dan edukasi yang baik terhadap masyarakat tentang pentingnya Pemeriksaan Ibu hamil 2. Meningkatkan koordinasi dan mewajibkan Fasilitas Pelayanan Kesehatan termasuk swasta untuk mencatat dan melaporkan hasil pelayanan ibu



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							swasta ataupun fasilitas pelayanan kesehatan di luar wilayah Kabupaten maupun Provinsi belum terintegrasi secara baik	hamil kepada Fasyankes dalam wilayah kerjanya setiap bulan dan melaporkan secara berjenjang
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin				
				Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	145 orang	73 orang	1. Kurangnya ketersediaan tenaga kesehatan (bidan) untuk tinggal di desa karena sarana prasarana yang kurang memadai (bangunan pustu rusak) 2. Masih tingginya pertolongan	1. Pengadaan dan perbaikan sarana prasarana oleh Dinas Kesehatan 2. Rapat koordinasi tingkat kecamatan dengan semua stakeholder untuk berkomitmen agar semua



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							persalinan di rumah/tidak di fasilitas kesehatan karena kurangnya dukungan keluarga	persalinan di fasilitas kesehatan yang diatur dalam Peraturan Desa
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				
				Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.167 orang	1.020 orang	1. Pelayanan kesehatan belum mencakup seluruh peserta didik di sekolah karena ada siswa yang tidak hadir 2. Pelayanan kesehatan hanya dilakukan pada anak usia pendidikan dasar di sekolah	1. Perlu dilakukan kegiatan sweeping terhadap siswa/i yang belum mendapat pelayanan kesehatan dan meningkatkan kinerja pelayanan di tahun berikutnya 2. Melakukan koordinasi lintas sektor terkait



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
								melakukan pelayanan Kesehatan kepada anak usia Pendidikan dasar di luar sekolah
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	121 orang	11 orang	Penanggung jawab program tidak aktif terkait dengan kinerja dalam pemberantasan penyakit Tuberkulosis (TBC)	pergantian penanggung jawab program
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV				
				Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	174 orang	222 orang	1. Masih ada layanan yang satelitnya dalam Perawatan Dukungan	1. Mengaktifkan layanan satelit PDP menjadi layanan PDP 2. Perlu



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							Pengobatan (PDP) 2. Belum adanya tenaga terlatih dalam hal Perawatan Dukungan Pengobatan 3. Logistik reagen 1, 2 dan 3 masih tergantung dari ketersediaan di IFK Dinas Kesehatan Provinsi NTT serta roses pengiriman logistik yang membutuhkan waktu yang lama (minimal 2 minggu) 4. Pencatatan dan pelaporan belum	dilakukan pelatihan terhadap tenaga yang terdiri dari dokter, perawat/bidan, petugas farmasi, petugas pencatatan dan pelaporan dan ahli Teknik laboratorium medik 3. Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao perlu menyediakan logistik yang dibutuhkan baik reagen 1, 2, 3 untuk mencapai target pelayanan 4. Perlu adanya



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							maksimal karena keterbatasan sarana khususnya laptop/komputer bagi penanggung jawab program di Puskesmas yang mengakibatkan pelaporannya tidak real time	pengadaan laptop/computer bagi setiap penanggung jawab program di Puskesmas
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 dokumen	1 dokumen		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 dokumen	1 dokumen		
				Pengelolaan Surveilans Kesehatan				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 dokumen	1 dokumen		
				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 dokumen	1 dokumen		
				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 dokumen	1 dokumen		
				Operasional Pelayanan Puskesmas				
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 dokumen	1 dokumen		
				Investigasi awal Kejadian tidak di harapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				
				Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat	1 laporan	1 laporan		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Massal)				
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan HIV (ODHIV)				
				Jumlah Orang Dengan HIV (ODHIV) Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 orang	0 orang		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis				
				Jumlah Orang dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6 orang	4 orang	1. Semua sampel Pemeriksaan awal wajib menggunakan Tes Cepat Molekuler (TCM) 2. Kurangnya dukungan alokasi anggaran terhadap kegiatan pelayanan diluar Gedung/Active Case Detectin	1. Penambahan Alat TCM ke Wilayah kerja Faskes yang ada di Kabupaten Rote Ndao 2. Mengalokasikan dukungan anggaran pelaksanaan kegiatan Penjaringan ILTB dan IK ke Desa atau ke sasaran indeks



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							(ACD) berupa Penjaringan, Investigasi Kontak (IK) dan Inveksi Laten Tuberkulosis (ILTB)	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi				
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	1 dokumen	1 dokumen		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak				
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	1 dokumen	1 dokumen		
				Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				
				Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 dokumen	1 dokumen		
				Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan				
				Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				
				Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 dokumen	1 dokumen		
				Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat				
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				
				Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	376 orang	134 orang	1. Standar kuantitas dan kualitas K6 belum mencapai target karena masih	1. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan ANC agar dapat bekerja sesuai



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							kurangnya kompetensi tenaga kesehatan dalam melakukan Penjaringan serta Pelayanan ANC dimana ada beberapa alat USG yang rusak (Puskesmas Busalangga dan Baa). Selain Itu kurangnya Pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya Pemeriksaan Ibu hamil secara teratur 2. Pencatatan dan pelaporan pelayanan Ibu Hamil	standar, melibatkan lintas sektor dalam Penjaringan ibu hamil baru dan pelaksanaan kelas ibu hamil, Serta perbaikan alat yang rusak. Selain itu perlunya sosialisasi dan edukasi yang baik terhadap masyarakat tentang pentingnya Pemeriksaan Ibu hamil 2. Meningkatkan koordinasi dan mewajibkan Fasilitas Pelayanan Kesehatan termasuk



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							pada jaringan dan fasilitas pelayanan kesehatan swasta ataupun fasilitas pelayanan kesehatan di luar wilayah Kabupaten maupun Provinsi belum terintegrasi secara baik	swasta untuk mencatat dan melaporkan hasil pelayanan ibu hamil kepada Fasyankes dalam wilayah kerjanya setiap bulan dan melaporkan secara berjenjang
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				
				Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	376 orang	213 orang	1. Kurangnya ketersediaan tenaga kesehatan (bidan) untuk tinggal di desa karena sarana prasarana yang kurang memadai	1. Pengadaan dan perbaikan sarana prasarana oleh Dinas Kesehatan 2. Rapat koordinasi tingkat kecamatan dengan



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							(bangunan pustu rusak) 2. Masih tingginya pertolongan persalinan di rumah/tidak di fasilitas kesehatan karena kurangnya dukungan keluarga	semua stakeholder untuk berkomitmen agar semua persalinan di fasilitas kesehatan yang diatur dalam Peraturan Desa
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				
				Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3.041 orang	2.659 orang	1. Pelayanan kesehatan belum mencakup seluruh peserta didik di sekolah karena ada siswa yang tidak hadir 2. Pelayanan kesehatan hanya dilakukan pada anak	1. Perlu dilakukan kegiatan sweeping terhadap siswa/i yang belum mendapat pelayanan kesehatan dan meningkatkan kinerja pelayanan di tahun



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							usia pendidikan dasar di sekolah	berikutnya 2. Melakukan kordinasi lintas sektor terkait melakukan pelayanan Kesehatan kepada anak usia Pendidikan dasar di luar sekolaH
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	269 orang	125 orang	Tidak ada dukungan anggaran guna mendukung kegiatan pelayanan di luar gedung	Melaksanakan kegiatan diluar gedung dengan berkolaborasi dengan program lain
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV				
				Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	428 orang	453 orang	1. Masih ada layanan yang satelitnya dalam Perawatan Dukungan Pengobatan	1. Mengaktifkan layanan satelit PDP menjadi layanan PDP 2. Perlu dilakukan



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							(PDP) 2. Belum adanya tenaga terlatih dalam hal Perawatan Dukungan Pengobatan 3. Logistik reagen 1, 2 dan 3 masih tergantung dari ketersediaan di IFK Dinas Kesehatan Provinsi NTT serta roses pengiriman logistik yang membutuhkan waktu yang lama (minimal 2 minggu) 4. Pencatatan dan pelaporan belum maksimal	pelatihan terhadap tenaga yang terdiri dari dokter, perawat/bidan, petugas farmasi, petugas pencatatan dan pelaporan dan ahli Teknik laboratorium medik 3. Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao perlu menyediakan logistik yang dibutuhkan baik reagen 1, 2, 3 untuk mencapai target pelayanan 4. Perlu adanya pengadaan



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							karena keterbatasan sarana khususnya laptop/komputer bagi penanggung jawab program di Puskesmas yang mengakibatkan pelaporannya tidak real time	laptop/computer bagi setiap penanggung jawab program di Puskesmas
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 dokumen	1 dokumen		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 dokumen	1 dokumen		
				Pengelolaan Surveilans Kesehatan				
				Jumlah Dokumen Hasil	1 dokumen	1 dokumen		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Pengelolaan Surveilans Kesehatan				
				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 dokumen	1 dokumen		
				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 dokumen	1 dokumen		
				Operasional Pelayanan Puskesmas				
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 dokumen	1 dokumen		
				Investigasi awal Kejadian tidak di harapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				
				Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 laporan	1 laporan		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan HIV (ODHIV)				
				Jumlah Orang Dengan HIV (ODHIV) Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 orang	0 orang		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis				
				Jumlah Orang dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5 orang	1 orang	1. Semua sampel Pemeriksaan awal wajib menggunakan Tes Cepat Molekuler (TCM) 2. Akses jangkauan pelayanan susah karena berada tepat di kepulauan	1. Penambahan Alat TCM ke Wilayah kerja Faskes yang ada di Kabupaten Rote Ndao 2. Bagi setiap kasus yang bersifat darurat atau emergensi maka bisa ditidakanjuti dengan pemeriksaan secara mikroskopis.
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	1 dokumen	1 dokumen		
				Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				
				Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 dokumen	1 dokumen		
				Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan				
				Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				
				Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 dokumen	1 dokumen		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat				
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit				
				Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	4 unit	4 unit		
				Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan				
				Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	66 unit	66 unit		
				Pengembangan Rumah Sakit				
				Jumlah Rumah Sakit	3 unit	3 unit		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000				
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
				Operasional Pelayanan Rumah Sakit				
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 dokumen	1 dokumen		
				Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota				
				Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	1 Unit	1 Unit		
				Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
				Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan				
				Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	1 dokumen	1 dokumen		
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan				
				Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				
				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar				
				Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	336 orang	336 orang		
				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Tidak Menular				
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 dokumen	1 dokumen		
				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 dokumen	1 dokumen		
				Operasional Pelayanan Puskesmas				
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 dokumen	1 dokumen		
				Investigasi awal Kejadian tidak di harapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				
				Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 laporan	1 laporan		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan HIV (ODHIV)				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Jumlah Orang Dengan HIV (ODHIV) Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 orang	0 orang		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis				
				Jumlah Orang dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5 orang	1 orang	3. Semua sampel Pemeriksaan awal wajib menggunakan Tes Cepat Molekuler (TCM) 4. Akses jangkauan pelayanan susah karena berada tepat di kepulauan	3. Penambahan Alat TCM ke Wilayah kerja Faskes yang ada di Kabupaten Rote Ndao 4. Bagi setiap kasus yang bersifat darurat atau emergensi maka bisa ditidakklanjuti dengan pemeriksaan secara mikroskopis.
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak				
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	1 dokumen	1 dokumen		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				
				Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 dokumen	1 dokumen		
				Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan				
				Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				
				Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 dokumen	1 dokumen		
				Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat				
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit				
				Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	4 unit	4 unit		
				Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan				
				Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	66 unit	66 unit		
				Pengembangan Rumah Sakit				
				Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar	3 unit	3 unit		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000				
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
				Operasional Pelayanan Rumah Sakit				
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 dokumen	1 dokumen		
				Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota				
				Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	1 Unit	1 Unit		
				Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
				Penyiapan Perumusan				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan				
				Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	1 dokumen	1 dokumen		
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan				
				Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				
				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar				
				Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	336 orang	336 orang		
				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan	1 dokumen	1 dokumen		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Tidak Menular				
				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 dokumen	1 dokumen		
				Operasional Pelayanan Puskesmas				
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 dokumen	1 dokumen		
				Investigasi awal Kejadian tidak di harapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				
				Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 laporan	1 laporan		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan HIV (ODHIV)				
				Jumlah Orang Dengan HIV (ODHIV) Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 orang	0 orang		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis				
				Jumlah Orang dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5 orang	1 orang	5. Semua sampel Pemeriksaan awal wajib menggunakan Tes Cepat Molekuler (TCM) 6. Akses jangkauan pelayanan susah karena berada tepat di kepulauan	5. Penambahan Alat TCM ke Wilayah kerja Faskes yang ada di Kabupaten Rote Ndao 6. Bagi setiap kasus yang bersifat darurat atau emergensi maka bisa ditidakanjuti dengan pemeriksaan secara mikroskopis.
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak				
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	1 dokumen	1 dokumen		
				Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				
				Pengelolaan Sistem				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Informasi Kesehatan				
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 dokumen	1 dokumen		
				Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan				
				Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				
				Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 dokumen	1 dokumen		
				Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat				
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				
				Rehabilitasi dan				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Pemeliharaan Rumah Sakit				
				Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	4 unit	4 unit		
				Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan				
				Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	66 unit	66 unit		
				Pengembangan Rumah Sakit				
				Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat	3 unit	3 unit		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000				
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
				Operasional Pelayanan Rumah Sakit				
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 dokumen	1 dokumen		
				Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota				
				Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	1 Unit	1 Unit		
				Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
				Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan				
				Jumlah Dokumen Hasil	1 dokumen	1 dokumen		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan				
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan				
				Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				
				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar				
				Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	336 orang	336 orang		
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tidak ada	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)				
				a. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu)				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Daerah Kabupaten/Kota				
				1. Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	4 Paket	4 Paket	-	-
				2. Normalisasi/ Restorasi Sungai	3 Paket	3 Paket	-	-
				3. Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	10 Bulan	10 Bulan	-	-
				b. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				
				1. Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	2.093 Meter	2.093 Meter	-	-
				2. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	5.318 Meter	5.318 Meter	-	-
				3. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	197 Meter	197 Meter	-	-



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Permukaan				
				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum				
				a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota				
				1. Pembangunan SPAM Jaringan Pipaan di Kawasan Perdesaan	451 SR	451 SR	-	-
				2. Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	109 SR	109 SR	-	-
				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah				
				a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota				
				1. Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	454 Unit	454 Unit	-	-



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Program Penataan Bangunan Gedung				
				a. Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung				
				1. Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-
				Program Penyelenggaraan Jalan				
				a. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota				
				1. Survey Kondisi Jalan/Jembatan	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-
				2. Rekonstruksi Jalan	30,647 Km	30,647 Km	-	-
				3. Pemeliharaan Rutin Jalan	1 paket	1 paket	-	-
				4. Rehabilitasi Jembatan	6 Meter	6 Meter	-	-
				Program Penyelenggaraan Penataan Ruang				
				a. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota				
				1. Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-
				b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				
				1. Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 52 Tahun 2019	Program Pengembangan Perumahan				
				a. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				
				1. Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	2 Unit	2 Unit	-	-
				PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				
				a. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha				
				1. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	50 Unit	50 Unit	-	-
				2. Penyusunan review/Legalisisi bidang PKP	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-
5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		Program Penanggulangan Bencana				
				a. Kegiatan Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100%	100%		
				1. Pelatihan Pencegahan Dan Mitigasi Bencana	4 Kawasan	4 Kawasan		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Kabupaten / Kota				
				2. Pengendalian Operasi Dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten / Kota	1 Laporan	1 Laporan	-	-
				b. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana	100%	100%	-	-
				1. Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten / Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-
				2. Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	1 Laporan	1 Laporan	-	-
				3. Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/ Wabah Penyakit	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-
6	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja	1. Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			2. Peningkatan Cakupan pelayanan bencana kebakaran					
				a. Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	68 org 91 kali 4 NHPD	68 org 91 kali 4 NHPD		
				1. Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui diteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan	67 org 3 kali 84 kali	67 org 3 kali 84 kali	-	-
				2. Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota	4 kali	4 kali	-	-



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				3. Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketertraman dan ketertiban umum	4 NPHD	4 NPHD	-	-
				b. Penegakan Peraturan Daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota	50 org 4 Operasi	50 org 2 Operasi		
				1. Sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peratiran bupati/walikota	50 org	50 org	-	-
				2. Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota	115 Orang	115 Orang	-	-
				Program Pencegahan, Penaggulangan, Penyelamatan, Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran				
				a. Pencegahan, pengendalian, pemadaman,				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota				
				1. Pemedaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	7 Kegiatan	12 Kegiatan	Melebihi kegiatan yang direncanakan	-
7	Sosial	Dinas Sosial	Tidak Ada	Program Pemberdayaan Sosial				
				a. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota				
				Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Lembaga	1 Lembaga	-	-
				Program Rehabilitasi Sosial				
				a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar,				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				
				1. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis dan masyarakat	40 Orang	40 Orang	-	-
				b. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial				
				1. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	40 Orang	40 Orang	-	-
				Program Perlindungan dan Jaminan Sosial				
				a. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Daerah Kabupaten/Kota				
				1. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	30.238 KK	30.472 KK	-	-
				2. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	11.731 KPM	21.959 KPM	-	-
				3. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	30 Orang	-	Tahun 2024 Dinas Sosial tidak mendapatkan alokasi bantuan pengembangan ekonomi berupa KUBE	Mengajukan usulan penerima bantuan pengembangan ekonomi di tahun mendatang
				Program Penanganan Bencana				
				a. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota				
				1. Penyediaan Makanan	10.500 KK	9.537 KK	Penyediaan makanan yang dimaksud berupa Cadangan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)	-



B. Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	Tenaga Kerja	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja				
				a. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi				
				1. Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	10 orang	10 orang	-	-
				Program Hubungan Industrial				
				a. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kab/ Kota				
				1. Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	1 Laporan	1 Laporan	-	-
				b. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kab/Kota				
				1. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan	4 kasus	4 kasus	-	-



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kab/ Kota				
2	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Tidak Ada	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan				
				a. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, Dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota				
				1. Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di	100 %	100%	-	-



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi				
				b. Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			-	-
				1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	79,38%	Mengalami permasalahan dikarenakan realisasi tidak sesuai kebutuhan lapangan	-
				Program Perlindungan Perempuan				
				a. Pencegahan Kekerasan Terhadap				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				
				1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	100%	92,98%	-	-
				b. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota				
				1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan	100%	74,70%	Mengalami permasalahan dikarenakan	-



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota			realisasi tidak sesuai kebutuhan lapangan	
				c. Penguataan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				
				1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan Bagi Perempuan Korban	100%	99,95%	-	-



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota				
				Program Peningkatan Kualitas Keluarga				
				a. Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota				
				1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah	100%	87,04%	-	-



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Kabupaten/ Kota				
				Program Perlindungan Khusus Anak				
				a. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan Para Pihak				
				Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				
				1. Penyusunan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak kewenangan Kab/kota	100%	91,97%	-	-
				2. Penyusunan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak kewenangan Kab/kota	100%	97,77%	-	-
				b. Penyedia Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Yang				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Memerlukan Koordinasi				
				1. Koordinasi dan Pelaksanaan Layanan AMPK	100%	99,28%	-	-
				c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				
				1. Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/ kota	100%	99,80%	-	-
3	Pangan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Tidak Ada	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				a. Penyediaan Dan Penyaluran Pangan Pokok Atau Pangan Lainnya Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan Dan Harga Pangan				
				1. Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan	1 Laporan	-	-
				2. Pemantauan Stok Pangan	1 Laporan	1 Laporan	-	-
				3. Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan	1 Unit	1 Unit	-	-
				b. Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai Dengan				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Angka Kecukupan Gizi				
				1. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan	1 Laporan	-	-
				Program Penanganan Kerawanan Pangan				
				a. Penyusunan Peta Kerentanan Dan Ketahanan Pangan Kecamatan				
				1. Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-
				b. Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota				
				1. Koordinasi Dan Sinkronisasi	1 Laporan	1 Laporan	-	-



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Penanganan Kerawanan Kabupaten/ Kota				
				Program Pengawasan Keamanan Pangan				
				a. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota				
				1. Rekomendasi Perizinan Keamanan Pangan Segar asal Tumbuhan	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-
4	Pertanahan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup		Program Penatagunaan Tanah				
				a. Penggunaan Tanah Yang Hamparannya Dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				1. Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	13,00 Ha	14,00 Ha	-	-
5	Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup		Program Perencanaan Lingkungan Hidup				
				a. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota				
				1. Pembuatan Dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-
				Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup				
				a. Pencegahan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				
				1. Koordinasi,	6 Lokasi	6 Lokasi (12	-	-



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Sinkronisasi Dan Pelaksanaan Pencegahan	(12 titik)	titik)		
				Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara Dan Laut				
				2. Koordinasi, Sinkronisasi Dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi Dan Adaptasi Perubahan Iklim	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-
				b. Penanggulangan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Kabupaten/Kota				
				1. Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran Dan/Atau	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-
				Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Masyarakat				
				Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)				
				a. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota				
				1. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	0,055 Ha	0,055 Ha	-	-
				Program Pengelolaan Persampahan				
				a. Pengelolaan Sampah				
				1. Penanganan Sampah melalui Pengangkutan	5.297,20 Ton	2.760 Ton	Kurangnya armada pengangkut sampah, sampah yang diangkat hanya pada TPS	1. perbanyak armada pengangkut sampah. 2. Perbanyak TPS 3. Melakukan



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							yang terletak di tempat-tempat umum dan kebanyakan sampah dimusnakan sendiri oleh masyarakat.	sosialisasi agar masyarakat memahami pentingnya pengolahann sampah.
6	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				
				a. Pelayanan Pendaftaran Penduduk				
				1.Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1 Paket	1 Paket	-	-
				Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Piak) Dan Pemanfaatan Data				
				a. Pengumpulan Data Kependudukan Dan Pemanfaatan Dan Penyajian				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Database Kependudukan				
				1. Pengolahan Dan Penyajian Data Kependudukan	1 Paket	1 Paket	-	-
7	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa		Program Penataan Desa				
				a. Meningkatnya Penataan Desa				
				1. Terselenggarany a Penataan Kelembagaan dan Istitusi Desa	25 Desa	22 Desa	Tidak Lolos Verifikasi	Kelengkapan Proposal Harus Sesuai Prosedur
				Program Administrasi Pemerintah Desa				
				a. Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa				
				1. Fasilitas Penyusunan	112 Desa	112 Desa	-	-
				Perencanaan Pembangunan				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Desa				
				2. Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	112 Perangkat	112 Perangkat	-	-
				3. Pembinaan Dan Pemberdayaan Bumdes Dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa	10 Bumdes	10 Bumdes	-	-
				4. Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	22 Desa	67 Desa	-	-
				5. Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa Dan Kelurahan	112 Desa	112 Desa	-	-
				Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat				
				a. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Yang Bergerak Dibidang Pembangunan				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Desa Dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi Serta Pemberdayan Masyarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat Yang Sama Dalam Kabupaten				
				1. Fasilitas Penataan, Pemberdayaan Dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (Rt, Rw, Pkk, Lpm Dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan Dan Masyarakat Hukum Adat	54 Desa	54 Desa	-	-
				2. Peningkatan	4 Posyandu	4 Posyandu	-	-



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (Rt,Rw,Pkk,Posy andu,Lpm, Dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan Dan Masyarakat Hukum Adat				
				3. Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Dan Pemerintah Desa Dalam Meningkatan Pendapatan Asli Daerah	5 Klpk	5 Klpk	-	-
				4. Fasilitas Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	7 Klpk	7 Klpk	-	-



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				5. Fasilitas Tim Penggerak Pkk Dalam Penyelenggara n Gerakan Pemberdayaan	12 Bln	12 Bln	-	-
		Kecamatan Lobalain	Tidak Ada	a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa	72 Usulan	72 Usulan	-	-
		Kecamatan Rote Barat Laut	Tidak Ada	b. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa	48 Usulan	48 Usulan	-	-
		Kecamatan Rote Barat	Tidak Ada	c. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah	21 Usulan	21 Usulan	-	-



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Perencanaan Pembangunan Di Desa				
		Kecamatan Rote Barat Daya	Tidak Ada	d. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa	-	-	Tidak Ada Anggaran	Kegiatan Tidak Dilaksanakan
		Kecamatan Rote Selatan	Tidak Ada	e. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa	8 Usulan	8 Usulan	-	-
		Kecamatan Rote Tengah	Tidak Ada	f. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa	32 Usulan	32 Usulan	-	-



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Kecamatan Pantai Baru	Tidak Ada	g. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa	6 Usulan	6 Usulan	-	-
		Kecamatan Rote Timur	Tidak Ada	h. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa	6 Usulan	6 Usulan	-	-
		Kecamatan Landu Leko	Tidak Ada	i. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa	28 Usulan	21 Usulan	Tidak terinputnya usulan karena kendala jaringan dan waktu input	Harus diupayakan input di tempat yang ada sinyal dan memperhatikan waktu
		Kecamatan Ndao Nuse	Tidak Ada	j. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam	5 Usulan	5 Usulan	-	-



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa				
		Kecamatan Loaholu		k. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa	22 Usulan	18 Usulan	-	-
8	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Tidak Ada	Program Pengendalian Penduduk				
				a. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah	100%	84,65%	-	-



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Kabupaten/Kota				
				1. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	100%	99,76%	-	-
				2. Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	100%	90,47%	-	-
				3. Pengelolaan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	100%	74,47%	Tidak Mengalami Permasalahan dikarenakan Realisasi sesuai Kebutuhan Lapangan	-
				Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)				
				a. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (Kie) Pengendalian Penduduk Dan Kb Sesuai Kearifan Budaya Lokal				
				1. Advokasi Program KKBPK	100%	44,24%	Mengalami Permasalahan dikarenakan	-



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Kepada Stakeholder dan Mitra Kerja			Realisasi tidak sesuai Kebutuhan Lapangan	
				2. Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	100%	0%	Mengalami Permasalahan dikarenakan Realisasi tidak sesuai Kebutuhan Lapangan	-
				3. Promosi Dan Kie Program Kkbpk Melalui Media Massa Cetak Dan Elektronik Serta Media Luar Ruang	100%	91,54%	-	-
				4. Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam) Rapat Koordinasi Desa (Rakordes)	100%	82,55%	-	-



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				dan Minilokakarya (Minilok)				
				5. Pengelolaan Operasional Dan Sarana Di Balai Penyuluhan KKBPK	100%	51,24%	-	-
				6. Pengendalian Program KKBPK	100%	60,34%	Tidak Mengalami Permasalahan dikarenakan Realisasi sesuai Kebutuhan Lapangan	-
				b. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)				
				1. Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana/	100%	97,48%	-	-



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Penyuluh				
				2. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	100%	99,18%	-	-
				c. Pengendalian Dan Pendistribusian Kebutuhan Alat Dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan Kb Di Daerah Kabupaten/Kota				
				1. Pengendalian Pendistribusian Alat Dan Obat Kontrasepsi Dan Sarana Penunjang Pelayanan Kb Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan Dan Jejaringnya	100%	84,88%	-	-
				2. Peningkatan	100%	50,52%	Mengalami	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Kesetaraan Penggunaan Metode Jangka Panjang (MKJP)			Masalah karena realisasi tidak sesuai kebutuhan lapangan	
				3. Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	100%	95,19%	-	-
				4. Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	100%	26,58%	-	-
				5. Promosi Dan Konseling KB Pasca Bersalin	100%	57,83%	-	-
				d. Pemberdayaan Dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan				
				Pelayanan Dan Pembinaan Kesertaan Ber-Kb				
				1. Integrasi Pembangunan Listas Sektor di Kampung KB	100%	87,34%	-	-
				2. Pelaksanaan Dan Pengelolaan Program KKBPK Di Kampung KB	100%	94,79%	-	-
				Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)				
				a. Pelaksanaan Pembangunan				
				Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga				
				1. Pengelolaan Ketahanan Keluarga melalui	100%	0%	Mengalami Masalah karena realisasi tidak	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)			sesuai kebutuhan lapangan	
				2. Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,BKL,PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	100%	98,21%	-	-
9	Perhubungan	Dinas Perhubungan	Tidak Ada	Peyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)				
				a. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kab/Kota				
				1. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kab/Kota	50 Unit	50 Unit	-	-



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				b. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				
				1. Penataan manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota	1 Laporan	1 Laporan	-	-
				Pengelolaan Pelayaran				
				a. Pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal				
				1. Pengawasan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal	1 dok	1 dok	-	-
10	Komunikasi Dan Informatika	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	Tidak Ada	Program Informasi Dan Komunikasi Publik				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				a. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
				1. Pelayanan Informasi Publik	12 Lap	12 Lap	-	-
				Program Aplikasi Informatika				
				a. Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota				
				1. Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	1 Unit	1 Unit	-	-
				2. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	3 Unit	3 Unit	-	-



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
11	Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	Peningkatan Jumlah KSP/USP Koperasi sehat dan Usaha Mikro menjadi Usaha kecil	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi				
				a. Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam Koperasi yang wilaya Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten Kota				
				1. Pengawasan kekuatan kesehatan kemandirian ketangguhan serta mantalitas koperasi kewenangan kabupaten/kota koperasi	4 Dokumen	4 Dokumen	-	-
				Program Pengembangan UMKM				
				a. Kegiatan Pengembangan				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Usaha Mikro dengan dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil				
				1. Fasilitasi usaha dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran SDM serta desain Teknologi	16 Dokumen NPHD	16 Dokumen NPHD	-	-
12	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Tidak Ada	Program Promosi Penanaman Modal				
				a. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				1. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	-
				Program Pelayanan Penanaman Modal				
				a. Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				
				1. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Dan Non Perizinan Penanaman Modal	500 Ijin	500 Ijin	-	-
				Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				a. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				
				1. Koordinasi Dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Modal	80 Pma/Pmdn	86 Pma/Pmdn	-	-
				2. Koordinasi Dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Modal	80 Pma/Pmdn	86 Pma/Pmdn	-	-
				3. Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Modal	80 Pma/Pmdn	86 Pma/Pmdn	-	-
13	Kepemudaan Dan Olah Raga	Dinas Pendidikan, Kepemudaaan dan OlahRaga		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				a. Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota				
				1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	803 orang	803 orang	-	-
				b. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				1. Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/ Kota	3 Dok	3 Dok	-	-
				Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan				
				a. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi				
				1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggara n Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	4 Dok	4 Dok	-	-
				Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan				
				a. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Kepramukaan				
				1. Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	1 Organisasi	1 Organisasi	-	-
		Kecamatan Lobalain	Tidak Ada	a. Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	45 Orang	45 Orang	-	-
		Kecamatan Rote Barat Laut	Tidak Ada	b. Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	11 BUMDES 12 Org	45 org (25 org PKK dan 20 org DWP)	-	-
		Kecamatan Rote Barat	Tidak Ada	c. Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	15 Orang	15 Orang	-	-



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Kecamatan Rote Barat Daya	Tidak Ada	d. Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	-	-	Tidak Ada Anggaran	Kegiatan Tidak Dilaksanakan
		Kecamatan Rote Selatan	Tidak Ada	e. Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	36 Orang	-	Refocusing anggaran dan hanya di akomodir biaya perjalanan dinas PKK	-
		Kecamatan Rote Tengah	Tidak Ada	f. Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	45 Orang	45 Orang	-	-
		Kecamatan Pantai Baru	Tidak Ada	g. Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah	45 Orang	45 Orang	-	-



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Kecamatan				
		Kecamatan Rote Timur	Tidak Ada	h. Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	45 Orang	45 Orang	-	-
		Kecamatan Landu Leko	Tidak Ada	i. Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	45 Orang	45 Orang	-	-
		Kecamatan Ndao Nuse	Tidak Ada	j. Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	45 Orang	45 Orang	-	-
		Kecamatan Loaholu	Tidak Ada	k. Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah	10 Orang	10 Orang	-	-



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Kecamatan				
14	Statistik	Dinas Kominfo, Statistik Dan Persandian	Tidak Ada	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral				
				a. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				
				1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1 Dok	1 Dok	-	-
				2. Membangun Metadata Statistik Sektoral	1 Dok	1 Dok	-	-
15	Persandian	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	Tidak Ada	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi				
				a. Penyelenggaraan				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
				1. Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	1 Lap	1 Lap	-	Kegiatan tetap dilakukan oleh Tim Kerja Internal Bidang Teknis
16	Kebudayaan	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	Tidak Ada	Program Pengembangan Kebudayaan				
				a. Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota				
				1. Pembinaan	3 Laporan	3 Laporan	-	-



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Sumber Daya Manusia, Lembaga, Dan Pranata Tradisional				
				Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya				
				a. Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota				
				1. Penetapan Cagar Budaya	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-
17	Perpustakaan Dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Tidak Ada	Program Pembinaan Perpustakaan				
				a. Kegiatan Pengolahan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
				1. Pengembangan Dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	60 Koleksi	199 Koleksi	-	-
				2. Pembinaan	20 Orang	20 Orang	-	-



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar diseluruh Wilayah				
				3. Pengolahan Dan Pengembangan Bahan Pustaka	30 Buku	56 Buku	-	-
				b. Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
				1. Sosialisasi Budaya Baca Dan Literisasi Pada Satuan Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat	500 Orang	969 Orang		
				2. Pemberian Penghargaan	10 Orang	10 Orang	-	-



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Gerakan Budaya Gemar Membaca				
				Program Pengolahan Arsip				
				a. Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kab/Kota				
				1. Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	2 OPD	2 OPD	-	-
				Program Perlindungan Dan Penyelematan Arsip				
				a. Kegiatan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN				
				1. Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Nasional Kabupaten/Kota	1 Aplikasi	1 Aplikasi	-	-



C. Pelaksanaan Urusan Pilihan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan	Tidak Ada	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap				
				a. Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				
				1. Penyediaan Prsarana Usaha Perikanan Tangkap	Jaring 3 lapis = 200 pc	Jaring 3 lapis = 200 pc	-	-
				b. Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota				
				1. Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Cool box= 9 unit, Jaring 3 lapis =181 Pc, Kapal fiber glass < 5 GT =15 unit, Mesin Kapal 30 Unit Gill net 269 Pc	Cool box= 9 unit, Jaring 3 lapis =181 Pc, Kapal fiber glass < 5 GT =15 unit, Mesin Kapal 30 Unit Gill net 269 Pc	-	-



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Program Pengelolaan Perikanan Budidaya				
				a. Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan kecil				
				1. Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	5 kelompok	5 kelompok	-	-
				b. Kegiatan Pengelolaan Pembudidaya Ikan				
				1. Penjamin Ketersediaan Sarana Pembudidaya Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Demplot Budidaya a air tawar = 6 kelompok, sarana budidaya rumput laut = 23 paket Sbabit rumput laut = 36 Ton, tali 720 roll sampan = 72 Unit	Demplot Budidaya air tawar = 6 kelompok, sarana budidaya rumput laut = 23 paket Sbabit rumput laut = 36 Ton, tali 720 roll sampan = 72 Unit	-	-
2	Pertanian	Dinas Pertanian dan Ketahanan	Tidak Ada	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Pangan						
				a. Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian				
				1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1 Laporan	1 Laporan	-	-
				b. Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota				
				1. Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-
				2. Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-
				3. Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1 VUB	1 VUB	-	-
				Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian				
				a. Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian				
				1. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	12 Unit	12 Unit	-	-
				2. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	7 Unit	-	Pembangunan Screen House sebanyak 7 Unit tidak dapat dilaksanakan oleh penyedia	Telah dikenakan Sanksi perusahaan berupa daftar hitam
				3. Pembangunan, Rehabilitasi dan	27 Unit	27 Unit	-	-



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani				
				Program Penyuluhan Pertanian				
				a. Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian				
				1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	11 Unit	11 Unit	-	-
				2. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	985 Poktan	1000 Poktan	-	-
3	Pertanian	Dinas Peternakan	Tidak ada	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian				
				a. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kab./Kota	100%	100%	-	-
				b. Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	329 ekor	329 ekor	-	-
				c. Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kab./Kota	5000 kg	5000 kg	-	-
				d. Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	5000 kg	5000 kg	-	-
				e. Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak dalam Kab./Kota	14 Ha	14 Ha	-	-



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				f. Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	14 Ha	14 Ha	-	-
				Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian				
				a. Pembangunan Prasarana Pertanian	11 Unit	11 Unit	-	-
				b. Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	11 Unit	11 Unit	-	-
				Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner				
				a. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kab./Kota	24000 ekor	24000 ekor	-	-
				b. Pembebasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	105 Botol	105 Botol	-	-
				c. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	15 %	15 %	-	-
				d. Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	9 Paket	9 Paket	-	-
				e. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	15 %	15 %	-	-
				f. Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	25 Kali	25 Kali	-	-
				Program Perizinan Usaha Pertanian				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				a. Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	10.709 Ekor	10.709 Ekor	-	-
				b. Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan	4000 ekor	4000 ekor	-	-
4	Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Optimalisasi Obyek-obyek wisata alam bahari, religi, budaya dan kuliner	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata				
				a. kegiatan pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota				
				1. Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen		
				2. Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	4 paket	4 paket	-	-
				3. Pemberdayaan Masyarakat dalam pengelolaan destinasi wisata Kabupaten/Kota	2 laporan	2 laporan	-	-
			Optimalisasi Pokdawis	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif				
				a. Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar				
				1. Pemberdayaan dan pembinaan masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	290 peserta	290 peserta	-	-
				2. Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	20 peserta	20 peserta	-	-
			Meningkatkan promosi dan penyelenggara event-event wisata	Program Pemasaran Pariwisata				
				a. Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				
				1. Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	2 Laporan	2 Laporan	-	-
5	Perdagangan	Dinas Koperasi, UKM, dan Perindag	Tidak Ada	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting				
				a. Kegiatan Pengendalian Harga dan stok barang Kebutuhan Pokok dan barang penting di Tingkat Pasar Kabupaten / Kota				
				1. Pemantaun harga stok barang	10	10	-	-



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) Kabupaten / Kota	Dokumen	Dokumen		
				Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen				
				a. Pelaksanaan Metrologi Legal, berupa tera – tera ulang dan Pengawasan				
				1. Pelaksanaan Metrologi Legal, berupa Tera – Tera Ulang	24 Kali	24 Kali	-	-
6	Industri	Dinas Koperasi, UKM, dan Perindag	Tidak Ada	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri				
				a. Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota				
				1. Koordinasi Sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri	3 Unit	20 Unit	-	-
				Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional				
				a. Kegiatan Penyediaan informasi industri untuk informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				1. Fasilitasi Pengumpulan Pengolahan dan analisis Data Industri data Kawasan Industri serta data lain dilingkup Kabupten/kota	1 Paket	1 Paket	-	-
				2. Diseminasi Publikasi data informasi dan analisis industri Kabupaten/kota melalui SIINas	6 komoditi	6 komoditi	-	-
7	Transmigrasi	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Tidak Ada	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi				
				a. Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi				
				1. Penyediaan Tanah untuk pembangunan kawasan transmigrasi	2 Dok	2 Dok	-	-
				Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi				
				a. Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kab/Kota				
				1. Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial Ekonomi bagi Penduduk setempat dan Transmigran	1 paket	1 paket	-	-
				2. Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota	15 KK	0 KK	-	-



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				dalam Provinsi				
				3. Penyuluhan Transmigrasi	15 KK	0 KK	-	-
				4. Pendaftaran Seleksi Administrasi dan Seleksi Teknis Calon Transmigran Penduduk setempat	15 KK	0 KK	-	-
				5. Monitoring dan Evaluasi Kelokasi Transmigran	1 Lokasi	0 Lokasi	-	-
				Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi				
				a. Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian				
				1. Penguatan SDM daam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	15 KK	15 KK	-	-
				2. Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelambagaan dalam Rangka Pemantapan satuan Permukiman	2 Sp	2 Sp	-	-



D. Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/ SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	Penunjang Urusan Pemerintahan	Sekretariat DPRD	Tidak Ada	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD				
				a. Pembentukan Peraturan Daerah Dan Peraturan DPRD				
				1. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-
				2. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	11 Dokumen	11 Dokumen	-	-
				3. Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-
				b. Pembahasan Kebijakan Anggaran				
				1. Pembahasan Kua Dan PPAS	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-
				2. Pembahasan Perubahan Kua Dan PPAS	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-
				3. Pembahasan APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-
				4. Pembahasan APBD Perubahan	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-
				5. Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/ SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				c. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan				
				1. Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-
				d. Peningkatan Kapasitas DPRD				
				1. Pendalaman Tugas DPRD	2 Laporan	2 Laporan	-	-
				2. Penyediaan Kelompok Pakar Tim Ahli	3 Orang	-	Masa transisi /peralihan periode keanggotaan DPRD sehingga tidak terusulkan	Diusulkan pada tahun berikutnya
				3. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	7 Orang	7 Orang	-	-
				e. Penyerapan Dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat				
				1. Kunjungan Kerja Dalam Daerah	16 Laporan	10 Laporan	Masa transisi/ peralihan periode keanggotaan DPRD sehingga kunker tidak dapat terlaksana sesuai jadwal yang ditargetka n	Melakukan perencanaan yang lebih efektif untuk tahun berikutnya
				2. Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/ SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				3. Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	3 Dokumen	-	-
				f. Fasilitas Tugas DPRD				
				1. Koordinasi Dan Konsultasi Tugas DPRD	24 Dokumen	24 Dokumen	-	-
2	Penunjang Urusan Pemerintahan	Bagian Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Tidak Ada	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat				
				a. Administrasi Tata Pemerintahan				
				1. Penataan Administrasi Pemerintahan	1 Kegiatan 6 Dokumen	1 Kegiatan 6 Dokumen	-	-
				2. Pengelolaan Administrasi Kewilayaan	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-
				3. Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	-	-
				a. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat				
				1. Fasilitas Pengelolaan Bina Mental dan Spiritual	3 Kegiatan 2 Lembaga 11 NPHD 10 Kelompok	2 Kegiatan 2 Lembaga 11 NPHD 10 Kelompok	-	-
3	Penunjang Urusan Pemerintahan	Bagian Perekonomian Dan	Tidak Ada	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/ SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Administrasi Pembangunan						
				a. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian				
				1. Jumlah Pembinaan BUMD	3 kali pada 1 BUMD	3 Kali pada 1 BUMD	-	-
				2. Jumlah Rapat Koordinasi Pengendalian Terhadap Inflasi Daerah	50 Kali	46 Kali	-	-
				b. Administrasi Pembangunan				
				1. Jumlah Monev Pembangunan	16 Kali Monev	16 Kali Monev	-	-
				2. Jumlah Laporan Tim Bupati Untuk Percepatan Pembangunan	10 Laporan TBUPP	10 Laporan TBUPP	-	-
				3. Jumlah Laporan Realisasi Fisik Keuangan Tepat Waktu	51 OPD	51 OPD	-	-
				c. Pemantauan Kebijakan Terkait Sumberdaya Alam	1 Dok. 30 Buku Profil SDA	1 Dok. 30 Buku Profil SDA	-	-
4	Penunjang Urusan Pemerintahan	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Tidak Ada	Program Perekonomian Dan Pembangunan				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/ SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				a. Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa	100 %	100 %		
				1. Pengelolaan Barang Dan Jasa	12 Bulan	12 Bulan	-	-
				2. Pengelolaan Lyanan Pengadaan Secara Elektronik	12 Bulan	12 Bulan	-	-
				3. Pembinaan Advokasi Pengadaan Barang Dan Jasa	12 Bulan	12 Bulan	-	-
5	Penunjang Urusan Pemerintahan	Bagian Hukum	Tidak Ada	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat				
				a. Kegiatan Fasilitas Dan Koordinasi Hukum				
				1. Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah	10 Perda	4 Perda	Ada 2 ranperda yaitu Ranperda tentang Pembentukan Desa dan Ranperda tentang Perubahan Status Sebagian Wilayah Kelurahan Menjadi Desa belum bisa ditetapkan karena masih menunggu	Terhadap 2 ranperda yang masih menunggu kode desa dari Kementerian, setelah kode desa diperoleh baru ditetapkan



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/ SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							kode desa dari Kementerian	
				2. Fasilitasi Bantuan Hukum	100%	100%	-	-
				3. Pendokumen-Tasian Produk Hukum	100%	100%	-	-
				4. Pengelolaan Informasi Hukum	100%	100%	-	-
6	Penunjang Urusan Pemerintahan	Bagian Organisasi	Tidak Ada	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
				a. Penataan Organisasi				
				1. Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	10 Dokumen	10 Dokumen		
				2. Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-
				3. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Orang	1 Orang	-	-
				4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/ SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Pemerintah Daerah				
				5. Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	10 Dokumen	10 Dokumen	-	-
7	Penunjang Urusan Pemerintahan	Bagian Umum	Tidak Ada	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
				a. Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
				1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14 Dokumen	14 Dokumen	-	-
				2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	-	-
				b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
				1. Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	90 Orang	76 Orang	Adanya mutasi ASN dan adanya ASN pensiun	Akan dilakukan penyesuaian target
				2. Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan Skpd	8 Orang	8 Orang	-	-
				c. Administrasi Barang Milik Daerah Pada				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/ SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Perangkat Daerah				
				1. Pengamanan Barang Milik Daerah Skpd	12 Bulan	12 Bulan	-	-
				d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
				1. Pendataan Dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	78 Orang	51 Orang	Adanya pengalihan pembayaran Honorarium TKD	Akan dilakukan penyesuaian target
				e. Administrasi Umum Perangkat Daerah				
				1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	-	-
				2. Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	2 Paket	2 Paket	-	-
				3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 Paket	3 Paket	-	Akan dilakukan penyesuaian target
				4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	12 Bulan	-	-
				5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	-	-
				6. Penyelenggaraan Rapat	1.586 Kali	1.585 Kali	-	-



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/ SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Koordinasi Dan Konsultasi SKPD				
				f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
				1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	12 Bulan	-	-
				2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan		
				g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
				1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan	2 Unit	2 Unit	-	-
				Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan				
				2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	53 Unit	41 Unit	Adanya pengalihan status pencatatan Aset	Akan dilakukan penyesuaian target



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/ SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				3. Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	50 Unit	50 Unit	-	-
				4. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	8 Unit	8 Unit	-	-
				5. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	6 Unit	6 Unit	-	-
				h. Administrasi Keuangan Dan Operasional Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah				
				1. Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	12 Bulan	12 Bulan	-	-
				2. Penyediaan Pakaian Dinas Dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah Dan Wakil	2 Paket	1 Paket	Adanya penyesuaian anggaran sesuai dgn PMK 212	Akan dilakukan penyesuaian target



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/ SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Kepala Daerah				
				3. Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	12 Bulan	12 Bulan	-	-
				4. Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	12 Bulan	12 Bulan	-	-
				i. Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah				
				1. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	12 Bulan	12 Bulan	-	-
				2. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	12 Bulan	12 Bulan	-	-
				j. Pelaksanaan Protokol Dan Komunikasi Pimpinan				
				1. Fasilitas Keprotokolan	12 Laporan	12 Laporan	-	-
				2. Fasilitas Komunikasi Pimpinan	1 Dokumen / 76 Kali / 175 Kali / 12 Bulan	1 Dokumen / 76 Kali / 175 Kali / 12 Bulan	-	-
				3. Pendokumen-	8 Media / 1	7 Media / 1	Tidak Adanya	Akan dilakukan



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/ SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Tasian Tugas Pimpinan	Paket	Paket	pengajuan permohonan kerjasama yakni Media Portal Media	koodinasi dengan media tersebut
8	Penunjang Urusan Pemerintahan	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Tidak Ada	Program Pengelolaan Keuangan Daerah				
				a. Koordinasi Dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				
				1. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-
				2. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-
				3. Koordinasi, Penyusunan dan Verikasi RKA SKPD	46 Dokumen	46 Dokumen	-	-
				4. Koordinasi, Penyusunan dan Verikasi Perubahan RKA SKPD	46 Dokumen	46 Dokumen	-	-
				5. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA - SKPD	46 Dokumen	46 Dokumen	-	-
				6. Koordinasi, Penyusunan dan	46 Dokumen	46 Dokumen	-	-



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/ SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Verifikasi Perubahan DPA - SKPD				
				7. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-
				8. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	4 Dokumen	4 Dokumen	-	-
				9. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-
				10. Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-
				11. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/ SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				12. Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota	46 Orang	46 Orang	-	-
				b. Koordinasi Dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah				
				1. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	5000 Dokumen	5000 Dokumen	-	-
				2. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	468 Dokumen	468 Dokumen	-	-
				3. Penatausahaan Pembiayaan Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	-	-
				4. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	216 Dokumen	216 Dokumen	-	-
				5. Koordinasi dan Penyusunan	36 Laporan	36 Laporan	-	-



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/ SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan / Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)				
				6. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait.	26 Dokumen	26 Dokumen	-	-
				c. Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah				
				1. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	1 Laporan	1 Laporan	-	-
				2. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset,	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/ SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban				
				3. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	1 Laporan	1 Laporan	-	-
				4. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	2 Laporan	2 Laporan	-	-
				5. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/ SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Kabupaten / Kota				
				6. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawab an Pemerintah Kabupaten/Kota	46 Orang	46 Orang	-	-
				d. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			-	-
				1. Analisis Perencanaan Dan Penyaluran Bantuan Keuangan	142 Laporan	142 Laporan	-	-
				2. Pengelolaan Dana Darurat Dan Mendesak	1 Laporan	1 Laporan	-	-
				3. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	112 Laporan	112 Laporan	-	-
				e. Pengelolaan Data Dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah				
				1. Implementasi Dan Pemeliharaan	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/ SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah				
				Program Pengelolaan Barang Milik Daerah				
				a. Pengelolaan Barang Milik Daerah				
				1. Penyusunan Standar Harga	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-
				2. Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	-	-
				3. Inventarisasi Barang Milik Daerah	5 Laporan	5 Laporan	-	-
				4. Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	-	-
				5. Penilaian Barang Milik Daerah	5 Laporan	5 Laporan	-	-
				6. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	-	-
				7. Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	-	-
				8. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	-	-



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/ SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
9	Penunjang Urusan Pemerintahan	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Tidak Ada	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah				
				a. Penyusunan Perencanaan Dan Pendanaan				
				1. Pelaksanaan Konsultasi Publik	1 Berita acara	1 Berita acara	-	-
				2. Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	4 Berita acara	4 Berita acara	-	-
				3. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita acara	1 Berita acara	-	-
				4. Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	11 Usulan	11 Usulan	-	-
				5. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen	-	-



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/ SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				b. Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah				
				1. Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-
				c. Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan Daerah				
				1. Monitoring, Evaluasi Dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	8 Laporan	8 Laporan	-	-
				Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah				
				a. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia				
				1. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan	40 Laporan	40 Laporan	-	-



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/ SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				
				2. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	7 Laporan	7 Laporan	-	-
				3. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	18 Laporan	18 Laporan	-	-
				4. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	12 Laporan	12 Laporan	-	-



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/ SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				b. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian Dan Sda (Sumber Daya Alam)				
				1. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	14 Laporan	14 Laporan	-	-
				2. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	4 Laporan	4 Laporan	-	-
				3. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	10 Laporan	10 Laporan	-	-
				4. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan	3 Laporan	3 Laporan	-	-



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/ SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Daerah Bidang SDA				
				c. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan				
				1. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	4 Laporan	4 Laporan	-	-
				2. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	5 Laporan	5 Laporan	-	-
				3. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	6 Laporan	6 Laporan	-	-
				4. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan	9 Laporan	9 Laporan	-	-



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/ SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Daerah Bidang Kewilayahan				
				Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah				
				a. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan				
				1. Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	9 Laporan	9 Laporan	-	-
				2. Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	2 Laporan	2 Laporan	-	-
				3. Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/Atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	-	-
				4. Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	4 Laporan	4 Laporan	-	-



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/ SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				b. Penelitian Dan Pengembangan Bidang Sosial Dan Kependudukan				
				1. Penelitian Dan Pengembangan Lingkungan Hidup	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-
				c. Pengembangan Inovasi Dan Teknologi				
				1. Uji coba dan Penerapan Rancangan Bangun/ Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	5 Dokumen	5 Dokumen	-	-
				Program Pengelolaan Perbatasan				
				a. Perencanaan Dan Fasilitasi Kerja Sama				
				1. Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-
		Kecamatan Lobalain	Tidak Ada	a. Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	100%	100 %	-	-
		Kecamatan	Tidak Ada	b. Sinergitas Dengan	100%	100 %	-	-



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/ SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Rote Barat Laut		Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan				
		Kecamatan Rote Barat	Tidak Ada	c. Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	100 %	100 %	-	-
		Kecamatan Rote Barat Daya	Tidak Ada	d. Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	100 %	100 %	-	-
		Kecamatan Rote Selatan	Tidak Ada	e. Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	100 %	100%	-	-



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/ SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Kecamatan Rote Tengah	Tidak Ada	f. Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	100%	100%	-	-
		Kecamatan Pantai Baru	Tidak Ada	g. Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	100%	100%	-	-
		Kecamatan Rote Timur	Tidak Ada	h. Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	100%	100%	-	-
		Kecamatan Landu Leko	Tidak Ada	i. Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	100%	100%	-	-
		Kecamatan	Tidak Ada	j. Sinergitas Dengan	100%	100%	-	-



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/ SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Ndao Nuse		Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan				
		Kecamatan Loaholu	Tidak Ada	k. Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	100%	100 %	-	-
10	Penunjang Urusan Pemerintahan	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Tidak Ada	Program Kepegawaian Daerah				
				a. Pengadaan, Pemberhentian Dan Informasi Kepegawaian ASN				
				1. Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis Dan Jumlah Jabatan Untuk	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/ SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Pelaksanaan Pengadaan ASN				
				2. Koordinasi Dan Fasilitasi Pengadaan PNS Dan PPPK	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-
				3. Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	70 Orang	72Orang	-	-
				4. Pengelolaan Data Kepegawaian	100 Orang	126 Orang	-	-
				b. Mutasi Dan Promosi ASN				
				1. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	450 Orang	378 Orang	-	-
				2. Pengelolaan Promosi ASN	34 Orang	34 Orang	-	-
				c. Pengembangan Kompetensi ASN				
				1. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	35 Orang	34 Orang	-	-
				2. Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/ SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				3. Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan Dan Tanda Jasa Aparatur	161 Orang	139Orang	-	-
				4. Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	10 Kasus	11 Kasus	-	-
				Program Pengembangan Sumber Daya Manusia				
				a. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial Dan Fungsional				
				1. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan Dan Prajabatan	6 Orang	6 Orang	-	-
11	Penunjang Urusan	Badan Pendapatan	Tidak Ada	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/ SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Pemerintahan	Daerah						
				a. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				
				1. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-
				2. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12 Laporan	12 Laporan	-	-
				3. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	12 Layanan	12 Layanan	-	-
				4. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-
				5. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	12 Laporan	-	-
12	Penunjang Urusan Pemerintahan	Inspektorat	1. Peningkatan Kualitas Akip Dalam Evaluasi Internal Lakip	Program Penyelenggaraan Pengawasan				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/ SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			Pemerintah Kabupaten	a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal				
			2. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	6 Laporan	6 Laporan	-	-
				2. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	34 Laporan	34 Laporan	-	-
			3. Pengevaluasian Terhadap Lakip Yang Telah Dilaksanakan Oleh OPD	3. Reviu Laporan Kinerja	2 Laporan	2 Laporan	-	-
				4. Reviu Laporan Keuangan	11 Laporan	11 Laporan	-	-
			4. Pengawasan Atas Kinerja OPD	5. Pengawasan Desa	11 Laporan	11 Laporan	-	-
				6. Kerjasama Pengawasan Internal	10 Kali Koordinasi	10 Kali Koordinasi	-	-
			5. Peningkatan System Pengendalian Intern Pemerintah	7. Monitoring Dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Bpk RI Dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Apip	2 Laporan	2 Laporan	-	-
			6. Peningkatan Pemeriksaan Operasional Opd Berdasarkan Urutan Opd Yang Risikonya Paling Besar	b. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				
			7. Kepatuhan Opd Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Sehingga Menurunkan Jumlah	1. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	10 Temuan	10 Temuan	-	-



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/ SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			Temuan Bpk	2. Pengawasan Dengan	20 Laporan	20 Laporan	-	-
			8. Pembuatan Laporan	Tujuan Tertentu				
			Dari Entitas	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi				
			Pelaporan Yang	a. Pendampingan Dan				
			Sesuai Dengan Sap	Asistensi				
			9. Pemeriksaan	1. Koordinasi,	1 Keg	1 Keg	-	-
			Terhadap Kualitas	Monitoring Dan				
			Pelayanan Publik	Evaluasi Serta				
			Yang Strategis	Verifikasi				
			Termasuk	Pencegahan Dan				
			Pemeriksaan Atas	Pemberantasan				
			Pelanggaran Disiplin	Korupsi				
			Oleh Pns					
			10. Mengembangkan					
			Pelayanan Publik					
			Melalui Pemanfaatan					
			Teknologi Informasi					
			Peningkatan					
			Kapasitas Sdm					
			(Auditor & P2upd)					
			Yang Sepenuhnya					
			Controllable Bagi					
			Inspektorat					



E. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/ SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Tidak Ada	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik				
				a. Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkata Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik				
				1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politk , Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan	10 Parpol / 10 NPHD	10 Parpol/ 9 NPHD	-	-



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/ SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemliihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik				
				2. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	15 Ormas/15 Rekomendasi	10 Ormas/15 Rekomendasi	-	-
				Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial				
				a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasioanal Konflik Sosial				
				1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	10 Kali Rapat/10 Rekomendasi	10 Kali Rapat/10 Rekomendasi	-	-



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/ SUB KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				2. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penangan Konflik Sosial	12 Kali Pemantauan/12 Laporan; 8 Rencana Aksi	12 Kali Pemantauan/12 Laporan; 8 Rencana Aksi	-	-
				Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan				
				a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan				
				1. Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi Parpol	10 Parpol	10 Parpol	-	-
				Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya				
				a. Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya				
				1. Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Perkursor Narkotika	30 Orang	30 Orang	-	-



4. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 di uraikan sebagai berikut :

1. Dinas Pendidikan, Kepemudaaan dan Olahraga

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja pada Dinas Pendidikan, kepemudaan dan Olahraga Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

1. Sub Kegiatan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan ditargetkan 60 orang namun realisasinya sebanyak 30 orang karena peserta didik yang mendaftar pada link yang tersedia sebagai peserta coding hanya sebanyak 30 orang.
2. Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru ditargetkan 7 ruang namun realisasinya sebanyak 3 ruang karena 4 ruang tersisa belum dapat diselesaikan pada tahun 2024 karena dilakukan Adendum kontrak (pemberian kesempatan) sampai dengan tahun 2025.
3. Sub Kegiatan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan ditargetkan 50 orang namun realisasinya sebanyak 30 orang karena peserta didik yang mendaftar pada link yang tersedia sebagai peserta coding hanya sebanyak 30 orang.
4. Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru ditargetkan 7 ruang namun realisasinya sebanyak 6 ruang karena 1 ruang tersisa belum dapat diselesaikan pada tahun 2024 karena dilakukan Adendum kontrak (pemberian kesempatan) sampai dengan tahun 2025.

2. Dinas Kesehatan

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

Semua sub kegiatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 terlaksana dengan baik, namun ada beberapa rincian kegiatan yang tidak mencapai target dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Sub Kegiatan Pengembangan Puskesmas, indikator Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar ditargetkan 21 Unit namun terealisasi hanya 19 unit. Dua unit Pustu tidak selesai pengerjaannya, progress fisik Pustu Modosinal hanya mencapai 50% dan Pustu Oenitas hanya 45%, dikarenakan keterlambatan diperolehnya surat hibah dari pemilik lahan mengakibatkan pekerjaan terlambat dilakukan. Oleh karena itu perlu di usulkan kembali untuk melanjutkan pembangunan di tahun berikutnya sehingga dapat dimanfaatkan sebagai tempat pelayanan Kesehatan
2. Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas, Indikator Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas, terealisasi 1 unit karena rehabilitasi hanya pada Puskesmas Korbafo. Namun Realisasi fisik rehabilitasi Puskesmas Korbafo hanya mencapai 60%, sisa 40% dilanjutkan dengan kontrak denda berjalan melewati tahun anggaran. Permasalahannya karna material ACP dan ACP cutting Lazer yg di pakai harus dengan warna yang sama sesuai kebutuhan di lokasi sehingga perlu dilakukan pemesanan luar Rote dan Kupang. Selain itu juga karena kendala dalam pendropingan.

Sehingga diusulkan kembali untuk dibayar pada tahun anggaran berikut.

3. Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Indikator Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan, ditargetkan 167 unit terealisasi 164 unit. Dengan perincian:

- Pengadaan ambulance tidak terealisasi. Proses pengadaan berjalan namun terjadi kecelakaan laut saat proses pendistribusian sehingga ambulance tidak sampai ke Rote. Kepada pihak ketiga diberikan adendum 50 hari kerja untuk dapat menyelesaikan pekerjaannya namun sampai 31 Desember tidak terealisasi, sehingga diusulkan kembali pada tahun anggaran 2025
- Realisasi fisik belanja modal mesin foging 100% namun realisasi keuangannya 0%. Hak pihak ketiga belum terbayarkan karena sampai dengan batas waktu pemasukan SPM, tidak bisa dilakukan penginputan data rekanan ke Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebab pada saat itu SIPD tidak berfungsi dengan baik, sehingga menyebabkan keterlambatan dalam penginputan dan pengajuan SPM LS ke Badan Keuangan dan Aset Daerah Daerah Kabupaten Rote Ndao. Diusulkan pembayaran hak pihak ketiga pada tahun anggaran 2025

4. Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan, indikator Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar ditargetkan 8 unit namun hanya 7 unit yang dilakukan

kalibrasi. 1 (satu) unit alat pH meter dalam keadaan rusak sehingga diusulkan untuk pengadaan baru

5. Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan sudah terlaksana sebanyak 6 paket namun jumlah yang dibutuhkan tidak terpenuhi secara lengkap. Pekerjaan sudah terlaksana namun tidak semua jenis obat terpenuhi. Masih terdapat juga hak pihak ketiga yang belum terbayarkan (pekerjaan pengadaan obat PKD instalasi farmasi) karena sampai dengan batas waktu pemasukan SPM, tidak bisa dilakukan penginputan data rekanan ke Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebab pada saat itu SIPD tidak berfungsi dengan baik. Solusinya diusulkan untuk melakukan pembayaran hak pihak ketiga pada tahun anggaran 2025.
6. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, indikator Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar ditargetkan 3.485 orang terealisasi 1.740 orang. Permasalahannya anatara lain:
 - Tidak semua ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar baik standar kuantitas maupun kualitas karena masih kurangnya kompetensi tenaga kesehatan dalam melakukan penjangkaran serta pelayanan ANC oleh karena ada beberapa alat USG yang rusak (Puskesmas Busalangga dan Baa).
 - Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan ibu hamil secara teratur
 - Pencatatan dan pelaporan pelayanan ibu hamil pada jaringan dan fasilitas pelayanan kesehatan swasta ataupun fasilitas pelayanan kesehatan di luar wilayah Kabupaten maupun Provinsi belum terintegrasi secara baik



7. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin, indikator jumlah ibu bersalin yang mendapat layanan kesehatan sesuai standar ditargetkan 3.475 orang terealisasi 2043 orang. Dikarenakan kurangnya ketersediaan tenaga kesehatan (bidan) untuk tinggal di desa karena sarana prasarana yang kurang memadai (bangunan rusak) serta masih tingginya pertolongan persalinan di rumah/tidak di fasilitas kesehatan karena kurangnya dukungan keluarga
8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir, indikator Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar ditargetkan 3.419 orang terealisasi 1.998 orang. Dikarenakan beberapa permasalahan seperti:
- Standar kuantitas dan kualitas bayi baru lahir belum mencapai target, sehingga perlu penyediaan logistik sesuai jumlah sasaran
 - Kurangnya pengetahuan keluarga akan pentingnya membawa bayi baru lahir ke Puskesmas/Posyandu/Kelas ibu Balita serta kurangnya pengetahuan tenaga kesehatan dalam pelayanan NICU dan implementasi SOP Pelayanan Bayi baru Lahir
9. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita, indikator Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar ditargetkan 13.504 orang terealisasi 11.644 orang. Dikarenakan sejumlah permasalahan:
- Kurangnya tenaga Kesehatan yang terlatih pelayanan SDIDTK,
 - Kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan balita yaitu SDIDTK Kit
 - Pelaksanaan pelayanan MTBS di Puskesmas belum maksimal karena belum semua tenaga kesehatan terlatih MTBS

- Pencatatan dan pelaporan pelayanan balita (kohort) tidak lengkap
 - Kurangnya KIE/konseling kepada sasaran pada saat posyandu (meja 4)
 - Kurangnya koordinasi lintas program dan lintas sektor dalam pelayanan kesehatan terhadap balita
10. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar, indikator Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar ditargetkan 28.807 orang terealisasi 24.560 orang. Dikarenakan
- Pelayanan kesehatan belum mencakup seluruh peserta didik di sekolah karena ada siswa yang tidak hadir di sekolah pada saat pelayanan
 - Pelayanan kesehatan hanya dilakukan pada anak usia pendidikan dasar di sekolah dan belum menjangkau di luar sekolah
 - Tim Pembina UKS/M Kabupaten belum aktif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
11. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif, indikator Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar ditargetkan 88.793 orang terealisasi 52.763 orang. Dikarenakan belum semua sasaran berpartisipasi aktif dalam pemeriksaan kesehatan serta kurangnya integrasi dan koordinasi dalam pencatatan dan pelaporan pelaksanaan SPM Usia Produktif
12. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut, indikator Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar ditargetkan 15.331 orang terealisasi 12.058 orang. Permasalahannya adalah

- Kurangnya logistik BMHP untuk skrining faktor resiko
 - Pencatatan/pelaporan di Posbindu PTM, pos lansia, pustu, pos UKK, serta pelayanan terpadu di FKTP belum akurat dan valid
 - Pengelola program Lansia Puskesmas selalu diganti sehingga pelaksanaan pelayanan pada lansia dan tatalaksana tidak sesuai standar
13. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi, indikator Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar ditargetkan 5.935 orang terealisasi 5.551 orang dikarenakan belum semua penderita hipertensi berpartisipasi aktif dalam melakukan kunjungan rutin ke fasilitas pelayanan kesehatan serta ketersediaan obat penderita hipertensi masih kurang
14. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus, indikator Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar ditargetkan 1.406 orang terealisasi 642 orang. Dikarenakan belum semua penderita diabetes melitus berpartisipasi aktif dalam melakukan kunjungan rutin ke fasilitas pelayanan kesehatan, Pos Pelayanan Kesehatan Pemberdayaan Masyarakat (Posbindu PTM, pos lansia dan pos UKK) belum beroperasi secara maksimal sehingga pencatatan dan pelaporan hasil skrining penderita diabetes melitus belum valid dan akurat
15. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat, indikator Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar ditargetkan 122 orang terealisasi 173 orang.

Sekalipun melebihi target namun terdapat permasalahan yang harus terus dibenahi, diantaranya:

- Pencatatan dan pelaporan hasil skrinning masalah kesehatan jiwa pada Aplikasi Simkeswa masih rendah
- Kurang Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat dan keluarga pasien terkait Kepatuhan Minum Obat
- Adanya laporan bahwa sebagian besar Penderita ODGJ tidak memiliki kelengkapan administrasi kependudukan seperti Akta Kelahiran, KTP dan KK yang merupakan syarat untuk mendapatkan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/KIS) yang dapat membantu dalam pelayanan pengobatan dan rujukan

16. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis, indikator Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar ditargetkan 2.351 orang terealisasi 1.135 orang. Dikarenakan beberapa hal diantaranya:

- Sesuai instruksi dari Subdit TBC Kemenkes pada bulan Juni tahun 2021 bahwa semua tindakan pemeriksaan TBC wajib di Fasilitas Tes Cepat Molekuler (TCM), di Kabupaten Rote Ndao baru tersedia 2 alat TCM yaitu di RSUD Ba'a dan Puskesmas Batutua
- Rendahnya dukungan anggaran sehingga menyulitkan untuk pelaksanaan kegiatan diluar gedung atau Active Case Detection (ACD) berupa penjarangan maupun Investigasi Kontak (IK), banyak sasaran/masyarakat yang secara klinis menunjukkan gejala sebagai terduga TBC namun tidak bisa mengeluarkan dahak secara sempurna

- Pencatatan/pelaporan melalui SITB online bagi semua Fasyankes belum maksimal sehingga semua pelaporan belum akurat dan valid
17. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV, indikator Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar, ditargetkan 4.049 orang terealisasi 5.411 orang. Sekalipun melebihi target masih terdapat beberapa permasalahan seperti:
- Masih ada layanan yang satelitnya dalam Perawatan Dukungan Pengobatan (PDP)
 - Belum adanya tenaga terlatih dalam hal Perawatan Dukungan Pengobatan
 - Logistik reagen 1, 2 dan 3 masih tergantung dari ketersediaan di IFK Dinas Kesehatan Provinsi NTT serta roses pengiriman logistik yang membutuhkan waktu yang lama (minimal 2 minggu)
 - Pencatatan dan pelaporan belum maksimal karena keterbatasan sarana khususnya laptop/komputer bagi penanggung jawab program di Puskesmas yang mengakibatkan pelaporannya tidak real time
18. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria, indikator Jumlah Orang Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Malaria, ditargetkan 12.296 orang terealisasi 5.794 orang. Dikarenakan Setiap Faskes tidak secara maksimal menjalankan kegiatan Active Case Detection (ACD) berupa Mass Blood Survey (MBS) dan Screening malaria pada Ibu Hamil
19. Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar, indikator Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) ditargetkan 1004 orang. Honorarium

bagi 60 orang Tenaga Non ASN di Pustu tidak dapat direalisasikan oleh karena sesuai SE MenPAN-RB Nomor: B/1527/M.SM.01.00/2023 tertanggal 25 Juli 2023 Pemda tidak boleh merekrut tenaga non ASN yang baru pada tahun 2024. Solusinya adalah Rekrutmen Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan melalui Formasi CPNS dan PPPK Tahun 2024

20. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, indikator Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya, ditargetkan 664 orang terealisasi 652 orang. Semua kelas pelatihan terlaksana namun untuk kegiatan uji kompetensi terdapat Dokter Umum yang akan mengikuti Uji Kompetensi telah berangkat mengikuti pendidikan tubel dokter spesialis (7 orang), dan yang berhalangan hadir/sakit 3 orang, Uji Kompetensi Dokter Gigi tidak dapat dilaksanakan karena 1 (satu) orang Penguji berhalangan hadir karena sedang mengikuti test pendidikan dokter spesialis
21. Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan, indikator Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan ditargetkan 40 produk, terealisasi 22 produk. Dikarenakan Pemeriksaan seharusnya dilakukan dalam dua tahap, tahap pertama untuk 22 produk dan sisanya pada tahap kedua namun dikarenakan Laboratorium rujukan pemeriksaan sedang dalam proses

rehabilitasi, baru aktif kembali pada tanggal 15 Desember sehingga pemeriksaan tahap kedua tidak dilaksanakan

22. Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis, indikator Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar tidak mencapai target. Dikarenakan:

- Semua sampel pemeriksaan awal wajib menggunakan Tes Cepat Molekuler (TCM) sehingga menyulitkan bagi puskesmas yang tidak memiliki peralatan ini, oleh karena ketersediaan alat TCM di Rote Ndao hanya tersedia 2 Unit yaitu RSUD Baa dan Puskesmas Batutua
- Belum secara maksimal pelaksanaan kegiatan Inveksi Laten Tuberkulosis (ILTB) melalui investigasi Kontak (IK) oleh karena kurangnya dukungan anggaran.

3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2024 terlaksana dengan baik.

4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2024.

Semua kegiatan pada program peningkatan pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2024 terlaksana dengan baik, namun pada kegiatan

penanganan sampah tidak mencapai target. Realisasi jumlah sampah yang tertangani/terangkut melalui proses pengangkutan kurang dari target dikarenakan Kurangnya armada pengangkut sampah, sampah yang diangkat hanya pada TPS yang terletak di tempat-tempat umum dan kebanyakan sampah dimusnakan sendiri oleh masyarakat, maka upaya yang dilakukan pada tahun yang akan datang yaitu: a) perbanyak armada pengangkut sampah, b) Perbanyak TPS dan c) Melakukan sosialisasi agar masyarakat memahami pentingnya pengolahan sampah dengan baik.

5. Satuan Polisi Pamong Praja

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sesudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja pada Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2024 semua berjalan dengan baik.

6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sesudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja pada Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024. Semua kegiatan pada Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan Penanganan Daerah Rawan Konflik pada Tahun Anggaran 2024 terlaksana dengan baik.

7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Semua kegiatan pada program peningkatan pelayanan pada Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 terlaksana dengan baik.

8. Dinas Sosial

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja pada Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024. Namun program/kegiatan yang dilaksanakan belum optimal dan mencapai target sesuai dengan perjanjian kinerja antara lain :

1. Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dimana meliputi pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dan bantuan sosial berupa bantuan program keluarga harapan dan sembako. Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao mengajukan usulan penerima manfaat dan penerima manfaat bantuan tersebut ditentukan dan dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Penerima bantuan merupakan masyarakat miskin yang tercover dalam DTKS tersebut. Proses usulan DTKS melalui verifikasi dan validasi yang merupakan tugas dan wewenang dari desa/kel.
2. Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota dimana salah satu potensi sumber kesejahteraan sosial yang dikembangkan yaitu Panti Mercy. Panti Mercy merupakan panti sosial yang diberikan bantuan pengembangan berupa bantuan bibit ayam beserta pakan ternak. Selain pengembangan PSKS kegiatan ini juga meliputi kegiatan pelaksanaan upacara hari pahlawan.
3. Kegiatan Penyediaan makanan diperuntukkan bagi korban bencana alam dan bencana sosial dalam hal ini penanganan korban bencana alam maupun bencana sosial (populasi korban bencana alam dan sosial) ditargetkan sebanyak 10.500 KK. Namun pada tahun ini penyediaan makanan yang dimaksud berupa Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) yang mana pengalokasiannya baik itu BNBA dan lokasinya ditentukan langsung oleh Kemensos serta tanggap

darurat bencana. Kuota CPP untuk Kabupaten Rote Ndao sebanyak 9530 KK dan tanggap darurat bencana sebanyak 7 KK sehingga belum mencapai target yang diharapkan.

4. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis berupa Pemberian Bimbingan Sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis dan masyarakat dan diperuntukkan bagi penyandang disabilitas bedridden sebanyak 40 orang dan terealisasi semuanya.
5. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial berupa pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial diperuntukkan bagi anak yang berhadapan dengan hukum dan korban tindak kekerasan baik itu anak korban maupun pelaku. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan penguatan, pendampingan, homevisit serta penelusuran bagi korban tindak kekerasan dimana sebanyak 40 anak yang ditargetkan dan terealisasi semuanya.

9. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Semua program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 terlaksana dengan baik.



10. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2024.

Semua kegiatan pada program peningkatan pelayanan Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2024 sebagian terlaksana dengan baik tanpa adanya kendala karena rata-rata pencapaian penyerapan realisasi anggaran 81,71% dan sisanya merupakan anggaran yang tidak terpakai sesuai kebutuhan lapangan.

11. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun Anggaran 2024 adalah Semua Program/kegiatan/sub kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun Anggaran 2024 berjalan dengan baik dengan presentase realisasi 100%.

12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja pada Organisasi Perangkat Daerah Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2024 Program kegiatan/ kegiatan/sub kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2024 berjalan dengan baik, namun pada Program Penataan Desa Kegiatan Pembentukan, penghapusan,

penggabungan dan perubahan status desa yang di targetkan 25 desa namun terealisasi 22 desa di karenakan 3 (tiga) desa ini tidak lolos dalam verifikasi pengajuan proposal.

13. Dinas Perhubungan

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah di tetapkan dalam perjanjian kinerja pada Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2024 Program kegiatan/ kegiatan/sub kegiatan :

1. Pada Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) ,Dinas Perhubungan Kabupaten Rote Ndao melaksanakan kegiatan penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota Pada program LLAJ Target pada tahun 2024 yaitu 53,55 %,

capaian kinerja= $\frac{\text{jumlah pemasangan perlengkapan jln} \times 100}{\text{kebutuhan perlengkapan jalan}}$

kebutuhan perlengkapan jalan

jumlah pemasangan perlengkapan jalan di kabupaten Rote Ndao sampai tahun 2024 yaitu 1119 unit + 20 unit , sedangkan kebutuhan perlengkapan jalan sebanyak 2054 unit maka

$$\frac{1139 \times 100}{2054} = 55,45 \%$$

Oleh karena itu capaian kinerja pada program LLAJ tahun 2024 sebesar **55,45 %**, tetapi dalam lima tahun terakhir ada 226 unit atau 20,57 yang banyak mengalami kerusakan adapun upaya yang dilakukan dalam mencapai target pada program LLAJ yaitu penyediaan fasilitas perlengkapan jalan yang memadai.

Pada kegiatan penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota , permasalahan yang dialami Dinas Perhubungan Kabupaten Rote Ndao yaitu banyak fasilitas pada perlengkapan jalan yang belum memadai sehingga Dinas Perhubungan mengusulkan untuk melaksanakan pengadaan fasilitas perlengkapan jalan.



14. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja pada Organisasi Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 berjalan baik karena dari target program dan kegiatan yang ada realisasinya 100%.

15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja pada Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 terlaksana dengan baik.

16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Analisis kesesuaian Program/kegiatan/sub kegiatan sudah terealisasi sesuai dengan target yang sudah ditetapkan namun pada Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 terlaksana dengan baik.

17. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Analisis kesesuaian antara Program dan Kegiatan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 terlaksana dengan baik dengan rata-rata capaian sebesar 89,46% dengan kategori tinggi.

18. Dinas Perikanan

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja pada Dinas Perikanan semua kegiatan pada program meningkatnya produksi kelautan dan perikanan Tahun Anggaran 2024 terlaksana dengan baik.

19. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024. Dalam pelaksanaannya ada beberapa program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak mencapai target dari yang direncanakan, yakni pada Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya, realisasi tidak sesuai target dikarenakan adanya kelalaian dari rekanan/kontraktor pelaksana pekerjaan sehingga sampai akhir tahun anggaran pekerjaan pembangunan screen house modern sebanyak 7 unit tidak selesai dilaksanakan.

20. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Analisis kesesuaian antar kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja pada Organisasi perangkat Daerah Dinas perpustakaan dan Kearsipan Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

1. Pada Program Pembinaan Perpustakaan Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan layanan pustakawan Elektronik target 60 Buku realisasi 199 Koleksi atau 331% dan 1300 Orang atau realisasi 1708 Orang atau realisasi 131%, Sub Kegiatan Bahan Pustaka Target 30



buku realisasi 56 Exemplar atau 186,66 % dan kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca target 500 Orang realisasi 969 atau 193 %.

2. Program Pengelolaan Arsip kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kab/Kota target 2 OPD realisasi 2 OPD atau realisasi 100%.
3. Program Pengelolaan Arsip, Kegiatan sinpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kab/Kota Target 1 Aplikasi realisasi 1 Aplikasi atau 100%.

21. Dinas Peternakan

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja pada Organisasi Perangkat Daerah Dinas Peternakan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Semua kegiatan pada peningkatan produksi peternakan Dinas Peternakan Tahun Anggaran 2024 terlaksana dengan baik.

22. Bagian Umum

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja pada Organisasi Perangkat Daerah Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Untuk sub kegiatan ini ditargetkan sebanyak 90 Orang dengan realisasi sebanyak 76 orang dikarenakan adanya mutasi ASN dan adanya ASN yang Pensiun;

2. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian



Untuk sub kegiatan ini ditargetkan sebanyak 78 Orang dengan realisasi sebanyak 51 orang dikarenakan adanya pengalihan pembayaran honorarium TKD;

3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Untuk sub kegiatan ini ditargetkan sebanyak 53 unit dengan realisasi 41 unit karena adanya pengalihan status pencatatan Aset;

4. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Untuk sub kegiatan ini ditargetkan sebanyak 2 Paket dengan realisasi 1 Paket karena adanya penyesuaian anggaran sesuai dgn PMK 212;

5. Pendokumentasian Tugas Pimpinan

Untuk sub kegiatan ini ditargetkan sebanyak 8 Media dan 1 Paket dengan realisasi 7 Media dan 1 Paket karena tidak adanya pengajuan permohonan kerjasama Media yakni Media Portal.

23. Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja pada program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Bagian Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 terealisasi sesuai target.

24. Bagian Hukum

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja pada perangkat Daerah Bagian Hukum Setda Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024.

Semua kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan dan Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Tahun Anggaran 2024 terlaksana dengan baik. Khusus untuk Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah dengan target 10 Perda dengan realisasi 8 Perda. Ada 2 (dua) ranperda yaitu Ranperda tentang Pembentukan Desa dan Ranperda tentang Perubahan Status Sebagian Wilayah Kelurahan Menjadi Desa belum ditetapkan karena masih menunggu kode dari kementerian.

25. Bagian Organisasi

Analisis kesesuaian antara kegiatan pada program Penunjang Urusan Pemerintahan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 terlaksana dengan baik.

26. Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebagai berikut :

a. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian

Pada kegiatan ini ditargetkan pembinaan pada 1 BUMD dan pengendalian harga inflasi pada saat menjelang hari raya keagamaan. Realisasi pembinaan BUMD dilaksanakan pada 1 BUMD yaitu PDAM; sedangkan monitoring harga barang dalam rangka pengendalian menjelang 2 hari raya keagamaan telah dilaksanakan 100%.

b. Administrasi Pembangunan

Dalam kegiatan ini terdapat 3 sub kegiatan yaitu :

- Sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan. Target sub kegiatan ini adalah terfasilitasinya Tim Bupati Untuk Percepatan

Pembangunan (TBUPP) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dan melaporkan hasilnya kepada Bupati sebanyak 10 laporan dan Realisasi telah dilaksanakan 100%.

- Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan. Target sub kegiatan ini adalah terfasilitasinya Unsur Forkopimda dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan sebanyak 1 kali. Realisasi telah dilaksanakan Monev unsur Forkopimda 1 kali atau 100%.
- Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan. Target Sub kegiatan ini 16 kali melakukan monev dan perangkat daerah yang melaksanakan pembangunan menyampaikan laporan tepat waktu serta melaksanakan rapat evaluasi realisasi fisik dan keuangan OPD secara berkala setiap triwulan dengan realisasi 100%.

c. Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam

Target Kegiatan ini adalah tersedianya buku Profil Sumber Daya Alam sebanyak 30 buku dan realisasi 100%.

27. Bagian Pengadaan Barang/Jasa

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Semua kegiatan pada Perangkat Daerah Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 terlaksana dengan baik dengan capaian 100%.



28. Sekretariat DPRD

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Semua kegiatan yang pada program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2024 telah disusun sesuai dengan target kinerja program dan semua kegiatan ini pada tahun 2024 telah terlaksana dengan baik, namun untuk kegiatan :

- a. Penyediaan Kelompok Pakar Tim Ahli dengan target 3 Orang dengan realisasi tidak ada di karenakan Masa transisi/peralihan periode keanggotaan DPRD sehingga tidak terusulkan dan akan diusulkan pada tahun berikutnya.
- b. Kunjungan Kerja dalam Daerah dengan target 16 Laporan dengan realisasi 10 Laporan di karenakan Masa transisi/peralihan periode keanggotaan DPRD sehingga kunker tidak dapat terlaksana sesuai jadwal yang ditargetkan dan akan dilakukan perencanaan yang lebih efektif untuk tahun berikutnya.

29. Kecamatan Lobalain

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Semua kegiatan pada program peningkatan pelayanan administrasi pemerintahan pada Kecamatan Lobalain Tahun Anggaran 2024 terlaksana dengan baik.

30. Kecamatan Rote Barat Laut

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Semua sub kegiatan/kegiatan/program pada Kantor Kecamatan Rote Barat Laut Tahun Anggaran 2024 terlaksana dengan baik



namun pada Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dilaksanakan karena terjadinya refocusing anggaran.

31. Kecamatan Rote Barat Daya

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Semua kegiatan pada program peningkatan pelayanan administrasi pemerintahan Tahun Anggaran 2024 terlaksana dengan baik namun untuk sub kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sub kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa tidak dilaksanakan karena terjadinya refocusing anggaran.

32. Kecamatan Rote Barat

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Semua kegiatan pada program peningkatan pelayanan administrasi pemerintahan Tahun Anggaran 2024 terlaksana dengan baik namun khusus untuk Sub Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahan dan

Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dilaksanakan karena terjadinya refocusing anggaran.

33. Kecamatan Rote Selatan

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Semua kegiatan pada program peningkatan pelayanan administrasi pemerintahan Tahun Anggaran 2024 terlaksana dengan baik.

34. Kecamatan Rote Tengah

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Semua kegiatan pada Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah, Pembangunan dan Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2024 terlaksana dengan baik.

35. Kecamatan Pantai Baru

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Semua kegiatan pada Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah, Pembangunan dan Kemasyarakatan pada Kecamatan Pantai Baru Tahun Anggaran 2024 terlaksana dengan baik.

36. Kecamatan Rote Timur

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Semua kegiatan pada program peningkatan pelayanan administrasi pemerintahan Tahun Anggaran 2024 terlaksana dengan baik.



37. Kecamatan Ndao Nuse

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Semua kegiatan pada program peningkatan pelayanan administrasi pemerintahan Tahun Anggaran 2024 terlaksana dengan baik.

38. Kecamatan Loaholu

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Semua kegiatan pada program peningkatan pelayanan administrasi pemerintahan Tahun Anggaran 2024 terlaksana dengan baik.

39. Kecamatan Landu Leko

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Semua kegiatan pada program pada Kecamatan Landu Leko Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

- a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa tidak lagi bersifat murni offline (tatap muka) akan tetapi juga dilaksanakan secara online untuk memberi kesempatan masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses ini. Akan tetapi sinyal menjadi kendala sendiri manakala proses dilaksanakan secara online, dan lebih fatalnya informasi tidak bisa diserap dan tidak bisa ditindaklanjuti dan diikuti prosesnya oleh Desa.
- b. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara RI tahun 1945, Pelestarian

Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI dilaksanakan di tingkat Kabupaten akan tetapi meskipun Diklat Pasukan Pengibar Bendera Pusaka di tingkat Kecamatan tidak jadi dilaksanakan dan dilaksanakan pada Tingkat Kabupaten.

40. Inspektorat

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja pada Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024.

a. Secara keseluruhan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun Anggaran 2024 berjalan dengan baik tanpa adanya permasalahan yang berarti sehingga menghambat pelaksanaan program dan kegiatan yang ada pada Inspektorat Kabupaten Rote Ndao. Meskipun ada beberapa kegiatan yang realisasi anggaran tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun beberapa permasalahan yang dihadapi Inspektorat Kabupaten Rote Ndao dalam menjalankan pelaksanaan program dan kegiatannya yaitu :

1. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM)

Kekuatan Personil atau Sumber daya Manusia (SDM), baik dalam jumlah maupun kualitas masih terbatas, Kemampuan kompetensi yang dimiliki sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

2. Masih kurangnya aparatur di Sekretariat terutama dibidang IT yang dibutuhkan sebagai operator.

3. Belum seimbang rasio antara tenaga auditor/pengawas dengan objek pemeriksaan yang berjumlah 15 (lima belas) orang yang seharusnya

berjumlah 42 (empat puluh dua) orang sehingga masih kurang 27 (dua puluh tujuh) orang, Pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang hanya berjumlah 2 (dua) orang dari yang seharusnya 10 (sepuluh) orang dan masih dibutuhkan 8 (delapan) orang lagi, Secara keseluruhan tenaga auditor/pengawas masih kurang 35 (tiga puluh lima) orang.

4. Masih kurangnya Bimbingan Teknis maupun diklat kompetensi pengawasan,

5. Kekurangan Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana penunjang pengawasan yang dimiliki oleh Inspektorat saat ini relatif masih terbatas misalnya peralatan untuk pengujian pekerjaan fisik konstruksi, kendaraan operasional pengawasan serta laptop dan printer sebagai penunjang penyusunan laporan hasil pemeriksaan

6. Biaya operasional Pengawasan belum terpenuhi sesuai standar,

Belum terpenuhinya anggaran penunjang pelaksanaan kegiatan sesuai kebutuhan yang dikaitkan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah serta anggaran penunjang pengawasan sesuai kebutuhan yang dikaitkan dengan kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah sehingga mempengaruhi output/kinerja Inspektorat Kabupaten Rote Ndao.

41. Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Semua kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah, Program penelitian dan pengembangan pembangunan daerah dan Program pengelolaan perbatasan Tahun anggaran 2024 terlaksana dengan capaian kinerja sebesar 99,26% dari target 100%.

42. Badan Keuangan dan Aset Daerah

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja pada Tahun Anggaran 2024. Semua sub kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, program pengelolaan keuangan daerah dan program pengelolaan barang milik daerah Tahun Anggaran 2024 terlaksana dengan baik.

43. Badan Pendapatan Daerah

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja semua kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024. Semua Kegiatan pada Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 terlaksana dengan baik.

44. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tahun Anggaran 2024.

Semua kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tahun Anggaran

2024 terlaksana dengan baik tapi masih terdapat 2 Sub Kegiatan yang tidak mencapai target yaitu :

1. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN dimana target untuk Pegawai yang mengikuti pendidikan lanjutan jenjang S-1 dan S-2 serta spesialis kedokteran semula ditargetkan 35 orang Aparatur Sipil Negara terealisasi 33 orang, hal ini disebabkan karena :
 - Kurangnya minat PNS untuk mengikuti seleksi dan atau mengikuti seleksi tetapi tidak lulus.
 - Kurangnya minat ASN untuk dibiayai dengan APBD lebih banyak yang berminat dengan APBN (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan)
2. Pengelolaan Promosi ASN dimana target dari kegiatan ini adalah pelaksanaan pelantikan pejabat struktural dan fungsional khusus dan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama namun dalam pelaksanaan pelantikan pejabat struktural dan fungsional khusus dapat dilaksanakan pada awal tahun (Januari 2024) tetapi untuk pelaksanaan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, hal ini disebabkan karena usulan untuk mendapatkan Pertimbangan Teknis sudah disampaikan ke BKN tapi sampai sekarang statusnya masih berproses.

3.2 Kebijakan Strategis yang Ditetapkan

Adapun Kebijakan Strategis pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan di Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	OPD	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
1.	Dinas Kesehatan	Percepatan Pencegahan dan penanganan <i>Stunitng</i> Terintegrasi	- Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 21 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 19 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan dan Penanganan Stunitng Terintegrasi - Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 85 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao	Menurunnya prevalensi balita stunitng di Kabupaten Rote Ndao
		Meningkatkan Pencegahan dan penanggulangan penyakit	Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 85 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao	- Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular. - Menurunkan angka kesakitan dan angka kematian akibat penyakit menular dan tidak menular.
		Meningkatkan Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan	Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 85 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao	- Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan. - Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia Kesehatan.



NO	OPD	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
		Meningkatkan upaya kesehatan masyarakat	Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 85 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao	Peningkatan upaya kesehatan masyarakat, kesehatan keluarga, gizi masyarakat dan keluarga, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga.
2.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Rumah Layak Huni (ALADIN)	Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 52 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Rumah Layak Huni di Kabupaten Rote Ndao	Adanya pembangunan swadaya rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu
3.	Satuan Polisi Pamong Praja	Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 2. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 3. Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 2016 4. Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2020	Menurunkan angka gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Rote Ndao dan Peningkatan penanggulangan bahaya kebakaran.
4.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Percepatan Pencegahan dan penanganan stunting terintegritas	Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2019, Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2020, Peraturan Bupati Nomor 235 Tahun 2020.	Agar Kader posyandu mengerti apa itu stunting, agar kader mengerti dan paham tentang penyebab terjadinya stunting, agar kader memahami cara penanggulangan stunting
		Dana Desa	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2023 tentang pengolahan dana desa	Rumah Layak Huni Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2019 yang bersumber dari DD, Bantuan Langsung Tunai PMK Nomor 94 Tahun 2023 yang anggarannya bersumber dari DD
5.	Badan Pendapatan Daerah	Relaksasi Kepada Wajib Pajak	Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 318/KEP/HK/2021, Tanggal 7 September 2021	Memaksimalkan Penerimaan PAD



3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Uraian mengenai kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai bentuk tindak lanjut terhadap Rekomendasi DPRD yang diberikan pada Tahun Anggaran sebelumnya dituangkan dalam Tabel berikut :

NO	REKOMENDASI DPRD	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	2	3	4
1	DINAS KESEHATAN		
	RENDAHNYA CAPAIAN REALISASI DINAS KESEHATAN YAKNI DI BAWAH 90%, BERDASARKAN HASIL PEMBAHASAN DIPANSUS DIAKIBATKAN BEBERAPA PUSKESMAS YANG TIDAK MENGAJUKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ) SEHINGGA PENYERAPAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) PUSKESMAS RENDAH, UNTUK ITU DPRD ROTE NDAO MEREKOMENDASIKAN AGAR TERHADAP KINERJA KEPALA PUSKESMAS YANG BURUK SEGERA DIGANTI KARENA DAPAT MENGANGGU PELAYANAN DI PUSKESMAS	TELAH DILAKUKAN RAPAT EVALUASI PENYERAPAN ANGGARAN PUSKESMAS DAN PENDAMPINGAN SECARA BERJENJANG UNTUK PENYELESAIAN MASALAH – MASALAH TEKNIS PENYERAPAN ANGGARAN DI PUSKESMAS.	PENINGKATAN PENYERAPAN ANGGARAN BOK PUSKESMAS.
	KETERSEDIAAN LISTRIK YANG KURANG MEMADAI PADA RSUD BA'A, YANG MENGAKIBATKAN BANYAK ALAT KESEHATAN SERING RUSAK DAN PELAYANAN RUMAH SAKIT YANG TERHAMBAT MAKA DPRD ROTE NDAO MEREKOMENDASIKAN AGAR SEGERA TAHUN INI PEMERINTAH MELAKUKAN PEMBENAHAN INSTALASI LISTRIK DAN PENGADAAN GENSET AGAR PELAYANAN	TERHADAP REKOMENDASI TERHADAP KETERSEDIAAN LISTRIK DI RSUD BA'A, YANG MENGHAMBAT PELAYANAN KESEHATAN MAKA PADA TAHUN 2024 TELAH DIANGGARKAN BIAYA LISTRIK DI RSUD SEBESAR	PENINGKATAN PELAYANAN DI RSUD



NO	REKOMENDASI DPRD	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
	OPERASIONAL DI RUMAH SAKIT DAPAT BERJALAN DENGAN BAIK	RP.3.001.303.470 UNTUK KAPASITAS 147 KVA KE 550 KVA DAN SUDAH DILAKSANAKAN DI TAHUN ANGGARAN 2024 DAN TELAH DIGUNAKAN.	
	TERHADAP PUSTU-PUSTU YANG TELAH SELESAI DIBANGUN AGAR PEMERINTAH SEGERA MENEMPATKAN TENAGA KESEHATAN ATAU BIDAN UNTUK DITEMPATI BESERTA DENGAN FASILITAS PENDUKUNG DAN ALAT-ALAT KESEHATAN YANG DIBUTUHKAN	SETIAP PUSKESMAS DI INSTRUKSIKAN UNTUK : 1. MEMBUAT PERMOHONAN PENGGUNAAN PUSTU DI WILAYAHNYA. 2. MENGATUR PENEMPATAN PETUGAS YANG BERTANGGUNG JAWAB DI PUSTU YANG SUDAH ADA DI WILAYAHNYA	PENINGKATAN PELAYANAN DI PUSTU
	BAHWA PADA SAAT UJI PETIK DI LAPANGAN PANSUS DPRD MENGAMBIL BEBERAPA SAMPEL PEKERJAAN PUSTU YAKNI DI DESA PAPELA DAN DESA TUALIMA DITEMUKAN HASIL PEKERJAAN PADA SELASAR DEPAN ATAU TERAS PUSTU SUDAH RUSAK BERAT SEHINGGA DPRD MEREKOMENDASIKAN KEPADA PEMERINTAH AGAR SEGERA DILAKUKAN PERBAIKAN	TERHADAP PEKERJAAN PUSTU DI DESA PAPELA DAN TUALIMA TAHUN ANGGARAN 2024, TELAH SELESAI DIKERJAKAN 100% DENGAN KONDISI BAIK.	PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN DI PUSTU PAPELA DAN TUALIMA.



NO	REKOMENDASI DPRD	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG BERDASARKAN HASIL UJI PETIK DI LAPANGAN PADA PEKERJAAN RUAS JALAN LAPEN EAHUN-KIMADALE PANSUS DPRD ROTE NDAO MENEMUKAN PADA BEBERAPA TITIK PERBAIKAN JALAN YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK KE TIGA TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR YANG DIHARAPKAN MAKA DARI ITU DPRD ROTE NDAO MEREKOMENDASIKAN KEPADA PEMERINTAH UNTUK SEGERA MEMPERBAIKI PERKERJAAN RUAS JALAN TERSEBUT	PEMERINTAH MELALUI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN KERUSAKAN PADA RUAS JALAN EAHUN – KIMADALE SESUAI DENGAN SPESIFIKASI YANG BENAR.	KUALITAS PADA STRUKTUR JALAN TERSEBUT AKAN JADI LEBIH BAIK
3	DINAS PERHUBUNGAN ADANYA KETIDAKPATUHAN PEMERINTAH SEBAGAIMANA YANG DI AMANATKAN DI DALAM PASAL 19 AYAT (6) PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 18 TAHUN 2020 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG LAPORAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG MENYATAKAN "HASIL REKOMENDASI SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (4) DAN (5), DITINDAKLANJUTI OLEH KEPALA DAERAH" SEHINGGA TERHADAP REKOMENDASI PANSUS TAHUN SEBELUMNYA AGAR SEGERA DITINDAKLANJUTI OLEH PEMERINTAH YAKNI PENGELOLAAN PARKIR DI BERIKAN KEPADA PIHAK KE TIGA DAN MELAKUKAN SURVEY LAHAN PARKIR YANG MEMPUNYAI POTENSI PENDAPATAN BAGI DAERAH	DINAS PERHUBUNGAN TELAH MELAKUKAN SURVEY SETIAP LAHAN PARKIR TEPI JALAN DAN SELANJUTNYA DIKAJI DAN DIATUR LEBIH LANJUT UNTUK DI SERAHKAN KE PIHAK KETIGA	POTENSI PENDAPATAN BAGI DAERAH



NO	REKOMENDASI DPRD	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
4	SELURUH KECAMATAN		
	MERUJUK PADA PASAL 57 AYAT (3) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA SEBAGAIMANA TELAH DI UBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA YANG MENYATAKAN "BUPATI/WALIKOTA MENGANGKAT PENJABAT KEPALA DESA SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA". BERDASARKAN BUNYI PASAL DIATAS PANSUS DPRD MASIH MENEMUKAN BEBERAPA PJ. KEPALA DESA YANG BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEHINGGA PANSUS DPRD MEREKOMENDASIKAN AGAR SEGERA MENGGANTI PARA PJ. KEPALA DESA TERSEBUT DENGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL	TERHADAP REKOMENDASI TERSEBUT DAPAT PEMERINTAH JELASKAN BAHWA TELAH DILAKUKAN PELANTIKAN PJ. KEPALA DESA YANG BERASAL DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO.	PJ. KEPALA DESA HARUS BERASAL DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL
	DIHARAPKAN KEPADA PEMERINTAH KEDEPANNYA DALAM ASISTENSI ANGGARAN PADA PROGRAM DAN KEGIATAN DI KECAMATAN AGAR DISERAGAMKAN KARENA PADA SAAT PEMBAHASAN BERSAMA PANSUS DITEMUKAN TIDAK SELARASNYA SURAT PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ) DENGAN PROGRAM DAN KEGIATAN YANG SEHARUSNYA	TERHADAP REKOMENDASI TERSEBUT DAPAT PEMERINTAH JELASKAN BAHWA TELAH DILAKUKAN ASISTENSI ANGGARAN PADA PROGRAM DAN KEGIATAN DI KECAMATAN DENGAN MEMPERHATIKAN ASAS KEPENTINGAN, ASAS KEADILAN,	KESERAGAMAN ANGGARAN PADA PROGRAM DAN KEGIATAN DI KECAMATAN



NO	REKOMENDASI DPRD	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
		ASAS KESEINMBANGAN SERTA KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH	
	DPRD MENYARANKAN KEPADA PEMERINTAH UNTUK MEMPERHATIKAN TUNGGAKAN PAJAK YANG BELUM DIBAYARKAN OLEH DESA-DESA AGAR SEGERA DIPERINTAH UNTUK DILAKUKAN PEMBAYARAN PAJAK SEHINGGA TIDAK MENJADI TEMUAN DI KEMUDIAN HARI	ATAS REKOMENDASI TERSEBUT PEMERINTAH TELAH MELAKUKAN MONITORING DAN EVALUASI KEPADA DESA-DESA AGAR TERTIB DALAM PEMBAYARAN PAJAK AGAR PAD KABUPATEN ROTE NDAO DAPAT MENINGKAT.	PEMBAYARAN TUNGGAKAN PAJAK OLEH DESA-DESA
	DPRD MEREKOMENDASIKAN AGAR PEMERINTAH MENGALOKASIKAN ANGGARAN UNTUK PENGADAAN MOBIL DINAS BAGI PARA CAMAT UNTUK MEMBANTU MOBILITAS PARA CAMAT DALAM PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT	TERHDAPAT REKOMENDASI TERSEBUT SELANJUTNYA AKAN MENJADI PERHATIAN PEMERINTAH UNTUK MENGALOKASIKAN ANGGARAN PENGADAAN MOBIL DENGAN MEMPERHATIKAN KONDISI KEUANGAN DAERAH SERTA MEMPERHATIKAN ASPEK-ASPEK PRIORITAS	PENGADAAN MOBIL DINAS BAGI PARA CAMAT UNTUK MEMBANTU MOBILITAS PARA CAMAT DALAM PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT
	DPRD JUGA MEREKOMENDASIKAN KEPADA PEMERINTAH TERHADAP PARA CAMAT YANG TERINDIKASI TERAFILIASI DENGAN KEPENTINGAN POLITIK BAIK INDIVIDU, KELOMPOK DAN PARTAI POLITIK AGAR SEGERA DIGANTIKAN	TERHDAPAT REKOMENDASI TERSEBUT SELANJUTNYA AKAN MENJADI PERHATIAN PEMERINTAH MENINDAK PARA CAMAT YANG TERBUKTI TERFASILITASI DENGAN KEPENTINGAN POLITIK SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU.	MENINDAK PARA CAMAT YANG TERINDIKASI TERAFILIASI DENGAN KEPENTINGAN POLITIK BAIK INDIVIDU, KELOMPOK DAN PARTAI POLITIK



NO	REKOMENDASI DPRD	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
5	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
	KEPADA PEMERINTAH AGAR DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN DI DINAS DAPAT DI KELOLA DENGAN SEBAIK MUNGKIN SEHINGGA DI KEMUDIAN HARI TIDAK BERHADAPAN DENGAN MASALAH HUKUM SEPerti PERSOALAN HILANGNYA UANG JASA MEDIS PELAYANAN KB MKJP (METODE KONTRASEPSI JANGKA PANJANG) PADA TAHUN 2023	TERHADAP REKOMENDASI DPRD YANG TERHORMAT MAKA PEMERINTAH MELALUI DINAS P3AP2KB AKAN MENINDAK LANJUT DENGAN MELAKUKAN PENGELOLAAN ANGGARANNYA KEDEPAN SECARA TELITI MENGACU PADA MEKANISME DAN PROSEDUR YANG SESUAI DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN DALAM ANGGARAN TAHUN 2023 DITINDAKLANJUTI SESUAI PROSES HUKUM YANG BERLAKU. SELANJUTNYA UNTUK TUJUAN PENGELOLAAN ANGGARAN TAHUN 2024 DAN KEDEPAN MELALUI PENGELOLAAN YANG TERTIB DAN TELITI SESUAI PROSEDUR BERDASARKAN ATURAN YANG BERLAKU SEHINGGA PENGELOLAAN ANGGARANNYA DAPAT BERJALAN DENGAN BAIK
6	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
	AGAR PEMERINTAH LEBIH SERIUS MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP DESA-DESA DALAM HAL PENGELOLAAN DANA DESA YANG MANA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA TERJADI BANYAK PENYIMPANGAN DAN TIDAK SESUAI DENGAN KEBUTUHAN MASYARAKAT	TERHADAP CATATAN REKOMENDASI DPRD, DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TELAH MELAKUKAN FASILITAS TERHADAP DESA DESA YANG DI DUGA MELAKUKAN PENYIMPANGAN DALAM PENGELOLAAN DANA DESA	PENINGKATAN KINERJA DINAS PMD DALAM PENGELOLAAN DANA DESA AGAR TIDAK TERJADI PENYIMPANGAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN KEBUTUHAN MASYARAKAT.



NO	REKOMENDASI DPRD	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
7	KECAMATAN PANTAI BARU		
	UNTUK MENGISI BEBERAPA JABATAN YANG KOSONG PADA KANTOR KECAMATAN SEHINGGA PELAYANAN OPERASIONAL DI KANTOR KECAMATAN DAPAT BERJALAN DENGAN BAIK	TERHAADAP REKOMENDASI DEWAN YANG TERHORMAT TERSUBUT DAPAT PEMERINTAH SAMPAIKAN BAHWA TELAH DILAKUKAN PENGISIAN JABATAN YANG KOSONG PADA KECAMATAN PANTAI BARU NAMUN MASIH TERSISA SATU JABATAN YANG BELUM TERISI DIKARENAKAN YANG BERSANGKUTAN MEMASUKI MASA PURNA BAKTI ATAU Pensiun	PENGISIAN JABATAN YANG KOSONG PADA KECAMATAN PANTAI BARU SEHINGGA PELAYANAN OPERASIONAL DAPAT BERJALAN DENGAN BAIK
8	KECAMATAN ROTE BARAT DAYA		
	TERHADAP PROSES PERGANTIAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA DI DESA OESELI DILAKUKAN SECARA SEPIHAK TANPA MEMPERHATIKAN PROSEDUR YANG BENAR SESUAI DENGAN ATURAN MAKA PANSUS DPRD MENGHARAPKAN KEPADA PEMERINTAH AGAR MELAKUKAN PENGAWASAN YANG KETAT DALAM PEMILIHAN PERANGKAT DESA SESUAI DENGAN PERSYARATAN AGAR NANTINYA PELAKSANAAN PELAYANAN DI DESA DAPAT BERJALAN DENGAN BAIK. HAL YANG SAMA PULA TERJADI DI DESA OEBOU, DESA HUNDIHOPO DAN SEJUMLAH DESA LAIN DIKARENAKAN KUAT DUGAAN BERKAITAN ERAT DENGAN POLITIK	TERHAADAP REKOMENDASI DEWAN YANG TERHORMAT TERSUBUT DAPAT PEMERINTAH SAMPAIKAN BAHWA TELAH DILAKUKAN MONITORING DAN EVALUASI SERTA PENGAWASAN TERHADAP DESA-DESA AGAR DALAM PERGANTIAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESAS HARUS SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.	PERGANTIAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESAS HARUS SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU



NO	REKOMENDASI DPRD	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
9	KECAMATAN NDAO NUSE		
	KARENA TERBATASNYA SDM APARATUR PADA KANTOR KECAMATAN MAKA PANSUS DPRD JUGA MEREKOMENDASIKAN KEPADA PEMERINTAH UNTUK SEGERA MENGISI JABATAN YANG MASIH KOSONG	TERHAADAP REKOMENDASI DEWAN YANG TERHORMAT TERSUBUT SELANJUTNYA AKAN MENJADI PERHATIAN PEMERINTAH AGAR MENGISI JABATAN YANG MASIH KOSONG PADA KECAMATAN NDAO NUSE DENGAN MEMPERHATIKAN ASAS KEPENTINGAN, ASAS KETERBUKAAN SERTA ASAS KESEIMBANGAN.	PENGISIAN JABATAN YANG KOSONG PADA KECAMATAN NDAO NUSE.
10	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		
	SETELAH PANITIA KHUSUS DPRD KABUPATEN ROTE NDAO MELAKUKAN UJI PETIK DILAPANGAN BAHWA PEMBANGUNAN LOPO DI LOKASI WISATA LAUT MATI PERLU DISEDIAKAN TEMPAT SAMPAH UNTUK MENJAGA KEBERSIHAN DI LOKASI WISATA DAN ADA BEBERAPA PEKERJAAN YANG PERLU DI PERBAIKI SERTA DILAKUKAN PENATAAN AGAR TERLIHAT LEBIH RAPI DAN INDAH	TERHADAP REKOMENDASI TERSEBUT, DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TELAH MEMBANGUN TPS (TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH) BANGUNAN SEBANYAK 1(SATU) UNIT DAN MENYEDIAKAN 10 (SEPULUH) UNIT TEMPAT SAMPAH TAMAN/OUTDOOR DAN PERLENGKAPANNYA SERTA MENYEDIAKAN KENDARAAN PENGUMPUL SAMPAH BERODA TIGA.	TERLAKSANANYA PEMBANGUNAN DAN PENATAAN DESTINASI WISATA LAUT MATI



NO	REKOMENDASI DPRD	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
11	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN		
	SETELAH DILAKUKAN UJI PETIK DI LAPANGAN TERHADAP PEMBANGUNAN BALAI BALAI PENYULUH PERTANIAN YANG ADA DI KECAMATAN LANDU LEKO DAN LOBALAIN DITEMUKAN KUALITAS PEKERJAAN YANG MASIH PERLU DILAKUKAN PERBAIKAN UNTUK ITU PANSUS DPRD MENYARANKAN KEPADA PEMERINTAH UNTUK SEGERA MELAKUKAN PERBAIKAN SEBELUM DILAKUKAN FHO	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN ROTE NDAO TELAH MELAKUKAN MONITORING DAN PENGAWASAN TERHADAP BANGUNAN BALAI PENYULUHAN PERTANIAN (BPP) TERSEBUT DAN MEMERINTAHKAN KEPADA PENYEDIA/REKANAN UNTUK SEGERA MELAKUKAN PERBAIKAN TERHADAP BANGUNAN BPP SESUAI DENGAN SPESIFIKASI SEBELUM DILAKUKAN FHO.	BANGUNAN BPP YANG BERKUALITAS.
	TERHADAP BALAI PENYULUH PERTANIAN YANG ADA DI KECAMATAN ROTE BARAT DAYA DAN ROTE BARAT YANG SUDAH SELESAI DIBANGUN NAMUN BELUM ADA PEMANFAATAN OLEH PEMERINTAH DAERAH SEHINGGA SANGAT DISAYANGKAN BANGUNAN-BANGUNAN TERSEBUT MENJADI TIDAK TERAWAT KEMUDIAN PADA BALAI PENYULUH PERTANIAN DI KECAMATAN ROTE BARAT, DESA OENITAS BELUM TERSEDIA TANDON AIR BERSIH SEHINGGA MENJADI PERHATIAN KEPADA PEMERINTAH UNTUK SEGERA MENINDAKLANJUTI HAL-HAL TERSEBUT	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN ROTE NDAO TELAH MEMERINTAHKAN KEPADA PARA PENYULUH DI SETIAP KECAMATAN AGAR SEGERA BERKANTOR DI BPP YANG ADA SERTA MEMANFAATKAN FASILITAS YANG UNTUK MENJADIKAN KEBUN PERCONTOHAN BAGI PETANI. SERTA MEMERINTAHKAN KEPADA PENYEDIA/REKANAN BPP ROTE BARAT UNTUK MENYEDIAKAN TENDON AIR DI LOKASI BPP.	ADANYA AKTIVITAS PENYULUH DI KANTOR BPP.



NO	REKOMENDASI DPRD	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
12	BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA		
	AGAR PEMERINTAH MELAKUKAN EVALUASI TERHADAP KONTRAKTOR-KONTRAKOR DENGAN KUALITAS HASIL PEKERJAAN YANG BURUK UNTUK DIBERIKAN CATATAN KHUSUS SEHINGGA KEDEPANNYA KONTRAKTOR-KONTRAKTOR TERSEBUT TIDAK LAGI DIBERIKAN PEKERJAAN ATAU PROYEK SERTA DALAM PENDISTRIBUSIAN PROYEK HARUS ADIL DAN MERATA SEHINGGA TIDAK TERKESAN HANYA BEBERAPA KONTRAKTOR SAJA YANG DIBERIKAN PEKERJAAN	ATAS REKOMENDASI TERSEBUT DAPAT PEMERINTAH JELASKAN BAHWA BAGI PENYEDIA YANG TIDAK MELAKSANAKAN PEKERJAAN SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU ATAU MELANGGAR KONTRAK PEKERJAAN MAKA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN/PEJABAT PENANDATANGANAN KONTRAK (PPK) WAJIB MELALAKUKAN BLACKLIST KEPADA PENYEDIA TERSEBUT DALAM APLIKASI SISTEM INFORMASI PEYEDIA (SIKAP) SERTA UNTUK PROSES PENGADAAN BARANG/JASA TELAH DILAKUKAN SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU YAITU TENDER DAN E-KATALOG MAUPUN PENGADAAN LANGSUNG DAN PENUNJUKAN LANGSUNG ADALAH MELALUI SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (SPSE) SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU.	PELAKSANAAN EVALUASI TERHADAP KONTRAKTOR-KONTRAKOR DENGAN KUALITAS HASIL PEKERJAAN YANG BURUK PEMILIHAN KONTRAKTOR DALAM PENDISTRIBUSIAN PROYEK PEMERINTAH.



NO	REKOMENDASI DPRD	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
13	INSPEKTORAT		
	DEMI Mendukung Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintah Daerah Maka DPRD merekomendasikan dilakukan penambahan biaya operasional pengawasan serta penambahan tenaga teknis yang dibutuhkan agar seimbang dengan objek pemeriksaan yang ada di Rote Ndao	Atas rekomendasi DPRD tersebut maka dapat dijelaskan bahwa Inspektorat telah mengusulkan biaya operasional pengawasan serta penambahan tenaga teknis yang dibutuhkan agar seimbang dalam melakukan pemeriksaan tapi adanya efisiensi pada tahun 2025 maka adanya pengurangan dari biaya operasional tersebut dan ada penambahan tenaga auditor sejumlah 4 orang.	Peningkatan tenaga auditor harus ditingkatkan setiap tahun, diklat penjurangan auditor juga harus ditingkatkan baik anggaran maupun jadwal pelatihan bagi aparat pengawasan yang bekerja pada Inspektorat Kabupaten Rote Ndao.
	DPRD juga meminta kepada pemerintah agar serius dalam hal pemeriksaan kepala desa yang terindikasi tidak transparan dalam pengelolaan APBDes	Inspektorat setiap tahun sudah melakukan pemeriksaan terhadap desa namun sampai saat ini belum ada peningkatan secara signifikan terhadap temuan-temuan yang direkomendasikan.	Pemeriksaan kepala desa yang terindikasi tidak transparan dalam pengelolaan APBDes
	Melakukan pemeriksaan khusus terhadap aset-aset pada beberapa desa yang terindikasi masih dikuasai oleh oknum pribadi dan belum tercatat sebagai aset desa	Inspektorat telah melakukan teguran dan pembenahan terhadap aset-aset desa yang terindikasi salah pemanfaatan.	Penyelesaian aset-aset pada beberapa desa yang terindikasi masih dikuasai oleh oknum pribadi dan belum tercatat sebagai aset desa



NO	REKOMENDASI DPRD	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
14	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
	TERHADAP ASET-ASET BANGUNAN MILIK PEMERINTAH DAERAH YANG DIBANGUN DIATAS TANAH MILIK MASYARAKAT DAN BELUM ADA TINDAK LANJUT TENTANG STATUS KEPEMILIKAN, MAKA DPRD MENGHARAPKAN AGAR PEMERINTAH SEGERA MENINDAKLANJUTI PERSOALAN TERSEBUT SEHINGGA TIDAK BERLARUT-LARUT DAN MENIMBULKAN SENGKETA DI KEMUDIAN HARI	TERHADAP HAL TERSEBUT AKAN MENJADI PEMERINTAH KEDEPANNYA AGAR PERMASALAHAN ASET BANGUNAN MILIK PEMERINTAH DAPAT TERSELESAIKAN DENGAN BAIK	PENYELESAIAN PERMASALAHAN ASET BANGUNAN MILIK PEMERINTAH
	HAL YANG SAMA JUGA TERJADI PADA ASET TANAH MILIK PEMERINTAH DAERAH YANG TELAH DIKUASAI OLEH MASYARAKAT SEHINGGA PANSUS DPRD MEMINTA KEPADA PEMERINTAH UNTUK MENERTIBKAN KEMBALI ASET TANAH YANG TELAH DIKUASAI OLEH MASYARAKAT	ATAS HAL TERSEBUT PEMERINTAH MENYAMPAIKAN TERIMA KASIH DAN DAPAT PEMERINTAH JELASKAN BAHWA TELAH DILAKUKAN UPAYA PERSUASIF KEPADA MASYARAKAT YANG MENGUASAI ASET DAERAH YANG SAAT INI TELAH BERDIRI BANGUNAN BERUPA RUMAH UNTUK MENYELESAIKAN SECARA HUKUM SEHINGGA MEMBERIKAN KEPASTIAN HAK ATAS TANAH YANG DIMILIKI BAIK OLEH PEMERINTAH MAUPUN OLEH MASYARAKAT, DAN PEMERINTAH AKAN MEMINTA PETUNJUK KEPADA MENTERI DALAM NEGERI MAUPUN PEMERINTAH PROVINSI DAN LEMBAGA-LEMBAGA TERKAIT BAIK	PENYELESAIAN PERMASALAHAN ASET TANAH MILIK PEMERINTAH YANG DIKUASI OLEH MASYARAKAT



NO	REKOMENDASI DPRD	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
		BPK, BPKP MAUPUN KEJAKSAAN AGAR DAMPAK SOSIAL, EKONOMI DAN HUKUM DAPAT DIMINIMALISIR	
15	BKPSDMD		
	AGAR MASA KERJA TENAGA KONTRAK DAERAH (TKD) DIBERLAKUKAN SETARA SELAMA 1 (SATU) TAHUN ANGGARAN ATAU 12 (DUA BELAS) BULAN TANPA ADANYA LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN YANG MEMBEDAKAN JANGKA WAKTU KONTRAK. HAL INI BERTUJUAN AGAR KEDEPAN APABILA ADA PENERIMAAN SELEKSI PPPK NASIB TENAGA KONTRAK TERSEBUT DAPAT MEMENUHI SYARAT	SK TENAGA KONTRAK DAERAH (TKD) MASA KERJA UNTUK TAHUN 2024 MASIH BERLAKU TIDAK TIDAK SAMA KARENA MENYESUAIKAN DENGAN KEBUTUHAN PADA PERANGKAT DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH	MASA KERJA TENAGA KONTRAK DAERAH (TKD) TAHUN 2024



BAB IV

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

4.1 URUSAN PEMERINTAHAN YANG DITUGAS PEMBANTUAN

1. Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang diterima Dari Pemerintah Tingkat Atas

Pada Tahun Anggaran 2024 Tidak Ada Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Rote Ndao

Tabel 4.1

Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat Yang Dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024

No	K/LPN K	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, OutPut dan Rincian Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana TP	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				NILAI							

2. Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang diberikan Kepada Tingkatan Pemerintahan di Bawahnya.

Pada Tahun Anggaran 2024 Tidak Ada Tugas Pembantuan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.

Tabel 4.2

Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Provinsi Yang Dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024

No	K/LPN K	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, OutPut dan Rincian Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana TP	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				NILAI							

4.2 PERMASALAHAN DAN SOLUSI

- Permasalahan
- Solusi



BAB V

PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2024 disusun sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Seperti yang telah diuraikan pada bab-bab terdahulu, LKPJ ini berisi hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Rote Ndao berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran Tahun 2024 dan hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan dari Pemerintah Pusat, yang telah dirumuskan dan disepakati bersama mitra yang terhormat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rote Ndao untuk mewujudkan visi ***“Terwujudnya Masyarakat Rote Ndao Yang BERMARTABAT Secara Berkelanjutan Bertumpu Pada Pariwisata Yang Didukung Oleh Pertanian dan Perikanan”***.

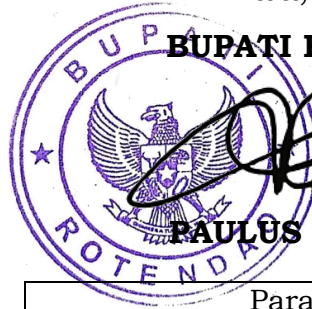
Demikian seluruh uraian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 yang dapat kami sampaikan kepada Dewan yang terhormat. Besar harapan kami agar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini kiranya dicermati, untuk mendapat masukan dan koreksi konstruktif dalam bentuk rekomendasi sebagai upaya penyempurnaan pelaksanaan Pemerintahan pada tahun yang akan datang.



Dalam semangat hubungan kemitraan, kami mengharapkan dukungan dan kerjasama dari Dewan yang terhormat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan kemasyarakatan.

Sekian dan terima kasih.

Ba'a, 10 Maret 2025


BUPATI ROTE NDAO,

PAULUS HENUK, S.H

Paraf Hirarki	
Sekretaris Daerah	
Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kabag. Pemerintahan dan Kesra	